

SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

**Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan
Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran
2021 dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi
Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Dampaknya**

DAFTAR ISI

BAB I KETENTUAN UMUM	2
BAB II PERUBAHAN ALOKASI	3
BAB III PENGGUNAAN	6
BAB IV PENYALURAN	13
BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN	24
BAB VI KETENTUAN PENUTUP	25

DISCLAIMER

Dokumen ini disusun semata-mata untuk memudahkan pembaca dalam memahami isi peraturan. Untuk keperluan referensi yang sah atau resmi, harap merujuk pada teks peraturan aslinya

SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Dampaknya

**PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 17/PMK.07/2021
TENTANG
PENGELOLAAN TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2021
DALAM RANGKA MENDUKUNG PENANGANAN PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE*
2019 (COVID-19) DAN DAMPAKNYA**

**SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 118/PMK.07/2022**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
5. Transfer ke Daerah adalah bagian dari Belanja Negara yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah dalam rangka mendanai pelaksanaan desentralisasi fiskal berupa Dana Perimbangan, Dana Insentif Daerah, Dana Otonomi Khusus, dan Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.
6. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah berdasarkan angka persentase tertentu dari pendapatan negara untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
7. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
8. Dana Alokasi Khusus Fisik yang selanjutnya disebut DAK Fisik adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus fisik yang merupakan urusan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.
9. Dana Alokasi Khusus Nonfisik yang selanjutnya disebut DAK Nonfisik adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus nonfisik yang merupakan urusan Daerah.
10. Dana Insentif Daerah yang selanjutnya disingkat DID adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada Daerah tertentu berdasarkan kriteria/kategori tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/ atau pencapaian

*) Perubahan Pertama	(PMK Nomor 94 Tahun 2021)	Tanggal Berlaku:	19 Juli 2021
***) Perubahan Kedua	(PMK Nomor 162 Tahun 2021)	Tanggal Berlaku:	23 November 2021
***) Perubahan Ketiga	(PMK Nomor 118 Tahun 2022)	Tanggal Berlaku:	25 Juli 2022

SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Dampaknya

kinerja tertentu di bidang tata kelola keuangan daerah, pelayanan umum pemerintahan, pelayanan dasar publik, dan kesejahteraan masyarakat.

11. Dana Otonomi Khusus adalah dana yang bersumber dari APBN untuk membiayai pelaksanaan otonomi khusus suatu Daerah, sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.
12. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang digunakan untuk membiayai pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan, pemerin tahan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
13. Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disebut Dana Keistimewaan adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan untuk mendanai Kewenangan Istimewa dan merupakan bagian dari Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa. *)
14. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh gubernur, bupati, atau walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan. *)
15. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank umum yang ditetapkan. *)
16. Bantuan Langsung Tunai Desa yang selanjutnya disebut BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). *)

Pasal 2

Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka mendukung penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dalam Peraturan Menteri ini meliputi:

- a. perubahan alokasi;
- b. penggunaan; dan
- c. penyaluran.

BAB II PERUBAHAN ALOKASI Bagian Kesatu Dana Alokasi Umum

Pasal 3

- (1) Pagu alokasi DAU ditetapkan sebesar Rp377.791.390.288.000,00 (tiga ratus tujuh puluh tujuh triliun tujuh ratus sembilan puluh satu miliar tiga ratus sembilan puluh juta dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah).
- (2) Perubahan alokasi DAU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk setiap Daerah provinsi dan kabupaten/kota ditetapkan secara proporsional.

*) Perubahan Pertama	(PMK Nomor 94 Tahun 2021)	Tanggal Berlaku:	19 Juli 2021
***) Perubahan Kedua	(PMK Nomor 162 Tahun 2021)	Tanggal Berlaku:	23 November 2021
****) Perubahan Ketiga	(PMK Nomor 118 Tahun 2022)	Tanggal Berlaku:	25 Juli 2022

SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Dampaknya

Bagian Kedua Dana Otonomi Khusus

Pasal 4

- (1) Pagu alokasi Dana Otonomi Khusus ditetapkan sebesar Rp19.482.919.184.000,00 (sembilan belas triliun empat ratus delapan puluh dua miliar sembilan ratus sembilan belas juta seratus delapan puluh empat ribu rupiah) yang terdiri dari:
 - a. alokasi Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh sebesar Rp7.555.827.806.000,00 (tujuh triliun lima ratus lima puluh lima miliar delapan ratus dua puluh tujuh juta delapan ratus enam ribu rupiah);
 - b. alokasi Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat sebesar Rp7.555.827.806.000,00 (tujuh triliun lima ratus lima puluh lima miliar delapan ratus dua puluh tujuh juta delapan ratus enam ribu rupiah) yang dibagi sebagai berikut:
 1. alokasi Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua sebesar Rp5.289.079.464.000,00 (lima triliun dua ratus delapan puluh sembilan miliar tujuh puluh sembilan juta empat ratus enam puluh empat ribu rupiah); dan
 2. alokasi Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua Barat sebesar Rp2.266.748.342.000,00 (dua triliun dua ratus enam puluh enam miliar tujuh ratus empat puluh delapan juta tiga ratus empat puluh dua ribu rupiah); dan
 - c. alokasi Dana Tambahan Infrastruktur dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat sebesar Rp4.371.263.572.000,00 (empat triliun tiga ratus tujuh puluh satu miliar dua ratus enam puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) yang dibagi sebagai berikut:
 1. alokasi Dana Tambahan Infrastruktur bagi Provinsi Papua sebesar Rp2.622.758.143.000,00 (dua triliun enam ratus dua puluh dua miliar tujuh ratus lima puluh delapan juta seratus empat puluh tiga ribu rupiah); dan
 2. alokasi Dana Tambahan Infrastruktur bagi Provinsi Papua Barat sebesar Rp1.748.505.429.000,00 (satu triliun tujuh ratus empat puluh delapan miliar lima ratus lima puluh empat ratus dua puluh sembilan ribu rupiah).
- (2) Perubahan pagu alokasi Dana Otonomi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, masing-masing dilakukan berdasarkan perhitungan yang besarnya setara dengan 2% (dua persen) dari pagu alokasi DAU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Bagian Ketiga Dana Transfer Khusus

Pasal 5

- (1) Pagu alokasi DAK Fisik ditetapkan sebesar Rp63.648.200.000.000 (enam puluh tiga triliun enam ratus empat puluh delapan miliar dua ratus juta rupiah), yang terdiri atas:
 - a. DAK Fisik yang dirinci per jenis/bidang/ subbidang menurut provinsi/kabupaten/kota sebesar Rp63.318.942.736.000,00 (enam puluh tiga triliun tiga ratus delapan belas miliar sembilan ratus empat puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah); dan
 - b. cadangan DAK Fisik sebesar Rp329.257.264.000,00 (tiga ratus dua puluh sembilan miliar dua ratus lima puluh tujuh juta dua ratus enam puluh empat ribu rupiah).
- (2) Bidang DAK Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. bidang Pendidikan se besar Rp18.333.059.942.000,00 (delapan belas triliun tiga ratus tiga puluh tiga miliar lima puluh sembilan juta sembilan ratus empat puluh dua ribu rupiah);
 - b. bidang Kesehatan dan Keluarga Berencana sebesar Rp19.796.485.885.000,00 (sembilan belas triliun tujuh ratus sembilan puluh enam miliar empat ratus delapan puluh lima juta delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

*) Perubahan Pertama	(PMK Nomor 94 Tahun 2021)	Tanggal Berlaku:	19 Juli 2021
***) Perubahan Kedua	(PMK Nomor 162 Tahun 2021)	Tanggal Berlaku:	23 November 2021
****) Perubahan Ketiga	(PMK Nomor 118 Tahun 2022)	Tanggal Berlaku:	25 Juli 2022

SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Dampaknya

- c. bidang Perumahan dan Permukiman sebesar Rp975.784.325.000 (sembilan ratus tujuh puluh lima miliar tujuh ratus delapan puluh empat juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);
 - d. bidang Industri Kecil dan Menengah sebesar Rp743.538.967.000,00 (tujuh ratus empat puluh tiga miliar lima ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu rupiah);
 - e. bidang Pertanian sebesar Rp1.394.263.757.000,00 (satu triliun tiga ratus sembilan puluh empat miliar dua ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu rupiah);
 - f. bidang Kelautan dan Perikanan sebesar Rp997.119.766.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh tujuh miliar seratus sembilan belas juta tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah);
 - g. bidang Pariwisata sebesar Rp585.411.191.000,00 (lima ratus delapan puluh lima miliar empat ratus sebelas juta seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
 - h. bidang Jalan sebesar Rp10.210.344.809.000,00 (sepuluh triliun dua ratus sepuluh miliar tiga ratus empat puluh empat juta delapan ratus sembilan ribu rupiah);
 - i. bidang Air Minum sebesar Rp2.977.364.075.000,00 (dua triliun sembilan ratus tujuh puluh tujuh miliar tiga ratus enam puluh empat juta tujuh puluh lima ribu rupiah);
 - j. bidang Sanitasi sebesar Rp1.974.663.982.000,00 (satu triliun sembilan ratus tujuh puluh empat miliar enam ratus enam puluh tiga juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu rupiah);
 - k. bidang Irigasi sebesar Rp2.901.015.016.000,00 (dua triliun sembilan ratus satu miliar lima belas juta enam belas ribu rupiah);
 - l. bidang Lingkungan Hidup sebesar Rp606.107.059.000,00 (enam ratus enam miliar seratus tujuh juta lima puluh sembilan ribu rupiah);
 - m. bidang Transportasi Perdesaan sebesar Rp1.248.319.817.000,00 (satu triliun dua ratus empat puluh delapan miliar tiga ratus sembilan belas juta delapan ratus tujuh belas ribu rupiah); dan
 - n. bidang Transportasi Laut sebesar Rp575.464.145.000,00 (lima ratus tujuh puluh lima miliar empat ratus enam puluh empat juta seratus empat puluh lima ribu rupiah).
- (3) Jenis DAK Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas jenis DAK Fisik Reguler dan DAK Fisik Penugasan.
- (4) Rincian DAK Fisik menurut Daerah provinsi/ kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a didasarkan pada nilai Rencana Kegiatan DAK Fisik per jenis/bidang/subbidang yang telah disepakati bersama antara Daerah dengan Kementerian/Lembaga terkait.
- (5) Alokasi cadangan DAK Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan selisih dari pagu alokasi DAK Fisik setelah penyesuaian dengan nilai total Rencana Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 6

Pagu alokasi DAK Nonfisik untuk Jenis Dana Tunjangan Khusus Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah ditetapkan sebesar Rp1.585.007.000.000,00 (satu triliun lima ratus delapan puluh lima miliar tujuh juta rupiah).

*) Perubahan Pertama	(PMK Nomor 94 Tahun 2021)	Tanggal Berlaku:	19 Juli 2021
***) Perubahan Kedua	(PMK Nomor 162 Tahun 2021)	Tanggal Berlaku:	23 November 2021
***) Perubahan Ketiga	(PMK Nomor 118 Tahun 2022)	Tanggal Berlaku:	25 Juli 2022

SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Dampaknya

BAB III **PENGGUNAAN** **Bagian Kesatu** **Dana Transfer Umum**

Pasal 7

- (1) Dana Transfer Umum diarahkan penggunaannya paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) untuk mendukung program pemulihan ekonomi Daerah yang terkait dengan percepatan penyediaan sarana dan prasarana layanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik antardaerah termasuk pembangunan sumber daya manusia dukungan pendidikan.
- (2) Dari besaran paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) untuk mendukung program pemulihan ekonomi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan penggunaannya, termasuk tetapi tidak terbatas pada:
 - a. perlindungan sosial dengan proporsi paling tinggi 20% (dua puluh persen); dan
 - b. pemberdayaan ekonomi masyarakat dengan proporsi paling tinggi 15% (lima belas persen).

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah menyampaikan laporan realisasi dukungan program pemulihan ekonomi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) yang telah ditandatangani oleh Kepala Daerah atau pejabat yang diberi kewenangan untuk menandatangani dan diberi cap dinas kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan setiap bulan.
- (2) Penyampaian laporan realisasi dukungan program pemulihan ekonomi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk periode laporan bulan April disertai pernyataan pengalokasian dukungan program pemulihan ekonomi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2).
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima oleh Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan setiap tanggal 7 untuk realisasi bulan sebelumnya. *)
- (4) Dalam hal tanggal 7 bertepatan dengan hari libur atau hari yang diliburkan, batas waktu penerimaan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pada hari kerja berikutnya. *)
- (5) Dalam hal Pemerintah Daerah tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyaluran DAU bulan berikutnya tidak dapat disalurkan.
- (6) Penyaluran DAU sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan setelah Pemerintah Daerah menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (7) Penyaluran kembali DAU yang belum disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan secara sekaligus sebesar DAU yang ditunda paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum akhir tahun anggaran berjalan.

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan dukungan pendanaan untuk belanja kesehatan penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan belanja prioritas lainnya.
- (2) Dukungan pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari DAU atau DBH yang digunakan untuk:
 - a. dukungan pelaksanaan vaksinasi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang dapat berupa:
 1. dukungan operasional untuk pelaksanaan vaksinasi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
 2. pemantauan dan penanggulangan dampak kesehatan ikutan pasca vaksinasi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);

*) Perubahan Pertama	(PMK Nomor 94 Tahun 2021)	Tanggal Berlaku:	19 Juli 2021
***) Perubahan Kedua	(PMK Nomor 162 Tahun 2021)	Tanggal Berlaku:	23 November 2021
****) Perubahan Ketiga	(PMK Nomor 118 Tahun 2022)	Tanggal Berlaku:	25 Juli 2022

SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Dampaknya

3. distribusi, pengamanan, penyediaan tempat penyimpanan vaksin Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) ke fasilitas kesehatan; dan
 4. insentif tenaga kesehatan daerah dalam rangka pelaksanaan vaksinasi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
 - b. mendukung kelurahan dalam pelaksanaan penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) melalui penyediaan anggaran sesuai dengan kebutuhan masing-masing kelurahan dan dapat digunakan untuk kegiatan pos komando tingkat kelurahan;
 - c. insentif tenaga kesehatan daerah dalam rangka penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19); dan
 - d. belanja kesehatan lainnya dan kegiatan prioritas yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
- (3) Dukungan pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling sedikit sebesar 8% (delapan persen) dari alokasi DAU.
 - (4) Dalam hal Pemerintah Daerah tidak mendapat alokasi DAU, dukungan pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersumber dari DBH ditetapkan paling sedikit sebesar 8% (delapan persen) dari alokasi DBH.
 - (5) Dalam hal dukungan pendanaan yang bersumber dari DAU sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau DBH sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak mencukupi, dukungan pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan dana yang bersumber dari penerimaan daerah yang tidak ditentukan penggunaannya (*non earmarked*). *)
 - (6) Penghitungan besaran dukungan pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan memperhatikan tingkat perkembangan kasus Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Daerah masing-masing.
 - (7) Pemerintah Daerah dapat menyesuaikan dukungan pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan kebutuhan Daerah dengan memperhatikan tingkat kasus Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang ditetapkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana paling cepat 3 (tiga) bulan setelah Pemerintah Daerah menyediakan dukungan pendanaan paling sedikit 8% (delapan persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - (7a) Hasil penyesuaian anggaran dukungan pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat digunakan untuk mendanai kegiatan prioritas Daerah dan penanganan kemiskinan ekstrem. **)
 - (8) Tata cara pelaksanaan kegiatan dan penghitungan masing-masing pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan.
 - (9) Tata cara penganggaran dan pengelolaan keuangan dalam APBD atas kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri.
 - (10) Kepala Daerah menyampaikan laporan realisasi dukungan pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan setiap tanggal 7 untuk periode laporan bulan sebelumnya. *)
 - (11) Dalam hal tanggal 7 bertepatan dengan hari libur atau hari yang diliburkan, batas waktu penerimaan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) pada hari kerja berikutnya. *)
 - (12) Bupati/wali kota melakukan pemantauan atas pelaksanaan kegiatan penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang dilaksanakan pada tingkat kelurahan.
 - (13) Pemantauan dan pengendalian atas belanja APBD untuk dukungan pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah Daerah.

Pasal 9A*)

*) Perubahan Pertama	(PMK Nomor 94 Tahun 2021)	Tanggal Berlaku:	19 Juli 2021
***) Perubahan Kedua	(PMK Nomor 162 Tahun 2021)	Tanggal Berlaku:	23 November 2021
***) Perubahan Ketiga	(PMK Nomor 118 Tahun 2022)	Tanggal Berlaku:	25 Juli 2022

SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Dampaknya

- (1) Dukungan pelaksanaan vaksinasi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) se bagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a, termasuk: ***)
 - a. dukungan operasional untuk pelaksanaan vaksinasi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat oleh Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, dan/atau Badan Intelijen Negara berupa:
 - 1) operasi penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Mikro;
 - 2) operasi yustisi/kawal vaksin;
 - 3) rekrutmen dan pelatihan tenaga kesehatan; dan/ atau
 - 4) operasional kegiatan; dan
 - b. pendanaan untuk pembayaran insentif atau honor kepada tenaga kesehatan dan tenaga pendukung yang melaksanakan vaksinasi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dari unsur Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, dan/ atau Badan Intelijen Negara.
- (2) Dukungan operasional dan insentif atau honor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu dilaksanakan dengan menggunakan dana yang bersumber dari APBN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. *)
- (3) Pemerintah Daerah wajib mengganti dana yang bersumber dari APBN sebagaimana dimaksud pada ayat (2). *)
- (4) Penggantian dana yang bersumber dari APBN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui pemotongan penyaluran DAU dan/ atau DBH per Daerah tahun anggaran 2021. ***)
- (5) Penggantian dana yang bersumber dari APBN sebagaimana dimaksud pada ayat (4) didasarkan atas realisasi anggaran yang dilaporkan oleh Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, dan/ atau Badan Intelijen Negara kepada Direktorat Jenderal Anggaran. ***)
- (6) Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diterima oleh Direktorat Jenderal Anggaran paling lambat tanggal 31 Agustus 2022. ***)

Pasal 9B*)

- (1) Pemotongan atas penyaluran DAU dan/atau DBH per daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9A ayat (4) dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan selaku Pembantu Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa setelah menerima rekomendasi pemotongan DAU dan/atau DBH per Daerah dari Direktorat Jenderal Anggaran. ***)
- (2) Rekomendasi pemotongan atas penyaluran DAU dan/atau DBH per Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat tanggal 12 setiap bulannya. ***)
- (3) Dalam hal tanggal 12 bertepatan dengan hari libur atau hari yang diliburkan, batas waktu penerimaan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada hari kerja berikutnya.
- (4) Berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan menyusun Keputusan Menteri Keuangan mengenai pemotongan DAU dan/ atau DBH dan penyetoran dana hasil pemotongan DAU dan/ atau DBH per Daerah yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan atas nama Menteri Keuangan. ***)

(4a) Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit memuat: ***)

a. nama daerah;

*) Perubahan Pertama	(PMK Nomor 94 Tahun 2021)	Tanggal Berlaku:	19 Juli 2021
***) Perubahan Kedua	(PMK Nomor 162 Tahun 2021)	Tanggal Berlaku:	23 November 2021
***) Perubahan Ketiga	(PMK Nomor 118 Tahun 2022)	Tanggal Berlaku:	25 Juli 2022

SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Dampaknya

- b. besaran DAU dan/ atau DBH yang dipotong; dan
 - c. periode pemotongan DAU dan/ atau DBH.
- (5) Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara Penyaluran Transfer ke Daerah dan Dana Desa melaksanakan pemotongan penyaluran DAU dan/ atau DBH. ***)
 - (6) Pemotongan atas penyaluran DAU dan/ atau DBH untuk tahun anggaran 2021 dilakukan dalam hal rekomendasi pemotongan penyaluran DAU dan/atau DBH per Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat tanggal 12 November 2021. ***)
 - (7) Dalam hal pemotongan penyaluran DAU dan/atau DBH per Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilakukan pada tahun anggaran 2021, pemotongan penyaluran DAU dan/ atau DBH per Daerah dapat dilakukan pada tahun anggaran 2022 dan/ atau tahun anggaran 2023. ***)
 - (8) Batas waktu penyampaian rekomendasi untuk pemotongan penyaluran DAU dan/ a tau DBH per Daerah pada tahun anggaran 2022 dan/ a tau tahun anggaran 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (7) paling lambat tanggal 13 September 2022. ***)

Pasal 9C*)**

- (1) Rekomendasi pemotongan atas penyaluran DAU dan/ atau DBH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9B ayat (1) wajib dilengkapi dengan Berita Acara Rekonsiliasi per Daerah yang disusun oleh Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, dan/ atau Badan Intelijen Negara bersama Daerah. ***)
- (2) Dalam rangka percepatan penggantian dana APBN, pemotongan atas penyaluran DAU dan/ a tau DBH per Daerah dapat dilakukan terlebih dahulu tanpa adanya dokumen Berita Acara Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1). ***)
- (3) Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, dan/ atau Badan Intelijen Negara bersama Daerah secara aktif melakukan koordinasi untuk menyusun dokumen Berita Acara Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan disampaikan paling lam.bat tanggal 12 Desember 2022. ***)
- (4) Hasil kesepakatan yang disampaikan dalam Berita Acara Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. ***)
- (5) Dalam hal Berita Acara Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak disampaikan paling lam.bat pada tanggal sebagaimana dimaksud pada ayat (3), besaran realisasi anggaran yang telah dilaporkan oleh Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, dan/atau Badan Intelijen Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9A ayat (5) dan/ atau telah ditindaklanjuti dengan pemotongan atas penyaluran DAU dan/ atau DBH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan sebagai angka yang telah disepakati oleh Daerah. ***)
- (6) Berita Acara Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sesuai contoh format tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. ***)

Pasal 9D*)**

- (1) Pemotongan atas penyaluran DAU dan/atau DBH yang telah dilakukan berdasarkan: ***)
 - a. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 32/KM.7 /2021 tentang Pemotongan Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan Triwulan IV Tahun Anggaran 2021 Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dalam rangka Penggantian Dana yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atas Dukungan terhadap Penanganan Dampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19); dan ***)

*) Perubahan Pertama	(PMK Nomor 94 Tahun 2021)	Tanggal Berlaku:	19 Juli 2021
***) Perubahan Kedua	(PMK Nomor 162 Tahun 2021)	Tanggal Berlaku:	23 November 2021
***) Perubahan Ketiga	(PMK Nomor 118 Tahun 2022)	Tanggal Berlaku:	25 Juli 2022

SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Dampaknya

- b. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 34/KM.7 /2021 tentang Pemotongan Penyaluran Dana Alokasi Umum atau Dana Bagi Hasil Tahun Anggaran 2022 Tahap Pertama dalam rangka Penggantian Dana yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atas Dukungan terhadap Penanganan Dampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), ***)

tanpa adanya dokumen Berita Acara Rekonsiliasi sebelum Peraturan Menteri ini mulai berlaku, harus dilengkapi dengan Berita Acara Rekonsiliasi. ***)

- (2) Ketentuan mengenai penyusunan dan penyampaian Berita Acara Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9C berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyusunan dan penyampaian atas Berita Acara Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1). ***)

Pasal 9E*)**

Terhadap rekomendasi pemotongan penyaluran DAU dan/ atau DBH yang telah disampaikan oleh Direktorat Jenderal Anggaran sebelum Peraturan Menteri ini mulai berlaku, harus dilakukan pemutakhiran berdasarkan hasil koordinasi dengan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, dan/ atau Badan Intelijen Negara. ***)

Bagian Kedua Insentif Tenaga Kesehatan

Pasal 10

- (1) Dalam hal pada Tahun Anggaran 2021, terdapat sisa dana dari DAK Nonfisik untuk jenis dana Bantuan Operasional Kesehatan Tambahan Tahun Anggaran 2020 pada Rekening Kas Umum Daerah, Pemerintah Daerah menganggarkan kembali dalam APBD Tahun Anggaran 2021 sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (2) Sisa dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk:
 - a. pembayaran insentif tenaga kesehatan Daerah atas kinerja Tahun Anggaran 2020; dan
 - b. pembayaran insentif tenaga kesehatan Daerah atas kinerja Tahun Anggaran 2021.
- (3) Pendanaan insentif tenaga kesehatan Daerah dalam rangka penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c digunakan untuk:
 - a. pembayaran insentif tenaga kesehatan Daerah atas kinerja Tahun Anggaran 2020 dalam hal sisa dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencukupi; dan
 - b. pembayaran insentif tenaga kesehatan daerah atas kinerja Tahun Anggaran 2021.

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyampaikan laporan realisasi insentif tenaga kesehatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dan ayat (3) yang telah ditandatangani oleh Kepala Daerah atau pejabat yang diberi kewenangan untuk menandatangani dan diberi cap dinas, kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk softcopy diterima oleh Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan paling lambat setiap tanggal 14 untuk periode laporan bulan sebelumnya.
- (3) Dalam hal tanggal 14 bertepatan dengan hari libur atau hari yang diliburkan, batas waktu penerimaan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada hari kerja berikutnya.

Bagian Ketiga Dana Transfer Khusus

*) Perubahan Pertama	(PMK Nomor 94 Tahun 2021)	Tanggal Berlaku:	19 Juli 2021
***) Perubahan Kedua	(PMK Nomor 162 Tahun 2021)	Tanggal Berlaku:	23 November 2021
***) Perubahan Ketiga	(PMK Nomor 118 Tahun 2022)	Tanggal Berlaku:	25 Juli 2022

SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Dampaknya

Pasal 12*)

- (1) Penggunaan DAK Fisik berpedoman pada dokumen rencana kegiatan, petunjuk teknis DAK Fisik, dan/ atau petunjuk operasional, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Cadangan DAK Fisik dapat digunakan untuk membiayai kebutuhan mendesak dalam rangka mendukung penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), pemulihan ekonomi nasional, penyesuaian belanja negara, dan/ atau kegiatan prioritas lainnya.
- (3) Penggunaan untuk membiayai kegiatan prioritas lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditunjukkan dengan dokumen termasuk namun tidak terbatas pada risalah rapat
- (4) Cadangan DAK Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dialokasikan menurut Daerah provinsi/kabupaten/kota dilakukan berdasarkan usulan daerah melalui aplikasi sistem informasi perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi, dan mempertimbangkan hasil penilaian oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional serta kementerian negara/lembaga terkait dan/ atau Kementerian Keuangan.
- (5) Rincian alokasi atas penggunaan Cadangan DAK Fisik menurut Daerah provinsi/kabupaten/kota dan tata cara penyaluran ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan atas nama Menteri Keuangan.
- (6) Dalam hal menu/kegiatan DAK Fisik belum dikontrakkan, pelaksanaan DAK Fisik diutamakan untuk penyerapan tenaga kerja lokal dan/ atau penggunaan bahan baku lokal dengan berpedoman pada petunjuk teknis dan petunjuk operasional DAK Fisik.
- (7) Penyerapan tenaga kerja lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan dalam aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN).
- (8) Penggunaan alokasi DAK Nonfisik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat DID

Pasal 13

- (1) DID digunakan untuk:
 - a. bidang pendidikan termasuk digitalisasi pelayanan pendidikan;
 - b. bidang kesehatan termasuk untuk penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), sarana prasarana kesehatan, dan digitalisasi pelayanan kesehatan;
 - c. penguatan perekonomian Daerah termasuk pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah, industri kecil, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat; dan/ atau
 - d. perlindungan sosial.
- (2) Penggunaan DID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat digunakan untuk mendanai:
 - a. honorarium; dan
 - b. perjalanan dinas.
- (3) Penggunaan DID untuk bidang kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari alokasi DID setiap Daerah.
- (4) Dalam hal Pemerintah Daerah menganggarkan penggunaan DID tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), DID tidak disalurkan.
- (5) Dalam hal pada Tahun Anggaran 2021, terdapat sisa DID dan DID Tambahan Tahun Anggaran 2020 pada Rekening Kas Umum Daerah, Pemerintah Daerah menganggarkan kembali dalam APBD Tahun Anggaran 2021 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Sisa DID dan DID Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) digunakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 14

*) Perubahan Pertama	(PMK Nomor 94 Tahun 2021)	Tanggal Berlaku:	19 Juli 2021
***) Perubahan Kedua	(PMK Nomor 162 Tahun 2021)	Tanggal Berlaku:	23 November 2021
****) Perubahan Ketiga	(PMK Nomor 118 Tahun 2022)	Tanggal Berlaku:	25 Juli 2022

SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Dampaknya

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyampaikan:
 - a. laporan realisasi penyerapan DID Tahun Anggaran 2020;
 - b. laporan rencana penggunaan sisa DID Tahun Anggaran 2020;
 - c. laporan realisasi penyerapan DID Tambahan Tahun Anggaran 2020;
 - d. laporan rencana penggunaan sisa DID Tambahan Tahun Anggaran 2020; dan
 - e. laporan bulanan realisasi penyerapan DID Tahun Anggaran 2021,kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.
- (2) Penyampaian laporan realisasi penyerapan DID Tahun Anggaran 2020 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai pengelolaan DID.
- (3) Penyampaian laporan rencana penggunaan sisa DID, laporan realisasi penyerapan DID Tambahan, dan laporan rencana penggunaan sisa DID Tambahan Tahun Anggaran 2020, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d, dengan ketentuan:
 - a. ditandatangani oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan diberi cap dinas; dan
 - b. disampaikan melalui Portal Pelaporan Transfer ke Daerah dan Dana Desa pada Sistem Informasi Keuangan Daerah paling lambat tanggal 21 Juni 2021.
- (4) Penyampaian laporan bulanan realisasi penyerapan DID Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dengan ketentuan:
 - a. ditandatangani oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan diberi cap dinas; dan
 - b. disampaikan melalui Portal Pelaporan Transfer ke Daerah dan Dana Desa pada Sistem Informasi Keuangan Daerah paling lambat tanggal 14 untuk realisasi bulan sebelumnya.
- (5) Dalam hal tanggal 21 Juni 2021 dan tanggal 14 bertepatan dengan hari libur atau hari yang diliburkan, batas waktu penerimaan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan ayat (4) huruf b pada hari kerja berikutnya.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.
- (7) Kepatuhan Pemerintah Daerah dalam penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, menjadi salah satu kriteria atau kategori kinerja dalam pengalokasian DID Tahun Anggaran 2022.

Pasal 14A*)

- (1) Dalam rangka percepatan pelaksanaan kegiatan pencegahan dan/ atau penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), Dana Keistimewaan dapat digunakan untuk mendanai pencegahan dan/ atau penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) termasuk namun tidak terbatas untuk:
 - a. penyediaan fasilitas kebutuhan medis penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
 - b. pembiayaan relawan penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
 - c. penyediaan sarana dan prasarana penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) termasuk penyediaan mobil ambulans;
 - d. pemberian jaminan hidup bagi masyarakat yang melakukan isolasi mandiri di rumah; dan/ atau
 - e. mendorong penyediaan plasma konvalesen untuk mempercepat penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
- (2) Pendanaan untuk pencegahan dan/ atau penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui perubahan terhadap rencana penggunaan Dana Keistimewaan.
- (3) Perubahan rencana penggunaan Dana Keistimewaan untuk pencegahan dan/atau penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), tidak

*) Perubahan Pertama	(PMK Nomor 94 Tahun 2021)	Tanggal Berlaku:	19 Juli 2021
***) Perubahan Ketiga	(PMK Nomor 118 Tahun 2022)	Tanggal Berlaku:	25 Juli 2022

SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Dampaknya

disampaikan kepada Kementerian Keuangan untuk dilakukan penilaian dengan kementerian/lembaga terkait.

- (4) Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta menyampaikan laporan atas perubahan rencana penggunaan Dana Keistimewaan untuk pencegahan dan/ atau penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) kepada Menteri Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dengan tembusan kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri/pimpinan Lembaga terkait paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak rencana penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan perubahan.

Bagian Kelima

Dana Desa

Pasal 15

Dihapus*)

BAB IV

PENYALURAN

Bagian Kesatu

Dana Transfer Umum

Pasal 16

- (1) Penyaluran DAU dilaksanakan setiap bulan sebesar sisa pagu alokasi DAU setelah penyesuaian dibagi dengan jumlah bulan yang belum disalurkan setelah memperhitungkan penyaluran sebelumnya.
- (2) Penyaluran DAU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan paling cepat 1 (satu) hari kerja sebelum hari kerja pertama untuk DAU bulan April 2021 sampai dengan Desember 2021.
- (3) Penyaluran DAU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah memenuhi persyaratan penyaluran DAU dan menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 ayat (10).

Bagian Kedua

Dana Transfer Khusus

Pasal 17

- (1) Penyaluran DAK Fisik dilakukan setelah Pemerintah Daerah menyampaikan persyaratan penyaluran sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai pengelolaan DAK Fisik.
- (2) Penyampaian persyaratan dimaksud pada ayat penyaluran sebagaimana (1) dilakukan dengan mencantumkan informasi tambahan berupa:
 - a. perkiraan data jumlah tenaga kerja lokal yang dibutuhkan untuk penyelesaian kegiatan; dan
 - b. pemutakhiran data jumlah tenaga kerja lokal yang dibutuhkan untuk penyelesaian kegiatan.
- (3) Perkiraan data jumlah tenaga kerja lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan pada daftar kontrak kegiatan sebagai persyaratan penyaluran DAK Fisik.
- (4) Pemerintah Daerah menyampaikan pemutakhiran data jumlah tenaga kerja lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b pada laporan realisasi penyerapan dana dan capaian keluaran (output) kegiatan DAK Fisik per jenis per bidang/ subbidang kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara melalui Aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara paling lambat tanggal 15 Desember 2021.

*) Perubahan Pertama	(PMK Nomor 94 Tahun 2021)	Tanggal Berlaku:	19 Juli 2021
***) Perubahan Kedua	(PMK Nomor 162 Tahun 2021)	Tanggal Berlaku:	23 November 2021
****) Perubahan Ketiga	(PMK Nomor 118 Tahun 2022)	Tanggal Berlaku:	25 Juli 2022

SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Dampaknya

- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diperbaharui sampai dengan penyaluran DAK Fisik tahun anggaran selanjutnya.

Pasal 18

Dalam hal penyaluran DAK Fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) telah dilakukan berdasarkan pagu alokasi DAK Fisik sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, penyaluran DAK Fisik tahap selanjutnya dilakukan dengan memperhitungkan penyaluran yang telah dilakukan. Pasal 19 Penyaluran DAK Nonfisik dilakukan setelah Pemerintah Daerah menyampaikan persyaratan penyaluran sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai pengelolaan DAK Nonfisik.

Bagian Ketiga

Dana Desa

Pasal 20*)

- (1) Dana Desa disalurkan dari RKUN ke RKD melalui RKUD.
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemotongan Dana Desa setiap Daerah kabupaten/kota dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD.
- (3) Pemotongan Dana kabupaten/kota dan Desa setiap penyaluran dana Daerah hasil pemotongan Dana Desa ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa dari bupati/wali kota.
- (4) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan:
 - a. tahap I sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa, dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan kelima dan kebutuhan Dana Desa untuk penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) paling cepat bulan Januari;
 - b. tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa, dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan keenam sampai dengan bulan kesepuluh paling cepat bulan Maret; dan
 - c. tahap III sebesar 20% (dua puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa, dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesebelas sampai dengan bulan kedua belas paling cepat bulan Juni;
- (5) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Desa berstatus Desa Mandiri dilakukan dalam 2 (dua) tahap, dengan ketentuan:
 - a. tahap I sebesar 60% (enam puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa, dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketujuh dan kebutuhan Dana Desa untuk penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) paling cepat bulan Januari; dan
 - b. tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa, dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kedelapan sampai dengan bulan kedua belas paling cepat bulan Maret;
- (6) Desa Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan status Desa hasil penilaian yang dilakukan setiap tahun dan ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dalam Indeks Desa.

Pasal 20A*)

*) Perubahan Pertama	(PMK Nomor 94 Tahun 2021)	Tanggal Berlaku:	19 Juli 2021
***) Perubahan Kedua	(PMK Nomor 162 Tahun 2021)	Tanggal Berlaku:	23 November 2021
****) Perubahan Ketiga	(PMK Nomor 118 Tahun 2022)	Tanggal Berlaku:	25 Juli 2022

SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Dampaknya

- (1) Penyaluran Dana Desa dilaksanakan setelah Kuasa Pengguna Anggaran Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa menerima dokumen persyaratan penyaluran dari bupati/wali kota secara lengkap dan benar, dengan ketentuan:
 - a. tahap I sebesar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4) huruf a berupa:
 1. peraturan bupati/wali kota mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa; dan
 2. surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa;
 - b. tahap II sebesar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4) huruf b berupa:
 1. peraturan Desa mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
 3. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Desa tahap I yang telah disalurkan;
 4. peraturan kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa atau peraturan kepala Desa mengenai penetapan tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa; dan
 5. berita acara konfirmasi dan rekonsiliasi kumulatif sisa Dana Desa di RKUD antara Pemerintah Daerah dan kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang berasal dari:
 - a) sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2018 yang disetor oleh kepala Desa ke RKUD; dan
 - b) sisa Dana Desa di RKUD Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2019; dan
 - c. tahap III sebesar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4) huruf c berupa:
 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari Dana Desa tahap II yang telah disalurkan; dan
 2. laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Bupati/wali kota wajib melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat untuk bulan yang telah disalurkan namun belum direkam realisasi BLT Desa pada saat pengajuan persyaratan penyaluran Dana Desa tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b a tau tahap III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c.
- (3) Penyaluran Dana Desa untuk Desa berstatus Desa Mandiri dilaksanakan setelah Kuasa Pengguna Anggaran Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa menerima dokumen persyaratan penyaluran dari bupati/wali kota secara lengkap dan benar, dengan ketentuan:
 - a. tahap I sebesar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (5) huruf a berupa:
 1. peraturan bupati/wali kota mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa; dan
 2. surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa; dan
 - b. tahap II sebesar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (5) huruf b berupa:
 1. peraturan Desa mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
 3. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan

*) Perubahan Pertama	(PMK Nomor 94 Tahun 2021)	Tanggal Berlaku:	19 Juli 2021
***) Perubahan Kedua	(PMK Nomor 162 Tahun 2021)	Tanggal Berlaku:	23 November 2021
***) Perubahan Ketiga	(PMK Nomor 118 Tahun 2022)	Tanggal Berlaku:	25 Juli 2022

SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Dampaknya

- ratarata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Desa tahap I yang telah disalurkan;
4. laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya;
 5. peraturan kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa atau peraturan kepala desa mengenai penetapan tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa; dan
 6. berita acara konfirmasi dan rekonsiliasi kumulatif sisa Dana Desa di RKUD antara Pemerintah Daerah dan kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang berasal dari:
 - a) sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2018 yang disetor oleh kepala Desa ke RKUD; dan
 - b) sisa Dana Desa di RKUD Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2019.
- (4) Bupati/wali kota wajib melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat untuk bulan yang telah disalurkan namun belum direkam realisasi BLT Desa pada saat pengajuan persyaratan penyaluran Dana Desa tahap II sebagaimana ayat (3) huruf b.
 - (5) Dalam hal Desa tidak melaksanakan BLT Desa Tahun Anggaran 2020 selama 9 (sembilan) bulan, selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (3) huruf b, penyaluran Dana Desa tahap II Tahun Anggaran 2021 ditambahkan dokumen persyaratan berupa peraturan kepala Desa mengenai tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Desa yang memenuhi kriteria dan/ atau tidak tersedia cukup anggaran per bulannya.
 - (6) Dalam hal tidak terdapat perubahan data jumlah Desa, tata cara penghitungan, dan penetapan rincian Dana Desa, peraturan bupati/wali kota mengenai tata cara pembagian dan rincian Dana Desa setiap desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ayat (3) huruf a tidak dilakukan perubahan.
 - (7) Dalam hal bupati/wali kota melakukan perubahan peraturan bupati/wali kota mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap desa, selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan ayat (3) huruf b, penyaluran Dana Desa tahap III dan tahap II untuk Desa berstatus Desa Mandiri ditambahkan dokumen persyaratan berupa peraturan bupati/wali kota mengenai perubahan tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap desa.
 - (8) Bupati/wali kota bertanggung jawab untuk menerbitkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2 dan ayat (3) huruf a angka 2 untuk seluruh desa, dan wajib disampaikan pada saat penyampaian dokumen persyaratan penyaluran tahap I pertama kali.
 - (9) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 3 dan huruf c angka 1 serta ayat (3) huruf b angka 3 dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan setiap desa.
 - (10) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 3 dan huruf c angka 1, serta ayat (3) huruf b angka 3 dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, satuan keluaran, dan capaian keluaran.
 - (11) Dalam hal tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (10) belum memenuhi kebutuhan input data, bupati/wali kota menyampaikan permintaan perubahan tabel referensi kepada Kuasa Pengguna Anggaran Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa untuk dilakukan pemutakhiran.
 - (12) Perubahan tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (11) mengacu pada peraturan yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri.

*) Perubahan Pertama	(PMK Nomor 94 Tahun 2021)	Tanggal Berlaku:	19 Juli 2021
***) Perubahan Kedua	(PMK Nomor 162 Tahun 2021)	Tanggal Berlaku:	23 November 2021
****) Perubahan Ketiga	(PMK Nomor 118 Tahun 2022)	Tanggal Berlaku:	25 Juli 2022

SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Dampaknya

- (13) Dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) disampaikan dengan surat pengantar yang ditandatangani paling rendah oleh pimpinan organisasi perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pengelolaan keuangan Daerah atau pimpinan organisasi perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemberdayaan masyarakat desa.
- (14) Pimpinan organisasi perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (13) ditunjuk oleh bupati/wali kota.
- (15) Dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) disampaikan dalam bentuk dokumen digital (softcopy) atau dokumen fisik (hardcopy).
- (16) Dokumen digital (softcopy) sebagaimana dimaksud pada ayat (15) diolah dan dihasilkan melalui aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN).

Pasal 20B*)

- (1) Dana Desa untuk kebutuhan BLT Desa termasuk untuk desa berstatus Desa Mandiri disalurkan dengan ketentuan:
 - a. Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketiga:
 - 1) memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20A ayat (1) huruf a angka 2;
 - 2) melakukan perekaman jumlah keluarga penerima manfaat bulan kesatu yang berlaku selama 12 (dua belas) bulan untuk penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa; dan
 - 3) melakukan penandaan pengajuan penyaluran atas desa layak salur masing-masing bulannya;
 - b. Dana Desa untuk BLT Desa bulan keempat sampai dengan bulan kesembilan, diajukan oleh bupati/wali kota paling banyak untuk kebutuhan penyaluran BLT Desa selama 3 (tiga) bulan setelah bupati/wali kota melakukan penandaan pengajuan penyaluran atas desa layak salur masing-masing bulannya;
 - c. dalam hal Dana Desa untuk BLT Desa telah disalurkan pada bulan tertentu, penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan berikutnya dapat diajukan secara 3 (tiga) bulanan setelah bupati/wali kota melakukan penandaan pengajuan penyaluran atas desa layak salur masing-masing bulannya;
 - d. penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa sebagaimana dimaksud pada huruf c, dilakukan sampai dengan bulan kesembilan; dan
 - e. Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesepuluh sampai dengan bulan kedua belas disalurkan sekaligus setelah bupati/wali kota melakukan penandaan pengajuan penyaluran atas desa layak salur masing-masing bulannya paling cepat pada bulan Oktober.
- (2) Penandaan pengajuan penyaluran atas desa layak salur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN).

Pasal 20C*)

- (1) Jumlah keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20B ayat (1) huruf a merupakan jumlah yang diperoleh dari realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa bulan kesatu tahun sebelumnya atau hasil pendataan jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa tahun berkenaan.
- (2) Kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa, dilakukan penghitungan dengan ketentuan:
 - a. Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan kelima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4) huruf a; dan
 - b. Dana Desa untuk BLT Desa untuk Desa berstatus Desa Mandiri bulan kesatu sampai dengan bulan ketujuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (5) huruf a;

*) Perubahan Pertama	(PMK Nomor 94 Tahun 2021)	Tanggal Berlaku:	19 Juli 2021
***) Perubahan Ketiga	(PMK Nomor 118 Tahun 2022)	Tanggal Berlaku:	25 Juli 2022

SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Dampaknya

diperoleh dari hasil perkalian antara jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa yang direkam dalam aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OMSPAN) dengan besaran BLT Desa setiap bulannya, paling banyak sebesar Dana Desa tahap I yang akan disalurkan di luar dari kebutuhan Dana Desa untuk penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

- (3) Dalam hal tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa, Dana Desa disalurkan dengan besaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4) dan ayat (5) tanpa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa.
- (4) Dalam hal penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu tidak dilaksanakan mulai bulan Januari, penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20B untuk bulan kesatu sampai dengan bulan yang belum disalurkan dapat dilakukan setelah bupati/wali kota melakukan penandaan atas Desa layak salur.
- (5) Dalam hal jumlah keluarga penerima manfaat yang telah direalisasikan lebih besar atau lebih kecil dari jumlah keluarga penerima manfaat yang telah direkam pada bulan kesatu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20B, Dana Desa untuk BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas tetap disalurkan sebesar kebutuhan BLT Desa setiap bulan.
- (6) Bupati/wali kota wajib melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat untuk bulan yang telah disalurkan namun belum direkam realisasi BLT Desanya sampai dengan bulan kedua belas paling lambat tanggal 31 Januari 2022.
- (7) Perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat sampai dengan bulan kedua belas sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menjadi persyaratan penyaluran Dana Desa tahun anggaran 2022.
- (8) Bupati/wali kota bertanggungjawab atas kebenaran perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (7).

Pasal 20D*)

- (1) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20A ayat (1), kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada bupati/wali kota, secara lengkap dan benar dengan ketentuan:
 - a. tahap I tanpa dokumen persyaratan;
 - b. tahap II berupa:
 1. peraturan Desa mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; .
 2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
 3. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Desa tahap I yang telah disalurkan; dan
 4. peraturan kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa atau peraturan kepala Desa mengenai penetapan tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa; dan
 5. berita acara konfirmasi dan rekonsiliasi kumulatif sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2018 di Rekening Kas Daerah antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa; dan
 - c. tahap III berupa:
 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90% (sembilan

*) Perubahan Pertama	(PMK Nomor 94 Tahun 2021)	Tanggal Berlaku:	19 Juli 2021
***) Perubahan Kedua	(PMK Nomor 162 Tahun 2021)	Tanggal Berlaku:	23 November 2021
****) Perubahan Ketiga	(PMK Nomor 118 Tahun 2022)	Tanggal Berlaku:	25 Juli 2022

SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Dampaknya

- puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari Dana Desa tahap II yang telah disalurkan; dan
2. laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Kepala Desa wajib menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat untuk bulan yang telah disalurkan BLT Desanya pada saat pengajuan persyaratan penyaluran Dana Desa tahap II dan tahap III sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - (3) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20A ayat (3), kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada bupati/wali kota secara lengkap dan benar, dengan ketentuan:
 - a. tahap I tanpa dokumen persyaratan;
 - b. tahap II berupa:
 1. peraturan Desa mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
 3. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan ratarata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Desa tahap I yang telah disalurkan;
 4. laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya;
 5. peraturan kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa atau peraturan kepala Desa mengenai penetapan tidak terdapat keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa; dan
 6. berita acara konfirmasi dan rekonsiliasi kumulatif sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2018 di RKD antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa.
 - (4) Kepala Desa wajib menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat untuk bulan yang telah disalurkan BLT Desa pada saat pengajuan persyaratan penyaluran Dana Desa tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
 - (5) Dalam hal Desa tidak melaksanakan BLT Desa Tahun Anggaran 2020 selama 9 (sembilan) bulan, selain persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (3) huruf b, penyaluran tahap II Tahun Anggaran 2021 ditambahkan dokumen persyaratan berupa peraturan kepala Desa mengenai tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Desa yang memenuhi kriteria dan/ atau tidak tersedia cukup anggaran per bulannya.
 - (6) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 3 dan huruf c angka 1 serta ayat (3) huruf b angka 3 dihitung berdasarkan ratarata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan setiap Desa.
 - (7) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 3 dan huruf c angka 1 serta ayat (3) huruf b angka 3 dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, cara pengadaan, dan capaian keluaran.
 - (8) Dalam hal tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) belum memenuhi kebutuhan input data, kepala Desa menyampaikan permintaan perubahan tabel referensi kepada bupati/wali kota untuk dilakukan pemutakhiran.
 - (9) Perubahan tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) mengacu pada ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri.

Pasal 20E*)

- (1) Dana Desa untuk kebutuhan BLT Desa termasuk untuk Desa berstatus Desa Mandiri disalurkan dengan ketentuan:

*) Perubahan Pertama	(PMK Nomor 94 Tahun 2021)	Tanggal Berlaku:	19 Juli 2021
***) Perubahan Kedua	(PMK Nomor 162 Tahun 2021)	Tanggal Berlaku:	23 November 2021
****) Perubahan Ketiga	(PMK Nomor 118 Tahun 2022)	Tanggal Berlaku:	25 Juli 2022

SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Dampaknya

- a. penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketiga dilaksanakan setelah kepala Desa menyampaikan data jumlah keluarga penerima manfaat bulan kesatu yang berlaku selama 12 (dua belas) bulan untuk penyaluran Dana Desa untuk BLT kepada bupati/wali kota; dan
 - b. penyaluran Dana Desa untuk bulan keempat sampai dengan bulan kedua belas dilaksanakan tanpa persyaratan.
- (2) Kepala Desa wajib menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat yang telah dibayarkan sampai dengan bulan kedua belas termasuk untuk Desa berstatus Desa Mandiri kepada bupati/wali kota paling lambat tanggal 31 Desember 2021.
 - (3) Dalam hal tanggal 31 Desember 2021 bertepatan dengan hari libur atau hari yang diliburkan, batas waktu penyampaian data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada hari kerja sebelumnya.
 - (4) Penyampaian data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat sampai dengan bulan kedua belas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi persyaratan penyaluran Dana Desa tahun anggaran 2022.
 - (5) Dana Desa untuk BLT Desa yang telah disalurkan ke RKD dibayarkan kepada keluarga penerima manfaat tidak melebihi bulan berkenaan.
 - (6) Jumlah keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan jumlah yang diperoleh dari realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa bulan kesatu tahun sebelumnya atau hasil pendataan jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa tahun berkenaan.
 - (7) Kepala Desa melakukan pendataan sesuai mekanisme pendataan yang digunakan dalam pendataan keluarga penerima manfaat BLT Desa Tahun 2020.
 - (8) Kepala Desa dapat menyesuaikan jumlah keluarga penerima manfaat tahun berkenaan dengan memperhatikan penduduk miskin yang terdampak pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan belum menerima bantuan.
 - (9) Kepala Desa bertanggung jawab atas kebenaran data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 20F)**

- (1) Untuk mendukung penanggulangan kemiskinan ekstrem pada Desa di 35 (tiga puluh lima) kabupaten prioritas, diberikan tambahan BLT Desa sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) selama 3 (tiga) bulan.
- (2) Tambahan BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:
 - a. keluarga penerima manfaat yang telah terdata sebagai penerima BLT Desa tahun anggaran 2021, dalam hal:
 1. Desa tidak memiliki data kelompok 10% (sepuluh persen) penduduk miskin terbawah (desil 1); atau
 2. Desa memiliki data kelompok 10% (sepuluh persen) penduduk miskin terbawah (desil 1) namun tidak terdapat keluarga miskin yang masuk dalam data penerima BLT Desa tahun anggaran 2021; atau
 - b. keluarga miskin yang berada pada kelompok 10% (sepuluh persen) penduduk miskin terbawah (desil 1) yang masuk dalam data penerima BLT Desa tahun anggaran 2021.
- (3) Kepala Desa melakukan pendataan calon penerima tambahan BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat tanggal 26 November 2021 setelah berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah.

*) Perubahan Pertama	(PMK Nomor 94 Tahun 2021)	Tanggal Berlaku:	19 Juli 2021
***) Perubahan Kedua	(PMK Nomor 162 Tahun 2021)	Tanggal Berlaku:	23 November 2021
****) Perubahan Ketiga	(PMK Nomor 118 Tahun 2022)	Tanggal Berlaku:	25 Juli 2022

SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Dampaknya

Pasal 20G**))

- (1) Pendanaan atas tambahan BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20F ayat (1) bersumber dari Dana Desa tahap III atau tahap II untuk Desa berstatus Desa Mandiri di luar dari kebutuhan BLT Desa selama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Dalam hal Desa sudah salur tahap III atau tahap II untuk Desa berstatus Desa Mandiri, tambahan BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan Dana Desa tahap III atau tahap II untuk Desa berstatus Desa Mandiri yang telah salur.
- (3) Tambahan BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan Dana Desa tahap II dalam hal:
 - a. Desa yang belum salur Dana Desa tahap II; atau
 - b. pendanaan tambahan BLT Desa tidak mencukupi dengan Dana Desa tahap III di luar dari kebutuhan BLT Desa selama 12 (dua belas) bulan.
- (4) Jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa yang menerima tambahan BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20F ayat (2) disesuaikan dengan ketersediaan anggaran Dana Desa tahap III atau tahap II untuk Desa berstatus Desa Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau Dana Desa tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Dalam hal Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencukupi, Pemerintah Desa menyampaikan daftar keluarga penerima manfaat yang belum menerima tambahan BLT Desa kepada Pemerintah Daerah.
- (6) Pendanaan kekurangan pembayaran tambahan BLT Desa kepada daftar keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bersumber dari APBD.
- (7) Dana APBD untuk pendanaan kekurangan pembayaran tambahan BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) bersumber dari hasil penyesuaian anggaran dukungan pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (7a).

Pasal 20H**))

Tambahan BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20F ayat (1) dibayarkan secara sekaligus paling lambat tanggal 3 Desember 2021.

Pasal 20I**))

- (1) Pemerintah Desa dapat menyesuaikan dukungan pendanaan penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) sesuai dengan kebutuhan Desa dengan memperhatikan tingkat kasus Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang ditetapkan oleh satuan tugas Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) setempat.
- (2) Hasil penyesuaian dukungan pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan untuk mendanai kegiatan yang menjadi prioritas Desa.

Pasal 20J**))

- (1) Penyaluran Dana Desa dalam rangka mendukung penanggulangan kemiskinan ekstrem pada Desa di 35 (tiga puluh lima) kabupaten prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20F ayat (1), dengan ketentuan:
 - a. penyaluran Dana Desa tahap II:
 1. kepala Desa menyampaikan dokumen Peraturan Desa mengenai APBDes kepada bupati/wali kota; dan
 2. bupati/wali kota menyampaikan dokumen Peraturan Desa mengenai APBDes kepada KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa dengan surat pengantar, dan melakukan

*) Perubahan Pertama	(PMK Nomor 94 Tahun 2021)	Tanggal Berlaku:	19 Juli 2021
**) Perubahan Kedua	(PMK Nomor 162 Tahun 2021)	Tanggal Berlaku:	23 November 2021
**) Perubahan Ketiga	(PMK Nomor 118 Tahun 2022)	Tanggal Berlaku:	25 Juli 2022

SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Dampaknya

- penandaan (*tagging*) atas Desa layak salur dalam aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN); dan
- b. penyaluran Dana Desa tahap III atau tahap II untuk Desa berstatus Desa Mandiri, bupati/wali kota menyampaikan surat pengantar, dan melakukan penandaan (*tagging*) atas Desa layak salur dalam aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN).
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 26 November 2021.
- (3) Kepala Desa wajib menyampaikan dokumen penyaluran Dana Desa kepada bupati/wali kota, dengan ketentuan:
- a. tahap II berupa:
 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
 2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Desa tahap I yang telah disalurkan;
 3. peraturan kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa atau peraturan kepala Desa mengenai penetapan tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa; dan
 4. berita acara konfirmasi dan rekonsiliasi kumulatif sisa Dana Desa di RKUD antara Pemerintah Daerah dan kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang berasal dari:
 - a) sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2018 yang disetor oleh kepala Desa ke RKUD; dan
 - b) sisa Dana Desa di RKUD Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2019;
 - b. tahap III berupa:
 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari Dana Desa tahap II yang telah disalurkan; dan
 2. laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
 - c. tahap II untuk Desa berstatus Desa Mandiri berupa:
 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
 2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Desa tahap I yang telah disalurkan;
 3. laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya;
 4. peraturan kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa atau peraturan kepala Desa mengenai penetapan tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa; dan
 5. berita acara konfirmasi dan rekonsiliasi kumulatif sisa Dana Desa di RKUD antara Pemerintah Daerah dan kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang berasal dari:
 - a) sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2018 yang disetor oleh kepala Desa ke RKUD;

*) Perubahan Pertama	(PMK Nomor 94 Tahun 2021)	Tanggal Berlaku:	19 Juli 2021
***) Perubahan Kedua	(PMK Nomor 162 Tahun 2021)	Tanggal Berlaku:	23 November 2021
***) Perubahan Ketiga	(PMK Nomor 118 Tahun 2022)	Tanggal Berlaku:	25 Juli 2022

SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Dampaknya

- b) sisa Dana Desa di RKUD Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2019.
- (4) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan paling lambat tanggal 24 Desember 2021.
- (5) Bupati/wali kota menyampaikan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Kuasa Pengguna Anggaran Penyaluran Dana Alokasi Fisik dan Dana Desa paling lambat 31 Desember 2021.
- (6) Penyampaian dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan melalui aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN).
- (7) Kepala Desa wajib menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat yang telah dibayarkan sampai dengan bulan kedua belas kepada bupati/wali kota termasuk realisasi pembayaran tambahan BLT Desa paling lambat tanggal 31 Desember 2021.
- (8) Bupati/wali kota wajib melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat untuk bulan yang telah disalurkan namun belum direkam realisasi BLT Desanya sampai dengan bulan kedua belas dan perekaman atas realisasi pembayaran tambahan BLT Desa paling lambat tanggal 31 Januari 2022.
- (9) Dalam hal tanggal 24 Desember 2021 dan tanggal 31 Desember 2021 bertepatan dengan hari libur atau hari yang diliburkan, batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (7) pada hari kerja berikutnya.

Pasal 20K)**

- (1) Dalam hal Pemerintah Desa tidak melaksanakan:
 - a. BLT Desa selama 12 (dua belas) bulan pada tahun anggaran 2021; dan/atau
 - b. tambahan BLT Desa,dikenakan sanksi pemotongan Dana Desa sebesar 50% (lima puluh persen) dari Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap II tahun anggaran 2022 di luar kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa.
- (2) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikecualikan dalam hal berdasarkan hasil musyawarah Desa khusus / musyawarah insidental tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Desa yang memenuhi kriteria atau anggaran Dana Desa tidak mencukupi untuk pembayaran BLT Desa kepada keluarga penerima manfaat yang telah ditetapkan karena terdapat penurunan pagu Dana Desa berdasarkan peraturan bupati/wali kota mengenai rincian Dana Desa setiap Desa.
- (3) Hasil musyawarah Desa khusus/musyawarah insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam peraturan kepala Desa yang diketahui oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota atau pejabat yang ditunjuk.
- (4) Peraturan kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh bupati/wali kota kepada kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara selaku KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa melalui aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN) sebagai syarat penyaluran Dana Desa tahap II pada tahun anggaran 2022.
- (5) Ketentuan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dikecualikan dalam hal seluruh pembayaran tambahan BLT Desa didanai dari APED dibuktikan dengan surat keterangan dari Pemerintah Daerah yang memuat daftar nama Desa yang sisa Dana Desanya tidak mencukupi untuk membayar tambahan BLT Desa.

*) Perubahan Pertama	(PMK Nomor 94 Tahun 2021)	Tanggal Berlaku:	19 Juli 2021
***) Perubahan Kedua	(PMK Nomor 162 Tahun 2021)	Tanggal Berlaku:	23 November 2021
****) Perubahan Ketiga	(PMK Nomor 118 Tahun 2022)	Tanggal Berlaku:	25 Juli 2022

SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Dampaknya

BAB V **KETENTUAN LAIN-LAIN** **Pasal 21**

Ketentuan mengenai:

- a. rincian alokasi DAU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 menurut Daerah provinsi/kabupaten/kota;
- b. rincian alokasi DAK Fisik per jenis/bidang/ subbidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dan cadangan DAK Fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b menurut Daerah provinsi / kabupaten / kota;
- c. rincian alokasi DAK Nonfisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 menurut Daerah provinsi/kabupaten/ kota;
- d. contoh format laporan realisasi dukungan program pemulihan ekonomi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1);
- e. contoh format pernyataan pengalokasian dukungan program pemulihan ekonomi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2);
- f. contoh format laporan realisasi insentif tenaga kesehatan daerah se bagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1);
- g. contoh format laporan rencana penggunaan sisa DID Tahun Anggaran 2020 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b;
- h. contoh format laporan realisasi penyerapan DID Tambahan Tahun Anggaran 2020 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c;
- i. contoh format laporan rencana penggunaan sisa DID Tambahan Tahun Anggaran 2020 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf d;
- j. contoh format laporan bulanan realisasi penyerapan DID tahun 2021 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf e; dan
- k. contoh format berita acara konfirmasi dan rekonsiliasi kumulatif sisa Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20,
- l. contoh format laporan realisasi dukungan pendanaan belanja kesehatan penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan belanja prioritas lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (10), *)

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 22

- (1) Sepanjang tidak diatur secara khusus dalam Peraturan Menteri ini, pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa dilaksanakan berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam:
 - a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.07 /2019 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 197 /PMK.07 /2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.07 /2019 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik;
 - b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.07 /2019 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik;
 - c. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07 /2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.07 /2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07 /2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus;

*) Perubahan Pertama	(PMK Nomor 94 Tahun 2021)	Tanggal Berlaku:	19 Juli 2021
***) Perubahan Kedua	(PMK Nomor 162 Tahun 2021)	Tanggal Berlaku:	23 November 2021
****) Perubahan Ketiga	(PMK Nomor 118 Tahun 2022)	Tanggal Berlaku:	25 Juli 2022

SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Dampaknya

- d. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.07 /2019 tentang Pengelolaan Dana Insentif Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 167 /PMK.07 /2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.07 /2019 tentang Pengelolaan Dana Insentif Daerah; dan
 - e. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07 /2020 tentang Pengelolaan Dana Desa.
- (2) Ketentuan dan/ atau peraturan pelaksanaan mengenai pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri ini.

BAB VI **KETENTUAN PENUTUP** **Pasal 23**

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19 /PMK.07 /2020 tentang Penyaluran dan Penggunaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2020 dalam rangka Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 250);
- b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07 /2020 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 dalam rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/ atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 377) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 219 /PMK.07 /2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07 /2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 dalam rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/ atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1612);
- c. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.07 /2020 tentang Penyaluran dan Penggunaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 untuk Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 866); dan
- d. Lampiran huruf h Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07 /2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

*) Perubahan Pertama	(PMK Nomor 94 Tahun 2021)	Tanggal Berlaku:	19 Juli 2021
***) Perubahan Kedua	(PMK Nomor 162 Tahun 2021)	Tanggal Berlaku:	23 November 2021
***) Perubahan Ketiga	(PMK Nomor 118 Tahun 2022)	Tanggal Berlaku:	25 Juli 2022

SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Dampaknya

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 17/PMK.07/2021
TENTANG
PENGELOLAAN TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA
TAHUN ANGGARAN 2021 DALAM RANGKA MENDUKUNG
PENANGANAN PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019
(COVID-19) DAN DAMPAKNYA

*) Perubahan Pertama	(PMK Nomor 94 Tahun 2021)	Tanggal Berlaku:	19 Juli 2021
***) Perubahan Kedua	(PMK Nomor 162 Tahun 2021)	Tanggal Berlaku:	23 November 2021
****) Perubahan Ketiga	(PMK Nomor 118 Tahun 2022)	Tanggal Berlaku:	25 Juli 2022

SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Dampaknya

A. RINCIAN ALOKASI DANA ALOKASI UMUM (DAU) MENURUT DAERAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO.	NAMA DAERAH	ALOKASI DAU
(1)	(2)	(3)
I	Provinsi Aceh	1.945.980.616
1	Kab. Aceh Barat	543.825.941
2	Kab. Aceh Besar	746.906.382
3	Kab. Aceh Selatan	595.672.666
4	Kab. Aceh Singkil	406.195.945
5	Kab. Aceh Tengah	565.358.454
6	Kab. Aceh Tenggara	539.367.761
7	Kab. Aceh Timur	759.513.864
8	Kab. Aceh Utara	882.657.786
9	Kab. Bireuen	801.251.152
10	Kab. Pidie	823.251.463
11	Kab. Simeulue	419.029.638
12	Kota Banda Aceh	539.238.114
13	Kota Sabang	332.134.428
14	Kota Langsa	407.519.092
15	Kota Lhokseumawe	418.626.656
16	Kab. Gayo Lues	419.760.894
17	Kab. Aceh Barat Daya	410.875.413
18	Kab. Aceh Jaya	392.655.879
19	Kab. Nagan Raya	477.108.051
20	Kab. Aceh Tamiang	488.331.564
21	Kab. Bener Meriah	417.698.518
22	Kab. Pidie Jaya	404.301.754
23	Kota Subulussalam	313.862.655
II	Provinsi Sumatera Utara	2.463.686.589
1	Kab. Asahan	818.693.947
2	Kab. Dairi	557.116.199
3	Kab. Deli Serdang	1.354.889.566
4	Kab. Karo	679.135.837
5	Kab. Labuhanbatu	638.234.403
6	Kab. Langkat	1.081.981.083

- *) Perubahan Pertama (PMK Nomor 94 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021
**) Perubahan Kedua (PMK Nomor 162 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 23 November 2021
***) Perubahan Ketiga (PMK Nomor 118 Tahun 2022) Tanggal Berlaku: 25 Juli 2022

SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Dampaknya

NO.	NAMA DAERAH	ALOKASI DAU
(1)	(2)	(3)
7	Kab. Mandailing Natal	742.346.622
8	Kab. Nias	412.621.552
9	Kab. Simalungun	1.120.786.035
10	Kab. Tapanuli Selatan	595.549.093
11	Kab. Tapanuli Tengah	603.228.847
12	Kab. Tapanuli Utara	597.636.159
13	Kab. Toba	510.871.853
14	Kota Binjai	532.627.031
15	Kota Medan	1.526.073.171
16	Kota Pematang Siantar	556.772.164
17	Kota Sibolga	384.535.437
18	Kota Tanjung Balai	403.249.168
19	Kota Tebing Tinggi	386.845.565
20	Kota Padang Sidempuan	468.092.452
21	Kab. Pakpak Bharat	318.568.675
22	Kab. Nias Selatan	617.556.640
23	Kab. Humbang Hasundutan	481.828.482
24	Kab. Serdang Bedagai	718.135.179
25	Kab. Samosir	414.127.985
26	Kab. Batu Bara	555.512.477
27	Kab. Padang Lawas	490.264.639
28	Kab. Padang Lawas Utara	513.912.559
29	Kab. Labuhanbatu Selatan	472.756.479
30	Kab. Labuhanbatu Utara	552.460.163
31	Kab. Nias Utara	388.378.010
32	Kab. Nias Barat	329.531.869
33	Kota Gunungsitoli	399.419.428
III	Provinsi Sumatera Barat	1.887.033.911
1	Kab. Limapuluh Kota	686.668.871
2	Kab. Agam	745.501.923
3	Kab. Kepulauan Mentawai	548.987.977
4	Kab. Padang Pariaman	706.486.730
5	Kab. Pasaman	551.664.960
6	Kab. Pesisir Selatan	777.267.217
7	Kab. Sijunjung	502.198.374
8	Kab. Solok	654.499.415
9	Kab. Tanah Datar	637.174.929
10	Kota Bukit Tinggi	421.334.282
11	Kota Padang Panjang	346.447.747
12	Kota Padang	1.044.871.353
13	Kota Payakumbuh	413.827.474
14	Kota Sawahlunto	341.393.550
15	Kota Solok	369.336.357
16	Kota Pariaman	382.767.313
17	Kab. Pasaman Barat	596.433.942
18	Kab. Dharmasraya	472.416.143
19	Kab. Solok Selatan	437.174.072
IV	Provinsi Riau	1.455.383.959
1	Kab. Bengkalis	336.787.052
2	Kab. Indragiri Hilir	885.153.707
3	Kab. Indragiri Hulu	629.776.504

- *) Perubahan Pertama (PMK Nomor 94 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021
 **) Perubahan Kedua (PMK Nomor 162 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 23 November 2021
 ***) Perubahan Ketiga (PMK Nomor 118 Tahun 2022) Tanggal Berlaku: 25 Juli 2022

SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Dampaknya

NO.	NAMA DAERAH	ALOKASI DAU
(1)	(2)	(3)
4	Kab. Kampar	766.486.966
5	Kab. Kuantan Singingi	399.278.856
6	Kab. Pelalawan	395.038.967
7	Kab. Rokan Hilir	491.328.649
8	Kab. Rokan Hulu	641.923.852
9	Kab. Siak	366.526.944
10	Kota Dumai	429.427.931
11	Kota Pekanbaru	800.145.136
12	Kab. Kepulauan Meranti	406.358.050
V	Provinsi Jambi	1.284.884.150
1	Kab. Batanghari	559.821.528
2	Kab. Bungo	389.404.249
3	Kab. Kerinci	557.771.989
4	Kab. Merangin	658.730.208
5	Kab. Muaro Jambi	619.495.157
6	Kab. Sarolangun	529.163.500
7	Kab. Tanjung Jabung Barat	479.384.508
8	Kab. Tanjung Jabung Timur	514.767.343
9	Kab. Tebo	528.393.374
10	Kota Jambi	675.288.713
11	Kota Sungai Penuh	405.067.761
VI	Provinsi Sumatera Selatan	1.563.041.287
1	Kab. Lahat	640.553.208
2	Kab. Musi Banyuasin	372.756.063
3	Kab. Musi Rawas	386.767.527
4	Kab. Muara Enim	606.450.888
5	Kab. Ogan Komering Ilir	966.478.190
6	Kab. Ogan Komering Ulu	590.080.276
7	Kota Palembang	1.207.730.107
8	Kota Prabumulih	392.368.815
9	Kota Pagar Alam	365.676.108
10	Kota Lubuk Linggau	441.802.413
11	Kab. Banyuasin	873.987.182
12	Kab. Ogan Ilir	579.569.016
13	Kab. OKU Timur	743.211.676
14	Kab. OKU Selatan	580.802.311
15	Kab. Empat Lawang	397.587.509
16	Kab. Penukal Abab Lematang Ilir	291.072.818
17	Kab. Musi Rawas Utara	362.017.608
VII	Provinsi Bengkulu	1.213.764.868
1	Kab. Bengkulu Selatan	513.903.304
2	Kab. Bengkulu Utara	579.751.729
3	Kab. Rejang Lebong	353.778.571
4	Kota Bengkulu	635.162.215
5	Kab. Kaur	408.155.458
6	Kab. Seluma	468.190.986
7	Kab. Mukomuko	452.497.926
8	Kab. Lebong	370.404.471
9	Kab. Kepahiang	395.317.091
10	Kab. Bengkulu Tengah	400.325.463
VIII	Provinsi Lampung	1.726.296.248

- *) Perubahan Pertama (PMK Nomor 94 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021
 **) Perubahan Kedua (PMK Nomor 162 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 23 November 2021
 ***) Perubahan Ketiga (PMK Nomor 118 Tahun 2022) Tanggal Berlaku: 25 Juli 2022

SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Dampaknya

NO.	NAMA DAERAH	ALOKASI DAU
(1)	(2)	(3)
1	Kab. Lampung Barat	491.712.483
2	Kab. Lampung Selatan	947.733.529
3	Kab. Lampung Tengah	1.233.414.075
4	Kab. Lampung Utara	868.639.092
5	Kab. Lampung Timur	996.513.649
6	Kab. Tanggamus	711.717.860
7	Kab. Tulang Bawang	570.870.961
8	Kab. Way Kanan	615.994.048
9	Kota Bandar Lampung	1.002.213.665
10	Kota Metro	427.590.058
11	Kab. Pesawaran	611.838.446
12	Kab. Pringsewu	569.803.319
13	Kab. Mesuji	403.336.470
14	Kab. Tulang Bawang Barat	436.388.502
15	Kab. Pesisir Barat	401.447.632
IX	Provinsi DKI Jakarta	-
X	Provinsi Jawa Barat	3.007.926.119
1	Kab. Bandung	1.947.251.242
2	Kab. Bekasi	1.096.895.278
3	Kab. Bogor	1.863.199.087
4	Kab. Ciamis	1.099.393.370
5	Kab. Cianjur	1.483.406.286
6	Kab. Cirebon	1.406.292.179
7	Kab. Garut	1.665.908.667
8	Kab. Indramayu	1.282.966.828
9	Kab. Karawang	1.199.911.350
10	Kab. Kuningan	1.111.944.421
11	Kab. Majalengka	1.112.158.811
12	Kab. Purwakarta	799.002.962
13	Kab. Subang	1.181.972.197
14	Kab. Sukabumi	1.491.039.889
15	Kab. Sumedang	1.058.905.256
16	Kab. Tasikmalaya	1.375.992.285
17	Kota Bandung	1.566.037.358
18	Kota Bekasi	1.137.891.061
19	Kota Bogor	751.862.545
20	Kota Cirebon	536.524.293
21	Kota Depok	843.688.626
22	Kota Sukabumi	463.567.655
23	Kota Tasikmalaya	742.097.940
24	Kota Cimahi	530.425.978
25	Kota Banjar	346.705.521
26	Kab. Bandung Barat	1.010.891.874
27	Kab. Pangandaran	505.200.629
XI	Provinsi Jawa Tengah	3.432.978.859
1	Kab. Banjarnegara	895.961.511
2	Kab. Banyumas	1.289.633.614
3	Kab. Batang	737.685.667
4	Kab. Blora	863.598.364
5	Kab. Boyolali	944.891.188
6	Kab. Brebes	1.238.589.246

- *) Perubahan Pertama (PMK Nomor 94 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021
 **) Perubahan Kedua (PMK Nomor 162 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 23 November 2021
 ***) Perubahan Ketiga (PMK Nomor 118 Tahun 2022) Tanggal Berlaku: 25 Juli 2022

SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Dampaknya

NO.	NAMA DAERAH	ALOKASI DAU
(1)	(2)	(3)
7	Kab. Cilacap	1.272.865.794
8	Kab. Demak	856.411.409
9	Kab. Grobogan	1.034.216.110
10	Kab. Jepara	928.866.409
11	Kab. Karanganyar	903.630.027
12	Kab. Kebumen	1.179.288.910
13	Kab. Kendal	901.552.517
14	Kab. Klaten	1.149.421.184
15	Kab. Kudus	747.504.503
16	Kab. Magelang	975.017.297
17	Kab. Pati	1.107.122.582
18	Kab. Pekalongan	871.067.401
19	Kab. Pemalang	1.107.792.827
20	Kab. Purbalingga	830.050.600
21	Kab. Purworejo	913.937.548
22	Kab. Rembang	718.204.574
23	Kab. Semarang	897.099.063
24	Kab. Sragen	984.484.500
25	Kab. Sukoharjo	847.875.034
26	Kab. Tegal	1.077.039.778
27	Kab. Temanggung	753.140.119
28	Kab. Wonogiri	1.059.941.416
29	Kab. Wonosobo	792.381.589
30	Kota Magelang	409.629.499
31	Kota Pekalongan	426.399.738
32	Kota Salatiga	418.013.566
33	Kota Semarang	1.167.622.970
34	Kota Surakarta	781.825.148
35	Kota Tegal	451.704.750
XII	Provinsi DI Yogyakarta	1.224.852.487
1	Kab. Bantul	911.168.107
2	Kab. Gunung Kidul	868.017.352
3	Kab. Kulon Progo	648.511.047
4	Kab. Sleman	925.964.567
5	Kota Yogyakarta	617.524.294
XIII	Provinsi Jawa Timur	3.650.366.754
1	Kab. Bangkalan	933.349.617
2	Kab. Banyuwangi	1.292.954.428
3	Kab. Blitar	1.043.910.472
4	Kab. Bojonegoro	870.125.915
5	Kab. Bondowoso	843.159.769
6	Kab. Gresik	870.446.047
7	Kab. Jember	1.607.489.075
8	Kab. Jombang	1.005.652.395
9	Kab. Kediri	1.149.914.158
10	Kab. Lamongan	1.086.400.453
11	Kab. Lumajang	899.452.272
12	Kab. Madiun	808.127.553
13	Kab. Magetan	837.710.006
14	Kab. Malang	1.558.477.503
15	Kab. Mojokerto	903.718.844

- *) Perubahan Pertama (PMK Nomor 94 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021
 **) Perubahan Kedua (PMK Nomor 162 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 23 November 2021
 ***) Perubahan Ketiga (PMK Nomor 118 Tahun 2022) Tanggal Berlaku: 25 Juli 2022

SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Dampaknya

NO.	NAMA DAERAH	ALOKASI DAU
(1)	(2)	(3)
16	Kab. Nganjuk	982.963.245
17	Kab. Ngawi	966.397.195
18	Kab. Pacitan	731.754.165
19	Kab. Pamekasan	791.549.034
20	Kab. Pasuruan	1.096.817.576
21	Kab. Ponorogo	979.474.402
22	Kab. Probolinggo	926.219.401
23	Kab. Sampang	781.832.940
24	Kab. Sidoarjo	1.132.080.961
25	Kab. Situbondo	744.920.418
26	Kab. Sumenep	1.081.877.188
27	Kab. Trenggalek	823.518.272
28	Kab. Tuban	960.230.004
29	Kab. Tulungagung	1.062.757.430
30	Kota Blitar	393.968.854
31	Kota Kediri	569.724.453
32	Kota Madiun	465.495.171
33	Kota Malang	792.693.133
34	Kota Mojokerto	367.576.298
35	Kota Pasuruan	403.383.780
36	Kota Probolinggo	430.613.654
37	Kota Surabaya	1.182.439.723
38	Kota Batu	445.511.050
XIV	Provinsi Kalimantan Barat	1.572.247.838
1	Kab. Bengkayang	543.069.666
2	Kab. Landak	608.484.664
3	Kab. Kapuas Hulu	891.104.376
4	Kab. Ketapang	1.032.254.019
5	Kab. Mempawah	531.639.134
6	Kab. Sambas	803.744.280
7	Kab. Sanggau	740.408.943
8	Kab. Sintang	837.189.641
9	Kota Pontianak	646.760.997
10	Kota Singkawang	457.023.658
11	Kab. Sekadau	463.850.905
12	Kab. Melawi	553.169.575
13	Kab. Kayong Utara	444.906.629
14	Kab. Kubu Raya	718.354.811
XV	Provinsi Kalimantan Tengah	1.431.363.200
1	Kab. Barito Selatan	517.055.110
2	Kab. Barito Utara	501.059.339
3	Kab. Kapuas	777.953.836
4	Kab. Kotawaringin Barat	593.260.006
5	Kab. Kotawaringin Timur	760.946.119
6	Kota Palangkaraya	592.472.958
7	Kab. Katingan	625.956.787
8	Kab. Seruyan	559.646.545
9	Kab. Sukamara	381.900.284
10	Kab. Lamandau	419.461.340
11	Kab. Gunung Mas	511.024.197
12	Kab. Pulang Pisau	515.062.491

- *) Perubahan Pertama (PMK Nomor 94 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021
**) Perubahan Kedua (PMK Nomor 162 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 23 November 2021
***) Perubahan Ketiga (PMK Nomor 118 Tahun 2022) Tanggal Berlaku: 25 Juli 2022

SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Dampaknya

NO.	NAMA DAERAH	ALOKASI DAU
(1)	(2)	(3)
13	Kab. Murung Raya	615.246.747
14	Kab. Berito Timur	437.087.627
XVI	Provinsi Kalimantan Selatan	1.093.343.743
1	Kab. Banjar	674.081.401
2	Kab. Barito Kuala	526.424.523
3	Kab. Hulu Sungai Selatan	474.753.627
4	Kab. Hulu Sungai Tengah	478.160.029
5	Kab. Hulu Sungai Utara	447.697.809
6	Kab. Kotabaru	582.990.513
7	Kab. Tabalong	451.421.653
8	Kab. Tanah Laut	494.306.446
9	Kab. Tapin	416.699.835
10	Kota Banjarbaru	411.679.729
11	Kota Banjarmasin	659.847.387
12	Kab. Balangan	346.527.140
13	Kab. Tanah Bumbu	428.237.770
XVII	Provinsi Kalimantan Timur	828.907.266
1	Kab. Berau	546.329.788
2	Kab. Kutai Kartanegara	443.413.042
3	Kab. Kutai Barat	544.622.975
4	Kab. Kutai Timur	858.995.500
5	Kab. Paser	376.294.804
6	Kota Balikpapan	428.306.693
7	Kota Bontang	225.977.741
8	Kota Samarinda	660.405.062
9	Kab. Penajam Paser Utara	271.407.999
10	Kab. Mahakam Ulu	443.010.427
XVIII	Provinsi Sulawesi Utara	1.330.463.660
1	Kab. Bolaang Mongondow	511.050.953
2	Kab. Minahasa	614.935.145
3	Kab. Sangihe	494.114.276
4	Kota Bitung	464.686.698
5	Kota Manado	702.057.099
6	Kab. Kepulauan Talaud	458.054.356
7	Kab. Minahasa Selatan	501.161.793
8	Kota Tomohon	393.387.326
9	Kab. Minahasa Utara	468.182.610
10	Kab. Kep. Siau Tagulandang Biaro	361.849.350
11	Kota Kotamobagu	353.039.596
12	Kab. Bolaang Mongondow Utara	348.446.042
13	Kab. Minahasa Tenggara	379.906.431
14	Kab. Bolaang Mongondow Timur	324.042.794
15	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	328.079.469
XIX	Provinsi Sulawesi Tengah	1.493.138.739
1	Kab. Banggai	805.938.719
2	Kab. Banggai Kepulauan	440.660.646
3	Kab. Buol	477.402.532
4	Kab. Toli-Toli	579.034.493
5	Kab. Donggala	618.899.454
6	Kab. Morowali	458.650.028
7	Kab. Poso	671.943.250

- *) Perubahan Pertama (PMK Nomor 94 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021
 **) Perubahan Kedua (PMK Nomor 162 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 23 November 2021
 ***) Perubahan Ketiga (PMK Nomor 118 Tahun 2022) Tanggal Berlaku: 25 Juli 2022

SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Dampaknya

NO.	NAMA DAERAH	ALOKASI DAU
(1)	(2)	(3)
8	Kota Palu	636.284.819
9	Kab. Parigi Moutong	718.721.702
10	Kab. Tojo Una Una	543.837.730
11	Kab. Sigi	578.721.561
12	Kab. Banggai Laut	385.546.396
13	Kab. Morowali Utara	532.725.535
XX	Provinsi Sulawesi Selatan	2.339.135.873
1	Kab. Bantaeng	168.011.498
2	Kab. Barru	482.644.349
3	Kab. Bone	995.519.760
4	Kab. Bulukumba	659.817.036
5	Kab. Enrekang	496.423.534
6	Kab. Gowa	795.804.286
7	Kab. Jeneponto	604.718.144
8	Kab. Luwu	647.227.070
9	Kab. Luwu Utara	616.768.825
10	Kab. Maros	660.026.786
11	Kab. Pangkajene Kepulauan	701.116.154
12	Kota Palopo	487.717.402
13	Kab. Luwu Timur	502.393.009
14	Kab. Pinrang	661.435.610
15	Kab. Sinjai	541.941.442
16	Kab. Kepulauan Selayar	560.147.823
17	Kab. Sidenreng Rappang	575.549.310
18	Kab. Soppeng	579.187.870
19	Kab. Takalar	564.934.568
20	Kab. Tana Toraja	537.030.126
21	Kab. Wajo	668.045.435
22	Kota Pare-pare	429.881.874
23	Kota Makassar	1.257.670.897
24	Kab. Toraja Utara	498.206.117
XXI	Provinsi Sulawesi Tenggara	1.456.620.465
1	Kab. Buton	394.867.827
2	Kab. Konawe	654.740.187
3	Kab. Kolaka	542.631.257
4	Kab. Muna	611.804.752
5	Kota Kendari	629.053.541
6	Kota Bau-bau	486.630.411
7	Kab. Konawe Selatan	661.510.848
8	Kab. Bombana	449.216.017
9	Kab. Wakatobi	439.035.399
10	Kab. Kolaka Utara	454.486.050
11	Kab. Konawe Utara	421.367.680
12	Kab. Buton Utara	384.899.292
13	Kab. Konawe Kepulauan	300.021.707
14	Kab. Kolaka Timur	378.525.998
15	Kab. Muna Barat	336.737.689
16	Kab. Buton Tengah	339.470.931
17	Kab. Buton Selatan	334.882.640
XXII	Provinsi Bali	1.201.511.839
1	Kab. Badung	327.680.331

- *) Perubahan Pertama (PMK Nomor 94 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021
 **) Perubahan Kedua (PMK Nomor 162 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 23 November 2021
 ***) Perubahan Ketiga (PMK Nomor 118 Tahun 2022) Tanggal Berlaku: 25 Juli 2022

SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Dampaknya

NO.	NAMA DAERAH	ALOKASI DAU
(1)	(2)	(3)
2	Kab. Bangli	525.978.399
3	Kab. Buleleng	890.141.572
4	Kab. Gianyar	637.644.039
5	Kab. Jembrana	513.845.294
6	Kab. Karangasem	700.663.380
7	Kab. Klungkung	494.287.735
8	Kab. Tabanan	746.276.084
9	Kota Denpasar	609.734.565
XXIII	Provinsi Nusa Tenggara Barat	1.475.675.853
1	Kab. Bima	832.682.655
2	Kab. Dompu	536.299.165
3	Kab. Lombok Barat	716.749.817
4	Kab. Lombok Tengah	938.877.404
5	Kab. Lombok Timur	1.072.361.428
6	Kab. Sumbawa	780.686.416
7	Kota Mataram	569.742.255
8	Kota Bima	432.159.814
9	Kab. Sumbawa Barat	370.668.794
10	Kab. Lombok Utara	373.720.523
XXIV	Provinsi Nusa Tenggara Timur	1.726.712.089
1	Kab. Alor	565.598.771
2	Kab. Belu	466.681.212
3	Kab. Ende	586.973.668
4	Kab. Flores Timur	583.023.737
5	Kab. Kupang	629.001.506
6	Kab. Lembata	437.999.954
7	Kab. Manggarai	552.025.297
8	Kab. Ngada	439.418.102
9	Kab. Sikka	579.691.529
10	Kab. Sumba Barat	373.358.635
11	Kab. Sumba Timur	597.431.647
12	Kab. Timor Tengah Selatan	705.697.225
13	Kab. Timor Tengah Utara	554.675.820
14	Kota Kupang	609.915.054
15	Kab. Rote Ndao	419.624.046
16	Kab. Manggarai Barat	495.210.105
17	Kab. Nagekeo	407.222.571
18	Kab. Sumba Barat Daya	456.661.628
19	Kab. Sumba Tengah	329.966.452
20	Kab. Manggarai Timur	486.677.418
21	Kab. Sabu Raijua	336.885.937
22	Kab. Malaka	422.349.168
XXV	Provinsi Maluku	1.524.362.740
1	Kab. Kepulauan Tanimbar	524.623.710
2	Kab. Maluku Tengah	877.646.423
3	Kab. Maluku Tenggara	453.062.144
4	Kab. Buru	476.301.412
5	Kota Ambon	621.203.847
6	Kab. Seram Bagian Barat	560.441.696
7	Kab. Seram Bagian Timur	500.895.943
8	Kab. Kepulauan Aru	554.228.862

- *) Perubahan Pertama (PMK Nomor 94 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021
 **) Perubahan Kedua (PMK Nomor 162 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 23 November 2021
 ***) Perubahan Ketiga (PMK Nomor 118 Tahun 2022) Tanggal Berlaku: 25 Juli 2022

SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Dampaknya

NO.	NAMA DAERAH	ALOKASI DAU
(1)	(2)	(3)
9	Kota Tual	363.635.673
10	Kab. Maluku Barat Daya	530.922.078
11	Kab. Buru Selatan	400.128.860
XXVI	Provinsi Papua	2.314.920.067
1	Kab. Biak Numfor	532.363.441
2	Kab. Jayapura	628.453.996
3	Kab. Jayawijaya	662.518.235
4	Kab. Merauke	1.121.068.531
5	Kab. Mimika	550.841.316
6	Kab. Nabire	661.803.937
7	Kab. Paniai	538.889.485
8	Kab. Puncak Jaya	690.475.876
9	Kab. Kepulauan Yapen	512.910.537
10	Kota Jayapura	580.485.618
11	Kab. Sarmi	631.560.556
12	Kab. Keerom	492.133.562
13	Kab. Yahukimo	695.666.855
14	Kab. Pegunungan Bintang	764.629.326
15	Kab. Tolikara	677.982.398
16	Kab. Boven Digoel	746.663.814
17	Kab. Mappi	697.309.133
18	Kab. Asmat	815.868.403
19	Kab. Waropen	522.616.999
20	Kab. Supiori	408.327.705
21	Kab. Mamberamo Raya	667.260.018
22	Kab. Mamberamo Tengah	592.696.848
23	Kab. Yalimo	561.979.012
24	Kab. Lanny Jaya	597.590.991
25	Kab. Nduga	560.392.779
26	Kab. Dogiyai	454.355.638
27	Kab. Puncak	736.186.791
28	Kab. Intan Jaya	629.060.034
29	Kab. Deiyai	447.049.186
XXVII	Provinsi Maluku Utara	1.222.526.964
1	Kab. Halmahera Tengah	410.893.085
2	Kota Ternate	588.615.360
3	Kab. Halmahera Barat	456.293.165
4	Kab. Halmahera Timur	443.074.788
5	Kab. Halmahera Selatan	693.726.110
6	Kab. Halmahera Utara	450.064.849
7	Kab. Kepulauan Sula	449.892.692
8	Kota Tidore Kepulauan	504.088.132
9	Kab. Pulau Morotai	360.501.070
10	Kab. Pulau Taliabu	328.264.221
XXVIII	Provinsi Banten	1.070.448.323
1	Kab. Lebak	1.013.013.728
2	Kab. Pandeglang	1.109.456.953
3	Kab. Serang	1.019.130.877
4	Kab. Tangerang	1.112.171.609
5	Kota Cilegon	586.064.288
6	Kota Tangerang	827.221.937

- *) Perubahan Pertama (PMK Nomor 94 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021
 **) Perubahan Kedua (PMK Nomor 162 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 23 November 2021
 ***) Perubahan Ketiga (PMK Nomor 118 Tahun 2022) Tanggal Berlaku: 25 Juli 2022

SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Dampaknya

NO.	NAMA DAERAH	ALOKASI DAU
(1)	(2)	(3)
7	Kota Serang	604.815.966
8	Kota Tangerang Selatan	551.963.179
XXIX	Provinsi Bangka Belitung	939.550.039
1	Kab. Bangka	490.426.548
2	Kab. Belitung	453.343.018
3	Kota Pangkal Pinang	424.862.442
4	Kab. Bangka Selatan	434.540.915
5	Kab. Bangka Tengah	417.416.112
6	Kab. Bangka Barat	419.899.512
7	Kab. Belitung Timur	415.532.093
XXX	Provinsi Gorontalo	940.639.321
1	Kab. Boalemo	421.838.769
2	Kab. Gorontalo	610.448.913
3	Kota Gorontalo	481.877.171
4	Kab. Pohuwato	480.943.263
5	Kab. Bone Bolango	452.140.544
6	Kab. Gorontalo Utara	376.906.992
XXXI	Provinsi Kepulauan Riau	1.092.929.539
1	Kab. Natuna	390.697.487
2	Kab. Kepulauan Anambas	368.303.160
3	Kab. Karimun	417.084.074
4	Kota Batam	626.199.396
5	Kota Tanjung Pinang	448.777.293
6	Kab. Lingga	454.584.269
7	Kab. Bintan	476.841.183
XXXII	Provinsi Papua Barat	1.307.710.344
1	Kab. Fak Fak	641.700.770
2	Kab. Manokwari	491.568.927
3	Kab. Sorong	495.495.508
4	Kota Sorong	457.994.121
5	Kab. Raja Ampat	642.356.495
6	Kab. Sorong Selatan	434.315.404
7	Kab. Teluk Bintuni	493.723.509
8	Kab. Teluk Wondama	421.468.195
9	Kab. Kaimana	568.163.328
10	Kab. Maybrat	401.780.960
11	Kab. Tambrauw	462.749.116
12	Kab. Manokwari Selatan	316.998.031
13	Kab. Pegunungan Arfak	343.724.410
XXXIII	Provinsi Sulawesi Barat	970.916.874
1	Kab. Majene	486.320.121
2	Kab. Mamuju	592.544.535
3	Kab. Polewali Mandar	664.134.140
4	Kab. Mamasa	489.195.519
5	Kab. Pasangkayu	453.516.929
6	Kab. Mamuju Tengah	333.663.316
XXXIV	Provinsi Kalimantan Utara	1.079.265.408
1	Kab. Bulungan	524.393.445
2	Kab. Malinau	780.635.100
3	Kab. Nunukan	502.646.295
4	Kota Tarakan	422.740.624

- *) Perubahan Pertama (PMK Nomor 94 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021
 **) Perubahan Kedua (PMK Nomor 162 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 23 November 2021
 ***) Perubahan Ketiga (PMK Nomor 118 Tahun 2022) Tanggal Berlaku: 25 Juli 2022

SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Dampaknya

NO.	NAMA DAERAH	ALOKASI DAU
(1)	(2)	(3)
5	Kab. Tana Tidung	407.450.064
JUMLAH ALOKASI DAU PROVINSI		53.268.586.031
JUMLAH ALOKASI DAU KAB/KOTA		324.522.804.257
JUMLAH ALOKASI DAU NASIONAL		377.791.390.288

*) Perubahan Pertama
**) Perubahan Kedua
***) Perubahan Ketiga

(PMK Nomor 94 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021
(PMK Nomor 162 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 23 November 2021
(PMK Nomor 118 Tahun 2022) Tanggal Berlaku: 25 Juli 2022

SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan Dampaknya

B. RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA TAHUN ANGGARAN 2021

1. DAK FISIK REGULER

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Pendidikan				
		PAUD	SD	SMP	SMA	SMK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Provinsi Aceh				100.391.123	103.659.840
2	Kab. Aceh Barat	453.430	26.522.671	22.410.110		
3	Kab. Aceh Besar	571.571	25.170.591	7.238.715		
4	Kab. Aceh Selatan	2.660.439	11.687.535	13.842.880		
5	Kab. Aceh Singkil		21.908.538	27.483.216		
6	Kab. Aceh Tengah	1.073.870	4.564.506	2.461.601		
7	Kab. Aceh Tenggara	996.412	27.644.118	22.298.351		
8	Kab. Aceh Timur	2.560.119	14.671.854	14.424.884		
9	Kab. Aceh Utara	5.143.241	28.815.351	20.580.516		
10	Kab. Bireuen	245.801	14.463.302	12.165.665		
11	Kab. Pidie	979.067	13.833.890	5.790.743		
12	Kab. Simeulue		4.670.439	2.613.304		
13	Kota Banda Aceh	489.205	4.048.841	2.151.452		
14	Kota Sabang	670.073	3.704.373	2.627.626		
15	Kota Langsa	1.732.995	25.380.663	23.829.541		
16	Kota Lhokseumawe	608.412	5.977.072	6.365.876		
17	Kab. Gayo Lues	2.662.702	8.925.034	6.918.015		

*) Perubahan Pertama

**) Perubahan Kedua

***) Perubahan Ketiga

(PMK Nomor 94 Tahun 2021)

(PMK Nomor 162 Tahun 2021)

(PMK Nomor 118 Tahun 2022)

Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021

Tanggal Berlaku: 23 November 2021

Tanggal Berlaku: 25 Juli 2022

SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Dampaknya

1. DAK FISIK REGULER

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Pendidikan				Kesehatan dan KB
		SKB	SLB	Perpustakaan Daerah	Subtotal Pendidikan	Pelayanan Dasar
(1)	(2)	(8)	(9)	(10)	(11)=(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)+(9)+(10)	(12)
1	Provinsi Aceh		3.864.765		207.915.728	
2	Kab. Aceh Barat	1.716.614			51.102.825	16.550.950
3	Kab. Aceh Besar			300.000	33.280.877	3.315.928
4	Kab. Aceh Selatan				28.190.854	13.910.618
5	Kab. Aceh Singkil			500.000	49.891.754	8.259.646
6	Kab. Aceh Tengah				8.099.977	9.003.725
7	Kab. Aceh Tenggara	446.800			51.385.681	1.978.128
8	Kab. Aceh Timur			432.348	32.089.205	1.948.700
9	Kab. Aceh Utara			357.200	54.896.308	1.831.615
10	Kab. Bireuen	596.800			27.471.568	4.403.004
11	Kab. Pidie			699.950	21.303.650	6.085.337
12	Kab. Simeulue				7.283.743	6.270.000
13	Kota Banda Aceh			9.999.930	16.689.428	1.968.628
14	Kota Sabang				7.002.072	1.956.150
15	Kota Langsa			200.000	51.143.199	836.000
16	Kota Lhokseumawe			499.625	13.450.985	2.000.000
17	Kab. Gayo Lues				18.505.751	6.883.850

*) Perubahan Pertama

**) Perubahan Kedua

***) Perubahan Ketiga

(PMK Nomor 94 Tahun 2021)

(PMK Nomor 162 Tahun 2021)

(PMK Nomor 118 Tahun 2022)

Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021

Tanggal Berlaku: 23 November 2021

Tanggal Berlaku: 25 Juli 2022

SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Dampaknya

1. DAK FISIK REGULER

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Kesehatan dan KB				Subtotal Kesehatan dan KB
		Pelayanan Rujukan	Pelayanan Kefarmasian dan Bahan Habis Pakai	Peningkatan Kesiapan Sistem Kesehatan	Keluarga Berencana	
(1)	(2)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)=(12)+(13)+(14)+(15)+(16)
1	Provinsi Aceh	14.689.559		4.886.882		19.576.441
2	Kab. Aceh Barat	20.546.190	3.970.333	260.535	1.475.147	42.803.155
3	Kab. Aceh Besar	3.911.300	5.065.434	390.000	1.146.089	13.828.751
4	Kab. Aceh Selatan	2.661.000	7.029.733	510.225	1.353.974	25.465.550
5	Kab. Aceh Singkil	25.876.872	3.257.327		1.112.537	38.506.382
6	Kab. Aceh Tengah	12.433.620	3.487.412		1.107.000	26.031.757
7	Kab. Aceh Tenggara	13.450.000	2.149.804	1.900.000	1.242.034	20.719.966
8	Kab. Aceh Timur	15.488.016	5.178.888	325.745	1.458.200	24.399.549
9	Kab. Aceh Utara	3.200.000	2.856.673	344.500	1.299.773	9.532.561
10	Kab. Bireuen	5.037.500	4.504.856	351.418	1.145.639	15.442.417
11	Kab. Pidie	3.597.614	8.321.422	390.000	1.118.386	19.512.759
12	Kab. Simeulue	13.643.381	2.533.605	75.342	1.155.834	23.678.162
13	Kota Banda Aceh	5.366.903	3.540.966	391.581	1.053.483	12.321.561
14	Kota Sabang	42.528.718	1.900.822		843.836	47.229.526
15	Kota Langsa	3.000.000	3.045.525	1.571.149	869.979	9.322.653
16	Kota Lhokseumawe		4.172.265	208.925	625.811	7.007.001
17	Kab. Gayo Lues	6.000.000	1.743.509		1.272.012	15.899.371

*) Perubahan Pertama

(PMK Nomor 94 Tahun 2021)

Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021

**) Perubahan Kedua

(PMK Nomor 162 Tahun 2021)

Tanggal Berlaku: 23 November 2021

***) Perubahan Ketiga

(PMK Nomor 118 Tahun 2022)

Tanggal Berlaku: 25 Juli 2022

SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Dampaknya

1. DAK FISIK REGULER

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Jalan	Transportasi Perdesaan	Transportasi Laut	TOTAL DAK REGULER
(1)	(2)	(18)	(19)	(20)	(21)=(11)+(17)+(18)+(19)+(20)
1	Provinsi Aceh	15.000.563			242.492.732
2	Kab. Aceh Barat	14.464.701			108.370.681
3	Kab. Aceh Besar	11.919.262	4.600.000		63.628.890
4	Kab. Aceh Selatan	11.668.455			65.324.859
5	Kab. Aceh Singkil	12.188.094	6.809.121		107.395.351
6	Kab. Aceh Tengah	15.217.015	3.800.000		53.148.749
7	Kab. Aceh Tenggara	10.839.569			82.945.216
8	Kab. Aceh Timur	24.942.458			81.431.212
9	Kab. Aceh Utara	23.078.259			87.507.128
10	Kab. Bireuen	35.949.116			78.863.101
11	Kab. Pidie	12.483.325			53.299.734
12	Kab. Simeulue	7.555.431	3.599.107		42.116.443
13	Kota Banda Aceh	6.530.449			35.541.438
14	Kota Sabang	4.921.875	4.600.000		63.753.473
15	Kota Langsa	9.018.699	3.700.000		73.184.551
16	Kota Lhokseumawe	7.364.010			27.821.996
17	Kab. Gayo Lues	10.386.484			44.791.606

*) Perubahan Pertama

**) Perubahan Kedua

***) Perubahan Ketiga

(PMK Nomor 94 Tahun 2021)

(PMK Nomor 162 Tahun 2021)

(PMK Nomor 118 Tahun 2022)

Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021

Tanggal Berlaku: 23 November 2021

Tanggal Berlaku: 25 Juli 2022

SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Dampaknya

2. DAK FISIK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Kesehatan dan KB				Jalan
		Penguatan Intervensi Stunting	Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi	Keluarga Berencana	Subtotal Kesehatan dan KB	Tematik Ketahanan Pangan
(1)	(2)	(22)	(23)	(24)	(25)=(22)+(23)+(24)	(26)
1	Provinsi Aceh	2.157.908			2.157.908	49.363.737
2	Kab. Aceh Barat					
3	Kab. Aceh Besar	650.000		280.000	930.000	8.774.291
4	Kab. Aceh Selatan		26.184.967		26.184.967	
5	Kab. Aceh Singkil					
6	Kab. Aceh Tengah			280.000	280.000	10.460.888
7	Kab. Aceh Tenggara			280.000	280.000	
8	Kab. Aceh Timur	3.228.440	261.000	260.000	3.749.440	11.752.135
9	Kab. Aceh Utara		5.667.799	280.000	5.947.799	12.892.227
10	Kab. Bireuen		29.507.743	280.000	29.787.743	13.665.421
11	Kab. Pidie	900.000	29.071.846	280.000	30.251.846	8.738.839
12	Kab. Simeulue			280.000	280.000	
13	Kota Banda Aceh					
14	Kota Sabang					
15	Kota Langsa					
16	Kota Lhokseumawe					
17	Kab. Gayo Lues			280.000	280.000	

*) Perubahan Pertama

**) Perubahan Kedua

***) Perubahan Ketiga

(PMK Nomor 94 Tahun 2021)

(PMK Nomor 162 Tahun 2021)

(PMK Nomor 118 Tahun 2022)

Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021

Tanggal Berlaku: 23 November 2021

Tanggal Berlaku: 25 Juli 2022

SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Dampaknya

2. DAK FISIK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Jalan		Air Minum		
		Tematik Pembangunan Infrastruktur Ekonomi Berkelanjutan	Subtotal Jalan	Tematik Penurunan Angka Kematian Ibu dan Stunting	Tematik Penanggulangan Kemiskinan	Subtotal Air Minum
(1)	(2)	(27)	(28)=(26)+(27)	(29)	(30)	(31)=(29)+(30)
1	Provinsi Aceh		49.363.737			
2	Kab. Aceh Barat				4.902.959	4.902.959
3	Kab. Aceh Besar		8.774.291		4.238.824	4.238.824
4	Kab. Aceh Selatan	11.451.642	11.451.642		5.770.768	5.770.768
5	Kab. Aceh Singkil				3.820.919	3.820.919
6	Kab. Aceh Tengah		10.460.888	1.613.675	2.076.175	3.689.850
7	Kab. Aceh Tenggara			2.749.680	2.250.000	4.999.680
8	Kab. Aceh Timur		11.752.135	840.000	6.182.108	7.022.108
9	Kab. Aceh Utara		12.892.227		7.096.137	7.096.137
10	Kab. Bireuen		13.665.421		4.873.288	4.873.288
11	Kab. Pidie		8.738.839	320.000	4.670.400	4.990.400
12	Kab. Simeulue	2.897.714	2.897.714	10.848.738	4.271.405	15.120.143
13	Kota Banda Aceh				4.297.900	4.297.900
14	Kota Sabang				4.979.108	4.979.108
15	Kota Langsa	1.206.716	1.206.716		6.595.119	6.595.119
16	Kota Lhokseumawe	2.751.552	2.751.552		4.585.549	4.585.549
17	Kab. Gayo Lues			3.714.568	4.180.381	7.894.949

*) Perubahan Pertama

**) Perubahan Kedua

***) Perubahan Ketiga

(PMK Nomor 94 Tahun 2021)

(PMK Nomor 162 Tahun 2021)

(PMK Nomor 118 Tahun 2022)

Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021

Tanggal Berlaku: 23 November 2021

Tanggal Berlaku: 25 Juli 2022

SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Dampaknya

2. DAK FISIK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Sanitasi			Perumahan dan Permukiman	Irigasi
		Tematik Penurunan Angka Kematian Ibu dan Stunting	Tematik Penanggulangan Kemiskinan	Subtotal Sanitasi		
(1)	(2)	(32)	(33)	(34)=(32)+(33)	(35)	(36)
1	Provinsi Aceh					6.664.652
2	Kab. Aceh Barat		1.911.541	1.911.541	6.264.890	13.282.000
3	Kab. Aceh Besar		2.121.501	2.121.501	7.348.845	7.814.384
4	Kab. Aceh Selatan		2.159.682	2.159.682	2.032.781	6.712.000
5	Kab. Aceh Singkil		1.653.144	1.653.144	14.070.248	
6	Kab. Aceh Tengah	4.234.160	2.281.319	6.515.479	745.603	5.673.598
7	Kab. Aceh Tenggara	6.863.553	2.099.691	8.963.244	1.129.711	7.721.165
8	Kab. Aceh Timur	1.539.099	3.054.756	4.593.855		3.791.245
9	Kab. Aceh Utara		2.249.669	2.249.669		5.564.900
10	Kab. Bireuen	1.758.970	2.766.427	4.525.397		15.425.057
11	Kab. Pidie	378.000	3.494.777	3.872.777	2.141.801	15.724.900
12	Kab. Simeulue	7.620.615		7.620.615		7.275.000
13	Kota Banda Aceh		1.501.238	1.501.238	2.480.235	10.600.000
14	Kota Sabang		1.256.960	1.256.960	1.094.559	
15	Kota Langsa		5.352.984	5.352.984	40.373.374	
16	Kota Lhokseumawe		1.791.228	1.791.228	2.613.842	
17	Kab. Gayo Lues	5.136.143	421.000	5.557.143		7.161.714

*) Perubahan Pertama

**) Perubahan Kedua

***) Perubahan Ketiga

(PMK Nomor 94 Tahun 2021)

(PMK Nomor 162 Tahun 2021)

(PMK Nomor 118 Tahun 2022)

Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021

Tanggal Berlaku: 23 November 2021

Tanggal Berlaku: 25 Juli 2022

SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Dampaknya

2. DAK FISIK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Pertanian	Kelautan dan Perikanan	Industri Kecil dan Menengah	Pariwisata	Lingkungan Hidup
						Lingkungan Hidup Tematik Penurunan Angka Kematian Ibu dan Stunting
(1)	(2)	(37)	(38)	(39)	(40)	(41)
1	Provinsi Aceh	4.902.661	10.478.800			
2	Kab. Aceh Barat	3.125.000	900.000	1.184.345		
3	Kab. Aceh Besar	6.420.922	1.094.000	4.000.389		
4	Kab. Aceh Selatan		1.097.500	3.700.360		
5	Kab. Aceh Singkil	3.100.000	1.082.000			
6	Kab. Aceh Tengah	5.815.000	1.213.820			
7	Kab. Aceh Tenggara	2.900.000	1.300.000		1.434.991	
8	Kab. Aceh Timur	6.794.817	1.718.315			
9	Kab. Aceh Utara	6.535.000	1.296.400	4.000.389		
10	Kab. Bireuen	3.642.000	1.159.000			
11	Kab. Pidie	8.378.283	1.195.000			
12	Kab. Simeulue		1.315.000			
13	Kota Banda Aceh		525.000	3.500.340	11.803.952	
14	Kota Sabang		1.179.999	4.000.389		
15	Kota Langsa		980.000	420.058		1.000.000
16	Kota Lhokseumawe		1.113.000			
17	Kab. Gayo Lues		526.000			

*) Perubahan Pertama

**) Perubahan Kedua

***) Perubahan Ketiga

(PMK Nomor 94 Tahun 2021)

(PMK Nomor 162 Tahun 2021)

(PMK Nomor 118 Tahun 2022)

Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021

Tanggal Berlaku: 23 November 2021

Tanggal Berlaku: 25 Juli 2022

SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Dampaknya

2. DAK FISIK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Lingkungan Hidup			TOTAL DAK PENUGASAN	TOTAL DAK FISIK
		Lingkungan Hidup Tematik Pembangunan Infrastruktur Ekonomi Berkelanjutan	Kehutanan Tematik Ketahanan Pangan	Subtotal Lingkungan Hidup		
(1)	(2)	(42)	(43)	(44)=(41)+(42)+(43)	(45)=(25)+(28)+(31)+(34)+(35)+(36)+(37)+(38)+(39)+(40)+(44)	(46)=(21)+(45)
1	Provinsi Aceh		2.400.000	2.400.000	75.967.758	318.460.490
2	Kab. Aceh Barat				31.570.735	139.941.416
3	Kab. Aceh Besar				42.743.156	106.372.046
4	Kab. Aceh Selatan				59.109.700	124.434.559
5	Kab. Aceh Singkil				23.726.311	131.121.662
6	Kab. Aceh Tengah				34.394.238	87.542.987
7	Kab. Aceh Tenggara				28.728.791	111.674.007
8	Kab. Aceh Timur				39.421.915	120.853.127
9	Kab. Aceh Utara				45.582.521	133.089.649
10	Kab. Bireuen				73.077.906	151.941.007
11	Kab. Pidie				75.293.846	128.593.580
12	Kab. Simeulue				34.508.472	76.624.915
13	Kota Banda Aceh				34.708.665	70.250.103
14	Kota Sabang				12.511.015	76.264.488
15	Kota Langsa			1.000.000	55.928.251	129.112.802
16	Kota Lhokseumawe				12.855.171	40.677.167
17	Kab. Gayo Lues				21.419.806	66.211.412

*) Perubahan Pertama
 **) Perubahan Kedua
 ***) Perubahan Ketiga

(PMK Nomor 94 Tahun 2021)
 (PMK Nomor 162 Tahun 2021)
 (PMK Nomor 118 Tahun 2022)

Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021
 Tanggal Berlaku: 23 November 2021
 Tanggal Berlaku: 25 Juli 2022

SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Dampaknya

1. DAK FISIK REGULER

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Pendidikan				
		PAUD	SD	SMP	SMA	SMK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
18	Kab. Aceh Barat Daya		14.133.092	8.805.315		
19	Kab. Aceh Jaya	1.489.185	12.892.479	6.724.931		
20	Kab. Nagan Raya		13.499.813	18.890.684		
21	Kab. Aceh Tamiang	281.738	3.831.582	5.269.787		
22	Kab. Bener Meriah	559.961	7.885.600	1.052.915		
23	Kab. Pidie Jaya	1.411.320	20.249.057	8.141.234		
24	Kota Subulussalam	1.167.182	5.540.581	6.259.427		
25	Provinsi Sumatera Utara				50.536.800	144.393.850
26	Kab. Asahan		19.775.779	9.673.764		
27	Kab. Dairi		19.503.211	11.629.209		
28	Kab. Deli Serdang	3.657.876	6.158.656	11.575.503		
29	Kab. Karo	1.226.270	20.939.811	23.776.952		
30	Kab. Labuhanbatu	320.150	16.586.039	2.513.336		
31	Kab. Langkat	447.397	23.492.544	12.254.413		
32	Kab. Mandailing Natal	331.977	14.444.997	1.096.447		
33	Kab. Nias		4.222.610	3.224.754		
34	Kab. Simalungun	349.046	13.360.614	8.388.416		
35	Kab. Tapanuli Selatan	262.000	16.112.845	6.754.234		
36	Kab. Tapanuli Tengah	574.686	15.151.459	24.615.950		
37	Kab. Tapanuli Utara	2.060.588	17.047.040	15.037.617		

*) Perubahan Pertama

**) Perubahan Kedua

***) Perubahan Ketiga

(PMK Nomor 94 Tahun 2021)

(PMK Nomor 162 Tahun 2021)

(PMK Nomor 118 Tahun 2022)

Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021

Tanggal Berlaku: 23 November 2021

Tanggal Berlaku: 25 Juli 2022

SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Dampaknya

1. DAK FISIK REGULER

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Pendidikan				Kesehatan dan KB
		SKB	SLB	Perpustakaan Daerah	Subtotal Pendidikan	Pelayanan Dasar
(1)	(2)	(8)	(9)	(10)	(11)=(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)+(9)+(10)	(12)
18	Kab. Aceh Barat Daya			475.000	23.413.407	2.000.000
19	Kab. Aceh Jaya			388.000	21.494.595	15.920.609
20	Kab. Nagan Raya			610.270	33.000.767	7.536.376
21	Kab. Aceh Tamiang				9.383.107	1.616.909
22	Kab. Bener Meriah			534.785	10.033.261	13.759.293
23	Kab. Pidie Jaya				29.801.611	6.430.272
24	Kota Subulussalam				12.967.190	3.849.899
25	Provinsi Sumatera Utara		1.895.050	500.000	197.325.700	
26	Kab. Asahan				29.449.543	1.937.513
27	Kab. Dairi				31.132.420	10.620.023
28	Kab. Deli Serdang	200.000		10.000.000	31.592.035	3.177.693
29	Kab. Karo				45.943.033	9.717.900
30	Kab. Labuhanbatu			300.000	19.719.525	9.536.665
31	Kab. Langkat	1.319.700			37.514.054	3.636.000
32	Kab. Mandailing Natal			200.000	16.073.421	2.970.105
33	Kab. Nias			200.000	7.647.364	1.969.851
34	Kab. Simalungun				22.098.076	14.243.000
35	Kab. Tapanuli Selatan				23.129.079	7.584.000
36	Kab. Tapanuli Tengah			183.500	40.525.595	2.844.575
37	Kab. Tapanuli Utara			218.981	34.364.226	2.877.000

*) Perubahan Pertama

**) Perubahan Kedua

***) Perubahan Ketiga

(PMK Nomor 94 Tahun 2021)

(PMK Nomor 162 Tahun 2021)

(PMK Nomor 118 Tahun 2022)

Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021

Tanggal Berlaku: 23 November 2021

Tanggal Berlaku: 25 Juli 2022

SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Dampaknya

1. DAK FISIK REGULER

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Kesehatan dan KB				
		Pelayanan Rujukan	Pelayanan Kefarmasian dan Bahan Habis Pakai	Peningkatan Kesiapan Sistem Kesehatan	Keluarga Berencana	Subtotal Kesehatan dan KB
(1)	(2)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)=(12)+(13)+(14)+(15)+(16)
18	Kab. Aceh Barat Daya	13.253.616	3.837.677		1.035.012	20.126.305
19	Kab. Aceh Jaya	20.000.000	2.658.708		1.250.299	39.829.616
20	Kab. Nagan Raya	2.240.000	2.389.127	5.522.296	1.101.167	18.788.966
21	Kab. Aceh Tamiang	3.000.000	4.217.164		938.717	9.772.790
22	Kab. Bener Meriah	5.747.484	1.806.625		1.229.332	22.542.734
23	Kab. Pidie Jaya	7.609.030	2.168.721		1.414.632	17.622.655
24	Kota Subulussalam	5.665.048	2.505.445		934.370	12.954.762
25	Provinsi Sumatera Utara	32.485.929		1.780.492		34.266.421
26	Kab. Asahan	3.000.000	3.595.305		1.216.295	9.749.113
27	Kab. Dairi	10.220.731	2.486.667		1.535.257	24.862.678
28	Kab. Deli Serdang	5.750.000	6.701.481	1.576.076	898.342	18.103.592
29	Kab. Karo	5.157.602	3.743.335		1.407.067	20.025.904
30	Kab. Labuhanbatu	5.700.000	2.782.371		844.210	18.863.246
31	Kab. Langkat	6.005.888	4.337.458		1.498.011	15.477.357
32	Kab. Mandailing Natal	4.717.571	4.605.173	349.750	1.257.000	13.899.599
33	Kab. Nias	1.774.045	2.341.400		1.249.691	7.334.987
34	Kab. Simalungun	22.152.153	2.968.159		1.044.702	40.408.014
35	Kab. Tapanuli Selatan	3.338.024	2.753.986		1.213.368	14.889.378
36	Kab. Tapanuli Tengah	4.957.410	5.174.985		1.484.789	14.461.759
37	Kab. Tapanuli Utara	5.454.600	2.789.321		1.111.752	12.232.673

*) Perubahan Pertama

(PMK Nomor 94 Tahun 2021)

Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021

**) Perubahan Kedua

(PMK Nomor 162 Tahun 2021)

Tanggal Berlaku: 23 November 2021

***) Perubahan Ketiga

(PMK Nomor 118 Tahun 2022)

Tanggal Berlaku: 25 Juli 2022

SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Dampaknya

1. DAK FISIK REGULER

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Jalan	Transportasi Perdesaan	Transportasi Laut	TOTAL DAK REGULER
(1)	(2)	(18)	(19)	(20)	(21)=(11)+(17)+(18)+(19)+(20)
18	Kab. Aceh Barat Daya	12.444.129			55.983.841
19	Kab. Aceh Jaya	9.324.545			70.648.756
20	Kab. Nagan Raya	15.937.120			67.726.853
21	Kab. Aceh Tamiang	13.915.801			33.071.698
22	Kab. Bener Meriah	19.120.098	4.600.000		56.296.093
23	Kab. Pidie Jaya	9.666.880			57.091.146
24	Kota Subulussalam	7.541.350			33.463.302
25	Provinsi Sumatera Utara	13.133.236			244.725.357
26	Kab. Asahan	17.937.510			57.136.166
27	Kab. Dairi	37.779.000			93.774.098
28	Kab. Deli Serdang	15.987.854			65.683.481
29	Kab. Karo	12.459.097			78.428.034
30	Kab. Labuhanbatu	11.229.931			49.812.702
31	Kab. Langkat	7.954.088			60.945.499
32	Kab. Mandailing Natal	26.632.839			56.605.859
33	Kab. Nias	13.501.568	5.700.000		34.183.919
34	Kab. Simalungun	21.510.929			84.017.019
35	Kab. Tapanuli Selatan	11.533.311			49.551.768
36	Kab. Tapanuli Tengah	12.711.321			67.698.675
37	Kab. Tapanuli Utara	13.077.345			59.674.244

*) Perubahan Pertama

**) Perubahan Kedua

***) Perubahan Ketiga

(PMK Nomor 94 Tahun 2021)

(PMK Nomor 162 Tahun 2021)

(PMK Nomor 118 Tahun 2022)

Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021

Tanggal Berlaku: 23 November 2021

Tanggal Berlaku: 25 Juli 2022

SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Dampaknya

2. DAK FISIK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Kesehatan dan KB				Jalan
		Penguatan Intervensi Stunting	Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi	Keluarga Berencana	Subtotal Kesehatan dan KB	Tematik Ketahanan Pangan
(1)	(2)	(22)	(23)	(24)	(25)=(22)+(23)+(24)	(26)
18	Kab. Aceh Barat Daya					
19	Kab. Aceh Jaya					
20	Kab. Nagan Raya	650.000	1.000.000	280.000	1.930.000	
21	Kab. Aceh Tamiang	2.007.846		280.000	2.287.846	
22	Kab. Bener Meriah	1.514.500		280.000	1.794.500	5.431.830
23	Kab. Pidie Jaya					
24	Kota Subulussalam	600.000		244.000	844.000	
25	Provinsi Sumatera Utara	19.256.700			19.256.700	
26	Kab. Asahan	2.849.900	1.451.701		4.301.601	
27	Kab. Dairi	650.000		280.000	930.000	
28	Kab. Deli Serdang		2.971.953	280.000	3.251.953	
29	Kab. Karo	1.834.716		290.000	2.124.716	
30	Kab. Labuhanbatu	882.000	6.432.459	280.000	7.594.459	
31	Kab. Langkat			280.000	280.000	
32	Kab. Mandailing Natal	649.440	69.416.775	250.000	70.316.215	
33	Kab. Nias	650.000		40.375	690.375	
34	Kab. Simalungun	1.765.400		39.999	1.805.399	15.364.122
35	Kab. Tapanuli Selatan					
36	Kab. Tapanuli Tengah	2.393.845		290.000	2.683.845	
37	Kab. Tapanuli Utara	2.590.000		280.000	2.870.000	9.838.397

*) Perubahan Pertama

**) Perubahan Kedua

***) Perubahan Ketiga

(PMK Nomor 94 Tahun 2021)

(PMK Nomor 162 Tahun 2021)

(PMK Nomor 118 Tahun 2022)

Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021

Tanggal Berlaku: 23 November 2021

Tanggal Berlaku: 25 Juli 2022

SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Dampaknya

2. DAK FISIK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Jalan		Air Minum		
		Tematik Pembangunan Infrastruktur Ekonomi Berkelanjutan	Subtotal Jalan	Tematik Penurunan Angka Kematian Ibu dan Stunting	Tematik Penanggulangan Kemiskinan	Subtotal Air Minum
(1)	(2)	(27)	(28)=(26)+(27)	(29)	(30)	(31)=(29)+(30)
18	Kab. Aceh Barat Daya				3.773.819	3.773.819
19	Kab. Aceh Jaya				4.159.827	4.159.827
20	Kab. Nagan Raya			2.138.222	3.833.653	5.971.875
21	Kab. Aceh Tamiang				5.212.467	5.212.467
22	Kab. Bener Meriah		5.431.830	9.192.282		9.192.282
23	Kab. Pidie Jaya				4.563.396	4.563.396
24	Kota Subulussalam			5.899.559		5.899.559
25	Provinsi Sumatera Utara	70.294.554	70.294.554			
26	Kab. Asahan				1.309.040	1.309.040
27	Kab. Dairi	10.972.878	10.972.878		4.210.429	4.210.429
28	Kab. Deli Serdang				3.703.099	3.703.099
29	Kab. Karo	4.121.974	4.121.974		1.726.893	1.726.893
30	Kab. Labuhanbatu				3.501.011	3.501.011
31	Kab. Langkat			1.509.729	817.500	2.327.229
32	Kab. Mandailing Natal			3.941.541	5.053.678	8.995.219
33	Kab. Nias	4.442.064	4.442.064	900.000	4.659.127	5.559.127
34	Kab. Simalungun		15.364.122		4.998.244	4.998.244
35	Kab. Tapanuli Selatan				3.576.800	3.576.800
36	Kab. Tapanuli Tengah			999.884	6.191.824	7.191.708
37	Kab. Tapanuli Utara		9.838.397		650.000	650.000

*) Perubahan Pertama

**) Perubahan Kedua

***) Perubahan Ketiga

(PMK Nomor 94 Tahun 2021)

(PMK Nomor 162 Tahun 2021)

(PMK Nomor 118 Tahun 2022)

Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021

Tanggal Berlaku: 23 November 2021

Tanggal Berlaku: 25 Juli 2022

SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Dampaknya

2. DAK FISIK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Sanitasi			Perumahan dan Permukiman	Irigasi
		Tematik Penurunan Angka Kematian Ibu dan Stunting	Tematik Penanggulangan Kemiskinan	Subtotal Sanitasi		
(1)	(2)	(32)	(33)	(34)=(32)+(33)	(35)	(36)
18	Kab. Aceh Barat Daya		2.413.981	2.413.981		2.293.000
19	Kab. Aceh Jaya		1.826.555	1.826.555		2.217.230
20	Kab. Nagan Raya					10.466.911
21	Kab. Aceh Tamiang		1.998.824	1.998.824	1.111.580	4.260.820
22	Kab. Bener Meriah	3.545.741	550.000	4.095.741		3.261.742
23	Kab. Pidie Jaya		2.170.445	2.170.445		5.500.000
24	Kota Subulussalam	8.602.235		8.602.235	1.017.016	
25	Provinsi Sumatera Utara					11.999.996
26	Kab. Asahan		466.955	466.955	1.350.061	3.867.000
27	Kab. Dairi		1.360.148	1.360.148	1.078.274	3.400.400
28	Kab. Deli Serdang	3.022.971		3.022.971	1.377.908	7.717.322
29	Kab. Karo		2.226.397	2.226.397	983.401	12.800.000
30	Kab. Labuhanbatu		2.885.682	2.885.682	2.424.649	3.348.499
31	Kab. Langkat				1.837.500	3.350.000
32	Kab. Mandailing Natal	3.954.864		3.954.864		5.255.000
33	Kab. Nias				1.022.410	7.434.000
34	Kab. Simalungun		2.768.449	2.768.449	1.176.000	6.788.848
35	Kab. Tapanuli Selatan		3.323.248	3.323.248		4.100.000
36	Kab. Tapanuli Tengah	2.708.813		2.708.813		6.660.000
37	Kab. Tapanuli Utara		1.049.845	1.049.845		9.544.000

*) Perubahan Pertama

**) Perubahan Kedua

***) Perubahan Ketiga

(PMK Nomor 94 Tahun 2021)

(PMK Nomor 162 Tahun 2021)

(PMK Nomor 118 Tahun 2022)

Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021

Tanggal Berlaku: 23 November 2021

Tanggal Berlaku: 25 Juli 2022

SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Dampaknya

2. DAK FISIK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Pertanian	Kelautan dan Perikanan	Industri Kecil dan Menengah	Pariwisata	Lingkungan Hidup
						Lingkungan Hidup Tematik Penurunan Angka Kematian Ibu dan Stunting
(1)	(2)	(37)	(38)	(39)	(40)	(41)
18	Kab. Aceh Barat Daya	3.105.000	1.037.200			
19	Kab. Aceh Jaya	2.550.000	1.323.000	12.237.068		
20	Kab. Nagan Raya	1.720.000	850.401			
21	Kab. Aceh Tamiang	3.255.000	1.344.000			
22	Kab. Bener Meriah	7.185.000	684.000			
23	Kab. Pidie Jaya	2.399.250	1.304.000			
24	Kota Subulussalam	1.903.935				
25	Provinsi Sumatera Utara	4.735.000	350.000			
26	Kab. Asahan	1.831.080	1.078.433			1.997.500
27	Kab. Dairi	2.762.560	605.000		4.462.323	
28	Kab. Deli Serdang	1.228.000	805.000	4.780.162		2.128.000
29	Kab. Karo			6.914.148	6.163.334	
30	Kab. Labuhanbatu	1.359.953	732.000			
31	Kab. Langkat	3.701.250	944.700	1.783.600		
32	Kab. Mandailing Natal	3.743.250	564.650			
33	Kab. Nias	3.080.000	523.400			
34	Kab. Simalungun	2.037.725	522.990	3.000.292	1.030.000	
35	Kab. Tapanuli Selatan	3.325.875	920.000			
36	Kab. Tapanuli Tengah		630.500			
37	Kab. Tapanuli Utara	1.700.000	735.860		5.103.335	

*) Perubahan Pertama

(PMK Nomor 94 Tahun 2021)

Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021

**) Perubahan Kedua

(PMK Nomor 162 Tahun 2021)

Tanggal Berlaku: 23 November 2021

***) Perubahan Ketiga

(PMK Nomor 118 Tahun 2022)

Tanggal Berlaku: 25 Juli 2022

SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Dampaknya

2. DAK FISIK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Lingkungan Hidup			TOTAL DAK PENUGASAN	TOTAL DAK FISIK
		Lingkungan Hidup Tematik Pembangunan Infrastruktur Ekonomi Berkelanjutan	Kehutanan Tematik Ketahanan Pangan	Subtotal Lingkungan Hidup		
(1)	(2)	(42)	(43)	(44)=(41)+(42)+(43)	(45)=(25)+(28)+(31)+(34)+(35)+(36)+(37)+(38)+(39)+(40)+(44)	(46)=(21)+(45)
18	Kab. Aceh Barat Daya				12.623.000	68.606.841
19	Kab. Aceh Jaya				24.313.680	94.962.436
20	Kab. Nagan Raya				20.939.187	88.666.040
21	Kab. Aceh Tamiang				19.470.537	52.542.235
22	Kab. Bener Meriah				31.645.095	87.941.188
23	Kab. Pidie Jaya				15.937.091	73.028.237
24	Kota Subulussalam				18.266.745	51.730.047
25	Provinsi Sumatera Utara		460.696	460.696	107.096.946	351.822.303
26	Kab. Asahan			1.997.500	16.201.670	73.337.836
27	Kab. Dairi	6.820.000		6.820.000	36.602.012	130.376.110
28	Kab. Deli Serdang			2.128.000	28.014.415	93.697.896
29	Kab. Karo				37.060.863	115.488.897
30	Kab. Labuhanbatu				21.846.253	71.658.955
31	Kab. Langkat				14.224.279	75.169.778
32	Kab. Mandailing Natal				92.829.198	149.435.057
33	Kab. Nias				22.751.376	56.935.295
34	Kab. Simalungun	3.590.000		3.590.000	43.082.069	127.099.088
35	Kab. Tapanuli Selatan				15.245.923	64.797.691
36	Kab. Tapanuli Tengah				19.874.866	87.573.541
37	Kab. Tapanuli Utara	3.590.000		3.590.000	35.081.437	94.755.681

*) Perubahan Pertama

**) Perubahan Kedua

***) Perubahan Ketiga

(PMK Nomor 94 Tahun 2021)

(PMK Nomor 162 Tahun 2021)

(PMK Nomor 118 Tahun 2022)

Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021

Tanggal Berlaku: 23 November 2021

Tanggal Berlaku: 25 Juli 2022

SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Dampaknya

1. DAK FISIK REGULER

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Pendidikan				
		PAUD	SD	SMP	SMA	SMK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
38	Kab. Toba		2.195.335	7.240.224		
39	Kota Binjai	222.020	25.685.229	13.864.315		
40	Kota Medan					
41	Kota Pematang Siantar	797.046	7.968.843	13.364.066		
42	Kota Sibolga		5.333.752	2.964.001		
43	Kota Tanjung Balai	727.210	2.418.595	13.806.683		
44	Kota Tebing Tinggi		10.386.458	2.421.377		
45	Kota Padangsidimpuan	243.969	20.276.509	7.478.474		
46	Kab. Pakpak Bharat	3.172.410	17.939.823	10.448.818		
47	Kab. Nias Selatan	824.042	23.784.623	26.726.875		
48	Kab. Humbang Hasundutan	221.979	15.809.885	7.705.428		
49	Kab. Serdang Bedagai	222.310	15.941.381	6.056.943		
50	Kab. Samosir		23.261.008	9.851.922		
51	Kab. Batu Bara		5.318.520	2.867.496		
52	Kab. Padang Lawas		9.615.000	1.397.944		
53	Kab. Padang Lawas Utara		13.506.173	3.595.628		
54	Kab. Labuhanbatu Selatan		19.065.045	3.049.562		
55	Kab. Labuhanbatu Utara	569.612	22.202.541	11.603.948		
56	Kab. Nias Utara	561.628	12.919.584	2.662.020		
57	Kab. Nias Barat	263.640	7.531.986	1.319.233		

*) Perubahan Pertama

**) Perubahan Kedua

***) Perubahan Ketiga

(PMK Nomor 94 Tahun 2021)

(PMK Nomor 162 Tahun 2021)

(PMK Nomor 118 Tahun 2022)

Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021

Tanggal Berlaku: 23 November 2021

Tanggal Berlaku: 25 Juli 2022

SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Dampaknya

1. DAK FISIK REGULER

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Pendidikan				Kesehatan dan KB
		SKB	SLB	Perpustakaan Daerah	Subtotal Pendidikan	Pelayanan Dasar
(1)	(2)	(8)	(9)	(10)	(11)=(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)+(9)+(10)	(12)
38	Kab. Toba	648.144			10.083.703	7.520.008
39	Kota Binjai	423.800			40.195.364	6.690.516
40	Kota Medan					13.069.500
41	Kota Pematang Siantar			498.840	22.628.795	2.368.682
42	Kota Sibolga			2.605.400	10.903.153	1.999.801
43	Kota Tanjung Balai				16.952.488	9.560.711
44	Kota Tebing Tinggi			581.621	13.389.456	8.674.000
45	Kota Padangsidempuan			300.000	28.298.952	3.448.374
46	Kab. Pakpak Bharat				31.561.051	1.488.485
47	Kab. Nias Selatan				51.335.540	30.569.739
48	Kab. Humbang Hasundutan				23.737.292	2.000.000
49	Kab. Serdang Bedagai	200.000			22.420.634	10.131.800
50	Kab. Samosir			10.000.000	43.112.930	2.000.000
51	Kab. Batu Bara			338.431	8.524.447	1.998.800
52	Kab. Padang Lawas				11.012.944	6.902.000
53	Kab. Padang Lawas Utara			200.000	17.301.801	11.721.537
54	Kab. Labuhanbatu Selatan				22.114.607	20.594.300
55	Kab. Labuhanbatu Utara			397.904	34.774.005	3.569.241
56	Kab. Nias Utara				16.143.232	18.400.000
57	Kab. Nias Barat				9.114.859	2.792.458

*) Perubahan Pertama

**) Perubahan Kedua

***) Perubahan Ketiga

(PMK Nomor 94 Tahun 2021)

(PMK Nomor 162 Tahun 2021)

(PMK Nomor 118 Tahun 2022)

Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021

Tanggal Berlaku: 23 November 2021

Tanggal Berlaku: 25 Juli 2022

SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Dampaknya

1. DAK FISIK REGULER

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Kesehatan dan KB				Subtotal Kesehatan dan KB
		Pelayanan Rujukan	Pelayanan Kefarmasian dan Bahan Habis Pakai	Peningkatan Kesiapan Sistem Kesehatan	Keluarga Berencana	
(1)	(2)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)=(12)+(13)+(14)+(15)+(16)
38	Kab. Toba	4.531.273	4.671.114	1.076.993		17.799.388
39	Kota Binjai	4.834.000	2.582.647	391.581	821.967	15.320.711
40	Kota Medan	7.310.912	8.084.465	1.987.275	1.260.437	31.712.589
41	Kota Pematang Siantar	4.707.102	2.815.590	526.000	1.385.100	11.802.474
42	Kota Sibolga	5.076.200	2.204.981		605.624	9.886.606
43	Kota Tanjung Balai	7.050.000	1.352.547	136.000	465.500	18.564.758
44	Kota Tebing Tinggi	8.219.286	1.837.921		302.812	19.034.019
45	Kota Padangsidimpuan	9.261.264	1.745.617	760.578	543.800	15.759.633
46	Kab. Pakpak Bharat	8.179.318	2.173.849		559.698	12.401.350
47	Kab. Nias Selatan		8.212.602	1.917.833	1.317.154	42.017.328
48	Kab. Humbang Hasundutan	4.000.000	2.070.577	391.427	1.393.693	9.855.697
49	Kab. Serdang Bedagai	6.433.860	5.597.492		662.149	22.825.301
50	Kab. Samosir	6.727.255	1.965.407		358.253	11.050.915
51	Kab. Batu Bara	3.000.000	3.234.544	541.385	1.423.217	10.197.946
52	Kab. Padang Lawas	6.733.208	3.483.928		1.432.301	18.551.437
53	Kab. Padang Lawas Utara	4.766.888	1.745.111		1.129.994	19.363.530
54	Kab. Labuhanbatu Selatan	26.277.545	2.632.739		1.301.083	50.805.667
55	Kab. Labuhanbatu Utara	13.107.626	2.803.724		598.348	20.078.939
56	Kab. Nias Utara	4.339.152	1.599.354	603.958	966.980	25.909.444
57	Kab. Nias Barat		4.548.278	190.000	1.427.868	8.958.604

*) Perubahan Pertama

**) Perubahan Kedua

***) Perubahan Ketiga

(PMK Nomor 94 Tahun 2021)

(PMK Nomor 162 Tahun 2021)

(PMK Nomor 118 Tahun 2022)

Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021

Tanggal Berlaku: 23 November 2021

Tanggal Berlaku: 25 Juli 2022

SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Dampaknya

1. DAK FISIK REGULER

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Jalan	Transportasi Perdesaan	Transportasi Laut	TOTAL DAK REGULER
(1)	(2)	(18)	(19)	(20)	(21)=(11)+(17)+(18)+(19)+(20)
38	Kab. Toba	34.019.264			61.902.355
39	Kota Binjai				55.516.075
40	Kota Medan				31.712.589
41	Kota Pematang Siantar				34.431.269
42	Kota Sibolga	5.353.025			26.142.784
43	Kota Tanjung Balai	6.648.195			42.165.441
44	Kota Tebing Tinggi	9.680.370			42.103.845
45	Kota Padangsidempuan	7.496.217			51.554.802
46	Kab. Pakpak Bharat	7.668.031			51.630.432
47	Kab. Nias Selatan	11.225.400	5.300.000		109.878.268
48	Kab. Humbang Hasundutan	8.347.170			41.940.159
49	Kab. Serdang Bedagai	35.023.044	5.544.570		85.813.549
50	Kab. Samosir	10.246.358			64.410.203
51	Kab. Batu Bara	8.019.865	4.000.000		30.742.258
52	Kab. Padang Lawas	11.031.870			40.596.251
53	Kab. Padang Lawas Utara	15.604.543			52.269.874
54	Kab. Labuhanbatu Selatan	10.138.287			83.058.561
55	Kab. Labuhanbatu Utara	16.120.590			70.973.534
56	Kab. Nias Utara	14.614.957	5.155.477		61.823.110
57	Kab. Nias Barat	11.216.660	5.641.843		34.931.966

*) Perubahan Pertama

**) Perubahan Kedua

***) Perubahan Ketiga

(PMK Nomor 94 Tahun 2021)

(PMK Nomor 162 Tahun 2021)

(PMK Nomor 118 Tahun 2022)

Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021

Tanggal Berlaku: 23 November 2021

Tanggal Berlaku: 25 Juli 2022

SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Dampaknya

2. DAK FISIK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Kesehatan dan KB				Jalan
		Penguatan Intervensi Stunting	Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi	Keluarga Berencana	Subtotal Kesehatan dan KB	Tematik Ketahanan Pangan
(1)	(2)	(22)	(23)	(24)	(25)=(22)+(23)+(24)	(26)
38	Kab. Toba					13.889.458
39	Kota Binjai					
40	Kota Medan	4.100.000		234.000	4.334.000	
41	Kota Pematang Siantar					
42	Kota Sibolga					
43	Kota Tanjung Balai					
44	Kota Tebing Tinggi					
45	Kota Padangsidimpuan	200.000		280.000	480.000	
46	Kab. Pakpak Bharat	299.850		170.000	469.850	
47	Kab. Nias Selatan	650.000	6.271.544	266.000	7.187.544	
48	Kab. Humbang Hasundutan	1.073.976		289.000	1.362.976	
49	Kab. Serdang Bedagai	340.000		250.000	590.000	14.689.571
50	Kab. Samosir					
51	Kab. Batu Bara	2.565.025		220.000	2.785.025	
52	Kab. Padang Lawas			280.000	280.000	
53	Kab. Padang Lawas Utara	1.677.900		280.000	1.957.900	
54	Kab. Labuhanbatu Selatan	2.897.054			2.897.054	
55	Kab. Labuhanbatu Utara	1.980.000		280.000	2.260.000	
56	Kab. Nias Utara			40.375	40.375	
57	Kab. Nias Barat		2.385.594	280.000	2.665.594	

*) Perubahan Pertama

**) Perubahan Kedua

***) Perubahan Ketiga

(PMK Nomor 94 Tahun 2021)

(PMK Nomor 162 Tahun 2021)

(PMK Nomor 118 Tahun 2022)

Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021

Tanggal Berlaku: 23 November 2021

Tanggal Berlaku: 25 Juli 2022

SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Dampaknya

2. DAK FISIK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Jalan		Air Minum		
		Tematik Pembangunan Infrastruktur Ekonomi Berkelanjutan	Subtotal Jalan	Tematik Penurunan Angka Kematian Ibu dan Stunting	Tematik Penanggulangan Kemiskinan	Subtotal Air Minum
(1)	(2)	(27)	(28)=(26)+(27)	(29)	(30)	(31)=(29)+(30)
38	Kab. Toba		13.889.458		2.727.961	2.727.961
39	Kota Binjai					
40	Kota Medan					
41	Kota Pematang Siantar					
42	Kota Sibolga				360.071	360.071
43	Kota Tanjung Balai				1.000.000	1.000.000
44	Kota Tebing Tinggi				4.769.366	4.769.366
45	Kota Padangsidempuan				975.000	975.000
46	Kab. Pakpak Bharat	2.322.310	2.322.310	5.434.000	4.331.000	9.765.000
47	Kab. Nias Selatan	3.939.715	3.939.715		5.861.509	5.861.509
48	Kab. Humbang Hasundutan	3.065.462	3.065.462		2.275.201	2.275.201
49	Kab. Serdang Bedagai		14.689.571		4.507.579	4.507.579
50	Kab. Samosir	3.517.556	3.517.556		3.893.930	3.893.930
51	Kab. Batu Bara	2.916.047	2.916.047		4.378.904	4.378.904
52	Kab. Padang Lawas			989.885	4.942.768	5.932.653
53	Kab. Padang Lawas Utara			799.907	2.988.950	3.788.857
54	Kab. Labuhanbatu Selatan				2.130.335	2.130.335
55	Kab. Labuhanbatu Utara				4.026.664	4.026.664
56	Kab. Nias Utara	4.805.204	4.805.204			
57	Kab. Nias Barat			5.149.655	3.442.421	8.592.076

*) Perubahan Pertama

**) Perubahan Kedua

***) Perubahan Ketiga

(PMK Nomor 94 Tahun 2021)

(PMK Nomor 162 Tahun 2021)

(PMK Nomor 118 Tahun 2022)

Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021

Tanggal Berlaku: 23 November 2021

Tanggal Berlaku: 25 Juli 2022

SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Dampaknya

2. DAK FISIK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Sanitasi			Perumahan dan Permukiman	Irigasi
		Tematik Penurunan Angka Kematian Ibu dan Stunting	Tematik Penanggulangan Kemiskinan	Subtotal Sanitasi		
(1)	(2)	(32)	(33)	(34)=(32)+(33)	(35)	(36)
38	Kab. Toba		707.535	707.535		1.497.541
39	Kota Binjai		1.240.568	1.240.568		
40	Kota Medan		3.432.000	3.432.000		
41	Kota Pematang Siantar		1.219.887	1.219.887	2.141.433	
42	Kota Sibolga		1.729.033	1.729.033	1.342.142	
43	Kota Tanjung Balai		1.754.999	1.754.999	1.196.106	
44	Kota Tebing Tinggi		1.688.019	1.688.019	1.527.803	
45	Kota Padangsidempuan		2.294.531	2.294.531	974.888	4.352.560
46	Kab. Pakpak Bharat	1.142.000		1.142.000		5.429.999
47	Kab. Nias Selatan	7.273.314	4.581.827	11.855.141	2.613.771	6.580.000
48	Kab. Humbang Hasundutan		1.695.211	1.695.211		3.227.100
49	Kab. Serdang Bedagai		2.332.500	2.332.500	1.426.688	5.087.900
50	Kab. Samosir		1.322.323	1.322.323		2.363.000
51	Kab. Batu Bara				2.600.489	3.352.400
52	Kab. Padang Lawas					5.500.000
53	Kab. Padang Lawas Utara	5.000.403		5.000.403		3.900.000
54	Kab. Labuhanbatu Selatan		2.412.734	2.412.734		
55	Kab. Labuhanbatu Utara					661.914
56	Kab. Nias Utara	2.638.455		2.638.455	992.545	2.831.349
57	Kab. Nias Barat	2.749.313	2.242.206	4.991.519	1.145.803	

*) Perubahan Pertama

**) Perubahan Kedua

***) Perubahan Ketiga

(PMK Nomor 94 Tahun 2021)

(PMK Nomor 162 Tahun 2021)

(PMK Nomor 118 Tahun 2022)

Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021

Tanggal Berlaku: 23 November 2021

Tanggal Berlaku: 25 Juli 2022

SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Dampaknya

2. DAK FISIK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Pertanian	Kelautan dan Perikanan	Industri Kecil dan Menengah	Pariwisata	Lingkungan Hidup
						Lingkungan Hidup Tematik Penurunan Angka Kematian Ibu dan Stunting
(1)	(2)	(37)	(38)	(39)	(40)	(41)
38	Kab. Toba	1.806.795	495.000	292.228	10.623.043	
39	Kota Binjai		640.000			
40	Kota Medan		520.000			
41	Kota Pematang Siantar					3.230.000
42	Kota Sibolga		555.000	3.750.365		2.520.000
43	Kota Tanjung Balai					
44	Kota Tebing Tinggi					
45	Kota Padangsidempuan					
46	Kab. Pakpak Bharat	2.550.000			928.000	
47	Kab. Nias Selatan	5.300.000	1.419.000		10.012.313	
48	Kab. Humbang Hasundutan	2.820.000	660.000		4.303.114	
49	Kab. Serdang Bedagai	1.980.000	752.169	2.349.275		
50	Kab. Samosir		510.842		4.942.269	
51	Kab. Batu Bara	2.015.645	1.709.000			
52	Kab. Padang Lawas		344.000			
53	Kab. Padang Lawas Utara			5.500.535		
54	Kab. Labuhanbatu Selatan	1.797.081				
55	Kab. Labuhanbatu Utara	1.540.000				
56	Kab. Nias Utara	2.923.900	1.315.000			
57	Kab. Nias Barat	2.688.000	735.000			

*) Perubahan Pertama

(PMK Nomor 94 Tahun 2021)

Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021

**) Perubahan Kedua

(PMK Nomor 162 Tahun 2021)

Tanggal Berlaku: 23 November 2021

***) Perubahan Ketiga

(PMK Nomor 118 Tahun 2022)

Tanggal Berlaku: 25 Juli 2022

SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Dampaknya

2. DAK FISIK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Lingkungan Hidup			TOTAL DAK PENUGASAN	TOTAL DAK FISIK
		Lingkungan Hidup Tematik Pembangunan Infrastruktur Ekonomi Berkelanjutan	Kehutanan Tematik Ketahanan Pangan	Subtotal Lingkungan Hidup		
(1)	(2)	(42)	(43)	(44)=(41)+(42)+(43)	(45)=(25)+(28)+(31)+(34)+(35)+(36)+(37)+(38)+(39)+(40)+(44)	(46)=(21)+(45)
38	Kab. Toba	2.800.000		2.800.000	34.839.561	96.741.916
39	Kota Binjai				1.880.568	57.396.643
40	Kota Medan				8.286.000	39.998.589
41	Kota Pematang Siantar			3.230.000	6.591.320	41.022.589
42	Kota Sibolga			2.520.000	10.256.611	36.399.395
43	Kota Tanjung Balai				3.951.105	46.116.546
44	Kota Tebing Tinggi				7.985.188	50.089.033
45	Kota Padangsidempuan				9.076.979	60.631.781
46	Kab. Pakpak Bharat				22.607.159	74.237.591
47	Kab. Nias Selatan				54.768.993	164.647.261
48	Kab. Humbang Hasundutan	3.090.000		3.090.000	22.499.064	64.439.223
49	Kab. Serdang Bedagai				33.715.682	119.529.231
50	Kab. Samosir	3.614.000		3.614.000	20.163.920	84.574.123
51	Kab. Batu Bara				19.757.510	50.499.768
52	Kab. Padang Lawas				12.056.653	52.652.904
53	Kab. Padang Lawas Utara				20.147.695	72.417.569
54	Kab. Labuhanbatu Selatan				9.237.204	92.295.765
55	Kab. Labuhanbatu Utara				8.488.578	79.462.112
56	Kab. Nias Utara				15.546.828	77.369.938
57	Kab. Nias Barat				20.817.992	55.749.958

*) Perubahan Pertama

**) Perubahan Kedua

***) Perubahan Ketiga

(PMK Nomor 94 Tahun 2021)

(PMK Nomor 162 Tahun 2021)

(PMK Nomor 118 Tahun 2022)

Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021

Tanggal Berlaku: 23 November 2021

Tanggal Berlaku: 25 Juli 2022

SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Dampaknya

1. DAK FISIK REGULER

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Pendidikan				
		PAUD	SD	SMP	SMA	SMK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
58	Kota Gunungsitoli	301.614	11.683.747	9.670.524		
59	Provinsi Sumatera Barat				35.609.062	85.201.207
60	Kab. Lima Puluh Kota		6.893.893	2.071.416		
61	Kab. Agam	487.638	15.005.605	1.583.510		
62	Kab. Kepulauan Mentawai		7.133.772	6.303.091		
63	Kab. Padang Pariaman	1.301.390	15.961.965	13.806.203		
64	Kab. Pasaman	295.948	8.002.497	4.037.760		
65	Kab. Pesisir Selatan	623.092	15.406.472	5.242.604		
66	Kab. Sijunjung	322.670	20.387.617	10.287.705		
67	Kab. Solok		6.387.909	4.786.908		
68	Kab. Tanah Datar	369.689	6.927.774	5.756.426		
69	Kota Bukit Tinggi		2.591.832	2.979.428		
70	Kota Padang Panjang	283.812	7.079.164	1.985.333		
71	Kota Padang	231.875	4.987.906	19.751.367		
72	Kota Payakumbuh		2.431.452	10.211.146		
73	Kota Sawahlunto	205.328	6.833.500	1.109.928		
74	Kota Solok	228.037	2.507.853	5.800.075		
75	Kota Pariaman	346.183	4.284.205	1.432.211		
76	Kab. Pasaman Barat	602.134	6.221.293	1.899.069		
77	Kab. Dharmasraya	1.129.685	28.517.453	10.193.060		

*) Perubahan Pertama

**) Perubahan Kedua

***) Perubahan Ketiga

(PMK Nomor 94 Tahun 2021)

(PMK Nomor 162 Tahun 2021)

(PMK Nomor 118 Tahun 2022)

Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021

Tanggal Berlaku: 23 November 2021

Tanggal Berlaku: 25 Juli 2022

SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Dampaknya

1. DAK FISIK REGULER

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Pendidikan				Kesehatan dan KB
		SKB	SLB	Perpustakaan Daerah	Subtotal Pendidikan	Pelayanan Dasar
(1)	(2)	(8)	(9)	(10)	(11)=(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)+(9)+(10)	(12)
58	Kota Gunungsitoli				21.655.885	11.282.920
59	Provinsi Sumatera Barat		7.407.020	700.000	128.917.289	
60	Kab. Lima Puluh Kota	198.984		10.000.000	19.164.293	8.423.253
61	Kab. Agam			9.500.000	26.576.753	4.315.000
62	Kab. Kepulauan Mentawai				13.436.863	820.000
63	Kab. Padang Pariaman	518.913			31.588.471	6.720.000
64	Kab. Pasaman			300.000	12.636.205	6.319.861
65	Kab. Pesisir Selatan	200.000			21.472.168	13.046.277
66	Kab. Sijunjung	201.800		500.000	31.699.792	3.136.088
67	Kab. Solok			300.000	11.474.817	5.397.201
68	Kab. Tanah Datar			500.000	13.553.889	17.078.860
69	Kota Bukit Tinggi				5.571.260	1.651.506
70	Kota Padang Panjang				9.348.309	2.000.000
71	Kota Padang	979.927			25.951.075	6.003.000
72	Kota Payakumbuh	1.189.244			13.831.842	2.000.000
73	Kota Sawahlunto			2.250.000	10.398.756	1.996.498
74	Kota Solok	357.500			8.893.465	3.391.261
75	Kota Pariaman	243.738			6.306.337	3.371.275
76	Kab. Pasaman Barat			460.500	9.182.996	6.511.007
77	Kab. Dharmasraya			500.000	40.340.198	9.635.455

*) Perubahan Pertama

**) Perubahan Kedua

***) Perubahan Ketiga

(PMK Nomor 94 Tahun 2021)

(PMK Nomor 162 Tahun 2021)

(PMK Nomor 118 Tahun 2022)

Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021

Tanggal Berlaku: 23 November 2021

Tanggal Berlaku: 25 Juli 2022

SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Dampaknya

1. DAK FISIK REGULER

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Kesehatan dan KB				Subtotal Kesehatan dan KB
		Pelayanan Rujukan	Pelayanan Kefarmasian dan Bahan Habis Pakai	Peningkatan Kesiapan Sistem Kesehatan	Keluarga Berencana	
(1)	(2)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)=(12)+(13)+(14)+(15)+(16)
58	Kota Gunungsitoli		4.244.607		1.106.172	16.633.699
59	Provinsi Sumatera Barat	29.228.663		13.382.300		42.610.963
60	Kab. Lima Puluh Kota	6.346.601	3.960.269		996.554	19.726.677
61	Kab. Agam		7.553.683		1.514.061	13.382.744
62	Kab. Kepulauan Mentawai	1.050.000	4.679.203		304.174	6.853.377
63	Kab. Padang Pariaman	19.867.576	5.599.560	4.567.694	1.068.202	37.823.032
64	Kab. Pasaman	7.285.274	4.810.037	3.000.000	1.383.851	22.799.023
65	Kab. Pesisir Selatan	5.116.517	4.057.968	764.000	1.488.826	24.473.588
66	Kab. Sijunjung	2.969.801	2.463.179	1.001.834	955.425	10.526.327
67	Kab. Solok	2.550.000	3.220.605	2.573.088	1.091.991	14.832.885
68	Kab. Tanah Datar	25.000.000	6.022.831		1.143.620	49.245.311
69	Kota Bukit Tinggi		750.648	2.830.263	288.347	5.520.764
70	Kota Padang Panjang	10.227.641	501.498		207.199	12.936.338
71	Kota Padang	7.499.815	3.767.823		1.347.514	18.618.152
72	Kota Payakumbuh	3.000.000	2.169.644	390.000	534.463	8.094.107
73	Kota Sawahlunto	8.148.000	1.974.732		601.788	12.721.018
74	Kota Solok		1.953.859	4.014.639	1.341.306	10.701.065
75	Kota Pariaman	3.000.000	1.627.884		1.282.914	9.282.073
76	Kab. Pasaman Barat	3.000.000	4.412.020		1.322.658	15.245.685
77	Kab. Dharmasraya	37.982.706	2.212.563	4.407.796	1.145.942	55.384.462

*) Perubahan Pertama

(PMK Nomor 94 Tahun 2021)

Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021

**) Perubahan Kedua

(PMK Nomor 162 Tahun 2021)

Tanggal Berlaku: 23 November 2021

***) Perubahan Ketiga

(PMK Nomor 118 Tahun 2022)

Tanggal Berlaku: 25 Juli 2022

SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Dampaknya

1. DAK FISIK REGULER

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Jalan	Transportasi Perdesaan	Transportasi Laut	TOTAL DAK REGULER
(1)	(2)	(18)	(19)	(20)	(21)=(11)+(17)+(18)+(19)+(20)
58	Kota Gunungsitoli	10.077.110			48.366.694
59	Provinsi Sumatera Barat	16.270.818			187.799.070
60	Kab. Lima Puluh Kota	8.423.962			47.314.932
61	Kab. Agam	15.712.594			55.672.091
62	Kab. Kepulauan Mentawai	22.969.790	5.300.000		48.560.030
63	Kab. Padang Pariaman	19.349.947			88.761.450
64	Kab. Pasaman	14.585.694			50.020.922
65	Kab. Pesisir Selatan	31.892.224	3.404.561		81.242.541
66	Kab. Sijunjung	13.845.022			56.071.141
67	Kab. Solok	12.623.980			38.931.682
68	Kab. Tanah Datar	11.798.633			74.597.833
69	Kota Bukit Tinggi	7.489.330			18.581.354
70	Kota Padang Panjang	3.281.664			25.566.311
71	Kota Padang	12.216.056			56.785.283
72	Kota Payakumbuh	8.831.901			30.757.850
73	Kota Sawahlunto	7.565.445			30.685.219
74	Kota Solok	6.619.569			26.214.099
75	Kota Pariaman	7.865.817			23.454.227
76	Kab. Pasaman Barat	16.796.184	5.155.477		46.380.342
77	Kab. Dharmasraya	16.512.715			112.237.375

*) Perubahan Pertama

**) Perubahan Kedua

***) Perubahan Ketiga

(PMK Nomor 94 Tahun 2021)

(PMK Nomor 162 Tahun 2021)

(PMK Nomor 118 Tahun 2022)

Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021

Tanggal Berlaku: 23 November 2021

Tanggal Berlaku: 25 Juli 2022

SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Dampaknya

2. DAK FISIK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Kesehatan dan KB			Jalan	
		Penguatan Intervensi Stunting	Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi	Keluarga Berencana	Subtotal Kesehatan dan KB	Tematik Ketahanan Pangan
(1)	(2)	(22)	(23)	(24)	(25)=(22)+(23)+(24)	(26)
58	Kota Gunungsitoli			258.000	258.000	
59	Provinsi Sumatera Barat	6.301.012			6.301.012	39.692.057
60	Kab. Lima Puluh Kota			315.000	315.000	7.181.312
61	Kab. Agam	1.752.901	19.674.683	405.999	21.833.583	10.080.000
62	Kab. Kepulauan Mentawai		9.155.021		9.155.021	
63	Kab. Padang Pariaman	2.425.000		280.000	2.705.000	8.772.769
64	Kab. Pasaman			280.000	280.000	8.751.917
65	Kab. Pesisir Selatan	1.429.325	17.699.971	280.000	19.409.296	13.839.968
66	Kab. Sijunjung	64.863	16.452.800	280.000	16.797.663	
67	Kab. Solok	2.835.000	25.156.534	280.000	28.271.534	7.938.575
68	Kab. Tanah Datar					8.839.176
69	Kota Bukit Tinggi					
70	Kota Padang Panjang					
71	Kota Padang	2.657.400	2.584.331	116.000	5.357.731	
72	Kota Payakumbuh					
73	Kota Sawahlunto					
74	Kota Solok					
75	Kota Pariaman					
76	Kab. Pasaman Barat		29.733.363	280.000	30.013.363	
77	Kab. Dharmasraya					

*) Perubahan Pertama

**) Perubahan Kedua

***) Perubahan Ketiga

(PMK Nomor 94 Tahun 2021)

(PMK Nomor 162 Tahun 2021)

(PMK Nomor 118 Tahun 2022)

Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021

Tanggal Berlaku: 23 November 2021

Tanggal Berlaku: 25 Juli 2022

SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Dampaknya

2. DAK FISIK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Jalan		Air Minum		
		Tematik Pembangunan Infrastruktur Ekonomi Berkelanjutan	Subtotal Jalan	Tematik Penurunan Angka Kematian Ibu dan Stunting	Tematik Penanggulangan Kemiskinan	Subtotal Air Minum
(1)	(2)	(27)	(28)=(26)+(27)	(29)	(30)	(31)=(29)+(30)
58	Kota Gunungsitoli				2.988.950	2.988.950
59	Provinsi Sumatera Barat		39.692.057			
60	Kab. Lima Puluh Kota		7.181.312	1.671.807		1.671.807
61	Kab. Agam		10.080.000		5.775.514	5.775.514
62	Kab. Kepulauan Mentawai	7.068.068	7.068.068		3.607.834	3.607.834
63	Kab. Padang Pariaman		8.772.769		3.529.577	3.529.577
64	Kab. Pasaman		8.751.917		5.079.981	5.079.981
65	Kab. Pesisir Selatan		13.839.968		6.380.645	6.380.645
66	Kab. Sijunjung				6.020.031	6.020.031
67	Kab. Solok		7.938.575	7.549.122	3.261.854	10.810.976
68	Kab. Tanah Datar		8.839.176		4.462.626	4.462.626
69	Kota Bukit Tinggi					
70	Kota Padang Panjang				2.188.435	2.188.435
71	Kota Padang				4.460.535	4.460.535
72	Kota Payakumbuh				1.300.000	1.300.000
73	Kota Sawahlunto	2.760.374	2.760.374		1.297.567	1.297.567
74	Kota Solok				3.846.589	3.846.589
75	Kota Pariaman				5.011.951	5.011.951
76	Kab. Pasaman Barat			5.579.683	5.810.768	11.390.451
77	Kab. Dharmasraya				5.387.463	5.387.463

*) Perubahan Pertama

**) Perubahan Kedua

***) Perubahan Ketiga

(PMK Nomor 94 Tahun 2021)

(PMK Nomor 162 Tahun 2021)

(PMK Nomor 118 Tahun 2022)

Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021

Tanggal Berlaku: 23 November 2021

Tanggal Berlaku: 25 Juli 2022

SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Dampaknya

2. DAK FISIK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Sanitasi			Perumahan dan Permukiman	Irigasi
		Tematik Penurunan Angka Kematian Ibu dan Stunting	Tematik Penanggulangan Kemiskinan	Subtotal Sanitasi		
(1)	(2)	(32)	(33)	(34)=(32)+(33)	(35)	(36)
58	Kota Gunungsitoli	4.341.072		4.341.072		5.499.222
59	Provinsi Sumatera Barat					28.146.761
60	Kab. Lima Puluh Kota	8.681.885		8.681.885		10.123.370
61	Kab. Agam		350.000	350.000	2.877.661	11.897.300
62	Kab. Kepulauan Mentawai		1.666.313	1.666.313	1.668.995	6.324.289
63	Kab. Padang Pariaman		634.000	634.000		9.655.000
64	Kab. Pasaman	5.772.559		5.772.559		2.745.490
65	Kab. Pesisir Selatan		3.055.157	3.055.157		5.749.096
66	Kab. Sijunjung		2.259.110	2.259.110	1.120.168	2.202.709
67	Kab. Solok	1.636.496		1.636.496		3.789.840
68	Kab. Tanah Datar		1.366.274	1.366.274		15.382.500
69	Kota Bukit Tinggi				477.750	1.960.540
70	Kota Padang Panjang		1.519.681	1.519.681	1.083.955	687.500
71	Kota Padang		3.686.374	3.686.374	853.355	7.024.000
72	Kota Payakumbuh		1.270.380	1.270.380	1.251.662	4.441.712
73	Kota Sawahlunto		1.171.092	1.171.092	1.425.027	415.000
74	Kota Solok		1.603.538	1.603.538	2.405.715	2.854.550
75	Kota Pariaman		1.599.853	1.599.853	1.027.395	7.203.856
76	Kab. Pasaman Barat	5.204.965	3.495.929	8.700.894	1.442.743	5.568.780
77	Kab. Dharmasraya		2.105.225	2.105.225		2.631.300

*) Perubahan Pertama

**) Perubahan Kedua

***) Perubahan Ketiga

(PMK Nomor 94 Tahun 2021)

(PMK Nomor 162 Tahun 2021)

(PMK Nomor 118 Tahun 2022)

Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021

Tanggal Berlaku: 23 November 2021

Tanggal Berlaku: 25 Juli 2022

SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Dampaknya

2. DAK FISIK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Pertanian	Kelautan dan Perikanan	Industri Kecil dan Menengah	Pariwisata	Lingkungan Hidup
						Lingkungan Hidup Tematik Penurunan Angka Kematian Ibu dan Stunting
(1)	(2)	(37)	(38)	(39)	(40)	(41)
58	Kota Gunungsitoli	1.224.009	1.385.000			
59	Provinsi Sumatera Barat	4.413.698	8.725.000			
60	Kab. Lima Puluh Kota	2.258.494	1.247.600	600.058		
61	Kab. Agam	4.640.000	1.299.850		9.576.133	
62	Kab. Kepulauan Mentawai	2.855.000	1.060.000	1.170.113		
63	Kab. Padang Pariaman	3.496.500	1.235.300	19.001.851	1.333.375	
64	Kab. Pasaman	1.780.000	1.352.000			
65	Kab. Pesisir Selatan	1.197.000	1.569.035	15.545.824	3.291.966	
66	Kab. Sijunjung	2.127.355		1.270.123	4.493.486	
67	Kab. Solok	2.690.000	692.041		4.568.886	
68	Kab. Tanah Datar	2.720.000	1.537.500	2.480.241	7.869.121	
69	Kota Bukit Tinggi				179.501	
70	Kota Padang Panjang		526.000		1.897.013	
71	Kota Padang	804.980	840.000	27.605.121	8.483.654	1.380.000
72	Kota Payakumbuh			5.019.949		
73	Kota Sawahlunto				4.695.617	
74	Kota Solok				4.589.238	4.337.000
75	Kota Pariaman		1.185.136			
76	Kab. Pasaman Barat	2.740.000	1.155.000			
77	Kab. Dharmasraya	3.040.467	1.252.000			

*) Perubahan Pertama

**) Perubahan Kedua

***) Perubahan Ketiga

(PMK Nomor 94 Tahun 2021)

(PMK Nomor 162 Tahun 2021)

(PMK Nomor 118 Tahun 2022)

Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021

Tanggal Berlaku: 23 November 2021

Tanggal Berlaku: 25 Juli 2022

SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Dampaknya

2. DAK FISIK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Lingkungan Hidup			TOTAL DAK PENUGASAN	TOTAL DAK FISIK
		Lingkungan Hidup Tematik Pembangunan Infrastruktur Ekonomi Berkelanjutan	Kehutanan Tematik Ketahanan Pangan	Subtotal Lingkungan Hidup		
(1)	(2)	(42)	(43)	(44)=(41)+(42)+(43)	(45)=(25)+(28)+(31)+(34)+(35)+(36)+(37)+(38)+(39)+(40)+(44)	(46)=(21)+(45)
58	Kota Gunungsitoli				15.696.253	64.062.947
59	Provinsi Sumatera Barat		5.167.416	5.167.416	92.445.944	280.245.014
60	Kab. Lima Puluh Kota				32.079.526	79.394.458
61	Kab. Agam				68.330.041	124.002.132
62	Kab. Kepulauan Mentawai				34.575.633	83.135.663
63	Kab. Padang Pariaman				50.363.372	139.124.822
64	Kab. Pasaman				25.761.947	75.782.869
65	Kab. Pesisir Selatan				70.037.987	151.280.528
66	Kab. Sijunjung				36.290.645	92.361.786
67	Kab. Solok				60.398.348	99.330.030
68	Kab. Tanah Datar				44.657.438	119.255.271
69	Kota Bukit Tinggi				2.617.791	21.199.145
70	Kota Padang Panjang				7.902.584	33.468.895
71	Kota Padang			1.380.000	60.495.750	117.281.033
72	Kota Payakumbuh				13.283.703	44.041.553
73	Kota Sawahlunto				11.764.677	42.449.896
74	Kota Solok			4.337.000	19.636.630	45.850.729
75	Kota Pariaman				16.028.191	39.482.418
76	Kab. Pasaman Barat				61.011.231	107.391.573
77	Kab. Dharmasraya				14.416.455	126.653.830

*) Perubahan Pertama

**) Perubahan Kedua

***) Perubahan Ketiga

(PMK Nomor 94 Tahun 2021)

(PMK Nomor 162 Tahun 2021)

(PMK Nomor 118 Tahun 2022)

Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021

Tanggal Berlaku: 23 November 2021

Tanggal Berlaku: 25 Juli 2022

SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Dampaknya

1. DAK FISIK REGULER

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Pendidikan				
		PAUD	SD	SMP	SMA	SMK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
78	Kab. Solok Selatan	1.965.403	13.149.123	5.991.207		
79	Provinsi Riau				65.046.450	103.967.683
80	Kab. Bengkalis	1.769.821	9.648.862	22.090.577		
81	Kab. Indragiri Hilir	2.403.303	9.534.802	14.946.262		
82	Kab. Indragiri Hulu	483.441	14.365.479	12.496.339		
83	Kab. Kampar	342.521	25.238.194	22.018.665		
84	Kab. Kuantan Singingi	263.239	7.178.319	13.519.007		
85	Kab. Pelalawan	1.386.442	26.021.490	8.503.636		
86	Kab. Rokan Hilir	852.276	23.247.106	27.434.082		
87	Kab. Rokan Hulu	3.922.378	25.608.023	17.477.631		
88	Kab. Siak	1.425.894	14.177.213	17.694.979		
89	Kota Dumai	1.265.568	14.564.789	8.768.815		
90	Kota Pekanbaru	1.613.573	13.418.540	6.559.201		
91	Kab. Kepulauan Meranti	2.784.027	26.074.617	10.458.136		
92	Provinsi Jambi				36.524.871	85.988.530
93	Kab. Batanghari		16.558.634	2.203.971		
94	Kab. Bungo	721.042	6.923.110	2.871.547		
95	Kab. Kerinci	1.124.500	8.225.630	12.040.417		
96	Kab. Merangin	3.022.066	19.580.442	7.054.518		
97	Kab. Muaro Jambi	510.445	8.421.258	17.962.893		

*) Perubahan Pertama

(PMK Nomor 94 Tahun 2021)

Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021

**) Perubahan Kedua

(PMK Nomor 162 Tahun 2021)

Tanggal Berlaku: 23 November 2021

***) Perubahan Ketiga

(PMK Nomor 118 Tahun 2022)

Tanggal Berlaku: 25 Juli 2022

SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Dampaknya

1. DAK FISIK REGULER

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Pendidikan				Kesehatan dan KB
		SKB	SLB	Perpustakaan Daerah	Subtotal Pendidikan	Pelayanan Dasar
(1)	(2)	(8)	(9)	(10)	(11)=(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)+(9)+(10)	(12)
78	Kab. Solok Selatan	2.183.000		200.000	23.488.733	1.853.912
79	Provinsi Riau		2.054.470	1.000.000	172.068.603	
80	Kab. Bengkalis				33.509.260	1.595.794
81	Kab. Indragiri Hilir			10.000.000	36.884.367	16.923.340
82	Kab. Indragiri Hulu	436.000			27.781.259	14.853.700
83	Kab. Kampar			396.563	47.995.943	19.700.825
84	Kab. Kuantan Singingi			118.250	21.078.815	20.173.491
85	Kab. Pelalawan				35.911.568	18.839.635
86	Kab. Rokan Hilir				51.533.464	15.969.100
87	Kab. Rokan Hulu				47.008.032	19.498.000
88	Kab. Siak			350.000	33.648.086	8.347.783
89	Kota Dumai			499.950	25.099.122	7.237.157
90	Kota Pekanbaru	445.000		300.000	22.336.314	1.650.000
91	Kab. Kepulauan Meranti			199.000	39.515.780	4.450.000
92	Provinsi Jambi		1.940.890	4.254.002	128.708.293	
93	Kab. Batanghari			10.000.000	28.762.605	31.122.175
94	Kab. Bungo			496.700	11.012.399	5.427.466
95	Kab. Kerinci				21.390.547	3.711.050
96	Kab. Merangin	1.311.212		300.000	31.268.238	14.518.480
97	Kab. Muaro Jambi				26.894.596	5.092.125

*) Perubahan Pertama

**) Perubahan Kedua

***) Perubahan Ketiga

(PMK Nomor 94 Tahun 2021)

(PMK Nomor 162 Tahun 2021)

(PMK Nomor 118 Tahun 2022)

Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021

Tanggal Berlaku: 23 November 2021

Tanggal Berlaku: 25 Juli 2022

SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Dampaknya

1. DAK FISIK REGULER

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Kesehatan dan KB				Subtotal Kesehatan dan KB
		Pelayanan Rujukan	Pelayanan Kefarmasian dan Bahan Habis Pakai	Peningkatan Kesiapan Sistem Kesehatan	Keluarga Berencana	
(1)	(2)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)=(12)+(13)+(14)+(15)+(16)
78	Kab. Solok Selatan	3.000.000	2.049.867		1.166.836	8.070.615
79	Provinsi Riau	24.594.479		1.756.404		26.350.883
80	Kab. Bengkalis	18.553.709	3.993.419	299.934	1.096.482	25.539.338
81	Kab. Indragiri Hilir	29.808.758	4.304.077	1.315.082	418.587	52.769.844
82	Kab. Indragiri Hulu	9.008.168	4.073.485	267.216	1.405.048	29.607.617
83	Kab. Kampar	13.295.713	5.860.464	2.007.319	1.154.698	42.019.019
84	Kab. Kuantan Singingi		2.074.659	344.657	1.488.826	24.081.633
85	Kab. Pelalawan		2.059.780		1.024.413	21.923.828
86	Kab. Rokan Hilir	5.200.000	5.449.830	700.000	1.140.793	28.459.723
87	Kab. Rokan Hulu	11.067.327	7.784.526	3.769.000	1.136.302	43.255.155
88	Kab. Siak	17.801.188	4.192.830	1.472.959	1.223.361	33.038.121
89	Kota Dumai	3.000.000	3.472.953	4.116.621	1.134.074	18.960.805
90	Kota Pekanbaru	11.467.922	5.555.408	1.318.561	1.298.534	21.290.425
91	Kab. Kepulauan Meranti		2.858.415	332.113	730.080	8.370.608
92	Provinsi Jambi	15.666.342	548.542	7.685.772		23.900.656
93	Kab. Batanghari	27.293.759	4.101.716		1.261.717	63.779.367
94	Kab. Bungo	4.054.428	4.327.578	4.942.980	1.145.639	19.898.091
95	Kab. Kerinci	3.000.000	3.539.758	2.890.000	1.059.842	14.200.650
96	Kab. Merangin	3.000.000	4.373.808	5.429.579	1.261.717	28.583.584
97	Kab. Muaro Jambi	8.246.075	3.051.696	610.556	1.261.717	18.262.169

*) Perubahan Pertama

**) Perubahan Kedua

***) Perubahan Ketiga

(PMK Nomor 94 Tahun 2021)

(PMK Nomor 162 Tahun 2021)

(PMK Nomor 118 Tahun 2022)

Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021

Tanggal Berlaku: 23 November 2021

Tanggal Berlaku: 25 Juli 2022

SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Dampaknya

1. DAK FISIK REGULER

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Jalan	Transportasi Perdesaan	Transportasi Laut	TOTAL DAK REGULER
(1)	(2)	(18)	(19)	(20)	(21)=(11)+(17)+(18)+(19)+(20)
78	Kab. Solok Selatan	11.343.941	6.000.000		48.903.289
79	Provinsi Riau	21.783.305			220.202.791
80	Kab. Bengkalis	15.097.197	2.452.504	3.368.212	79.966.511
81	Kab. Indragiri Hilir	11.303.605			100.957.816
82	Kab. Indragiri Hulu	13.889.288			71.278.164
83	Kab. Kampar	17.246.424			107.261.386
84	Kab. Kuantan Singingi	12.044.945			57.205.393
85	Kab. Pelalawan	31.783.851			89.619.247
86	Kab. Rokan Hilir	20.658.938	5.350.024		106.002.149
87	Kab. Rokan Hulu	23.390.324			113.653.511
88	Kab. Siak	50.194.904			116.881.111
89	Kota Dumai	2.385.571	4.300.000		50.745.498
90	Kota Pekanbaru	35.785.346			79.412.085
91	Kab. Kepulauan Meranti	11.124.471	4.669.112		63.679.971
92	Provinsi Jambi	10.434.140			163.043.089
93	Kab. Batanghari	16.640.619			109.182.591
94	Kab. Bungo	7.205.616	3.700.000		41.816.106
95	Kab. Kerinci	14.922.656			50.513.853
96	Kab. Merangin	11.956.565			71.808.387
97	Kab. Muaro Jambi	12.965.261			58.122.026

*) Perubahan Pertama

**) Perubahan Kedua

***) Perubahan Ketiga

(PMK Nomor 94 Tahun 2021)

(PMK Nomor 162 Tahun 2021)

(PMK Nomor 118 Tahun 2022)

Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021

Tanggal Berlaku: 23 November 2021

Tanggal Berlaku: 25 Juli 2022

SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Dampaknya

2. DAK FISIK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Kesehatan dan KB				Jalan
		Penguatan Intervensi Stunting	Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi	Keluarga Berencana	Subtotal Kesehatan dan KB	Tematik Ketahanan Pangan
(1)	(2)	(22)	(23)	(24)	(25)=(22)+(23)+(24)	(26)
78	Kab. Solok Selatan					
79	Provinsi Riau	5.027.774			5.027.774	
80	Kab. Bengkalis	3.239.175		407.000	3.646.175	
81	Kab. Indragiri Hilir			339.815	339.815	
82	Kab. Indragiri Hulu			413.000	413.000	
83	Kab. Kampar	1.480.625		344.000	1.824.625	
84	Kab. Kuantan Singingi		925.619		925.619	
85	Kab. Pelalawan	650.000	12.372.363	140.000	13.162.363	
86	Kab. Rokan Hilir	500.000	12.134.447	290.000	12.924.447	
87	Kab. Rokan Hulu			280.000	280.000	
88	Kab. Siak	1.100.000		416.149	1.516.149	
89	Kota Dumai		35.476.160		35.476.160	
90	Kota Pekanbaru	4.053.029		144.000	4.197.029	
91	Kab. Kepulauan Meranti		8.128.267	433.000	8.561.267	
92	Provinsi Jambi	3.296.698			3.296.698	
93	Kab. Batanghari					
94	Kab. Bungo					
95	Kab. Kerinci	790.000		325.500	1.115.500	
96	Kab. Merangin	1.950.000	15.113.124	290.000	17.353.124	
97	Kab. Muaro Jambi					

*) Perubahan Pertama

(PMK Nomor 94 Tahun 2021)

Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021

**) Perubahan Kedua

(PMK Nomor 162 Tahun 2021)

Tanggal Berlaku: 23 November 2021

***) Perubahan Ketiga

(PMK Nomor 118 Tahun 2022)

Tanggal Berlaku: 25 Juli 2022

SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Dampaknya

2. DAK FISIK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Jalan		Air Minum		
		Tematik Pembangunan Infrastruktur Ekonomi Berkelanjutan	Subtotal Jalan	Tematik Penurunan Angka Kematian Ibu dan Stunting	Tematik Penanggulangan Kemiskinan	Subtotal Air Minum
(1)	(2)	(27)	(28)=(26)+(27)	(29)	(30)	(31)=(29)+(30)
78	Kab. Solok Selatan				4.685.820	4.685.820
79	Provinsi Riau	69.729.850	69.729.850			
80	Kab. Bengkalis	4.813.923	4.813.923		5.467.631	5.467.631
81	Kab. Indragiri Hilir				2.324.001	2.324.001
82	Kab. Indragiri Hulu					
83	Kab. Kampar				5.511.000	5.511.000
84	Kab. Kuantan Singingi				4.219.905	4.219.905
85	Kab. Pelalawan				5.171.092	5.171.092
86	Kab. Rokan Hilir	6.317.222	6.317.222	10.498.779	6.333.918	16.832.697
87	Kab. Rokan Hulu			8.069.067	5.719.190	13.788.257
88	Kab. Siak				5.543.633	5.543.633
89	Kota Dumai	4.806.527	4.806.527		5.177.994	5.177.994
90	Kota Pekanbaru				1.637.066	1.637.066
91	Kab. Kepulauan Meranti	3.795.137	3.795.137	1.757.922	5.061.768	6.819.690
92	Provinsi Jambi	27.894.888	27.894.888			
93	Kab. Batanghari				2.402.437	2.402.437
94	Kab. Bungo	2.597.826	2.597.826		7.088.264	7.088.264
95	Kab. Kerinci			1.973.061	2.992.152	4.965.213
96	Kab. Merangin				7.870.174	7.870.174
97	Kab. Muaro Jambi				8.701.374	8.701.374

*) Perubahan Pertama

**) Perubahan Kedua

***) Perubahan Ketiga

(PMK Nomor 94 Tahun 2021)

(PMK Nomor 162 Tahun 2021)

(PMK Nomor 118 Tahun 2022)

Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021

Tanggal Berlaku: 23 November 2021

Tanggal Berlaku: 25 Juli 2022

SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Dampaknya

2. DAK FISIK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Sanitasi			Perumahan dan Permukiman	Irigasi
		Tematik Penurunan Angka Kematian Ibu dan Stunting	Tematik Penanggulangan Kemiskinan	Subtotal Sanitasi		
(1)	(2)	(32)	(33)	(34)=(32)+(33)	(35)	(36)
78	Kab. Solok Selatan		2.195.674	2.195.674	1.126.779	6.099.293
79	Provinsi Riau					
80	Kab. Bengkalis		2.642.346	2.642.346	1.157.800	
81	Kab. Indragiri Hilir				2.367.808	3.124.307
82	Kab. Indragiri Hulu		2.287.405	2.287.405		1.460.757
83	Kab. Kampar	4.295.801	2.848.610	7.144.411		4.853.852
84	Kab. Kuantan Singingi		1.399.794	1.399.794	1.124.726	3.043.388
85	Kab. Pelalawan	5.498.625		5.498.625		
86	Kab. Rokan Hilir	16.228.582	3.523.285	19.751.867	2.739.650	
87	Kab. Rokan Hulu	3.033.720	2.642.280	5.676.000		
88	Kab. Siak		1.932.050	1.932.050		15.283.531
89	Kota Dumai		1.660.237	1.660.237	1.571.315	
90	Kota Pekanbaru		1.969.201	1.969.201	1.319.810	
91	Kab. Kepulauan Meranti	5.454.975	2.428.670	7.883.645	1.278.165	3.179.590
92	Provinsi Jambi					1.999.901
93	Kab. Batanghari		2.170.041	2.170.041		
94	Kab. Bungo		2.586.000	2.586.000		
95	Kab. Kerinci		1.546.772	1.546.772		5.730.000
96	Kab. Merangin	1.934.867	2.429.805	4.364.672		2.298.000
97	Kab. Muaro Jambi		1.756.638	1.756.638		9.500.000

*) Perubahan Pertama

**) Perubahan Kedua

***) Perubahan Ketiga

(PMK Nomor 94 Tahun 2021)

(PMK Nomor 162 Tahun 2021)

(PMK Nomor 118 Tahun 2022)

Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021

Tanggal Berlaku: 23 November 2021

Tanggal Berlaku: 25 Juli 2022

SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Dampaknya

2. DAK FISIK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Pertanian	Kelautan dan Perikanan	Industri Kecil dan Menengah	Pariwisata	Lingkungan Hidup
						Lingkungan Hidup Tematik Penurunan Angka Kematian Ibu dan Stunting
(1)	(2)	(37)	(38)	(39)	(40)	(41)
78	Kab. Solok Selatan	2.180.782	1.018.000	8.750.852		
79	Provinsi Riau	6.299.789	4.784.360			
80	Kab. Bengkalis	1.978.125	1.102.500			
81	Kab. Indragiri Hilir	2.719.907	2.014.200			
82	Kab. Indragiri Hulu	5.730.000		1.700.165		
83	Kab. Kampar	8.179.147	1.425.000			1.276.000
84	Kab. Kuantan Singingi		1.177.000			
85	Kab. Pelalawan		1.045.035			
86	Kab. Rokan Hilir	1.500.806	1.167.512			
87	Kab. Rokan Hulu	6.173.216	1.607.500			916.220
88	Kab. Siak		1.423.400			3.574.000
89	Kota Dumai		740.000			
90	Kota Pekanbaru		778.000	2.549.248		
91	Kab. Kepulauan Meranti	2.671.337	1.425.000	3.294.320		
92	Provinsi Jambi	6.183.849	5.179.419			
93	Kab. Batanghari	3.738.657	1.400.908			
94	Kab. Bungo		706.000			
95	Kab. Kerinci	6.285.000	1.844.500			1.300.000
96	Kab. Merangin	4.655.000	720.000			1.300.000
97	Kab. Muaro Jambi	3.314.597	1.678.000			

*) Perubahan Pertama

**) Perubahan Kedua

***) Perubahan Ketiga

(PMK Nomor 94 Tahun 2021)

(PMK Nomor 162 Tahun 2021)

(PMK Nomor 118 Tahun 2022)

Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021

Tanggal Berlaku: 23 November 2021

Tanggal Berlaku: 25 Juli 2022

SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Dampaknya

2. DAK FISIK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Lingkungan Hidup			TOTAL DAK PENUGASAN	TOTAL DAK FISIK
		Lingkungan Hidup Tematik Pembangunan Infrastruktur Ekonomi Berkelanjutan	Kehutanan Tematik Ketahanan Pangan	Subtotal Lingkungan Hidup		
(1)	(2)	(42)	(43)	(44)=(41)+(42)+(43)	(45)=(25)+(28)+(31)+(34)+(35)+(36)+(37)+(38)+(39)+(40)+(44)	(46)=(21)+(45)
78	Kab. Solok Selatan				26.057.200	74.960.489
79	Provinsi Riau		2.734.658	2.734.658	88.576.431	308.779.222
80	Kab. Bengkalis				20.808.500	100.775.011
81	Kab. Indragiri Hilir				12.890.038	113.847.854
82	Kab. Indragiri Hulu				11.591.327	82.869.491
83	Kab. Kampar			1.276.000	30.214.035	137.475.421
84	Kab. Kuantan Singingi				11.890.432	69.095.825
85	Kab. Pelalawan				24.877.115	114.496.362
86	Kab. Rokan Hilir				61.234.201	167.236.350
87	Kab. Rokan Hulu			916.220	28.441.193	142.094.704
88	Kab. Siak			3.574.000	29.272.763	146.153.874
89	Kota Dumai				49.432.233	100.177.731
90	Kota Pekanbaru				12.450.354	91.862.439
91	Kab. Kepulauan Meranti				38.908.151	102.588.122
92	Provinsi Jambi		744.409	744.409	45.299.164	208.342.253
93	Kab. Batanghari				9.712.043	118.894.634
94	Kab. Bungo				12.978.090	54.794.196
95	Kab. Kerinci			1.300.000	22.786.985	73.300.838
96	Kab. Merangin			1.300.000	38.560.970	110.369.357
97	Kab. Muaro Jambi				24.950.609	83.072.635

*) Perubahan Pertama

**) Perubahan Kedua

***) Perubahan Ketiga

(PMK Nomor 94 Tahun 2021)

(PMK Nomor 162 Tahun 2021)

(PMK Nomor 118 Tahun 2022)

Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021

Tanggal Berlaku: 23 November 2021

Tanggal Berlaku: 25 Juli 2022

SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Dampaknya

1. DAK FISIK REGULER

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Pendidikan				
		PAUD	SD	SMP	SMA	SMK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
98	Kab. Sarolangun	436.863	22.872.274	5.313.619		
99	Kab. Tanjung Jabung Barat		11.877.236	7.705.516		
100	Kab. Tanjung Jabung Timur	3.188.966	19.264.352	23.137.258		
101	Kab. Tebo	252.449	13.122.027	13.762.463		
102	Kota Jambi		22.149.067	7.098.186		
103	Kota Sungai Penuh	592.846	8.174.553	2.509.432		
104	Provinsi Sumatera Selatan				32.260.333	80.791.021
105	Kab. Lahat	742.094	27.205.603	12.351.847		
106	Kab. Musi Banyuasin	3.793.682	25.553.226	22.023.668		
107	Kab. Musi Rawas	595.644	25.978.732	14.824.420		
108	Kab. Muara Enim	1.304.269	20.660.076	7.372.226		
109	Kab. Ogan Komering Ilir	870.032	17.475.014	16.316.202		
110	Kab. Ogan Komering Ulu	1.272.869	28.052.498	11.036.920		
111	Kota Palembang	906.758	27.373.943	33.764.313		
112	Kota Prabumulih	807.947	14.313.010	7.734.551		
113	Kota Pagar Alam		6.420.017	7.725.316		
114	Kota Lubuk Linggau	354.711	17.298.477	7.290.905		
115	Kab. Banyuasin	604.296	26.019.449	25.859.926		
116	Kab. Ogan Ilir		23.804.885	24.955.840		
117	Kab. Ogan Komering Ulu Timur	3.779.560	23.778.435	13.692.124		

*) Perubahan Pertama

(PMK Nomor 94 Tahun 2021)

Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021

**) Perubahan Kedua

(PMK Nomor 162 Tahun 2021)

Tanggal Berlaku: 23 November 2021

***) Perubahan Ketiga

(PMK Nomor 118 Tahun 2022)

Tanggal Berlaku: 25 Juli 2022

SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Dampaknya

1. DAK FISIK REGULER

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Pendidikan				Kesehatan dan KB
		SKB	SLB	Perpustakaan Daerah	Subtotal Pendidikan	Pelayanan Dasar
(1)	(2)	(8)	(9)	(10)	(11)=(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)+(9)+(10)	(12)
98	Kab. Sarolangun			4.500.000	33.122.756	2.100.000
99	Kab. Tanjung Jabung Barat			4.500.000	24.082.752	4.350.000
100	Kab. Tanjung Jabung Timur			300.000	45.890.576	7.572.048
101	Kab. Tebo				27.136.939	13.098.231
102	Kota Jambi				29.247.253	3.276.600
103	Kota Sungai Penuh				11.276.831	3.003.000
104	Provinsi Sumatera Selatan		1.161.465	2.500.000	116.712.819	
105	Kab. Lahat	618.000			40.917.544	4.517.350
106	Kab. Musi Banyuasin			300.000	51.670.576	4.874.568
107	Kab. Musi Rawas			10.000.000	51.398.796	2.000.000
108	Kab. Muara Enim	730.000			30.066.571	2.000.000
109	Kab. Ogan Komering Ilir			300.000	34.961.248	3.939.343
110	Kab. Ogan Komering Ulu	998.100			41.360.387	8.996.944
111	Kota Palembang	1.590.200			63.635.214	5.157.066
112	Kota Prabumulih			500.000	23.355.508	2.000.000
113	Kota Pagar Alam				14.145.333	3.009.210
114	Kota Lubuk Linggau			690.000	25.634.093	6.266.731
115	Kab. Banyuasin				52.483.671	5.520.000
116	Kab. Ogan Ilir				48.760.725	6.000.000
117	Kab. Ogan Komering Ulu Timur				41.250.119	2.000.000

*) Perubahan Pertama

**) Perubahan Kedua

***) Perubahan Ketiga

(PMK Nomor 94 Tahun 2021)

(PMK Nomor 162 Tahun 2021)

(PMK Nomor 118 Tahun 2022)

Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021

Tanggal Berlaku: 23 November 2021

Tanggal Berlaku: 25 Juli 2022

SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Dampaknya

1. DAK FISIK REGULER

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Kesehatan dan KB				
		Pelayanan Rujukan	Pelayanan Kefarmasian dan Bahan Habis Pakai	Peningkatan Kesiapan Sistem Kesehatan	Keluarga Berencana	Subtotal Kesehatan dan KB
(1)	(2)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)=(12)+(13)+(14)+(15)+(16)
98	Kab. Sarolangun	7.288.983	3.297.725	199.500	1.245.365	14.131.573
99	Kab. Tanjung Jabung Barat	10.635.309	2.525.411	502.374	1.261.515	19.274.609
100	Kab. Tanjung Jabung Timur		2.083.011		1.059.842	10.714.901
101	Kab. Tebo	44.096.000	2.808.316		1.059.842	61.062.389
102	Kota Jambi	48.075.462	2.664.460	200.000	1.110.311	55.326.833
103	Kota Sungai Penuh		2.075.897	4.407.796	1.059.842	10.546.535
104	Provinsi Sumatera Selatan	23.068.669	1.074.601			24.143.270
105	Kab. Lahat	7.907.176	5.436.050		1.216.800	19.077.376
106	Kab. Musi Banyuasin	12.406.393	3.971.956	793.202	1.110.311	23.156.430
107	Kab. Musi Rawas	14.023.005	3.872.878	46.281.225	1.059.842	67.236.950
108	Kab. Muara Enim	18.870.747	4.807.572	3.614.594	158.976	29.451.889
109	Kab. Ogan Komering Ilir	10.954.069	6.772.976	432.558	1.029.561	23.128.507
110	Kab. Ogan Komering Ulu		1.885.754	1.415.947	963.952	13.262.597
111	Kota Palembang	3.404.788	10.568.611	333.964	1.257.074	20.721.503
112	Kota Prabumulih	3.403.716	2.194.784	1.954.893	1.399.396	10.952.789
113	Kota Pagar Alam	2.724.250	2.858.876	2.594.902	1.354.097	12.541.335
114	Kota Lubuk Linggau	8.287.307	2.813.012	1.118.618	1.000.491	19.486.159
115	Kab. Banyuasin	4.936.819	2.738.239		1.234.863	14.429.921
116	Kab. Ogan Ilir	12.176.548	4.653.320	528.132	1.261.717	24.619.717
117	Kab. Ogan Komering Ulu Timur	17.631.969	6.186.169	2.680.310	686.374	29.184.822

*) Perubahan Pertama

(PMK Nomor 94 Tahun 2021)

Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021

**) Perubahan Kedua

(PMK Nomor 162 Tahun 2021)

Tanggal Berlaku: 23 November 2021

**) Perubahan Ketiga

(PMK Nomor 118 Tahun 2022)

Tanggal Berlaku: 25 Juli 2022

SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Dampaknya

1. DAK FISIK REGULER

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Jalan	Transportasi Perdesaan	Transportasi Laut	TOTAL DAK REGULER
(1)	(2)	(18)	(19)	(20)	(21)=(11)+(17)+(18)+(19)+(20)
98	Kab. Sarolangun	13.155.813			60.410.142
99	Kab. Tanjung Jabung Barat	15.940.448			59.297.809
100	Kab. Tanjung Jabung Timur	11.865.846			68.471.323
101	Kab. Tebo	11.489.599			99.688.927
102	Kota Jambi	9.771.105			94.345.191
103	Kota Sungai Penuh	11.036.459			32.859.825
104	Provinsi Sumatera Selatan	12.488.983			153.345.072
105	Kab. Lahat	13.415.067	2.500.000		75.909.987
106	Kab. Musi Banyuasin	12.889.225			87.716.231
107	Kab. Musi Rawas	37.350.072	4.800.000		160.785.818
108	Kab. Muara Enim	10.798.667			70.317.127
109	Kab. Ogan Komering Ilir	13.346.175			71.435.930
110	Kab. Ogan Komering Ulu	10.829.975			65.452.959
111	Kota Palembang	6.146.599			90.503.316
112	Kota Prabumulih	5.417.757			39.726.054
113	Kota Pagar Alam	8.835.747			35.522.415
114	Kota Lubuk Linggau	7.033.624			52.153.876
115	Kab. Banyuasin	11.607.363	5.400.000		83.920.955
116	Kab. Ogan Ilir	13.567.094	4.100.000		91.047.536
117	Kab. Ogan Komering Ulu Timur	8.840.877			79.275.818

*) Perubahan Pertama

**) Perubahan Kedua

***) Perubahan Ketiga

(PMK Nomor 94 Tahun 2021)

(PMK Nomor 162 Tahun 2021)

(PMK Nomor 118 Tahun 2022)

Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021

Tanggal Berlaku: 23 November 2021

Tanggal Berlaku: 25 Juli 2022

SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Dampaknya

2. DAK FISIK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Kesehatan dan KB				Jalan
		Penguatan Intervensi Stunting	Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi	Keluarga Berencana	Subtotal Kesehatan dan KB	Tematik Ketahanan Pangan
(1)	(2)	(22)	(23)	(24)	(25)=(22)+(23)+(24)	(26)
98	Kab. Sarolangun					
99	Kab. Tanjung Jabung Barat	1.150.000		425.500	1.575.500	
100	Kab. Tanjung Jabung Timur	200.000	16.507.385	425.500	17.132.885	
101	Kab. Tebo	1.010.000		20.000	1.030.000	
102	Kota Jambi	200.000		276.500	476.500	
103	Kota Sungai Penuh					
104	Provinsi Sumatera Selatan	6.413.379			6.413.379	36.023.379
105	Kab. Lahat	2.702.586		215.500	2.918.086	
106	Kab. Musi Banyuasin	2.976.456	21.977.720	483.999	25.438.175	
107	Kab. Musi Rawas	1.600.000		275.500	1.875.500	
108	Kab. Muara Enim	850.000		234.000	1.084.000	
109	Kab. Ogan Komering Ilir	2.550.000			2.550.000	9.747.627
110	Kab. Ogan Komering Ulu	2.383.700	13.995.367	305.500	16.684.567	
111	Kota Palembang	2.747.220			2.747.220	
112	Kota Prabumulih					
113	Kota Pagar Alam					
114	Kota Lubuk Linggau					
115	Kab. Banyuasin	1.929.850	8.386.000	90.000	10.405.850	10.859.432
116	Kab. Ogan Ilir			99.999	99.999	
117	Kab. Ogan Komering Ulu Timur	4.017.511		368.000	4.385.511	

*) Perubahan Pertama

(PMK Nomor 94 Tahun 2021)

Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021

**) Perubahan Kedua

(PMK Nomor 162 Tahun 2021)

Tanggal Berlaku: 23 November 2021

***) Perubahan Ketiga

(PMK Nomor 118 Tahun 2022)

Tanggal Berlaku: 25 Juli 2022

SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Dampaknya

2. DAK FISIK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Jalan		Air Minum		
		Tematik Pembangunan Infrastruktur Ekonomi Berkelanjutan	Subtotal Jalan	Tematik Penurunan Angka Kematian Ibu dan Stunting	Tematik Penanggulangan Kemiskinan	Subtotal Air Minum
(1)	(2)	(27)	(28)=(26)+(27)	(29)	(30)	(31)=(29)+(30)
98	Kab. Sarolangun				5.984.468	5.984.468
99	Kab. Tanjung Jabung Barat			3.500.000	4.283.952	7.783.952
100	Kab. Tanjung Jabung Timur				3.936.040	3.936.040
101	Kab. Tebo				5.844.150	5.844.150
102	Kota Jambi				5.669.225	5.669.225
103	Kota Sungai Penuh				1.599.400	1.599.400
104	Provinsi Sumatera Selatan		36.023.379			
105	Kab. Lahat			4.999.418	6.393.140	11.392.558
106	Kab. Musi Banyuasin				6.621.315	6.621.315
107	Kab. Musi Rawas				4.800.601	4.800.601
108	Kab. Muara Enim			3.764.362	1.921.915	5.686.277
109	Kab. Ogan Komering Ilir		9.747.627	2.299.734	5.931.132	8.230.866
110	Kab. Ogan Komering Ulu				5.524.000	5.524.000
111	Kota Palembang			10.607.671		10.607.671
112	Kota Prabumulih				5.746.016	5.746.016
113	Kota Pagar Alam				2.799.016	2.799.016
114	Kota Lubuk Linggau				1.243.750	1.243.750
115	Kab. Banyuasin		10.859.432	10.488.590	8.164.220	18.652.810
116	Kab. Ogan Ilir	4.340.310	4.340.310		5.977.899	5.977.899
117	Kab. Ogan Komering Ulu Timur				5.109.256	5.109.256

*) Perubahan Pertama

**) Perubahan Kedua

***) Perubahan Ketiga

(PMK Nomor 94 Tahun 2021)

(PMK Nomor 162 Tahun 2021)

(PMK Nomor 118 Tahun 2022)

Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021

Tanggal Berlaku: 23 November 2021

Tanggal Berlaku: 25 Juli 2022

SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Dampaknya

2. DAK FISIK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Sanitasi			Perumahan dan Permukiman	Irigasi
		Tematik Penurunan Angka Kematian Ibu dan Stunting	Tematik Penanggulangan Kemiskinan	Subtotal Sanitasi		
(1)	(2)	(32)	(33)	(34)=(32)+(33)	(35)	(36)
98	Kab. Sarolangun		2.017.383	2.017.383		2.947.194
99	Kab. Tanjung Jabung Barat	500.000		500.000		
100	Kab. Tanjung Jabung Timur	8.576.944		8.576.944		10.650.000
101	Kab. Tebo		2.399.602	2.399.602		800.170
102	Kota Jambi		2.024.822	2.024.822	2.589.458	
103	Kota Sungai Penuh		1.463.865	1.463.865		7.287.603
104	Provinsi Sumatera Selatan					35.645.000
105	Kab. Lahat	3.363.000	2.789.340	6.152.340		
106	Kab. Musi Banyuasin		3.453.392	3.453.392		8.160.560
107	Kab. Musi Rawas		2.722.099	2.722.099	3.162.735	5.600.000
108	Kab. Muara Enim	7.818.812		7.818.812	1.690.234	1.008.000
109	Kab. Ogan Komering Ilir	3.030.926	5.013.066	8.043.992	1.763.723	3.707.459
110	Kab. Ogan Komering Ulu		654.400	654.400	2.296.514	
111	Kota Palembang	6.684.085	3.236.167	9.920.252	987.604	8.795.656
112	Kota Prabumulih		1.669.109	1.669.109	869.967	
113	Kota Pagar Alam		1.958.322	1.958.322	1.530.729	1.300.000
114	Kota Lubuk Linggau		1.828.396	1.828.396	1.506.974	1.400.000
115	Kab. Banyuasin	1.750.000	4.724.207	6.474.207	866.496	10.518.570
116	Kab. Ogan Ilir	909.164	3.202.976	4.112.140		4.551.000
117	Kab. Ogan Komering Ulu Timur		3.058.759	3.058.759		

*) Perubahan Pertama

**) Perubahan Kedua

***) Perubahan Ketiga

(PMK Nomor 94 Tahun 2021)

(PMK Nomor 162 Tahun 2021)

(PMK Nomor 118 Tahun 2022)

Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021

Tanggal Berlaku: 23 November 2021

Tanggal Berlaku: 25 Juli 2022

SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Dampaknya

2. DAK FISIK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Pertanian	Kelautan dan Perikanan	Industri Kecil dan Menengah	Pariwisata	Lingkungan Hidup
						Lingkungan Hidup Tematik Penurunan Angka Kematian Ibu dan Stunting
(1)	(2)	(37)	(38)	(39)	(40)	(41)
98	Kab. Sarolangun	6.135.000	1.079.000			
99	Kab. Tanjung Jabung Barat	2.755.000	1.406.000			
100	Kab. Tanjung Jabung Timur	2.465.000	1.790.000	1.045.101		
101	Kab. Tebo	2.807.332	721.608			
102	Kota Jambi		1.458.102	225.098		
103	Kota Sungai Penuh		588.900			
104	Provinsi Sumatera Selatan	1.534.804	9.769.507			
105	Kab. Lahat	2.535.741	816.000			
106	Kab. Musi Banyuasin	2.490.000	1.676.000			
107	Kab. Musi Rawas	2.331.348	2.165.000			924.600
108	Kab. Muara Enim	4.455.000	1.294.050			
109	Kab. Ogan Komering Ilir	1.880.000	1.706.200			
110	Kab. Ogan Komering Ulu					
111	Kota Palembang		1.215.400			
112	Kota Prabumulih		632.000	600.058		
113	Kota Pagar Alam	1.466.368	897.000			
114	Kota Lubuk Linggau	1.490.000	351.410			
115	Kab. Banyuasin	3.188.338	1.452.600	3.400.331		
116	Kab. Ogan Ilir	3.097.500	894.500			
117	Kab. Ogan Komering Ulu Timur	2.550.000	1.265.000			

*) Perubahan Pertama

(PMK Nomor 94 Tahun 2021)

Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021

**) Perubahan Kedua

(PMK Nomor 162 Tahun 2021)

Tanggal Berlaku: 23 November 2021

***) Perubahan Ketiga

(PMK Nomor 118 Tahun 2022)

Tanggal Berlaku: 25 Juli 2022

SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Dampaknya

2. DAK FISIK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Lingkungan Hidup			TOTAL DAK PENUGASAN	TOTAL DAK FISIK
		Lingkungan Hidup Tematik Pembangunan Infrastruktur Ekonomi Berkelanjutan	Kehutanan Tematik Ketahanan Pangan	Subtotal Lingkungan Hidup		
(1)	(2)	(42)	(43)	(44)=(41)+(42)+(43)	(45)=(25)+(28)+(31)+(34)+(35)+(36)+(37)+(38)+(39)+(40)+(44)	(46)=(21)+(45)
98	Kab. Sarolangun				18.163.045	78.573.187
99	Kab. Tanjung Jabung Barat				14.020.452	73.318.261
100	Kab. Tanjung Jabung Timur				45.595.970	114.067.293
101	Kab. Tebo				13.602.862	113.291.789
102	Kota Jambi				12.443.205	106.788.396
103	Kota Sungai Penuh				10.939.768	43.799.593
104	Provinsi Sumatera Selatan				89.386.069	242.731.141
105	Kab. Lahat				23.814.725	99.724.712
106	Kab. Musi Banyuasin				47.839.442	135.555.673
107	Kab. Musi Rawas			924.600	23.581.883	184.367.701
108	Kab. Muara Enim				23.036.373	93.353.500
109	Kab. Ogan Komering Ilir				37.629.867	109.065.797
110	Kab. Ogan Komering Ulu				25.159.481	90.612.440
111	Kota Palembang				34.273.803	124.777.119
112	Kota Prabumulih				9.517.150	49.243.204
113	Kota Pagar Alam				9.951.435	45.473.850
114	Kota Lubuk Linggau				7.820.530	59.974.406
115	Kab. Banyuasin				65.818.634	149.739.589
116	Kab. Ogan Ilir				23.073.348	114.120.884
117	Kab. Ogan Komering Ulu Timur				16.368.526	95.644.344

*) Perubahan Pertama

**) Perubahan Kedua

***) Perubahan Ketiga

(PMK Nomor 94 Tahun 2021)

(PMK Nomor 162 Tahun 2021)

(PMK Nomor 118 Tahun 2022)

Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021

Tanggal Berlaku: 23 November 2021

Tanggal Berlaku: 25 Juli 2022

SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Dampaknya

1. DAK FISIK REGULER

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Pendidikan				
		PAUD	SD	SMP	SMA	SMK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
118	Kab. Ogan Komering Ulu Selatan	1.780.254	20.340.532	6.447.337		
119	Kab. Empat Lawang		23.078.157	14.608.904		
120	Kab. Penukal Abab Lematang Ilir	333.325	10.213.220	6.607.469		
121	Kab. Musi Rawas Utara		13.201.721	2.715.787		
122	Provinsi Bengkulu				61.914.932	49.511.419
123	Kab. Bengkulu Selatan	2.649.671	25.097.433	15.128.914		
124	Kab. Bengkulu Utara	332.323	22.076.198	15.902.535		
125	Kab. Rejang Lebong	280.946	9.232.395	2.822.689		
126	Kota Bengkulu	346.984	6.119.240	2.000.700		
127	Kab. Kaur	1.038.569	24.611.717	15.250.907		
128	Kab. Seluma	703.255	21.318.173	17.476.277		
129	Kab. Mukomuko	609.488	9.949.620	8.451.183		
130	Kab. Lebong	1.583.033	9.997.042	15.843.114		
131	Kab. Kepahiang	402.339	24.410.648	16.679.588		
132	Kab. Bengkulu Tengah		5.163.149	11.680.030		
133	Provinsi Lampung				114.809.573	102.332.138
134	Kab. Lampung Barat	491.450	23.470.849	6.253.850		
135	Kab. Lampung Selatan	724.229	15.487.965	9.011.749		
136	Kab. Lampung Tengah	407.897	25.549.213	4.783.152		
137	Kab. Lampung Utara	471.708	8.254.265	2.197.101		

*) Perubahan Pertama

(PMK Nomor 94 Tahun 2021)

Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021

**) Perubahan Kedua

(PMK Nomor 162 Tahun 2021)

Tanggal Berlaku: 23 November 2021

***) Perubahan Ketiga

(PMK Nomor 118 Tahun 2022)

Tanggal Berlaku: 25 Juli 2022

SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Dampaknya

1. DAK FISIK REGULER

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Pendidikan				Kesehatan dan KB
		SKB	SLB	Perpustakaan Daerah	Subtotal Pendidikan	Pelayanan Dasar
(1)	(2)	(8)	(9)	(10)	(11)=(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)+(9)+(10)	(12)
118	Kab. Ogan Komering Ulu Selatan				28.568.123	8.391.869
119	Kab. Empat Lawang			300.000	37.987.061	3.776.925
120	Kab. Penukal Abab Lematang Ilir			114.600	17.268.614	5.362.905
121	Kab. Musi Rawas Utara			492.200	16.409.708	2.000.000
122	Provinsi Bengkulu		3.573.780	4.500.000	119.500.131	
123	Kab. Bengkulu Selatan			500.000	43.376.018	8.862.865
124	Kab. Bengkulu Utara			500.000	38.811.056	16.818.489
125	Kab. Rejang Lebong	1.228.640		750.000	14.314.670	9.438.996
126	Kota Bengkulu				8.466.924	14.355.463
127	Kab. Kaur	1.082.098		4.500.000	46.483.291	15.311.637
128	Kab. Seluma			196.655	39.694.360	12.750.369
129	Kab. Mukomuko			446.290	19.456.581	7.983.650
130	Kab. Lebong				27.423.189	8.287.467
131	Kab. Kepahiang				41.492.575	8.775.073
132	Kab. Bengkulu Tengah				16.843.179	11.795.288
133	Provinsi Lampung		4.085.960	200.000	221.427.671	
134	Kab. Lampung Barat	200.000		500.000	30.916.149	1.993.071
135	Kab. Lampung Selatan	703.570			25.927.513	2.887.374
136	Kab. Lampung Tengah	445.000		211.054	31.396.316	7.425.264
137	Kab. Lampung Utara				10.923.074	7.435.244

*) Perubahan Pertama

(PMK Nomor 94 Tahun 2021)

Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021

**) Perubahan Kedua

(PMK Nomor 162 Tahun 2021)

Tanggal Berlaku: 23 November 2021

***) Perubahan Ketiga

(PMK Nomor 118 Tahun 2022)

Tanggal Berlaku: 25 Juli 2022

SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Dampaknya

1. DAK FISIK REGULER

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Kesehatan dan KB				
		Pelayanan Rujukan	Pelayanan Kefarmasian dan Bahan Habis Pakai	Peningkatan Kesiapan Sistem Kesehatan	Keluarga Berencana	Subtotal Kesehatan dan KB
(1)	(2)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)=(12)+(13)+(14)+(15)+(16)
118	Kab. Ogan Komering Ulu Selatan	6.206.463	5.107.475	399.070	1.261.717	21.366.594
119	Kab. Empat Lawang	63.359.000	4.211.151		1.011.443	72.358.519
120	Kab. Penukal Abab Lematang Ilir		4.256.680		1.189.143	10.808.728
121	Kab. Musi Rawas Utara	3.000.000	7.477.562		1.017.449	13.495.011
122	Provinsi Bengkulu	1.700.000		17.425.355		19.125.355
123	Kab. Bengkulu Selatan	5.688.528	2.705.648	409.151	1.362.654	19.028.846
124	Kab. Bengkulu Utara	7.098.000	4.752.715	485.078	1.261.717	30.415.999
125	Kab. Rejang Lebong	4.420.921	4.072.552	1.515.756	1.059.842	20.508.067
126	Kota Bengkulu	3.000.000	2.439.528	2.438.413	1.074.983	23.308.387
127	Kab. Kaur	5.479.009	1.949.542		1.261.717	24.001.905
128	Kab. Seluma	2.981.198	2.088.530	297.375	566.056	18.683.528
129	Kab. Mukomuko	3.000.000	2.344.114	552.049	1.195.744	15.075.557
130	Kab. Lebong	5.943.376	1.151.746	204.827	1.059.842	16.647.258
131	Kab. Kepahiang	3.000.000	2.316.355	1.053.540	1.059.842	16.204.810
132	Kab. Bengkulu Tengah	3.000.000	2.323.325	390.000	1.261.717	18.770.330
133	Provinsi Lampung	9.215.872		5.818.618		15.034.490
134	Kab. Lampung Barat	3.000.000	2.293.501		1.261.717	8.548.289
135	Kab. Lampung Selatan	3.000.000	7.816.601	1.205.171	623.377	15.532.523
136	Kab. Lampung Tengah	3.282.200	3.954.338	2.893.390	1.233.455	18.788.647
137	Kab. Lampung Utara	7.670.250	5.349.816	574.716	631.500	21.661.526

*) Perubahan Pertama

(PMK Nomor 94 Tahun 2021)

Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021

**) Perubahan Kedua

(PMK Nomor 162 Tahun 2021)

Tanggal Berlaku: 23 November 2021

***) Perubahan Ketiga

(PMK Nomor 118 Tahun 2022)

Tanggal Berlaku: 25 Juli 2022

SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Dampaknya

1. DAK FISIK REGULER

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Jalan	Transportasi Perdesaan	Transportasi Laut	TOTAL DAK REGULER
(1)	(2)	(18)	(19)	(20)	(21)=(11)+(17)+(18)+(19)+(20)
118	Kab. Ogan Komering Ulu Selatan	9.421.951			59.356.668
119	Kab. Empat Lawang	7.983.863			118.329.443
120	Kab. Penukal Abab Lematang Ilir	7.941.425			36.018.767
121	Kab. Musi Rawas Utara	11.338.017	6.322.755		47.565.491
122	Provinsi Bengkulu	10.836.075			149.461.561
123	Kab. Bengkulu Selatan	13.523.477			75.928.341
124	Kab. Bengkulu Utara	8.678.827	4.830.000		82.735.882
125	Kab. Rejang Lebong	9.085.535			43.908.272
126	Kota Bengkulu	7.565.037			39.340.348
127	Kab. Kaur	17.304.234			87.789.430
128	Kab. Seluma	12.913.162	5.880.000		77.171.050
129	Kab. Mukomuko	11.293.703			45.825.841
130	Kab. Lebong	10.863.795			54.934.242
131	Kab. Kepahiang	9.436.940			67.134.325
132	Kab. Bengkulu Tengah	6.982.905			42.596.414
133	Provinsi Lampung	9.476.712			245.938.873
134	Kab. Lampung Barat	15.710.841	5.155.477		60.330.756
135	Kab. Lampung Selatan	14.587.830			56.047.866
136	Kab. Lampung Tengah	14.832.782			65.017.745
137	Kab. Lampung Utara				32.584.600

*) Perubahan Pertama

(PMK Nomor 94 Tahun 2021)

Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021

**) Perubahan Kedua

(PMK Nomor 162 Tahun 2021)

Tanggal Berlaku: 23 November 2021

***) Perubahan Ketiga

(PMK Nomor 118 Tahun 2022)

Tanggal Berlaku: 25 Juli 2022

SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Dampaknya

2. DAK FISIK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Kesehatan dan KB				Jalan
		Penguatan Intervensi Stunting	Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi	Keluarga Berencana	Subtotal Kesehatan dan KB	Tematik Ketahanan Pangan
(1)	(2)	(22)	(23)	(24)	(25)=(22)+(23)+(24)	(26)
118	Kab. Ogan Komering Ulu Selatan					
119	Kab. Empat Lawang					
120	Kab. Penukal Abab Lematang Ilir	368.528		190.000	558.528	
121	Kab. Musi Rawas Utara		2.696.452		2.696.452	
122	Provinsi Bengkulu	2.390.500			2.390.500	
123	Kab. Bengkulu Selatan	1.324.037		276.500	1.600.537	
124	Kab. Bengkulu Utara		26.974.733	260.000	27.234.733	
125	Kab. Rejang Lebong					
126	Kota Bengkulu					
127	Kab. Kaur			280.000	280.000	
128	Kab. Seluma	1.630.000	2.701.293		4.331.293	
129	Kab. Mukomuko					
130	Kab. Lebong					
131	Kab. Kepahiang		14.954.230		14.954.230	
132	Kab. Bengkulu Tengah					
133	Provinsi Lampung	3.254.776			3.254.776	38.586.183
134	Kab. Lampung Barat					
135	Kab. Lampung Selatan			254.000	254.000	8.131.200
136	Kab. Lampung Tengah	1.400.000		40.000	1.440.000	9.215.897
137	Kab. Lampung Utara			502.000	502.000	

*) Perubahan Pertama

**) Perubahan Kedua

***) Perubahan Ketiga

(PMK Nomor 94 Tahun 2021)

(PMK Nomor 162 Tahun 2021)

(PMK Nomor 118 Tahun 2022)

Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021

Tanggal Berlaku: 23 November 2021

Tanggal Berlaku: 25 Juli 2022

SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Dampaknya

2. DAK FISIK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Jalan		Air Minum		
		Tematik Pembangunan Infrastruktur Ekonomi Berkelanjutan	Subtotal Jalan	Tematik Penurunan Angka Kematian Ibu dan Stunting	Tematik Penanggulangan Kemiskinan	Subtotal Air Minum
(1)	(2)	(27)	(28)=(26)+(27)	(29)	(30)	(31)=(29)+(30)
118	Kab. Ogan Komering Ulu Selatan				2.781.055	2.781.055
119	Kab. Empat Lawang				5.490.914	5.490.914
120	Kab. Penukal Abab Lematang Ilir				2.649.069	2.649.069
121	Kab. Musi Rawas Utara	3.741.775	3.741.775		4.650.394	4.650.394
122	Provinsi Bengkulu	22.008.081	22.008.081			
123	Kab. Bengkulu Selatan			3.664.574	5.682.893	9.347.467
124	Kab. Bengkulu Utara	3.073.552	3.073.552		5.629.233	5.629.233
125	Kab. Rejang Lebong				6.760.000	6.760.000
126	Kota Bengkulu				3.763.128	3.763.128
127	Kab. Kaur	5.363.485	5.363.485	300.000	3.103.909	3.403.909
128	Kab. Seluma			894.600	3.319.163	4.213.763
129	Kab. Mukomuko				4.411.194	4.411.194
130	Kab. Lebong				4.665.000	4.665.000
131	Kab. Kepahiang				4.168.535	4.168.535
132	Kab. Bengkulu Tengah				4.062.042	4.062.042
133	Provinsi Lampung		38.586.183			
134	Kab. Lampung Barat				6.067.761	6.067.761
135	Kab. Lampung Selatan		8.131.200	1.692.601	5.227.067	6.919.668
136	Kab. Lampung Tengah		9.215.897	3.599.584	4.947.855	8.547.439
137	Kab. Lampung Utara			8.118.587	5.219.320	13.337.907

*) Perubahan Pertama

**) Perubahan Kedua

***) Perubahan Ketiga

(PMK Nomor 94 Tahun 2021)

(PMK Nomor 162 Tahun 2021)

(PMK Nomor 118 Tahun 2022)

Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021

Tanggal Berlaku: 23 November 2021

Tanggal Berlaku: 25 Juli 2022

SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Dampaknya

2. DAK FISIK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Sanitasi			Perumahan dan Permukiman	Irigasi
		Tematik Penurunan Angka Kematian Ibu dan Stunting	Tematik Penanggulangan Kemiskinan	Subtotal Sanitasi		
(1)	(2)	(32)	(33)	(34)=(32)+(33)	(35)	(36)
118	Kab. Ogan Komering Ulu Selatan		3.092.103	3.092.103		2.952.000
119	Kab. Empat Lawang		2.632.405	2.632.405		6.489.020
120	Kab. Penukal Abab Lematang Ilir		1.815.574	1.815.574		3.043.299
121	Kab. Musi Rawas Utara				1.152.270	
122	Provinsi Bengkulu					9.171.011
123	Kab. Bengkulu Selatan	1.202.824	1.929.025	3.131.849	1.511.335	4.835.051
124	Kab. Bengkulu Utara	8.865.261	2.247.330	11.112.591		8.430.000
125	Kab. Rejang Lebong		2.441.000	2.441.000	2.981.737	3.629.774
126	Kota Bengkulu		1.868.846	1.868.846	547.000	1.497.789
127	Kab. Kaur	1.479.665	500.000	1.979.665		4.480.000
128	Kab. Seluma	5.273.153	2.019.388	7.292.541	2.678.414	5.069.382
129	Kab. Mukomuko					1.694.945
130	Kab. Lebong		1.855.468	1.855.468		6.035.660
131	Kab. Kepahiang		1.967.290	1.967.290		5.182.679
132	Kab. Bengkulu Tengah		999.853	999.853		2.235.000
133	Provinsi Lampung					5.500.000
134	Kab. Lampung Barat		2.784.380	2.784.380	2.995.050	7.774.000
135	Kab. Lampung Selatan	2.181.994	3.310.988	5.492.982		7.675.794
136	Kab. Lampung Tengah	3.488.781		3.488.781		3.201.621
137	Kab. Lampung Utara	5.598.000		5.598.000	2.939.538	1.917.751

*) Perubahan Pertama

**) Perubahan Kedua

***) Perubahan Ketiga

(PMK Nomor 94 Tahun 2021)

(PMK Nomor 162 Tahun 2021)

(PMK Nomor 118 Tahun 2022)

Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021

Tanggal Berlaku: 23 November 2021

Tanggal Berlaku: 25 Juli 2022

SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Dampaknya

2. DAK FISIK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Pertanian	Kelautan dan Perikanan	Industri Kecil dan Menengah	Pariwisata	Lingkungan Hidup
						Lingkungan Hidup Tematik Penurunan Angka Kematian Ibu dan Stunting
(1)	(2)	(37)	(38)	(39)	(40)	(41)
118	Kab. Ogan Komering Ulu Selatan		306.000			
119	Kab. Empat Lawang					
120	Kab. Penukal Abab Lematang Ilir					
121	Kab. Musi Rawas Utara			3.500.340		
122	Provinsi Bengkulu	7.332.382	6.426.000			
123	Kab. Bengkulu Selatan	2.530.500	1.914.250			
124	Kab. Bengkulu Utara	4.155.000	1.260.000	392.038		
125	Kab. Rejang Lebong		542.000	1.471.863		
126	Kota Bengkulu		1.175.000			
127	Kab. Kaur		1.186.000	2.300.224		
128	Kab. Seluma		205.000	2.500.243		
129	Kab. Mukomuko		949.000			
130	Kab. Lebong		1.154.000	5.900.574		
131	Kab. Kepahiang		1.326.700			
132	Kab. Bengkulu Tengah		1.055.000	1.500.146		
133	Provinsi Lampung	7.576.882	7.333.270			2.584.000
134	Kab. Lampung Barat	4.557.000	1.642.550	659.470		
135	Kab. Lampung Selatan	5.405.000	1.506.526	1.030.100		
136	Kab. Lampung Tengah	4.340.000	945.000			
137	Kab. Lampung Utara		1.129.000			

*) Perubahan Pertama

**) Perubahan Kedua

***) Perubahan Ketiga

(PMK Nomor 94 Tahun 2021)

(PMK Nomor 162 Tahun 2021)

(PMK Nomor 118 Tahun 2022)

Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021

Tanggal Berlaku: 23 November 2021

Tanggal Berlaku: 25 Juli 2022

SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Dampaknya

2. DAK FISIK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Lingkungan Hidup			TOTAL DAK PENUGASAN	TOTAL DAK FISIK
		Lingkungan Hidup Tematik Pembangunan Infrastruktur Ekonomi Berkelanjutan	Kehutanan Tematik Ketahanan Pangan	Subtotal Lingkungan Hidup		
(1)	(2)	(42)	(43)	(44)=(41)+(42)+(43)	(45)=(25)+(28)+(31)+(34)+(35)+(36)+(37)+(38)+(39)+(40)+(44)	(46)=(21)+(45)
118	Kab. Ogan Komering Ulu Selatan				9.131.158	68.487.826
119	Kab. Empat Lawang				14.612.339	132.941.782
120	Kab. Penukal Abab Lematang Ilir				8.066.470	44.085.237
121	Kab. Musi Rawas Utara				15.741.231	63.306.722
122	Provinsi Bengkulu				47.327.974	196.789.535
123	Kab. Bengkulu Selatan				24.870.989	100.799.330
124	Kab. Bengkulu Utara				61.287.147	144.023.029
125	Kab. Rejang Lebong				17.826.374	61.734.646
126	Kota Bengkulu				8.851.763	48.192.111
127	Kab. Kaur				18.993.283	106.782.713
128	Kab. Seluma				26.290.636	103.461.686
129	Kab. Mukomuko				7.055.139	52.880.980
130	Kab. Lebong				19.610.702	74.544.944
131	Kab. Kepahiang				27.599.434	94.733.759
132	Kab. Bengkulu Tengah				9.852.041	52.448.455
133	Provinsi Lampung		19.177.604	21.761.604	84.012.715	329.951.588
134	Kab. Lampung Barat				26.480.211	86.810.967
135	Kab. Lampung Selatan				36.415.270	92.463.136
136	Kab. Lampung Tengah				31.178.738	96.196.483
137	Kab. Lampung Utara				25.424.196	58.008.796

*) Perubahan Pertama

**) Perubahan Kedua

***) Perubahan Ketiga

(PMK Nomor 94 Tahun 2021)

(PMK Nomor 162 Tahun 2021)

(PMK Nomor 118 Tahun 2022)

Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021

Tanggal Berlaku: 23 November 2021

Tanggal Berlaku: 25 Juli 2022

SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Dampaknya

1. DAK FISIK REGULER

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Pendidikan				
		PAUD	SD	SMP	SMA	SMK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
138	Kab. Lampung Timur		22.331.499	7.930.068		
139	Kab. Tanggamus	202.594	25.217.044	15.938.927		
140	Kab. Tulang Bawang	438.797	19.547.504	2.492.736		
141	Kab. Way Kanan	261.902	10.672.000	13.337.338		
142	Kota Bandar Lampung		1.313.248	1.703.493		
143	Kota Metro	384.849	1.298.998	4.072.930		
144	Kab. Pesawaran	311.141	18.502.593	3.932.639		
145	Kab. Pringsewu	723.571	19.441.882	10.937.576		
146	Kab. Mesuji	5.509.190	3.839.586	25.698.030		
147	Kab. Tulang Bawang Barat		19.839.909	1.190.996		
148	Kab. Pesisir Barat	296.929	4.660.629	3.900.227		
149	Provinsi DKI Jakarta					
150	Provinsi Jawa Barat				265.524.415	219.183.783
151	Kab. Bandung	266.104	19.967.769	11.083.261		
152	Kab. Bekasi					
153	Kab. Bogor		21.140.487	13.537.485		
154	Kab. Ciamis	442.141	24.936.382	20.593.868		
155	Kab. Cianjur	829.516	17.126.313	23.116.298		
156	Kab. Cirebon	3.594.924	23.729.226	17.410.430		
157	Kab. Garut	263.044	15.221.147	3.262.711		

*) Perubahan Pertama

**) Perubahan Kedua

***) Perubahan Ketiga

(PMK Nomor 94 Tahun 2021)

(PMK Nomor 162 Tahun 2021)

(PMK Nomor 118 Tahun 2022)

Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021

Tanggal Berlaku: 23 November 2021

Tanggal Berlaku: 25 Juli 2022

SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Dampaknya

1. DAK FISIK REGULER

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Pendidikan				Kesehatan dan KB
		SKB	SLB	Perpustakaan Daerah	Subtotal Pendidikan	Pelayanan Dasar
(1)	(2)	(8)	(9)	(10)	(11)=(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)+(9)+(10)	(12)
138	Kab. Lampung Timur			248.050	30.509.617	7.502.668
139	Kab. Tanggamus			500.000	41.858.565	4.891.614
140	Kab. Tulang Bawang			500.000	22.979.037	8.501.388
141	Kab. Way Kanan			10.000.000	34.271.240	6.795.313
142	Kota Bandar Lampung				3.016.741	7.988.431
143	Kota Metro				5.756.777	6.281.250
144	Kab. Pesawaran				22.746.373	1.143.666
145	Kab. Pringsewu	674.200			31.777.229	1.996.847
146	Kab. Mesuji			10.000.000	45.046.806	7.354.389
147	Kab. Tulang Bawang Barat				21.030.905	2.465.168
148	Kab. Pesisir Barat				8.857.785	3.259.517
149	Provinsi DKI Jakarta					1.704.225
150	Provinsi Jawa Barat		7.766.510	200.000	492.674.708	
151	Kab. Bandung	653.900			31.971.034	2.000.000
152	Kab. Bekasi					
153	Kab. Bogor				34.677.972	600.000
154	Kab. Ciamis			500.000	46.472.391	2.237.960
155	Kab. Cianjur	576.600		4.500.000	46.148.727	1.999.973
156	Kab. Cirebon				44.734.580	5.547.026
157	Kab. Garut			300.000	19.046.902	5.094.570

*) Perubahan Pertama

**) Perubahan Kedua

***) Perubahan Ketiga

(PMK Nomor 94 Tahun 2021)

(PMK Nomor 162 Tahun 2021)

(PMK Nomor 118 Tahun 2022)

Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021

Tanggal Berlaku: 23 November 2021

Tanggal Berlaku: 25 Juli 2022

SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Dampaknya

1. DAK FISIK REGULER

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Kesehatan dan KB				Subtotal Kesehatan dan KB
		Pelayanan Rujukan	Pelayanan Kefarmasian dan Bahan Habis Pakai	Peningkatan Kesiapan Sistem Kesehatan	Keluarga Berencana	
(1)	(2)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)=(12)+(13)+(14)+(15)+(16)
138	Kab. Lampung Timur	3.000.000	5.932.877		1.111.421	17.546.966
139	Kab. Tanggamus	2.226.800	4.879.407		359.740	12.357.561
140	Kab. Tulang Bawang	5.729.019	3.159.180		1.291.427	18.681.014
141	Kab. Way Kanan	3.324.935	3.656.953		1.261.717	15.038.918
142	Kota Bandar Lampung	3.000.000	6.131.832	519.210	1.266.507	18.905.980
143	Kota Metro	4.722.000	2.282.689	390.000	657.269	14.333.208
144	Kab. Pesawaran	2.921.104	5.175.405		511.752	9.751.927
145	Kab. Pringsewu	2.814.115	2.598.957	351.418	1.562.212	9.323.549
146	Kab. Mesuji		2.062.483	351.418	958.496	10.726.786
147	Kab. Tulang Bawang Barat	3.000.000	4.372.992		1.261.717	11.099.877
148	Kab. Pesisir Barat	3.000.000	3.973.280	180.000	1.554.435	11.967.232
149	Provinsi DKI Jakarta		22.488.597	318.093		24.510.915
150	Provinsi Jawa Barat	45.416.883				45.416.883
151	Kab. Bandung	45.596.270	13.882.194		1.258.689	62.737.153
152	Kab. Bekasi				1.362.654	1.362.654
153	Kab. Bogor	16.089.300	16.203.596	971.000	1.117.604	34.981.500
154	Kab. Ciamis		9.222.181	5.285.602	1.450.470	18.196.213
155	Kab. Cianjur	8.686.576	9.417.132		1.488.826	21.592.507
156	Kab. Cirebon	25.656.536	8.865.969	600.000	1.488.826	42.158.357
157	Kab. Garut		9.535.127	692.797	1.358.514	16.681.008

*) Perubahan Pertama

(PMK Nomor 94 Tahun 2021)

Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021

**) Perubahan Kedua

(PMK Nomor 162 Tahun 2021)

Tanggal Berlaku: 23 November 2021

***) Perubahan Ketiga

(PMK Nomor 118 Tahun 2022)

Tanggal Berlaku: 25 Juli 2022

SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Dampaknya

1. DAK FISIK REGULER

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Jalan	Transportasi Perdesaan	Transportasi Laut	TOTAL DAK REGULER
(1)	(2)	(18)	(19)	(20)	(21)=(11)+(17)+(18)+(19)+(20)
138	Kab. Lampung Timur	22.392.822			70.449.405
139	Kab. Tanggamus	39.183.444			93.399.570
140	Kab. Tulang Bawang	12.965.553	4.280.023		58.905.627
141	Kab. Way Kanan	41.358.002			90.668.160
142	Kota Bandar Lampung	12.715.123			34.637.844
143	Kota Metro	17.980.695			38.070.680
144	Kab. Pesawaran	31.757.638			64.255.938
145	Kab. Pringsewu	41.918.090			83.018.868
146	Kab. Mesuji	9.762.530	3.800.000		69.336.122
147	Kab. Tulang Bawang Barat	39.474.497			71.605.279
148	Kab. Pesisir Barat	35.348.672	5.207.000		61.380.689
149	Provinsi DKI Jakarta				24.510.915
150	Provinsi Jawa Barat	7.842.801			545.934.392
151	Kab. Bandung	11.262.035			105.970.222
152	Kab. Bekasi				1.362.654
153	Kab. Bogor	7.594.201			77.253.673
154	Kab. Ciamis	18.302.728			82.971.332
155	Kab. Cianjur				67.741.234
156	Kab. Cirebon	30.958.897			117.851.834
157	Kab. Garut	27.686.521			63.414.431

*) Perubahan Pertama
 **) Perubahan Kedua
 ***) Perubahan Ketiga

(PMK Nomor 94 Tahun 2021)
 (PMK Nomor 162 Tahun 2021)
 (PMK Nomor 118 Tahun 2022)

Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021
 Tanggal Berlaku: 23 November 2021
 Tanggal Berlaku: 25 Juli 2022

SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Dampaknya

2. DAK FISIK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Kesehatan dan KB			Subtotal Kesehatan dan KB	Jalan
		Penguatan Intervensi Stunting	Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi	Keluarga Berencana		Tematik Ketahanan Pangan
(1)	(2)	(22)	(23)	(24)	(25)=(22)+(23)+(24)	(26)
138	Kab. Lampung Timur			474.000	474.000	10.766.252
139	Kab. Tanggamus	300.000		434.000	734.000	
140	Kab. Tulang Bawang	1.974.096		483.999	2.458.095	
141	Kab. Way Kanan	3.414.768		200.000	3.614.768	
142	Kota Bandar Lampung	1.416.587	13.281.991	472.999	15.171.577	
143	Kota Metro					
144	Kab. Pesawaran			200.000	200.000	
145	Kab. Pringsewu	1.649.090	59.639.728	280.000	61.568.818	
146	Kab. Mesuji		19.496.634		19.496.634	
147	Kab. Tulang Bawang Barat					
148	Kab. Pesisir Barat					
149	Provinsi DKI Jakarta	20.806.134	11.913.419	1.680.000	34.399.553	
150	Provinsi Jawa Barat		7.213.662		7.213.662	
151	Kab. Bandung		1.000.000	448.000	1.448.000	
152	Kab. Bekasi	4.172.622	2.200.000	280.000	6.652.622	
153	Kab. Bogor	650.000	8.062.610	522.999	9.235.609	
154	Kab. Ciamis		815.666	516.000	1.331.666	8.739.657
155	Kab. Cianjur	1.200.000	15.341.638	523.000	17.064.638	
156	Kab. Cirebon	200.000	13.272.194	398.000	13.870.194	
157	Kab. Garut	3.500.000	16.781.243	516.000	20.797.243	13.707.563

*) Perubahan Pertama

**) Perubahan Kedua

***) Perubahan Ketiga

(PMK Nomor 94 Tahun 2021)

(PMK Nomor 162 Tahun 2021)

(PMK Nomor 118 Tahun 2022)

Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021

Tanggal Berlaku: 23 November 2021

Tanggal Berlaku: 25 Juli 2022

SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Dampaknya

2. DAK FISIK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Jalan		Air Minum		
		Tematik Pembangunan Infrastruktur Ekonomi Berkelanjutan	Subtotal Jalan	Tematik Penurunan Angka Kematian Ibu dan Stunting	Tematik Penanggulangan Kemiskinan	Subtotal Air Minum
(1)	(2)	(27)	(28)=(26)+(27)	(29)	(30)	(31)=(29)+(30)
138	Kab. Lampung Timur		10.766.252	9.795.444	7.990.009	17.785.453
139	Kab. Tanggamus			7.399.145	5.808.811	13.207.956
140	Kab. Tulang Bawang	4.260.259	4.260.259		4.913.501	4.913.501
141	Kab. Way Kanan				7.504.379	7.504.379
142	Kota Bandar Lampung				871.501	871.501
143	Kota Metro				2.014.292	2.014.292
144	Kab. Pesawaran			5.039.417	5.779.311	10.818.728
145	Kab. Pringsewu			2.499.709	4.816.430	7.316.139
146	Kab. Mesuji	3.355.125	3.355.125		3.993.629	3.993.629
147	Kab. Tulang Bawang Barat				5.831.806	5.831.806
148	Kab. Pesisir Barat	10.253.170	10.253.170		4.626.870	4.626.870
149	Provinsi DKI Jakarta					
150	Provinsi Jawa Barat					
151	Kab. Bandung				7.715.573	7.715.573
152	Kab. Bekasi			2.360.467	8.414.161	10.774.628
153	Kab. Bogor			3.793.591	7.003.959	10.797.550
154	Kab. Ciamis		8.739.657		7.691.403	7.691.403
155	Kab. Cianjur			1.771.328	8.949.044	10.720.372
156	Kab. Cirebon				6.049.400	6.049.400
157	Kab. Garut		13.707.563	2.034.222	8.989.924	11.024.146

*) Perubahan Pertama

**) Perubahan Kedua

***) Perubahan Ketiga

(PMK Nomor 94 Tahun 2021)

(PMK Nomor 162 Tahun 2021)

(PMK Nomor 118 Tahun 2022)

Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021

Tanggal Berlaku: 23 November 2021

Tanggal Berlaku: 25 Juli 2022

SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Dampaknya

2. DAK FISIK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Sanitasi			Perumahan dan Permukiman	Irigasi
		Tematik Penurunan Angka Kematian Ibu dan Stunting	Tematik Penanggulangan Kemiskinan	Subtotal Sanitasi		
(1)	(2)	(32)	(33)	(34)=(32)+(33)	(35)	(36)
138	Kab. Lampung Timur	10.150.819		10.150.819		1.649.192
139	Kab. Tanggamus	8.926.771	3.599.570	12.526.341		3.606.168
140	Kab. Tulang Bawang		2.199.676	2.199.676		3.961.492
141	Kab. Way Kanan		3.058.219	3.058.219		5.258.099
142	Kota Bandar Lampung		2.947.113	2.947.113	2.199.902	
143	Kota Metro		1.563.920	1.563.920	1.233.544	
144	Kab. Pesawaran	7.343.699	2.629.380	9.973.079		7.449.762
145	Kab. Pringsewu	1.718.320	2.249.669	3.967.989	1.365.546	4.465.000
146	Kab. Mesuji		2.261.872	2.261.872	2.781.572	5.112.392
147	Kab. Tulang Bawang Barat		2.444.581	2.444.581		2.368.800
148	Kab. Pesisir Barat		1.802.479	1.802.479	1.259.012	7.850.000
149	Provinsi DKI Jakarta					
150	Provinsi Jawa Barat					120.121.523
151	Kab. Bandung	6.859.982	9.173.551	16.033.533	2.928.679	
152	Kab. Bekasi	3.754.848	7.634.647	11.389.495		
153	Kab. Bogor	3.890.562	7.649.934	11.540.496		5.391.144
154	Kab. Ciamis	4.925.115	600.000	5.525.115	1.242.572	5.852.570
155	Kab. Cianjur	3.636.657	8.848.696	12.485.353		10.847.992
156	Kab. Cirebon	12.044.600	4.899.150	16.943.750		6.398.807
157	Kab. Garut	6.090.766	4.534.332	10.625.098	1.292.475	10.650.000

*) Perubahan Pertama

**) Perubahan Kedua

***) Perubahan Ketiga

(PMK Nomor 94 Tahun 2021)

(PMK Nomor 162 Tahun 2021)

(PMK Nomor 118 Tahun 2022)

Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021

Tanggal Berlaku: 23 November 2021

Tanggal Berlaku: 25 Juli 2022

SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Dampaknya

2. DAK FISIK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Pertanian	Kelautan dan Perikanan	Industri Kecil dan Menengah	Pariwisata	Lingkungan Hidup
						Lingkungan Hidup Tematik Penurunan Angka Kematian Ibu dan Stunting
(1)	(2)	(37)	(38)	(39)	(40)	(41)
138	Kab. Lampung Timur	4.160.000	266.000			
139	Kab. Tanggamus	2.117.716	789.500			
140	Kab. Tulang Bawang	3.133.759	1.084.250			
141	Kab. Way Kanan	4.490.000		5.200.506		
142	Kota Bandar Lampung		525.000	5.326.959		2.920.000
143	Kota Metro		940.000	950.670		
144	Kab. Pesawaran	5.355.000	735.000			
145	Kab. Pringsewu	5.540.000	1.252.750	2.250.219		
146	Kab. Mesuji	2.275.000	545.000			
147	Kab. Tulang Bawang Barat	2.380.000				
148	Kab. Pesisir Barat		1.156.100	1.500.146		
149	Provinsi DKI Jakarta					
150	Provinsi Jawa Barat	11.174.794	10.525.100			
151	Kab. Bandung	8.935.000	526.100			
152	Kab. Bekasi	2.615.000	735.000			
153	Kab. Bogor	4.010.000	978.000			
154	Kab. Ciamis	4.420.000	301.500			
155	Kab. Cianjur	1.940.000	1.068.000		2.489.999	1.300.000
156	Kab. Cirebon	7.535.000				
157	Kab. Garut	4.736.130	1.318.500	1.200.116	2.945.264	1.300.000

*) Perubahan Pertama

(PMK Nomor 94 Tahun 2021)

Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021

**) Perubahan Kedua

(PMK Nomor 162 Tahun 2021)

Tanggal Berlaku: 23 November 2021

***) Perubahan Ketiga

(PMK Nomor 118 Tahun 2022)

Tanggal Berlaku: 25 Juli 2022

SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Dampaknya

2. DAK FISIK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Lingkungan Hidup			TOTAL DAK PENUGASAN	TOTAL DAK FISIK
		Lingkungan Hidup Tematik Pembangunan Infrastruktur Ekonomi Berkelanjutan	Kehutanan Tematik Ketahanan Pangan	Subtotal Lingkungan Hidup		
(1)	(2)	(42)	(43)	(44)=(41)+(42)+(43)	(45)=(25)+(28)+(31)+(34)+(35)+(36)+(37)+(38)+(39)+(40)+(44)	(46)=(21)+(45)
138	Kab. Lampung Timur				45.251.716	115.701.121
139	Kab. Tanggamus				32.981.681	126.381.251
140	Kab. Tulang Bawang				22.011.032	80.916.659
141	Kab. Way Kanan				29.125.971	119.794.131
142	Kota Bandar Lampung			2.920.000	29.962.052	64.599.896
143	Kota Metro				6.702.426	44.773.106
144	Kab. Pesawaran				34.531.569	98.787.507
145	Kab. Pringsewu				87.726.461	170.745.329
146	Kab. Mesuji				39.821.224	109.157.346
147	Kab. Tulang Bawang Barat				13.025.187	84.630.466
148	Kab. Pesisir Barat				28.447.777	89.828.466
149	Provinsi DKI Jakarta				34.399.553	58.910.468
150	Provinsi Jawa Barat		41.335.798	41.335.798	190.370.877	736.305.269
151	Kab. Bandung				37.586.885	143.557.107
152	Kab. Bekasi				32.166.745	33.529.399
153	Kab. Bogor				41.952.799	119.206.472
154	Kab. Ciamis				35.104.483	118.075.815
155	Kab. Cianjur			1.300.000	57.916.354	125.657.588
156	Kab. Cirebon				50.797.151	168.648.985
157	Kab. Garut			1.300.000	79.596.535	143.010.966

*) Perubahan Pertama

**) Perubahan Kedua

***) Perubahan Ketiga

(PMK Nomor 94 Tahun 2021)

(PMK Nomor 162 Tahun 2021)

(PMK Nomor 118 Tahun 2022)

Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021

Tanggal Berlaku: 23 November 2021

Tanggal Berlaku: 25 Juli 2022

SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Dampaknya

1. DAK FISIK REGULER

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Pendidikan				
		PAUD	SD	SMP	SMA	SMK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
158	Kab. Indramayu	672.763	25.755.928	13.426.280		
159	Kab. Karawang	335.853	14.529.734	11.151.434		
160	Kab. Kuningan	2.447.086	17.747.848	17.705.590		
161	Kab. Majalengka	1.597.826	23.384.350	14.297.336		
162	Kab. Purwakarta	673.041	25.928.850	10.750.816		
163	Kab. Subang	253.910	23.123.812	11.471.047		
164	Kab. Sukabumi		23.047.264	7.849.477		
165	Kab. Sumedang	1.709.052	25.995.807	23.079.105		
166	Kab. Tasikmalaya	275.385	22.919.143	17.185.100		
167	Kota Bandung	830.107	21.743.430	17.689.858		
168	Kota Bekasi	2.626.509	4.069.778	4.696.708		
169	Kota Bogor					
170	Kota Cirebon		22.774.627	22.567.588		
171	Kota Depok		1.928.682	5.911.094		
172	Kota Sukabumi	499.815	20.903.389	5.270.751		
173	Kota Tasikmalaya	332.994	4.975.529	2.762.356		
174	Kota Cimahi	242.162	6.439.711	1.177.919		
175	Kota Banjar					
176	Kab. Bandung Barat		15.132.766	12.975.186		
177	Kab. Pangandaran		22.975.075	16.185.944		

*) Perubahan Pertama

(PMK Nomor 94 Tahun 2021)

Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021

**) Perubahan Kedua

(PMK Nomor 162 Tahun 2021)

Tanggal Berlaku: 23 November 2021

***) Perubahan Ketiga

(PMK Nomor 118 Tahun 2022)

Tanggal Berlaku: 25 Juli 2022

SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Dampaknya

1. DAK FISIK REGULER

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Pendidikan				Kesehatan dan KB
		SKB	SLB	Perpustakaan Daerah	Subtotal Pendidikan	Pelayanan Dasar
(1)	(2)	(8)	(9)	(10)	(11)=(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)+(9)+(10)	(12)
158	Kab. Indramayu			500.000	40.354.971	6.986.135
159	Kab. Karawang	198.970			26.215.991	12.117.999
160	Kab. Kuningan	1.268.400			39.168.924	5.239.000
161	Kab. Majalengka			10.000.000	49.279.512	6.750.595
162	Kab. Purwakarta				37.352.707	5.219.650
163	Kab. Subang	859.800			35.708.569	9.500.000
164	Kab. Sukabumi				30.896.741	33.520.000
165	Kab. Sumedang				50.783.964	3.176.793
166	Kab. Tasikmalaya	198.970			40.578.598	2.036.400
167	Kota Bandung				40.263.395	910.000
168	Kota Bekasi				11.392.995	635.000
169	Kota Bogor					1.346.390
170	Kota Cirebon				45.342.215	1.881.919
171	Kota Depok				7.839.776	2.000.000
172	Kota Sukabumi				26.673.955	2.000.000
173	Kota Tasikmalaya	881.936			8.952.815	7.305.584
174	Kota Cimahi				7.859.792	4.990.096
175	Kota Banjar					
176	Kab. Bandung Barat				28.107.952	1.900.000
177	Kab. Pangandaran			364.828	39.525.847	4.754.640

*) Perubahan Pertama

**) Perubahan Kedua

***) Perubahan Ketiga

(PMK Nomor 94 Tahun 2021)

(PMK Nomor 162 Tahun 2021)

(PMK Nomor 118 Tahun 2022)

Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021

Tanggal Berlaku: 23 November 2021

Tanggal Berlaku: 25 Juli 2022

SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Dampaknya

1. DAK FISIK REGULER

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Kesehatan dan KB				Subtotal Kesehatan dan KB
		Pelayanan Rujukan	Pelayanan Kefarmasian dan Bahan Habis Pakai	Peningkatan Kesiapan Sistem Kesehatan	Keluarga Berencana	
(1)	(2)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)=(12)+(13)+(14)+(15)+(16)
158	Kab. Indramayu	38.998.631	12.515.392	708.266	1.493.873	60.702.297
159	Kab. Karawang	22.820.919	8.378.017		1.110.311	44.427.246
160	Kab. Kuningan	11.247.932	6.741.956	1.208.419	1.488.826	25.926.133
161	Kab. Majalengka	5.400.000	8.379.947		1.233.455	21.763.997
162	Kab. Purwakarta	6.300.000	5.434.170	3.992.118	1.483.779	22.429.717
163	Kab. Subang	11.531.673	3.474.620	10.597.789	1.261.717	36.365.799
164	Kab. Sukabumi	200.000	7.403.838	6.654.965	1.423.116	49.201.919
165	Kab. Sumedang		5.439.049		1.064.889	9.680.731
166	Kab. Tasikmalaya	3.000.000	8.855.927	4.339.061	1.176.021	19.407.409
167	Kota Bandung	1.428.533	14.177.651	243.310	1.110.291	17.869.785
168	Kota Bekasi	2.660.000	9.783.859	1.321.452	1.110.311	15.510.622
169	Kota Bogor	2.457.000	4.368.648	645.000	1.110.230	9.927.268
170	Kota Cirebon	5.330.540	3.369.865	628.000	1.085.884	12.296.208
171	Kota Depok		13.581.164	2.920.000	1.110.011	19.611.175
172	Kota Sukabumi	9.944.687	3.042.733	200.000	1.130.498	16.317.918
173	Kota Tasikmalaya	4.961.570	10.262.545	390.000	1.354.579	24.274.278
174	Kota Cimahi		1.441.143			6.431.239
175	Kota Banjar		1.880.422		1.482.265	3.362.687
176	Kab. Bandung Barat	7.442.719	8.881.733	1.204.391	1.252.734	20.681.577
177	Kab. Pangandaran		5.760.483	1.099.398	1.034.608	12.649.129

*) Perubahan Pertama

**) Perubahan Kedua

***) Perubahan Ketiga

(PMK Nomor 94 Tahun 2021)

(PMK Nomor 162 Tahun 2021)

(PMK Nomor 118 Tahun 2022)

Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021

Tanggal Berlaku: 23 November 2021

Tanggal Berlaku: 25 Juli 2022

SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Dampaknya

1. DAK FISIK REGULER

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Jalan	Transportasi Perdesaan	Transportasi Laut	TOTAL DAK REGULER
(1)	(2)	(18)	(19)	(20)	(21)=(11)+(17)+(18)+(19)+(20)
158	Kab. Indramayu				101.057.268
159	Kab. Karawang	11.380.915			82.024.152
160	Kab. Kuningan	29.855.872			94.950.929
161	Kab. Majalengka	25.830.441			96.873.950
162	Kab. Purwakarta	10.124.698			69.907.122
163	Kab. Subang	30.753.841			102.828.209
164	Kab. Sukabumi	11.104.719			91.203.379
165	Kab. Sumedang	4.175.334			64.640.029
166	Kab. Tasikmalaya	10.101.087			70.087.094
167	Kota Bandung				58.133.180
168	Kota Bekasi				26.903.617
169	Kota Bogor	4.566.803			14.494.071
170	Kota Cirebon				57.638.423
171	Kota Depok				27.450.951
172	Kota Sukabumi	13.451.522			56.443.395
173	Kota Tasikmalaya	18.049.862			51.276.955
174	Kota Cimahi	6.142.613			20.433.644
175	Kota Banjar	1.630.000			4.992.687
176	Kab. Bandung Barat				48.789.529
177	Kab. Pangandaran	28.350.872			80.525.848

*) Perubahan Pertama

**) Perubahan Kedua

***) Perubahan Ketiga

(PMK Nomor 94 Tahun 2021)

(PMK Nomor 162 Tahun 2021)

(PMK Nomor 118 Tahun 2022)

Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021

Tanggal Berlaku: 23 November 2021

Tanggal Berlaku: 25 Juli 2022

SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Dampaknya

2. DAK FISIK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Kesehatan dan KB				Jalan
		Penguatan Intervensi Stunting	Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi	Keluarga Berencana	Subtotal Kesehatan dan KB	Tematik Ketahanan Pangan
(1)	(2)	(22)	(23)	(24)	(25)=(22)+(23)+(24)	(26)
158	Kab. Indramayu		14.688.937	515.999	15.204.936	
159	Kab. Karawang	200.000	8.348.576	329.999	8.878.575	
160	Kab. Kuningan		5.369.152	506.000	5.875.152	
161	Kab. Majalengka		9.932.685	478.000	10.410.685	13.990.742
162	Kab. Purwakarta	650.000	12.506.956	526.150	13.683.106	
163	Kab. Subang		3.816.951	369.999	4.186.950	12.684.375
164	Kab. Sukabumi	2.131.755	32.215.099	280.000	34.626.854	8.822.963
165	Kab. Sumedang	550.000	22.671.918	320.000	23.541.918	
166	Kab. Tasikmalaya	3.016.337	22.928.214	477.999	26.422.550	10.160.633
167	Kota Bandung	2.983.875	10.296.740	403.999	13.684.614	
168	Kota Bekasi	4.082.558	12.503.514	478.000	17.064.072	
169	Kota Bogor	464.202		318.000	782.202	
170	Kota Cirebon					
171	Kota Depok	850.000		427.650	1.277.650	
172	Kota Sukabumi		4.837.555		4.837.555	
173	Kota Tasikmalaya	1.718.638	6.303.828	516.000	8.538.466	
174	Kota Cimahi	832.000	9.879.400	182.000	10.893.400	
175	Kota Banjar		8.259.558		8.259.558	
176	Kab. Bandung Barat	3.240.739	42.793.165	388.000	46.421.904	
177	Kab. Pangandaran		34.153.530		34.153.530	

*) Perubahan Pertama

(PMK Nomor 94 Tahun 2021)

Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021

**) Perubahan Kedua

(PMK Nomor 162 Tahun 2021)

Tanggal Berlaku: 23 November 2021

***) Perubahan Ketiga

(PMK Nomor 118 Tahun 2022)

Tanggal Berlaku: 25 Juli 2022

SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Dampaknya

2. DAK FISIK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Jalan		Air Minum		
		Tematik Pembangunan Infrastruktur Ekonomi Berkelanjutan	Subtotal Jalan	Tematik Penurunan Angka Kematian Ibu dan Stunting	Tematik Penanggulangan Kemiskinan	Subtotal Air Minum
(1)	(2)	(27)	(28)=(26)+(27)	(29)	(30)	(31)=(29)+(30)
158	Kab. Indramayu			628.261	1.884.783	2.513.044
159	Kab. Karawang			6.099.290	6.982.436	13.081.726
160	Kab. Kuningan			2.399.723	6.679.608	9.079.331
161	Kab. Majalengka		13.990.742	2.927.659		2.927.659
162	Kab. Purwakarta			15.848.168	4.048.577	19.896.745
163	Kab. Subang		12.684.375	2.499.709	5.680.027	8.179.736
164	Kab. Sukabumi		8.822.963	6.120.189	8.267.957	14.388.146
165	Kab. Sumedang			2.730.797	5.701.576	8.432.373
166	Kab. Tasikmalaya		10.160.633		6.497.717	6.497.717
167	Kota Bandung					
168	Kota Bekasi			4.921.900	5.780.251	10.702.151
169	Kota Bogor				1.625.000	1.625.000
170	Kota Cirebon					
171	Kota Depok				5.000.000	5.000.000
172	Kota Sukabumi				4.835.327	4.835.327
173	Kota Tasikmalaya				3.938.414	3.938.414
174	Kota Cimahi				1.000.000	1.000.000
175	Kota Banjar				4.445.525	4.445.525
176	Kab. Bandung Barat					
177	Kab. Pangandaran				3.755.896	3.755.896

*) Perubahan Pertama

**) Perubahan Kedua

***) Perubahan Ketiga

(PMK Nomor 94 Tahun 2021)

(PMK Nomor 162 Tahun 2021)

(PMK Nomor 118 Tahun 2022)

Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021

Tanggal Berlaku: 23 November 2021

Tanggal Berlaku: 25 Juli 2022

SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Dampaknya

2. DAK FISIK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Sanitasi			Perumahan dan Permukiman	Irigasi
		Tematik Penurunan Angka Kematian Ibu dan Stunting	Tematik Penanggulangan Kemiskinan	Subtotal Sanitasi		
(1)	(2)	(32)	(33)	(34)=(32)+(33)	(35)	(36)
158	Kab. Indramayu	1.111.350		1.111.350	1.306.895	
159	Kab. Karawang	4.677.650	8.067.949	12.745.599	880.726	3.260.000
160	Kab. Kuningan	7.713.082	3.544.342	11.257.424	2.738.238	11.537.000
161	Kab. Majalengka				2.997.982	6.100.000
162	Kab. Purwakarta	16.819.538	1.349.801	18.169.339	883.691	8.112.650
163	Kab. Subang					4.900.000
164	Kab. Sukabumi	7.773.354	600.000	8.373.354	877.489	7.669.450
165	Kab. Sumedang		3.779.677	3.779.677	1.075.827	3.322.303
166	Kab. Tasikmalaya	4.636.738	4.599.322	9.236.060	1.075.328	2.828.000
167	Kota Bandung	350.000	683.137	1.033.137	2.689.564	
168	Kota Bekasi		3.955.014	3.955.014	1.001.607	
169	Kota Bogor		4.259.846	4.259.846	911.103	
170	Kota Cirebon					
171	Kota Depok	1.454.663		1.454.663		
172	Kota Sukabumi		2.199.676	2.199.676	1.269.751	3.956.611
173	Kota Tasikmalaya		5.010.986	5.010.986	1.463.801	1.848.000
174	Kota Cimahi		3.499.484	3.499.484	1.206.893	
175	Kota Banjar		500.000	500.000		
176	Kab. Bandung Barat				933.069	
177	Kab. Pangandaran		2.446.810	2.446.810	1.512.521	3.026.605

*) Perubahan Pertama

**) Perubahan Kedua

***) Perubahan Ketiga

(PMK Nomor 94 Tahun 2021)

(PMK Nomor 162 Tahun 2021)

(PMK Nomor 118 Tahun 2022)

Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021

Tanggal Berlaku: 23 November 2021

Tanggal Berlaku: 25 Juli 2022

SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Dampaknya

2. DAK FISIK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Pertanian	Kelautan dan Perikanan	Industri Kecil dan Menengah	Pariwisata	Lingkungan Hidup
						Lingkungan Hidup Tematik Penurunan Angka Kematian Ibu dan Stunting
(1)	(2)	(37)	(38)	(39)	(40)	(41)
158	Kab. Indramayu	6.702.627	2.158.756			
159	Kab. Karawang	3.885.000	1.319.970			3.150.000
160	Kab. Kuningan	3.182.025	1.175.000	5.000.487		1.000.000
161	Kab. Majalengka	4.498.000	875.000	5.000.487		
162	Kab. Purwakarta	4.180.000	913.000			5.876.000
163	Kab. Subang	5.130.000	2.352.000			
164	Kab. Sukabumi	7.478.500	1.578.400	3.100.302		1.300.000
165	Kab. Sumedang	7.245.000	864.000			
166	Kab. Tasikmalaya	4.049.350	2.424.000			
167	Kota Bandung					3.608.350
168	Kota Bekasi					
169	Kota Bogor					
170	Kota Cirebon		638.400			
171	Kota Depok					
172	Kota Sukabumi	1.233.672	788.610			
173	Kota Tasikmalaya		1.261.800	14.601.422		
174	Kota Cimahi					
175	Kota Banjar					
176	Kab. Bandung Barat	3.175.970	804.984			
177	Kab. Pangandaran	2.435.000	2.206.450		2.061.663	

*) Perubahan Pertama

**) Perubahan Kedua

***) Perubahan Ketiga

(PMK Nomor 94 Tahun 2021)

(PMK Nomor 162 Tahun 2021)

(PMK Nomor 118 Tahun 2022)

Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021

Tanggal Berlaku: 23 November 2021

Tanggal Berlaku: 25 Juli 2022

SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Dampaknya

2. DAK FISIK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Lingkungan Hidup			TOTAL DAK PENUGASAN	TOTAL DAK FISIK
		Lingkungan Hidup Tematik Pembangunan Infrastruktur Ekonomi Berkelanjutan	Kehutanan Tematik Ketahanan Pangan	Subtotal Lingkungan Hidup		
(1)	(2)	(42)	(43)	(44)=(41)+(42)+(43)	(45)=(25)+(28)+(31)+(34)+(35)+(36)+(37)+(38)+(39)+(40)+(44)	(46)=(21)+(45)
158	Kab. Indramayu				28.997.608	130.054.876
159	Kab. Karawang			3.150.000	47.201.596	129.225.748
160	Kab. Kuningan			1.000.000	50.844.657	145.795.586
161	Kab. Majalengka				46.800.555	143.674.505
162	Kab. Purwakarta			5.876.000	71.714.531	141.621.653
163	Kab. Subang				37.433.061	140.261.270
164	Kab. Sukabumi			1.300.000	88.215.458	179.418.837
165	Kab. Sumedang				48.261.098	112.901.127
166	Kab. Tasikmalaya				62.693.638	132.780.732
167	Kota Bandung			3.608.350	21.015.665	79.148.845
168	Kota Bekasi				32.722.844	59.626.461
169	Kota Bogor				7.578.151	22.072.222
170	Kota Cirebon				638.400	58.276.823
171	Kota Depok				7.732.313	35.183.264
172	Kota Sukabumi				19.121.202	75.564.597
173	Kota Tasikmalaya				36.662.889	87.939.844
174	Kota Cimahi				16.599.777	37.033.421
175	Kota Banjar				13.205.083	18.197.770
176	Kab. Bandung Barat				51.335.927	100.125.456
177	Kab. Pangandaran				51.598.475	132.124.323

*) Perubahan Pertama

**) Perubahan Kedua

***) Perubahan Ketiga

(PMK Nomor 94 Tahun 2021)

(PMK Nomor 162 Tahun 2021)

(PMK Nomor 118 Tahun 2022)

Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021

Tanggal Berlaku: 23 November 2021

Tanggal Berlaku: 25 Juli 2022

SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Dampaknya

1. DAK FISIK REGULER

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Pendidikan				
		PAUD	SD	SMP	SMA	SMK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
178	Provinsi Jawa Tengah				56.213.112	168.291.945
179	Kab. Banjarnegara	282.161	15.807.122	9.553.460		
180	Kab. Banyumas	214.762	23.343.909	10.405.919		
181	Kab. Batang	1.135.041	14.217.588	14.845.398		
182	Kab. Blora	339.614	23.156.250	9.314.312		
183	Kab. Boyolali		17.366.105	12.696.869		
184	Kab. Brebes	390.086	26.778.099	16.420.985		
185	Kab. Cilacap		16.618.050	16.123.984		
186	Kab. Demak	1.566.593	15.109.580	12.923.975		
187	Kab. Grobogan	290.640	23.662.168	26.732.041		
188	Kab. Jepara	636.014	11.484.231	10.173.129		
189	Kab. Karanganyar		7.893.350	1.559.104		
190	Kab. Kebumen		6.927.787	6.882.088		
191	Kab. Kendal	300.784	12.951.995	1.248.550		
192	Kab. Klaten		11.660.183	1.134.888		
193	Kab. Kudus	252.708	14.768.084	4.281.659		
194	Kab. Magelang	273.472	18.605.806	5.546.178		
195	Kab. Pati	436.512	24.155.907	11.660.597		
196	Kab. Pekalongan	1.140.090	23.043.599	10.756.002		
197	Kab. Pemasang	660.449	10.518.064	29.131.135		

*) Perubahan Pertama

**) Perubahan Kedua

***) Perubahan Ketiga

(PMK Nomor 94 Tahun 2021)

(PMK Nomor 162 Tahun 2021)

(PMK Nomor 118 Tahun 2022)

Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021

Tanggal Berlaku: 23 November 2021

Tanggal Berlaku: 25 Juli 2022

SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Dampaknya

1. DAK FISIK REGULER

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Pendidikan				Kesehatan dan KB
		SKB	SLB	Perpustakaan Daerah	Subtotal Pendidikan	Pelayanan Dasar
(1)	(2)	(8)	(9)	(10)	(11)=(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)+(9)+(10)	(12)
178	Provinsi Jawa Tengah		8.395.710	300.000	233.200.767	
179	Kab. Banjarnegara	200.000			25.842.743	9.636.000
180	Kab. Banyumas	570.447			34.535.037	5.786.780
181	Kab. Batang	1.033.460			31.231.487	2.000.000
182	Kab. Blora	1.084.350			33.894.526	13.507.200
183	Kab. Boyolali			10.000.000	40.062.974	9.825.018
184	Kab. Brebes	724.200		152.600	44.465.970	2.000.000
185	Kab. Cilacap	198.970			32.941.004	2.098.530
186	Kab. Demak			300.000	29.900.148	5.127.700
187	Kab. Grobogan	1.079.800		800.000	52.564.649	6.075.566
188	Kab. Jepara	972.225		182.500	23.448.099	6.516.472
189	Kab. Karanganyar	200.000		1.000.000	10.652.454	11.193.422
190	Kab. Kebumen			300.000	14.109.875	8.996.146
191	Kab. Kendal			10.000.000	24.501.329	7.301.188
192	Kab. Klaten	240.455			13.035.526	4.691.000
193	Kab. Kudus				19.302.451	1.160.400
194	Kab. Magelang	1.256.993		300.000	25.982.449	2.682.107
195	Kab. Pati	1.045.000			37.298.016	6.914.395
196	Kab. Pekalongan				34.939.691	8.914.598
197	Kab. Pemasang	1.377.900		500.000	42.187.548	3.636.800

*) Perubahan Pertama

**) Perubahan Kedua

***) Perubahan Ketiga

(PMK Nomor 94 Tahun 2021)

(PMK Nomor 162 Tahun 2021)

(PMK Nomor 118 Tahun 2022)

Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021

Tanggal Berlaku: 23 November 2021

Tanggal Berlaku: 25 Juli 2022

SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Dampaknya

1. DAK FISIK REGULER

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Kesehatan dan KB				Subtotal Kesehatan dan KB
		Pelayanan Rujukan	Pelayanan Kefarmasian dan Bahan Habis Pakai	Peningkatan Kesiapan Sistem Kesehatan	Keluarga Berencana	
(1)	(2)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)=(12)+(13)+(14)+(15)+(16)
178	Provinsi Jawa Tengah	63.069.522		1.556.082		64.625.604
179	Kab. Banjarnegara	7.888.000	6.513.840	2.167.300	1.261.717	27.466.857
180	Kab. Banyumas		9.876.185	3.627.500	612.282	19.902.747
181	Kab. Batang	3.000.000	4.915.216	505.041	1.578.257	11.998.514
182	Kab. Blora		4.642.319	390.000	1.059.842	19.599.361
183	Kab. Boyolali	47.637.421	6.513.135	208.365	1.257.957	65.441.896
184	Kab. Brebes	3.000.000	8.666.718	4.160.170	1.261.717	19.088.605
185	Kab. Cilacap	7.904.225	9.317.372	893.327	1.111.320	21.324.774
186	Kab. Demak		5.005.479	5.441.505	1.059.842	16.634.526
187	Kab. Grobogan	3.000.000	7.636.563	1.372.092	1.059.842	19.144.063
188	Kab. Jepara	6.715.820	7.770.684	408.000	1.278.271	22.689.247
189	Kab. Karanganyar	3.709.000	5.063.591	964.361	1.239.965	22.170.339
190	Kab. Kebumen	14.444.000	7.740.276	2.545.006	1.189.042	34.914.470
191	Kab. Kendal	694.789	5.780.474	1.534.900	1.299.266	16.610.617
192	Kab. Klaten		5.084.356	734.559	1.122.313	11.632.228
193	Kab. Kudus		4.542.689	200.000	1.018.206	6.921.295
194	Kab. Magelang	52.527.470	10.811.236	10.001.470		76.022.283
195	Kab. Pati		6.450.953	7.567.425	1.059.842	21.992.615
196	Kab. Pekalongan	10.703.200	6.059.995	1.390.068	975.156	28.043.017
197	Kab. Pemasang	3.000.000	6.065.852	1.484.114	1.497.002	15.683.768

*) Perubahan Pertama

(PMK Nomor 94 Tahun 2021)

Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021

**) Perubahan Kedua

(PMK Nomor 162 Tahun 2021)

Tanggal Berlaku: 23 November 2021

***) Perubahan Ketiga

(PMK Nomor 118 Tahun 2022)

Tanggal Berlaku: 25 Juli 2022

SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Dampaknya

1. DAK FISIK REGULER

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Jalan	Transportasi Perdesaan	Transportasi Laut	TOTAL DAK REGULER
(1)	(2)	(18)	(19)	(20)	(21)=(11)+(17)+(18)+(19)+(20)
178	Provinsi Jawa Tengah	7.957.843			305.784.214
179	Kab. Banjarnegara	6.940.902			60.250.502
180	Kab. Banyumas	12.186.015			66.623.799
181	Kab. Batang	25.282.230			68.512.231
182	Kab. Blora	12.574.132			66.068.019
183	Kab. Boyolali	7.246.058			112.750.928
184	Kab. Brebes	10.198.875			73.753.450
185	Kab. Cilacap	9.110.885			63.376.663
186	Kab. Demak	7.948.333			54.483.007
187	Kab. Grobogan	11.517.272			83.225.984
188	Kab. Jepara	32.622.948		12.393.000	91.153.294
189	Kab. Karanganyar	9.047.239			41.870.032
190	Kab. Kebumen	9.935.662			58.960.007
191	Kab. Kendal	9.136.573		3.001.450	53.249.969
192	Kab. Klaten	10.894.271			35.562.025
193	Kab. Kudus	6.053.054			32.276.800
194	Kab. Magelang	10.927.132			112.931.864
195	Kab. Pati	8.276.380			67.567.011
196	Kab. Pekalongan	7.555.973			70.538.681
197	Kab. Pemasang	9.241.601			67.112.917

*) Perubahan Pertama

**) Perubahan Kedua

***) Perubahan Ketiga

(PMK Nomor 94 Tahun 2021)

(PMK Nomor 162 Tahun 2021)

(PMK Nomor 118 Tahun 2022)

Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021

Tanggal Berlaku: 23 November 2021

Tanggal Berlaku: 25 Juli 2022

SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Dampaknya

2. DAK FISIK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Kesehatan dan KB				Jalan
		Penguatan Intervensi Stunting	Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi	Keluarga Berencana	Subtotal Kesehatan dan KB	Tematik Ketahanan Pangan
(1)	(2)	(22)	(23)	(24)	(25)=(22)+(23)+(24)	(26)
178	Provinsi Jawa Tengah	24.844.514	25.276.619		50.121.133	37.483.801
179	Kab. Banjarnegara	3.542.000		280.000	3.822.000	
180	Kab. Banyumas		103.230.622	280.000	103.510.622	
181	Kab. Batang	945.000	18.911.673	280.000	20.136.673	
182	Kab. Blora		42.377.000	229.500	42.606.500	7.956.164
183	Kab. Boyolali	430.372	26.067.066	280.000	26.777.438	
184	Kab. Brebes	200.000	30.123.172	280.000	30.603.172	
185	Kab. Cilacap		9.792.862	280.000	10.072.862	7.182.639
186	Kab. Demak	650.000	25.890.632	280.000	26.820.632	7.184.302
187	Kab. Grobogan		33.609.078	329.999	33.939.077	8.296.733
188	Kab. Jepara			280.000	280.000	
189	Kab. Karanganyar	204.257		280.000	484.257	
190	Kab. Kebumen			280.000	280.000	
191	Kab. Kendal	1.405.212	8.086.644	244.000	9.735.856	
192	Kab. Klaten		6.358.658	230.000	6.588.658	
193	Kab. Kudus	1.139.985	11.300.834	252.000	12.692.819	
194	Kab. Magelang	635.000		244.000	879.000	
195	Kab. Pati	1.700.000	12.845.339	184.000	14.729.339	7.534.423
196	Kab. Pekalongan			244.000	244.000	
197	Kab. Pemasang	625.000	11.549.552	244.000	12.418.552	

*) Perubahan Pertama

**) Perubahan Kedua

***) Perubahan Ketiga

(PMK Nomor 94 Tahun 2021)

(PMK Nomor 162 Tahun 2021)

(PMK Nomor 118 Tahun 2022)

Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021

Tanggal Berlaku: 23 November 2021

Tanggal Berlaku: 25 Juli 2022

SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Dampaknya

2. DAK FISIK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Jalan		Air Minum		
		Tematik Pembangunan Infrastruktur Ekonomi Berkelanjutan	Subtotal Jalan	Tematik Penurunan Angka Kematian Ibu dan Stunting	Tematik Penanggulangan Kemiskinan	Subtotal Air Minum
(1)	(2)	(27)	(28)=(26)+(27)	(29)	(30)	(31)=(29)+(30)
178	Provinsi Jawa Tengah		37.483.801			
179	Kab. Banjarnegara				5.485.509	5.485.509
180	Kab. Banyumas			2.214.158	7.115.774	9.329.932
181	Kab. Batang				6.082.731	6.082.731
182	Kab. Blora		7.956.164	13.898.383	4.798.314	18.696.697
183	Kab. Boyolali	2.672.433	2.672.433		5.040.229	5.040.229
184	Kab. Brebes			10.428.794	6.672.538	17.101.332
185	Kab. Cilacap		7.182.639	3.283.639	6.884.245	10.167.884
186	Kab. Demak		7.184.302	4.799.442	6.404.771	11.204.213
187	Kab. Grobogan		8.296.733		6.003.670	6.003.670
188	Kab. Jepara			3.527.592	7.183.725	10.711.317
189	Kab. Karanganyar				5.594.314	5.594.314
190	Kab. Kebumen				5.199.754	5.199.754
191	Kab. Kendal				5.130.598	5.130.598
192	Kab. Klaten				2.489.125	2.489.125
193	Kab. Kudus				5.204.962	5.204.962
194	Kab. Magelang				6.414.654	6.414.654
195	Kab. Pati		7.534.423		2.529.111	2.529.111
196	Kab. Pekalongan			999.884	4.457.693	5.457.577
197	Kab. Pemasang			797.907	8.255.074	9.052.981

*) Perubahan Pertama

**) Perubahan Kedua

***) Perubahan Ketiga

(PMK Nomor 94 Tahun 2021)

(PMK Nomor 162 Tahun 2021)

(PMK Nomor 118 Tahun 2022)

Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021

Tanggal Berlaku: 23 November 2021

Tanggal Berlaku: 25 Juli 2022

SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Dampaknya

2. DAK FISIK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Sanitasi			Perumahan dan Permukiman	Irigasi
		Tematik Penurunan Angka Kematian Ibu dan Stunting	Tematik Penanggulangan Kemiskinan	Subtotal Sanitasi		
(1)	(2)	(32)	(33)	(34)=(32)+(33)	(35)	(36)
178	Provinsi Jawa Tengah					14.168.369
179	Kab. Banjarnegara		4.999.263	4.999.263	2.792.077	4.960.000
180	Kab. Banyumas	2.672.943	7.235.300	9.908.243	2.794.613	11.839.000
181	Kab. Batang		4.211.552	4.211.552	2.388.374	2.965.129
182	Kab. Blora	12.000.968	3.149.536	15.150.504	2.983.411	12.273.289
183	Kab. Boyolali		2.688.791	2.688.791	2.980.796	4.230.000
184	Kab. Brebes	8.000.645		8.000.645	2.803.980	5.850.000
185	Kab. Cilacap	1.657.225	6.190.950	7.848.175	2.214.591	8.084.613
186	Kab. Demak	615.639	2.944.169	3.559.808	2.842.734	3.500.000
187	Kab. Grobogan		4.614.143	4.614.143	1.306.528	7.550.000
188	Kab. Jepara	5.182.236	6.631.181	11.813.417	3.341.381	28.850.000
189	Kab. Karanganyar		2.087.337	2.087.337	2.068.463	11.423.742
190	Kab. Kebumen	2.263.362	1.994.986	4.258.348	2.715.051	2.396.064
191	Kab. Kendal		6.516.152	6.516.152	15.271.599	3.800.000
192	Kab. Klaten	2.727.493	2.399.646	5.127.139	2.809.017	1.865.417
193	Kab. Kudus		1.074.842	1.074.842	1.212.370	4.700.000
194	Kab. Magelang		4.662.819	4.662.819	1.155.000	3.846.091
195	Kab. Pati		2.412.145	2.412.145	2.811.586	3.485.296
196	Kab. Pekalongan	1.136.455	3.458.938	4.595.393	2.827.615	3.250.000
197	Kab. Pemalang	2.227.452	3.799.440	6.026.892	32.812.440	1.792.343

*) Perubahan Pertama

**) Perubahan Kedua

***) Perubahan Ketiga

(PMK Nomor 94 Tahun 2021)

(PMK Nomor 162 Tahun 2021)

(PMK Nomor 118 Tahun 2022)

Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021

Tanggal Berlaku: 23 November 2021

Tanggal Berlaku: 25 Juli 2022

SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Dampaknya

2. DAK FISIK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Pertanian	Kelautan dan Perikanan	Industri Kecil dan Menengah	Pariwisata	Lingkungan Hidup
						Lingkungan Hidup Tematik Penurunan Angka Kematian Ibu dan Stunting
(1)	(2)	(37)	(38)	(39)	(40)	(41)
178	Provinsi Jawa Tengah	4.658.099	17.231.549		6.024.302	
179	Kab. Banjarnegara	2.160.000	926.750			
180	Kab. Banyumas	5.695.000	784.900			6.406.687
181	Kab. Batang	4.645.000	640.000			
182	Kab. Blora	7.465.000				1.300.000
183	Kab. Boyolali	5.160.000	1.047.500	2.500.243	6.547.662	
184	Kab. Brebes	3.506.737	1.257.500			
185	Kab. Cilacap	6.106.892	750.000	3.650.355		3.150.000
186	Kab. Demak	5.046.398	1.093.000			
187	Kab. Grobogan	8.945.000		1.260.122		
188	Kab. Jepara	4.364.850	1.102.560		9.232.025	
189	Kab. Karanganyar	4.589.932	615.950		1.399.999	
190	Kab. Kebumen	3.875.000	1.391.000	1.360.398		
191	Kab. Kendal	6.070.000	1.063.300			
192	Kab. Klaten	8.170.000	700.400	1.373.333	1.751.716	1.300.000
193	Kab. Kudus	1.300.000				
194	Kab. Magelang	5.595.236	981.000	600.058	6.112.935	
195	Kab. Pati	4.550.000	1.377.267			4.839.000
196	Kab. Pekalongan	975.000	1.277.000	6.000.584		
197	Kab. Pemalang	6.150.000	1.496.750			2.691.000

*) Perubahan Pertama

**) Perubahan Kedua

***) Perubahan Ketiga

(PMK Nomor 94 Tahun 2021)

(PMK Nomor 162 Tahun 2021)

(PMK Nomor 118 Tahun 2022)

Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021

Tanggal Berlaku: 23 November 2021

Tanggal Berlaku: 25 Juli 2022

SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Dampaknya

2. DAK FISIK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Lingkungan Hidup			TOTAL DAK PENUGASAN	TOTAL DAK FISIK
		Lingkungan Hidup Tematik Pembangunan Infrastruktur Ekonomi Berkelanjutan	Kehutanan Tematik Ketahanan Pangan	Subtotal Lingkungan Hidup		
(1)	(2)	(42)	(43)	(44)=(41)+(42)+(43)	(45)=(25)+(28)+(31)+(34)+(35)+(36)+(37)+(38)+(39)+(40)+(44)	(46)=(21)+(45)
178	Provinsi Jawa Tengah		27.770.086	27.770.086	157.457.339	463.241.553
179	Kab. Banjarnegara				25.145.599	85.396.101
180	Kab. Banyumas			6.406.687	150.268.997	216.892.796
181	Kab. Batang				41.069.459	109.581.690
182	Kab. Blora			1.300.000	108.431.565	174.499.584
183	Kab. Boyolali				59.645.092	172.396.020
184	Kab. Brebes				69.123.366	142.876.816
185	Kab. Cilacap			3.150.000	59.228.011	122.604.674
186	Kab. Demak				61.251.087	115.734.094
187	Kab. Grobogan				71.915.273	155.141.257
188	Kab. Jepara				69.695.550	160.848.844
189	Kab. Karanganyar				28.263.994	70.134.026
190	Kab. Kebumen				21.475.615	80.435.622
191	Kab. Kendal				47.587.505	100.837.474
192	Kab. Klaten			1.300.000	32.174.805	67.736.830
193	Kab. Kudus				26.184.993	58.461.793
194	Kab. Magelang	3.800.000		3.800.000	34.046.793	146.978.657
195	Kab. Pati			4.839.000	44.268.167	111.835.178
196	Kab. Pekalongan				24.627.169	95.165.850
197	Kab. Pemasang			2.691.000	72.440.958	139.553.875

*) Perubahan Pertama

**) Perubahan Kedua

***) Perubahan Ketiga

(PMK Nomor 94 Tahun 2021)

(PMK Nomor 162 Tahun 2021)

(PMK Nomor 118 Tahun 2022)

Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021

Tanggal Berlaku: 23 November 2021

Tanggal Berlaku: 25 Juli 2022

SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Dampaknya

1. DAK FISIK REGULER

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Pendidikan				
		PAUD	SD	SMP	SMA	SMK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
198	Kab. Purbalingga	360.930	15.957.249	17.082.474		
199	Kab. Purworejo	305.330	5.856.192	9.954.142		
200	Kab. Rembang	747.715	22.877.295	8.427.826		
201	Kab. Semarang	712.703	19.908.114	3.094.393		
202	Kab. Sragen	252.560	8.780.502	8.480.579		
203	Kab. Sukoharjo	637.605	4.863.720	7.880.376		
204	Kab. Tegal	869.338	25.847.069	21.681.980		
205	Kab. Temanggung	728.247	16.953.345	17.475.203		
206	Kab. Wonogiri	1.575.283	20.912.678	16.584.232		
207	Kab. Wonosobo		15.484.321	13.143.393		
208	Kota Magelang			1.042.528		
209	Kota Pekalongan	689.136	13.034.642	17.382.665		
210	Kota Salatiga					
211	Kota Semarang	475.186	4.889.482	8.366.727		
212	Kota Surakarta	653.282	13.231.093	3.012.120		
213	Kota Tegal	261.030	8.549.533	1.532.677		
214	Provinsi DI Yogyakarta				15.195.182	68.063.624
215	Kab. Bantul	228.524	2.934.734	4.887.537		
216	Kab. Gunungkidul	2.168.084	26.268.295	24.838.201		
217	Kab. Kulon Progo	354.314	9.461.742	15.727.370		

*) Perubahan Pertama

**) Perubahan Kedua

***) Perubahan Ketiga

(PMK Nomor 94 Tahun 2021)

(PMK Nomor 162 Tahun 2021)

(PMK Nomor 118 Tahun 2022)

Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021

Tanggal Berlaku: 23 November 2021

Tanggal Berlaku: 25 Juli 2022

SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Dampaknya

1. DAK FISIK REGULER

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Pendidikan				Kesehatan dan KB
		SKB	SLB	Perpustakaan Daerah	Subtotal Pendidikan	Pelayanan Dasar
(1)	(2)	(8)	(9)	(10)	(11)=(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)+(9)+(10)	(12)
198	Kab. Purbalingga			556.225	33.956.878	5.600.000
199	Kab. Purworejo			9.956.680	26.072.344	8.077.488
200	Kab. Rembang				32.052.836	3.552.927
201	Kab. Semarang	810.704			24.525.914	2.000.000
202	Kab. Sragen			499.966	18.013.607	9.874.717
203	Kab. Sukoharjo				13.381.701	2.470.310
204	Kab. Tegal	1.775.300			50.173.687	10.261.000
205	Kab. Temanggung				35.156.795	29.088.000
206	Kab. Wonogiri				39.072.193	11.869.991
207	Kab. Wonosobo				28.627.714	8.410.000
208	Kota Magelang				1.042.528	5.500.000
209	Kota Pekalongan				31.106.443	1.648.520
210	Kota Salatiga					
211	Kota Semarang	897.752		201.656	14.830.803	2.365.000
212	Kota Surakarta	456.636			17.353.131	1.960.160
213	Kota Tegal	1.074.040		492.000	11.909.280	4.550.000
214	Provinsi DI Yogyakarta		2.201.820	300.000	85.760.626	
215	Kab. Bantul	730.800			8.781.595	8.135.232
216	Kab. Gunungkidul	4.478.000		10.000.000	67.752.580	10.940.000
217	Kab. Kulon Progo	890.800			26.434.226	16.104.264

*) Perubahan Pertama

**) Perubahan Kedua

***) Perubahan Ketiga

(PMK Nomor 94 Tahun 2021)

(PMK Nomor 162 Tahun 2021)

(PMK Nomor 118 Tahun 2022)

Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021

Tanggal Berlaku: 23 November 2021

Tanggal Berlaku: 25 Juli 2022

SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Dampaknya

1. DAK FISIK REGULER

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Kesehatan dan KB				Subtotal Kesehatan dan KB
		Pelayanan Rujukan	Pelayanan Kefarmasian dan Bahan Habis Pakai	Peningkatan Kesiapan Sistem Kesehatan	Keluarga Berencana	
(1)	(2)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)=(12)+(13)+(14)+(15)+(16)
198	Kab. Purbalingga		5.268.728	773.121	1.433.311	13.075.160
199	Kab. Purworejo	20.759.200	4.386.666	390.000	1.179.021	34.792.375
200	Kab. Rembang		6.396.759	1.500.000	1.059.842	12.509.528
201	Kab. Semarang	19.301.745	6.029.344	973.351	1.195.906	29.500.346
202	Kab. Sragen	3.000.000	5.488.374	1.394.109	1.665.467	21.422.667
203	Kab. Sukoharjo	11.721.000	5.455.324	444.261	1.359.893	21.450.788
204	Kab. Tegal		7.823.289	1.606.000	1.355.935	21.046.224
205	Kab. Temanggung	22.612.480	5.578.376	4.514.890	1.261.717	63.055.463
206	Kab. Wonogiri	8.860.000	4.960.809	540.000	1.444.414	27.675.214
207	Kab. Wonosobo	7.266.641	6.104.715	3.359.373	1.144.226	26.284.955
208	Kota Magelang	17.519.025	2.359.778	3.300.000	513.771	29.192.574
209	Kota Pekalongan	9.756.000	2.570.081	2.878.439	459.769	17.312.809
210	Kota Salatiga	5.758.625	2.003.558		1.194.617	8.956.800
211	Kota Semarang		12.933.701	8.805.313	1.345.152	25.449.166
212	Kota Surakarta	9.724.000	5.732.041	250.000	962.291	18.628.492
213	Kota Tegal	7.597.711	3.987.287	570.000	1.591.066	18.296.064
214	Provinsi DI Yogyakarta	7.959.330		3.263.175		11.222.505
215	Kab. Bantul	3.000.000	5.582.854		1.013.567	17.731.653
216	Kab. Gunungkidul		4.431.924	696.750	1.067.815	17.136.489
217	Kab. Kulon Progo	4.700.000	3.554.088	3.312.825		27.671.177

*) Perubahan Pertama

(PMK Nomor 94 Tahun 2021)

Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021

**) Perubahan Kedua

(PMK Nomor 162 Tahun 2021)

Tanggal Berlaku: 23 November 2021

***) Perubahan Ketiga

(PMK Nomor 118 Tahun 2022)

Tanggal Berlaku: 25 Juli 2022

SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Dampaknya

1. DAK FISIK REGULER

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Jalan	Transportasi Perdesaan	Transportasi Laut	TOTAL DAK REGULER
(1)	(2)	(18)	(19)	(20)	(21)=(11)+(17)+(18)+(19)+(20)
198	Kab. Purbalingga	10.130.110			57.162.148
199	Kab. Purworejo	19.555.377			80.420.096
200	Kab. Rembang	12.094.309			56.656.673
201	Kab. Semarang	10.679.903			64.706.163
202	Kab. Sragen	4.410.164			43.846.438
203	Kab. Sukoharjo	6.140.771			40.973.260
204	Kab. Tegal	6.760.647			77.980.558
205	Kab. Temanggung	10.192.148			108.404.406
206	Kab. Wonogiri	8.421.065			75.168.472
207	Kab. Wonosobo	9.356.259			64.268.928
208	Kota Magelang	6.279.000			36.514.102
209	Kota Pekalongan	5.742.608			54.161.860
210	Kota Salatiga	14.492.915			23.449.715
211	Kota Semarang	8.228.397			48.508.366
212	Kota Surakarta	6.457.335			42.438.958
213	Kota Tegal	4.881.875			35.087.219
214	Provinsi DI Yogyakarta	10.540.678			107.523.809
215	Kab. Bantul	10.177.939			36.691.187
216	Kab. Gunungkidul	13.089.577			97.978.646
217	Kab. Kulon Progo	31.707.388			85.812.791

*) Perubahan Pertama

(PMK Nomor 94 Tahun 2021)

Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021

**) Perubahan Kedua

(PMK Nomor 162 Tahun 2021)

Tanggal Berlaku: 23 November 2021

***) Perubahan Ketiga

(PMK Nomor 118 Tahun 2022)

Tanggal Berlaku: 25 Juli 2022

SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Dampaknya

2. DAK FISIK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Kesehatan dan KB				Jalan
		Penguatan Intervensi Stunting	Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi	Keluarga Berencana	Subtotal Kesehatan dan KB	Tematik Ketahanan Pangan
(1)	(2)	(22)	(23)	(24)	(25)=(22)+(23)+(24)	(26)
198	Kab. Purbalingga		10.501.424	290.000	10.791.424	
199	Kab. Purworejo	650.000		280.000	930.000	
200	Kab. Rembang	2.030.000	10.852.000	277.525	13.159.525	
201	Kab. Semarang	2.191.265		280.000	2.471.265	
202	Kab. Sragen	1.200.000	10.287.549	190.000	11.677.549	7.822.922
203	Kab. Sukoharjo	947.990		274.000	1.221.990	
204	Kab. Tegal	678.565	56.430.422	280.000	57.388.987	
205	Kab. Temanggung	2.189.500		280.000	2.469.500	
206	Kab. Wonogiri	650.000		280.000	930.000	
207	Kab. Wonosobo	1.046.684		280.000	1.326.684	
208	Kota Magelang					
209	Kota Pekalongan					
210	Kota Salatiga					
211	Kota Semarang	952.956	11.007.141	244.000	12.204.097	
212	Kota Surakarta	1.839.060		280.000	2.119.060	
213	Kota Tegal					
214	Provinsi DI Yogyakarta	2.452.634			2.452.634	
215	Kab. Bantul	650.000	14.734.175	280.000	15.664.175	
216	Kab. Gunungkidul		23.501.314	280.000	23.781.314	
217	Kab. Kulon Progo	650.000		280.000	930.000	

*) Perubahan Pertama

(PMK Nomor 94 Tahun 2021)

Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021

**) Perubahan Kedua

(PMK Nomor 162 Tahun 2021)

Tanggal Berlaku: 23 November 2021

***) Perubahan Ketiga

(PMK Nomor 118 Tahun 2022)

Tanggal Berlaku: 25 Juli 2022

SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Dampaknya

2. DAK FISIK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Jalan		Air Minum		
		Tematik Pembangunan Infrastruktur Ekonomi Berkelanjutan	Subtotal Jalan	Tematik Penurunan Angka Kematian Ibu dan Stunting	Tematik Penanggulangan Kemiskinan	Subtotal Air Minum
(1)	(2)	(27)	(28)=(26)+(27)	(29)	(30)	(31)=(29)+(30)
198	Kab. Purbalingga			3.824.558	6.712.886	10.537.444
199	Kab. Purworejo	8.964.310	8.964.310		5.171.942	5.171.942
200	Kab. Rembang				4.488.971	4.488.971
201	Kab. Semarang				5.319.205	5.319.205
202	Kab. Sragen		7.822.922		5.992.228	5.992.228
203	Kab. Sukoharjo				2.599.087	2.599.087
204	Kab. Tegal				5.686.202	5.686.202
205	Kab. Temanggung				5.503.605	5.503.605
206	Kab. Wonogiri				5.566.967	5.566.967
207	Kab. Wonosobo			1.007.883	5.759.975	6.767.858
208	Kota Magelang					
209	Kota Pekalongan				981.000	981.000
210	Kota Salatiga				2.666.792	2.666.792
211	Kota Semarang				250.000	250.000
212	Kota Surakarta				1.265.000	1.265.000
213	Kota Tegal				3.000.000	3.000.000
214	Provinsi DI Yogyakarta	24.915.874	24.915.874			
215	Kab. Bantul			2.989.652	5.247.987	8.237.639
216	Kab. Gunungkidul			6.076.639	2.387.757	8.464.396
217	Kab. Kulon Progo	15.251.526	15.251.526	2.460.178	5.678.392	8.138.570

*) Perubahan Pertama

**) Perubahan Kedua

***) Perubahan Ketiga

(PMK Nomor 94 Tahun 2021)

(PMK Nomor 162 Tahun 2021)

(PMK Nomor 118 Tahun 2022)

Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021

Tanggal Berlaku: 23 November 2021

Tanggal Berlaku: 25 Juli 2022

SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Dampaknya

2. DAK FISIK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Sanitasi			Perumahan dan Permukiman	Irigasi
		Tematik Penurunan Angka Kematian Ibu dan Stunting	Tematik Penanggulangan Kemiskinan	Subtotal Sanitasi		
(1)	(2)	(32)	(33)	(34)=(32)+(33)	(35)	(36)
198	Kab. Purbalingga	4.273.072	949.860	5.222.932	551.250	7.817.158
199	Kab. Purworejo		3.574.102	3.574.102	1.033.128	5.741.568
200	Kab. Rembang				436.200	10.113.386
201	Kab. Semarang		2.982.838	2.982.838	1.618.618	10.095.620
202	Kab. Sragen		2.934.268	2.934.268	1.124.456	5.000.000
203	Kab. Sukoharjo		2.085.757	2.085.757	2.775.218	930.922
204	Kab. Tegal		4.869.599	4.869.599	2.773.056	1.525.480
205	Kab. Temanggung		2.099.691	2.099.691	1.228.249	10.634.300
206	Kab. Wonogiri		2.229.290	2.229.290	2.716.421	7.136.020
207	Kab. Wonosobo	4.473.088	6.154.805	10.627.893	1.300.464	6.988.519
208	Kota Magelang		1.596.229	1.596.229	1.222.305	
209	Kota Pekalongan				2.666.960	
210	Kota Salatiga		1.609.786	1.609.786	1.431.000	
211	Kota Semarang		1.049.845	1.049.845	2.913.147	1.183.504
212	Kota Surakarta		2.500.000	2.500.000	22.373.432	
213	Kota Tegal		1.715.758	1.715.758	1.234.871	
214	Provinsi DI Yogyakarta					18.163.988
215	Kab. Bantul	1.118.272	2.208.771	3.327.043	2.665.167	7.299.857
216	Kab. Gunungkidul	1.407.176		1.407.176		12.685.589
217	Kab. Kulon Progo	1.145.547	1.249.816	2.395.363	3.149.353	10.295.487

*) Perubahan Pertama

**) Perubahan Kedua

***) Perubahan Ketiga

(PMK Nomor 94 Tahun 2021)

(PMK Nomor 162 Tahun 2021)

(PMK Nomor 118 Tahun 2022)

Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021

Tanggal Berlaku: 23 November 2021

Tanggal Berlaku: 25 Juli 2022

SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Dampaknya

2. DAK FISIK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Pertanian	Kelautan dan Perikanan	Industri Kecil dan Menengah	Pariwisata	Lingkungan Hidup
						Lingkungan Hidup Tematik Penurunan Angka Kematian Ibu dan Stunting
(1)	(2)	(37)	(38)	(39)	(40)	(41)
198	Kab. Purbalingga	1.715.000	1.063.500	25.002.435		1.300.000
199	Kab. Purworejo	1.990.000	1.113.140		5.324.394	
200	Kab. Rembang	5.995.000	476.000			
201	Kab. Semarang	7.425.000	1.093.000		9.210.494	1.690.500
202	Kab. Sragen	5.689.358	672.959		4.420.227	
203	Kab. Sukoharjo	5.355.000	926.000			4.336.000
204	Kab. Tegal	1.359.953	1.059.550	3.050.297		
205	Kab. Temanggung	5.348.000	1.171.696			
206	Kab. Wonogiri	5.490.000			14.554.594	
207	Kab. Wonosobo	2.394.000	942.000		10.844.194	1.300.000
208	Kota Magelang					
209	Kota Pekalongan	285.000	685.000			
210	Kota Salatiga	1.540.000				
211	Kota Semarang	1.635.000	634.997	28.607.062	713.927	4.331.000
212	Kota Surakarta			8.865.163	4.218.958	3.676.000
213	Kota Tegal		790.000	2.168.016		
214	Provinsi DI Yogyakarta		2.472.332			2.413.400
215	Kab. Bantul	2.742.050	495.000			
216	Kab. Gunungkidul	6.290.000	1.312.160		2.013.168	
217	Kab. Kulon Progo	2.870.000	1.265.600	347.533		3.075.000

*) Perubahan Pertama

(PMK Nomor 94 Tahun 2021)

Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021

**) Perubahan Kedua

(PMK Nomor 162 Tahun 2021)

Tanggal Berlaku: 23 November 2021

***) Perubahan Ketiga

(PMK Nomor 118 Tahun 2022)

Tanggal Berlaku: 25 Juli 2022

SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Dampaknya

2. DAK FISIK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Lingkungan Hidup			TOTAL DAK PENUGASAN	TOTAL DAK FISIK
		Lingkungan Hidup Tematik Pembangunan Infrastruktur Ekonomi Berkelanjutan	Kehutanan Tematik Ketahanan Pangan	Subtotal Lingkungan Hidup		
(1)	(2)	(42)	(43)	(44)=(41)+(42)+(43)	(45)=(25)+(28)+(31)+(34)+(35)+(36)+(37)+(38)+(39)+(40)+(44)	(46)=(21)+(45)
198	Kab. Purbalingga			1.300.000	64.001.143	121.163.291
199	Kab. Purworejo				33.842.584	114.262.680
200	Kab. Rembang				34.669.082	91.325.755
201	Kab. Semarang			1.690.500	41.906.540	106.612.703
202	Kab. Sragen				45.333.967	89.180.405
203	Kab. Sukoharjo			4.336.000	20.229.974	61.203.234
204	Kab. Tegal				77.713.124	155.693.682
205	Kab. Temanggung				28.455.041	136.859.447
206	Kab. Wonogiri				38.623.292	113.791.764
207	Kab. Wonosobo			1.300.000	42.491.612	106.760.540
208	Kota Magelang	4.890.000		4.890.000	7.708.534	44.222.636
209	Kota Pekalongan				4.617.960	58.779.820
210	Kota Salatiga				7.247.578	30.697.293
211	Kota Semarang			4.331.000	53.522.579	102.030.945
212	Kota Surakarta			3.676.000	45.017.613	87.456.571
213	Kota Tegal				8.908.645	43.995.864
214	Provinsi DI Yogyakarta		3.175.342	5.588.742	53.593.570	161.117.379
215	Kab. Bantul				40.430.931	77.122.118
216	Kab. Gunungkidul				55.953.803	153.932.449
217	Kab. Kulon Progo			3.075.000	47.718.432	133.531.223

*) Perubahan Pertama

**) Perubahan Kedua

***) Perubahan Ketiga

(PMK Nomor 94 Tahun 2021)

(PMK Nomor 162 Tahun 2021)

(PMK Nomor 118 Tahun 2022)

Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021

Tanggal Berlaku: 23 November 2021

Tanggal Berlaku: 25 Juli 2022

SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Dampaknya

1. DAK FISIK REGULER

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Pendidikan				
		PAUD	SD	SMP	SMA	SMK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
218	Kab. Sleman		7.268.441	3.289.863		
219	Kota Yogyakarta		1.729.033	1.661.145		
220	Provinsi Jawa Timur				278.057.764	200.060.077
221	Kab. Bangkalan	407.929	14.704.684	7.708.001		
222	Kab. Banyuwangi		5.318.408	5.255.053		
223	Kab. Blitar	379.130	5.238.977	1.764.629		
224	Kab. Bojonegoro		4.708.489	8.096.345		
225	Kab. Bondowoso	1.603.110	22.490.918	9.419.334		
226	Kab. Gresik	677.354	2.093.500	18.098.876		
227	Kab. Jember	717.399	13.643.031	1.714.252		
228	Kab. Jombang	334.005	16.694.898	20.258.139		
229	Kab. Kediri		22.754.057	11.832.916		
230	Kab. Lamongan	1.000.110	21.847.908	36.024.803		
231	Kab. Lumajang		8.998.765	7.275.791		
232	Kab. Madiun		15.922.014	17.427.851		
233	Kab. Magetan	560.296	12.815.949	19.402.593		
234	Kab. Malang	958.589	14.804.948	11.268.162		
235	Kab. Mojokerto	2.997.712	26.433.910	10.550.627		
236	Kab. Nganjuk	564.415	25.739.400	17.054.531		
237	Kab. Ngawi		18.102.015	19.700.975		

*) Perubahan Pertama

**) Perubahan Kedua

***) Perubahan Ketiga

(PMK Nomor 94 Tahun 2021)

(PMK Nomor 162 Tahun 2021)

(PMK Nomor 118 Tahun 2022)

Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021

Tanggal Berlaku: 23 November 2021

Tanggal Berlaku: 25 Juli 2022

SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Dampaknya

1. DAK FISIK REGULER

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Pendidikan				Kesehatan dan KB
		SKB	SLB	Perpustakaan Daerah	Subtotal Pendidikan	Pelayanan Dasar
(1)	(2)	(8)	(9)	(10)	(11)=(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)+(9)+(10)	(12)
218	Kab. Sleman	600.000		375.000	11.533.304	7.530.000
219	Kota Yogyakarta	198.970			3.589.148	6.776.500
220	Provinsi Jawa Timur		14.893.665		493.011.506	
221	Kab. Bangkalan				22.820.614	14.913.000
222	Kab. Banyuwangi				10.573.461	5.129.819
223	Kab. Blitar				7.382.736	1.961.733
224	Kab. Bojonegoro				12.804.834	5.901.228
225	Kab. Bondowoso	440.920		681.116	34.635.398	6.706.690
226	Kab. Gresik	1.273.109		2.500.000	24.642.839	2.000.000
227	Kab. Jember				16.074.682	3.847.651
228	Kab. Jombang				37.287.042	13.392.000
229	Kab. Kediri				34.586.973	1.993.536
230	Kab. Lamongan			500.000	59.372.821	1.999.347
231	Kab. Lumajang			2.500.000	18.774.556	1.930.000
232	Kab. Madiun			258.988	33.608.853	6.103.678
233	Kab. Magetan			10.000.000	42.778.838	1.065.872
234	Kab. Malang	1.612.014		500.000	29.143.713	7.661.572
235	Kab. Mojokerto	484.500			40.466.749	
236	Kab. Nganjuk	606.600			43.964.946	7.479.353
237	Kab. Ngawi			584.300	38.387.290	9.149.476

*) Perubahan Pertama

**) Perubahan Kedua

***) Perubahan Ketiga

(PMK Nomor 94 Tahun 2021)

(PMK Nomor 162 Tahun 2021)

(PMK Nomor 118 Tahun 2022)

Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021

Tanggal Berlaku: 23 November 2021

Tanggal Berlaku: 25 Juli 2022

SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Dampaknya

1. DAK FISIK REGULER

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Kesehatan dan KB				
		Pelayanan Rujukan	Pelayanan Kefarmasian dan Bahan Habis Pakai	Peningkatan Kesiapan Sistem Kesehatan	Keluarga Berencana	Subtotal Kesehatan dan KB
(1)	(2)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)=(12)+(13)+(14)+(15)+(16)
218	Kab. Sleman	3.780.000	5.617.279	589.560	1.004.327	18.521.166
219	Kota Yogyakarta	3.259.921	1.763.891	1.663.556	949.215	14.413.083
220	Provinsi Jawa Timur	268.946.008				268.946.008
221	Kab. Bangkalan	9.950.000	5.392.446		1.110.311	31.365.757
222	Kab. Banyuwangi	18.079.995	6.019.228	1.427.059	732.805	31.388.906
223	Kab. Blitar	46.705.119	6.417.891	625.000	1.459.252	57.168.995
224	Kab. Bojonegoro	16.097.400	3.051.439		607.814	25.657.881
225	Kab. Bondowoso		2.714.635	1.269.348	1.050.000	11.740.673
226	Kab. Gresik	25.561.703	8.618.781	758.395	1.165.830	38.104.709
227	Kab. Jember	1.000.000	12.642.332	4.363.000	1.059.842	22.912.825
228	Kab. Jombang	8.650.000	7.012.898	740.000	1.059.842	30.854.740
229	Kab. Kediri		4.522.276		184.715	6.700.527
230	Kab. Lamongan	23.530.000	6.482.177	488.000	1.184.500	33.684.024
231	Kab. Lumajang	300.000	5.228.555	4.829.581	577.527	12.865.663
232	Kab. Madiun	30.532.344	3.797.255		1.231.688	41.664.965
233	Kab. Magetan		3.506.269	2.000.000	815.644	7.387.785
234	Kab. Malang	3.200.000	12.998.606	833.515	1.254.954	25.948.647
235	Kab. Mojokerto	20.335.246	5.280.088	625.000	990.000	27.230.334
236	Kab. Nganjuk	57.378.430	3.920.435	499.164	1.299.698	70.577.080
237	Kab. Ngawi	21.050.000	4.203.801	45.332.530	201.874	79.937.681

*) Perubahan Pertama

**) Perubahan Kedua

***) Perubahan Ketiga

(PMK Nomor 94 Tahun 2021)

(PMK Nomor 162 Tahun 2021)

(PMK Nomor 118 Tahun 2022)

Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021

Tanggal Berlaku: 23 November 2021

Tanggal Berlaku: 25 Juli 2022

SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Dampaknya

1. DAK FISIK REGULER

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Jalan	Transportasi Perdesaan	Transportasi Laut	TOTAL DAK REGULER
(1)	(2)	(18)	(19)	(20)	(21)=(11)+(17)+(18)+(19)+(20)
218	Kab. Sleman	6.989.345			37.043.815
219	Kota Yogyakarta	10.997.841			29.000.072
220	Provinsi Jawa Timur	7.210.871			769.168.385
221	Kab. Bangkalan	8.093.819	6.322.755		68.602.945
222	Kab. Banyuwangi	34.592.121			76.554.488
223	Kab. Blitar	10.930.500			75.482.231
224	Kab. Bojonegoro				38.462.715
225	Kab. Bondowoso	12.818.826	6.500.000		65.694.897
226	Kab. Gresik	11.556.272			74.303.820
227	Kab. Jember	9.644.942			48.632.449
228	Kab. Jombang	8.508.801			76.650.583
229	Kab. Kediri				41.287.500
230	Kab. Lamongan	29.913.232			122.970.077
231	Kab. Lumajang	7.989.154			39.629.373
232	Kab. Madiun	10.356.809			85.630.627
233	Kab. Magetan				50.166.623
234	Kab. Malang	13.041.414			68.133.774
235	Kab. Mojokerto	7.358.017			75.055.100
236	Kab. Nganjuk	11.271.967			125.813.993
237	Kab. Ngawi	7.327.659			125.652.630

*) Perubahan Pertama

**) Perubahan Kedua

***) Perubahan Ketiga

(PMK Nomor 94 Tahun 2021)

(PMK Nomor 162 Tahun 2021)

(PMK Nomor 118 Tahun 2022)

Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021

Tanggal Berlaku: 23 November 2021

Tanggal Berlaku: 25 Juli 2022

SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Dampaknya

2. DAK FISIK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Kesehatan dan KB			Jalan	
		Penguatan Intervensi Stunting	Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi	Keluarga Berencana	Subtotal Kesehatan dan KB	Tematik Ketahanan Pangan
(1)	(2)	(22)	(23)	(24)	(25)=(22)+(23)+(24)	(26)
218	Kab. Sleman	2.971.050		280.000	3.251.050	
219	Kota Yogyakarta	1.864.492		280.000	2.144.492	
220	Provinsi Jawa Timur	24.079.795			24.079.795	44.422.308
221	Kab. Bangkalan		1.731.965	220.000	1.951.965	
222	Kab. Banyuwangi	2.250.000	1.000.000	486.700	3.736.700	15.901.997
223	Kab. Blitar	1.748.272		280.000	2.028.272	
224	Kab. Bojonegoro	2.395.800	8.338.743		10.734.543	
225	Kab. Bondowoso		30.076.058	307.525	30.383.583	
226	Kab. Gresik	797.052	7.275.043	200.000	8.272.095	7.839.899
227	Kab. Jember	950.000	38.464.806	240.000	39.654.806	
228	Kab. Jombang	2.470.000	20.091.587	427.524	22.989.111	7.234.619
229	Kab. Kediri	650.000	9.838.973	150.000	10.638.973	
230	Kab. Lamongan	650.000		280.000	930.000	
231	Kab. Lumajang	1.934.400	7.895.736	277.525	10.107.661	
232	Kab. Madiun	2.030.000		280.000	2.310.000	
233	Kab. Magetan	1.100.000	2.731.912	280.000	4.111.912	
234	Kab. Malang		32.895.930	280.000	33.175.930	
235	Kab. Mojokerto	2.540.000	7.039.962	280.000	9.859.962	
236	Kab. Nganjuk	650.000		280.000	930.000	8.012.221
237	Kab. Ngawi	1.300.000		277.525	1.577.525	

*) Perubahan Pertama

(PMK Nomor 94 Tahun 2021)

Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021

**) Perubahan Kedua

(PMK Nomor 162 Tahun 2021)

Tanggal Berlaku: 23 November 2021

***) Perubahan Ketiga

(PMK Nomor 118 Tahun 2022)

Tanggal Berlaku: 25 Juli 2022

SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Dampaknya

2. DAK FISIK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Jalan		Air Minum		
		Tematik Pembangunan Infrastruktur Ekonomi Berkelanjutan	Subtotal Jalan	Tematik Penurunan Angka Kematian Ibu dan Stunting	Tematik Penanggulangan Kemiskinan	Subtotal Air Minum
(1)	(2)	(27)	(28)=(26)+(27)	(29)	(30)	(31)=(29)+(30)
218	Kab. Sleman				5.643.734	5.643.734
219	Kota Yogyakarta	4.443.834	4.443.834			
220	Provinsi Jawa Timur		44.422.308			
221	Kab. Bangkalan			1.469.830	17.090.644	18.560.474
222	Kab. Banyuwangi		15.901.997		1.500.000	1.500.000
223	Kab. Blitar				6.440.237	6.440.237
224	Kab. Bojonegoro				4.654.905	4.654.905
225	Kab. Bondowoso	11.814.440	11.814.440	7.730.101	4.709.181	12.439.282
226	Kab. Gresik		7.839.899		6.326.665	6.326.665
227	Kab. Jember			287.190	1.201.844	1.489.034
228	Kab. Jombang		7.234.619		5.717.094	5.717.094
229	Kab. Kediri				2.377.260	2.377.260
230	Kab. Lamongan			1.199.860	6.438.744	7.638.604
231	Kab. Lumajang	12.717.046	12.717.046		6.224.668	6.224.668
232	Kab. Madiun				4.811.156	4.811.156
233	Kab. Magetan				2.549.104	2.549.104
234	Kab. Malang	28.565.414	28.565.414		5.569.608	5.569.608
235	Kab. Mojokerto				5.440.155	5.440.155
236	Kab. Nganjuk		8.012.221		3.697.226	3.697.226
237	Kab. Ngawi			9.148.942	5.278.145	14.427.087

*) Perubahan Pertama

**) Perubahan Kedua

***) Perubahan Ketiga

(PMK Nomor 94 Tahun 2021)

(PMK Nomor 162 Tahun 2021)

(PMK Nomor 118 Tahun 2022)

Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021

Tanggal Berlaku: 23 November 2021

Tanggal Berlaku: 25 Juli 2022

SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Dampaknya

2. DAK FISIK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Sanitasi			Perumahan dan Permukiman	Irigasi
		Tematik Penurunan Angka Kematian Ibu dan Stunting	Tematik Penanggulangan Kemiskinan	Subtotal Sanitasi		
(1)	(2)	(32)	(33)	(34)=(32)+(33)	(35)	(36)
218	Kab. Sleman		2.286.385	2.286.385	3.082.242	9.318.807
219	Kota Yogyakarta		1.503.389	1.503.389	2.755.817	
220	Provinsi Jawa Timur					105.529.463
221	Kab. Bangkalan	700.000	6.427.492	7.127.492	2.239.536	
222	Kab. Banyuwangi				893.277	7.845.433
223	Kab. Blitar		2.099.691	2.099.691	2.798.464	5.291.308
224	Kab. Bojonegoro		3.780.016	3.780.016	983.301	
225	Kab. Bondowoso	6.955.106	5.099.249	12.054.355	1.443.716	12.800.001
226	Kab. Gresik		595.305	595.305	1.699.842	5.328.187
227	Kab. Jember	350.000	1.399.794	1.749.794	954.731	3.185.951
228	Kab. Jombang		3.412.191	3.412.191	3.002.117	673.894
229	Kab. Kediri	1.909.245	1.799.735	3.708.980	1.039.689	2.990.000
230	Kab. Lamongan	2.181.994	2.267.630	4.449.624	2.551.104	748.771
231	Kab. Lumajang		4.206.022	4.206.022	3.001.484	2.595.736
232	Kab. Madiun		1.498.997	1.498.997	2.248.891	5.685.200
233	Kab. Magetan		2.099.691	2.099.691	2.409.526	
234	Kab. Malang	5.772.559	1.199.823	6.972.382	2.863.059	2.396.065
235	Kab. Mojokerto		3.207.342	3.207.342	1.329.599	4.773.996
236	Kab. Nganjuk		3.479.098	3.479.098	3.043.322	4.895.026
237	Kab. Ngawi	4.397.424	1.707.842	6.105.266		17.638.125

*) Perubahan Pertama

**) Perubahan Kedua

***) Perubahan Ketiga

(PMK Nomor 94 Tahun 2021)

(PMK Nomor 162 Tahun 2021)

(PMK Nomor 118 Tahun 2022)

Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021

Tanggal Berlaku: 23 November 2021

Tanggal Berlaku: 25 Juli 2022

SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Dampaknya

2. DAK FISIK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Pertanian	Kelautan dan Perikanan	Industri Kecil dan Menengah	Pariwisata	Lingkungan Hidup
						Lingkungan Hidup Tematik Penurunan Angka Kematian Ibu dan Stunting
(1)	(2)	(37)	(38)	(39)	(40)	(41)
218	Kab. Sleman	1.447.379	915.000		1.598.102	
219	Kota Yogyakarta				2.842.690	
220	Provinsi Jawa Timur	7.382.603	16.468.249		3.073.368	1.845.190
221	Kab. Bangkalan	6.300.880		21.002.045		
222	Kab. Banyuwangi	2.450.000	1.157.211		3.319.979	
223	Kab. Blitar	8.705.000	756.500			
224	Kab. Bojonegoro	2.798.343	684.949			
225	Kab. Bondowoso	4.012.500	1.473.000	1.000.097	4.030.662	
226	Kab. Gresik	7.700.000	502.234			
227	Kab. Jember	485.698	1.168.500			
228	Kab. Jombang	3.849.800	800.000	25.238.883		
229	Kab. Kediri	2.377.004	773.926			
230	Kab. Lamongan	6.790.000	1.252.500			1.300.000
231	Kab. Lumajang	6.140.000	666.964		3.977.929	
232	Kab. Madiun	1.554.232				
233	Kab. Magetan	6.160.000	120.000	3.800.370	4.815.428	
234	Kab. Malang	4.200.000	1.749.992			
235	Kab. Mojokerto	1.068.535	684.287			
236	Kab. Nganjuk	6.063.200	1.039.000			1.300.000
237	Kab. Ngawi	5.334.000	825.000	538.227		

*) Perubahan Pertama

**) Perubahan Kedua

***) Perubahan Ketiga

(PMK Nomor 94 Tahun 2021)

(PMK Nomor 162 Tahun 2021)

(PMK Nomor 118 Tahun 2022)

Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021

Tanggal Berlaku: 23 November 2021

Tanggal Berlaku: 25 Juli 2022

SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Dampaknya

2. DAK FISIK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Lingkungan Hidup			TOTAL DAK PENUGASAN	TOTAL DAK FISIK
		Lingkungan Hidup Tematik Pembangunan Infrastruktur Ekonomi Berkelanjutan	Kehutanan Tematik Ketahanan Pangan	Subtotal Lingkungan Hidup		
(1)	(2)	(42)	(43)	(44)=(41)+(42)+(43)	(45)=(25)+(28)+(31)+(34)+(35)+(36)+(37)+(38)+(39)+(40)+(44)	(46)=(21)+(45)
218	Kab. Sleman				27.542.699	64.586.514
219	Kota Yogyakarta				13.690.222	42.690.294
220	Provinsi Jawa Timur		36.513.777	38.358.967	239.314.753	1.008.483.138
221	Kab. Bangkalan				57.182.392	125.785.337
222	Kab. Banyuwangi				36.804.597	113.359.085
223	Kab. Blitar				28.119.472	103.601.703
224	Kab. Bojonegoro				23.636.057	62.098.772
225	Kab. Bondowoso				91.451.636	157.146.533
226	Kab. Gresik				38.264.227	112.568.047
227	Kab. Jember				48.688.514	97.320.963
228	Kab. Jombang				72.917.709	149.568.292
229	Kab. Kediri				23.905.832	65.193.332
230	Kab. Lamongan			1.300.000	25.660.603	148.630.680
231	Kab. Lumajang				49.637.510	89.266.883
232	Kab. Madiun				18.108.476	103.739.103
233	Kab. Magetan				26.066.031	76.232.654
234	Kab. Malang	8.807.000		8.807.000	94.299.450	162.433.224
235	Kab. Mojokerto				26.363.876	101.418.976
236	Kab. Nganjuk			1.300.000	32.459.093	158.273.086
237	Kab. Ngawi				46.445.230	172.097.860

*) Perubahan Pertama

**) Perubahan Kedua

***) Perubahan Ketiga

(PMK Nomor 94 Tahun 2021)

(PMK Nomor 162 Tahun 2021)

(PMK Nomor 118 Tahun 2022)

Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021

Tanggal Berlaku: 23 November 2021

Tanggal Berlaku: 25 Juli 2022

SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Dampaknya

1. DAK FISIK REGULER

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Pendidikan				
		PAUD	SD	SMP	SMA	SMK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
238	Kab. Pacitan	970.692	26.389.408	23.021.104		
239	Kab. Pamekasan	424.347	24.830.745	12.366.972		
240	Kab. Pasuruan		10.306.700	1.333.800		
241	Kab. Ponorogo	392.689	25.912.963	8.212.121		
242	Kab. Probolinggo	330.785	14.753.300	5.394.312		
243	Kab. Sampang	442.659	20.436.330	12.272.469		
244	Kab. Sidoarjo			1.477.665		
245	Kab. Situbondo	328.082	12.240.282	3.615.180		
246	Kab. Sumenep	410.173	8.844.602	11.481.654		
247	Kab. Trenggalek	821.662	22.970.739	13.209.793		
248	Kab. Tuban		7.126.822	7.768.460		
249	Kab. Tulungagung	223.681	18.382.588	22.367.647		
250	Kota Blitar		1.054.745			
251	Kota Kediri	290.375	20.473.628	5.791.500		
252	Kota Madiun		2.227.200			
253	Kota Malang		13.163.305	1.406.503		
254	Kota Mojokerto	199.268	6.673.099	3.655.276		
255	Kota Pasuruan		1.187.428	1.583.668		
256	Kota Probolinggo		3.237.061	2.844.628		
257	Kota Surabaya		2.387.244	1.333.258		

*) Perubahan Pertama

**) Perubahan Kedua

***) Perubahan Ketiga

(PMK Nomor 94 Tahun 2021)

(PMK Nomor 162 Tahun 2021)

(PMK Nomor 118 Tahun 2022)

Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021

Tanggal Berlaku: 23 November 2021

Tanggal Berlaku: 25 Juli 2022

SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Dampaknya

1. DAK FISIK REGULER

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Pendidikan				Kesehatan dan KB
		SKB	SLB	Perpustakaan Daerah	Subtotal Pendidikan	Pelayanan Dasar
(1)	(2)	(8)	(9)	(10)	(11)=(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)+(9)+(10)	(12)
238	Kab. Pacitan			3.410.668	53.791.872	11.245.347
239	Kab. Pamekasan	200.000			37.822.064	3.980.029
240	Kab. Pasuruan				11.640.500	2.000.000
241	Kab. Ponorogo			195.000	34.712.773	6.540.006
242	Kab. Probolinggo	532.500		500.000	21.510.897	14.531.829
243	Kab. Sampang				33.151.458	17.542.657
244	Kab. Sidoarjo				1.477.665	
245	Kab. Situbondo			300.000	16.483.544	1.572.000
246	Kab. Sumenep				20.736.429	12.962.914
247	Kab. Trenggalek	198.970			37.201.164	4.540.474
248	Kab. Tuban				14.895.282	
249	Kab. Tulungagung				40.973.916	2.000.000
250	Kota Blitar			176.250	1.230.995	1.966.000
251	Kota Kediri	480.000		200.000	27.235.503	2.173.598
252	Kota Madiun			421.039	2.648.239	
253	Kota Malang				14.569.808	2.000.000
254	Kota Mojokerto				10.527.643	11.432.770
255	Kota Pasuruan				2.771.096	
256	Kota Probolinggo				6.081.689	2.000.000
257	Kota Surabaya	198.970			3.919.472	2.000.000

*) Perubahan Pertama

**) Perubahan Kedua

***) Perubahan Ketiga

(PMK Nomor 94 Tahun 2021)

(PMK Nomor 162 Tahun 2021)

(PMK Nomor 118 Tahun 2022)

Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021

Tanggal Berlaku: 23 November 2021

Tanggal Berlaku: 25 Juli 2022

SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Dampaknya

1. DAK FISIK REGULER

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Kesehatan dan KB				Subtotal Kesehatan dan KB
		Pelayanan Rujukan	Pelayanan Kefarmasian dan Bahan Habis Pakai	Peningkatan Kesiapan Sistem Kesehatan	Keluarga Berencana	
(1)	(2)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)=(12)+(13)+(14)+(15)+(16)
238	Kab. Pacitan	20.230.300	2.770.784	648.572	1.188.528	36.083.531
239	Kab. Pamekasan	11.203.713	6.673.615		1.110.311	22.967.668
240	Kab. Pasuruan	2.940.000	6.560.045	2.350.000	1.009.364	14.859.409
241	Kab. Ponorogo	15.727.147	4.053.886	1.913.158	949.316	29.183.513
242	Kab. Probolinggo	9.870.000	6.779.967	1.676.413	1.096.180	33.954.389
243	Kab. Sampang		5.061.978		1.100.000	23.704.635
244	Kab. Sidoarjo		7.333.278		192.184	7.525.462
245	Kab. Situbondo	11.335.451	5.220.741	979.781	1.059.842	20.167.815
246	Kab. Sumenep	8.182.000	6.294.377	4.111.885	1.231.936	32.783.112
247	Kab. Trenggalek	17.924.684	3.850.421	200.000	1.503.462	28.019.041
248	Kab. Tuban	4.839.392	5.119.159		374.831	10.333.382
249	Kab. Tulungagung	7.164.000	5.198.032	200.000	463.961	15.025.993
250	Kota Blitar	14.798.112	815.998	511.577	1.078.011	19.169.698
251	Kota Kediri	17.947.500	2.328.800		900.000	23.349.898
252	Kota Madiun	3.000.000	833.690		1.086.000	4.919.690
253	Kota Malang	3.000.000	2.651.577	390.000	902.380	8.943.957
254	Kota Mojokerto	5.268.552	2.760.129	464.925	111.286	20.037.662
255	Kota Pasuruan	8.180.000	2.127.421		587.253	10.894.674
256	Kota Probolinggo	31.620.000	3.047.769	353.288	573.937	37.594.994
257	Kota Surabaya		8.419.602		1.550.398	11.970.000

*) Perubahan Pertama

(PMK Nomor 94 Tahun 2021)

Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021

**) Perubahan Kedua

(PMK Nomor 162 Tahun 2021)

Tanggal Berlaku: 23 November 2021

***) Perubahan Ketiga

(PMK Nomor 118 Tahun 2022)

Tanggal Berlaku: 25 Juli 2022

SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Dampaknya

1. DAK FISIK REGULER

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Jalan	Transportasi Perdesaan	Transportasi Laut	TOTAL DAK REGULER
(1)	(2)	(18)	(19)	(20)	(21)=(11)+(17)+(18)+(19)+(20)
238	Kab. Pacitan	11.910.322			101.785.725
239	Kab. Pamekasan	11.167.865			71.957.597
240	Kab. Pasuruan	8.638.565			35.138.474
241	Kab. Ponorogo	7.870.344			71.766.630
242	Kab. Probolinggo	9.467.598			64.932.884
243	Kab. Sampang	7.091.870	7.875.000		71.822.963
244	Kab. Sidoarjo	6.633.410			15.636.537
245	Kab. Situbondo	6.510.001	4.800.000		47.961.360
246	Kab. Sumenep	35.045.201	1.640.000		90.204.742
247	Kab. Trenggalek	8.821.796			74.042.001
248	Kab. Tuban				25.228.664
249	Kab. Tulungagung	11.767.180			67.767.089
250	Kota Blitar	3.042.984			23.443.677
251	Kota Kediri				50.585.401
252	Kota Madiun				7.567.929
253	Kota Malang				23.513.765
254	Kota Mojokerto	1.000.000			31.565.305
255	Kota Pasuruan	8.595.531			22.261.301
256	Kota Probolinggo	7.899.427			51.576.110
257	Kota Surabaya	5.246.578			21.136.050

*) Perubahan Pertama

**) Perubahan Kedua

***) Perubahan Ketiga

(PMK Nomor 94 Tahun 2021)

(PMK Nomor 162 Tahun 2021)

(PMK Nomor 118 Tahun 2022)

Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021

Tanggal Berlaku: 23 November 2021

Tanggal Berlaku: 25 Juli 2022

SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Dampaknya

2. DAK FISIK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Kesehatan dan KB			Jalan	
		Penguatan Intervensi Stunting	Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi	Keluarga Berencana	Subtotal Kesehatan dan KB	Tematik Ketahanan Pangan
(1)	(2)	(22)	(23)	(24)	(25)=(22)+(23)+(24)	(26)
238	Kab. Pacitan					
239	Kab. Pamekasan			280.000	280.000	
240	Kab. Pasuruan	650.000	9.681.000	280.000	10.611.000	
241	Kab. Ponorogo	3.750.000		198.000	3.948.000	
242	Kab. Probolinggo	650.000	7.683.141	277.525	8.610.666	
243	Kab. Sampang	784.800	7.108.350	468.419	8.361.569	
244	Kab. Sidoarjo	191.400	4.430.701	280.000	4.902.101	
245	Kab. Situbondo	1.851.300	22.033.108	277.525	24.161.933	
246	Kab. Sumenep	650.000		280.000	930.000	
247	Kab. Trenggalek			212.000	212.000	
248	Kab. Tuban	2.970.000		236.700	3.206.700	
249	Kab. Tulungagung		14.502.224	222.000	14.724.224	
250	Kota Blitar					
251	Kota Kediri					
252	Kota Madiun					
253	Kota Malang	407.000		229.500	636.500	
254	Kota Mojokerto					
255	Kota Pasuruan					
256	Kota Probolinggo					
257	Kota Surabaya		1.784.838	483.999	2.268.837	

*) Perubahan Pertama

**) Perubahan Kedua

***) Perubahan Ketiga

(PMK Nomor 94 Tahun 2021)

(PMK Nomor 162 Tahun 2021)

(PMK Nomor 118 Tahun 2022)

Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021

Tanggal Berlaku: 23 November 2021

Tanggal Berlaku: 25 Juli 2022

SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Dampaknya

2. DAK FISIK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Jalan		Air Minum		
		Tematik Pembangunan Infrastruktur Ekonomi Berkelanjutan	Subtotal Jalan	Tematik Penurunan Angka Kematian Ibu dan Stunting	Tematik Penanggulangan Kemiskinan	Subtotal Air Minum
(1)	(2)	(27)	(28)=(26)+(27)	(29)	(30)	(31)=(29)+(30)
238	Kab. Pacitan				3.608.732	3.608.732
239	Kab. Pamekasan			4.534.476	200.000	4.734.476
240	Kab. Pasuruan	1.366.573	1.366.573		5.211.963	5.211.963
241	Kab. Ponorogo				5.890.305	5.890.305
242	Kab. Probolinggo	13.507.983	13.507.983		3.008.943	3.008.943
243	Kab. Sampang			3.956.540	6.460.044	10.416.584
244	Kab. Sidoarjo				5.205.595	5.205.595
245	Kab. Situbondo	9.756.601	9.756.601		4.563.296	4.563.296
246	Kab. Sumenep			1.700.062	2.644.071	4.344.133
247	Kab. Trenggalek			180.000	5.482.573	5.662.573
248	Kab. Tuban				4.670.000	4.670.000
249	Kab. Tulungagung				3.132.076	3.132.076
250	Kota Blitar				919.917	919.917
251	Kota Kediri				1.815.626	1.815.626
252	Kota Madiun					
253	Kota Malang				1.250.000	1.250.000
254	Kota Mojokerto				1.198.313	1.198.313
255	Kota Pasuruan				3.045.000	3.045.000
256	Kota Probolinggo				1.371.921	1.371.921
257	Kota Surabaya					

*) Perubahan Pertama

(PMK Nomor 94 Tahun 2021)

Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021

**) Perubahan Kedua

(PMK Nomor 162 Tahun 2021)

Tanggal Berlaku: 23 November 2021

***) Perubahan Ketiga

(PMK Nomor 118 Tahun 2022)

Tanggal Berlaku: 25 Juli 2022

SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Dampaknya

2. DAK FISIK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Sanitasi			Perumahan dan Permukiman	Irigasi
		Tematik Penurunan Angka Kematian Ibu dan Stunting	Tematik Penanggulangan Kemiskinan	Subtotal Sanitasi		
(1)	(2)	(32)	(33)	(34)=(32)+(33)	(35)	(36)
238	Kab. Pacitan		3.488.926	3.488.926	1.177.990	5.559.674
239	Kab. Pamekasan	14.001.129	1.659.755	15.660.884	1.275.266	
240	Kab. Pasuruan		2.634.957	2.634.957	3.009.683	7.690.754
241	Kab. Ponorogo		2.967.565	2.967.565	1.653.490	4.100.000
242	Kab. Probolinggo	1.909.245	2.329.657	4.238.902	1.078.527	16.535.397
243	Kab. Sampang	2.004.707	4.745.366	6.750.073	2.761.886	900.000
244	Kab. Sidoarjo		2.974.562	2.974.562		2.617.634
245	Kab. Situbondo		1.049.845	1.049.845	1.784.834	2.324.889
246	Kab. Sumenep	13.014.686	5.004.263	18.018.949	955.145	4.013.400
247	Kab. Trenggalek	5.091.320	3.514.936	8.606.256	2.802.653	6.256.592
248	Kab. Tuban		3.445.200	3.445.200	2.808.666	1.361.685
249	Kab. Tulungagung		3.659.649	3.659.649	2.423.993	8.575.912
250	Kota Blitar		1.086.820	1.086.820	2.911.287	3.344.730
251	Kota Kediri		2.700.000	2.700.000	8.023.577	2.195.600
252	Kota Madiun					
253	Kota Malang		2.439.775	2.439.775	1.052.107	
254	Kota Mojokerto		1.565.512	1.565.512	1.878.901	
255	Kota Pasuruan		819.764	819.764		
256	Kota Probolinggo		1.869.681	1.869.681	367.500	2.737.050
257	Kota Surabaya		1.070.728	1.070.728		

*) Perubahan Pertama

**) Perubahan Kedua

***) Perubahan Ketiga

(PMK Nomor 94 Tahun 2021)

(PMK Nomor 162 Tahun 2021)

(PMK Nomor 118 Tahun 2022)

Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021

Tanggal Berlaku: 23 November 2021

Tanggal Berlaku: 25 Juli 2022

SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Dampaknya

2. DAK FISIK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Pertanian	Kelautan dan Perikanan	Industri Kecil dan Menengah	Pariwisata	Lingkungan Hidup
						Lingkungan Hidup Tematik Penurunan Angka Kematian Ibu dan Stunting
(1)	(2)	(37)	(38)	(39)	(40)	(41)
238	Kab. Pacitan	3.248.783	1.473.350			
239	Kab. Pamekasan	2.477.058	1.436.000	1.500.146		
240	Kab. Pasuruan	911.854	851.500			
241	Kab. Ponorogo	5.459.630	210.335			
242	Kab. Probolinggo	6.780.000	1.117.800		11.540.752	
243	Kab. Sampang	2.100.000	921.000	3.088.567		3.420.000
244	Kab. Sidoarjo	310.000	1.281.000	3.370.328		
245	Kab. Situbondo	4.970.000	669.198		2.668.561	
246	Kab. Sumenep	13.690.000	1.280.000			
247	Kab. Trenggalek	3.887.112	1.181.000			
248	Kab. Tuban	3.147.320	1.448.005			6.637.000
249	Kab. Tulungagung	3.885.581	1.177.713			4.849.000
250	Kota Blitar	450.000				
251	Kota Kediri	582.837		1.000.000		
252	Kota Madiun					
253	Kota Malang					
254	Kota Mojokerto	1.340.000				
255	Kota Pasuruan	550.000				
256	Kota Probolinggo					
257	Kota Surabaya					

*) Perubahan Pertama

**) Perubahan Kedua

***) Perubahan Ketiga

(PMK Nomor 94 Tahun 2021)

(PMK Nomor 162 Tahun 2021)

(PMK Nomor 118 Tahun 2022)

Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021

Tanggal Berlaku: 23 November 2021

Tanggal Berlaku: 25 Juli 2022

SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Dampaknya

2. DAK FISIK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Lingkungan Hidup			TOTAL DAK PENUGASAN	TOTAL DAK FISIK
		Lingkungan Hidup Tematik Pembangunan Infrastruktur Ekonomi Berkelanjutan	Kehutanan Tematik Ketahanan Pangan	Subtotal Lingkungan Hidup		
(1)	(2)	(42)	(43)	(44)=(41)+(42)+(43)	(45)=(25)+(28)+(31)+(34)+(35)+(36)+(37)+(38)+(39)+(40)+(44)	(46)=(21)+(45)
238	Kab. Pacitan				18.557.455	120.343.180
239	Kab. Pamekasan				27.363.830	99.321.427
240	Kab. Pasuruan				32.288.284	67.426.758
241	Kab. Ponorogo				24.229.325	95.995.955
242	Kab. Probolinggo				66.418.970	131.351.854
243	Kab. Sampang			3.420.000	38.719.679	110.542.642
244	Kab. Sidoarjo				20.661.220	36.297.757
245	Kab. Situbondo				51.949.157	99.910.517
246	Kab. Sumenep				43.231.627	133.436.369
247	Kab. Trenggalek				28.608.186	102.650.187
248	Kab. Tuban			6.637.000	26.724.576	51.953.240
249	Kab. Tulungagung			4.849.000	42.428.148	110.195.237
250	Kota Blitar				8.712.754	32.156.431
251	Kota Kediri				16.317.640	66.903.041
252	Kota Madiun					7.567.929
253	Kota Malang				5.378.382	28.892.147
254	Kota Mojokerto				5.982.726	37.548.031
255	Kota Pasuruan				4.414.764	26.676.065
256	Kota Probolinggo				6.346.152	57.922.262
257	Kota Surabaya				3.339.565	24.475.615

*) Perubahan Pertama

**) Perubahan Kedua

***) Perubahan Ketiga

(PMK Nomor 94 Tahun 2021)

(PMK Nomor 162 Tahun 2021)

(PMK Nomor 118 Tahun 2022)

Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021

Tanggal Berlaku: 23 November 2021

Tanggal Berlaku: 25 Juli 2022

SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Dampaknya

1. DAK FISIK REGULER

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Pendidikan				
		PAUD	SD	SMP	SMA	SMK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
258	Kota Batu	239.084	1.357.880	1.019.308		
259	Provinsi Kalimantan Barat				113.768.273	99.431.869
260	Kab. Bengkayang	409.002	18.710.184	14.816.879		
261	Kab. Landak	647.155	18.439.096	1.287.322		
262	Kab. Kapuas Hulu	908.349	7.568.186	13.336.817		
263	Kab. Ketapang	1.360.318	24.025.886	32.134.752		
264	Kab. Mempawah	572.398	23.099.543	5.216.268		
265	Kab. Sambas	460.000	16.450.351	21.316.653		
266	Kab. Sanggau	810.438	17.140.476	5.008.964		
267	Kab. Sintang	395.218	19.774.869	6.675.490		
268	Kota Pontianak		4.648.212	11.734.830		
269	Kota Singkawang	3.201.118	5.878.377	3.284.810		
270	Kab. Sekadau	304.047	11.255.636	2.634.554		
271	Kab. Melawi	883.255	17.601.069	15.422.067		
272	Kab. Kayong Utara	505.450	25.518.102	17.661.147		
273	Kab. Kubu Raya	1.148.976	24.851.077	16.656.461		
274	Provinsi Kalimantan Tengah				81.652.589	109.296.844
275	Kab. Barito Selatan	539.712	2.274.425	7.184.649		
276	Kab. Barito Utara	752.432	22.975.565	19.869.945		
277	Kab. Kapuas	1.078.109	21.243.374	10.961.492		

*) Perubahan Pertama

**) Perubahan Kedua

***) Perubahan Ketiga

(PMK Nomor 94 Tahun 2021)

(PMK Nomor 162 Tahun 2021)

(PMK Nomor 118 Tahun 2022)

Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021

Tanggal Berlaku: 23 November 2021

Tanggal Berlaku: 25 Juli 2022

SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Dampaknya

1. DAK FISIK REGULER

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Pendidikan				Kesehatan dan KB
		SKB	SLB	Perpustakaan Daerah	Subtotal Pendidikan	Pelayanan Dasar
(1)	(2)	(8)	(9)	(10)	(11)=(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)+(9)+(10)	(12)
258	Kota Batu			2.750.000	5.366.272	
259	Provinsi Kalimantan Barat		3.692.910	796.908	217.689.960	
260	Kab. Bengkayang			500.000	34.436.065	
261	Kab. Landak				20.373.573	26.623.735
262	Kab. Kapuas Hulu			251.550	22.064.902	19.340.469
263	Kab. Ketapang				57.520.956	24.567.387
264	Kab. Mempawah				28.888.209	2.793.928
265	Kab. Sambas			10.000.000	48.227.004	24.185.120
266	Kab. Sanggau			500.000	23.459.878	12.613.599
267	Kab. Sintang	935.000		186.977	27.967.554	33.297.417
268	Kota Pontianak				16.383.042	9.833.487
269	Kota Singkawang				12.364.305	8.149.362
270	Kab. Sekadau				14.194.237	13.433.878
271	Kab. Melawi				33.906.391	13.219.140
272	Kab. Kayong Utara			285.000	43.969.699	22.465.039
273	Kab. Kubu Raya			500.000	43.156.514	12.392.768
274	Provinsi Kalimantan Tengah		1.142.430	4.800.000	196.891.863	
275	Kab. Barito Selatan	1.300.300		526.300	11.825.386	5.995.627
276	Kab. Barito Utara			3.212.749	46.810.691	6.610.000
277	Kab. Kapuas	200.000		408.710	33.891.685	7.664.802

*) Perubahan Pertama

(PMK Nomor 94 Tahun 2021)

Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021

**) Perubahan Kedua

(PMK Nomor 162 Tahun 2021)

Tanggal Berlaku: 23 November 2021

***) Perubahan Ketiga

(PMK Nomor 118 Tahun 2022)

Tanggal Berlaku: 25 Juli 2022

SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Dampaknya

1. DAK FISIK REGULER

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Kesehatan dan KB				
		Pelayanan Rujukan	Pelayanan Kefarmasian dan Bahan Habis Pakai	Peningkatan Kesiapan Sistem Kesehatan	Keluarga Berencana	Subtotal Kesehatan dan KB
(1)	(2)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)=(12)+(13)+(14)+(15)+(16)
258	Kota Batu		1.709.870		490.522	2.200.392
259	Provinsi Kalimantan Barat	86.356.339		20.081.078		106.437.417
260	Kab. Bengkayang	11.253.605	2.788.420		1.417.968	15.459.993
261	Kab. Landak	10.769.085	5.123.436		1.429.211	43.945.467
262	Kab. Kapuas Hulu	3.022.351	2.866.421	300.094	1.145.639	26.674.974
263	Kab. Ketapang	3.500.000	3.491.358	52.100.358	1.159.770	84.818.873
264	Kab. Mempawah	9.400.500	4.482.749		529.012	17.206.189
265	Kab. Sambas	8.080.262	4.909.109	3.262.171	1.514.061	41.950.723
266	Kab. Sanggau	2.693.551	3.297.662	423.140	1.120.192	20.148.144
267	Kab. Sintang	8.174.875	7.910.818	5.411.850	1.261.111	56.056.071
268	Kota Pontianak	25.741.007	4.734.127	585.468	1.115.023	42.009.112
269	Kota Singkawang	14.424.108	3.284.040		1.096.403	26.953.913
270	Kab. Sekadau	1.983.267	2.355.713		1.216.447	18.989.305
271	Kab. Melawi		2.301.515	2.463.731	1.049.748	19.034.134
272	Kab. Kayong Utara	3.300.000	5.690.836	351.418	617.736	32.425.029
273	Kab. Kubu Raya	1.292.600	2.677.866	337.617	972.229	17.673.080
274	Provinsi Kalimantan Tengah	12.921.415	1.507.714	3.363.580		17.792.709
275	Kab. Barito Selatan	12.084.045	2.105.061	5.648.516	812.546	26.645.795
276	Kab. Barito Utara	4.701.051	1.642.650	552.229	1.261.717	14.767.647
277	Kab. Kapuas	9.470.000	2.238.632	623.493	1.250.000	21.246.927

*) Perubahan Pertama

(PMK Nomor 94 Tahun 2021)

Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021

**) Perubahan Kedua

(PMK Nomor 162 Tahun 2021)

Tanggal Berlaku: 23 November 2021

***) Perubahan Ketiga

(PMK Nomor 118 Tahun 2022)

Tanggal Berlaku: 25 Juli 2022

SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Dampaknya

1. DAK FISIK REGULER

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Jalan	Transportasi Perdesaan	Transportasi Laut	TOTAL DAK REGULER
(1)	(2)	(18)	(19)	(20)	(21)=(11)+(17)+(18)+(19)+(20)
258	Kota Batu	6.325.528			13.892.192
259	Provinsi Kalimantan Barat	11.665.450			335.792.827
260	Kab. Bengkayang	13.631.581	5.641.843		69.169.482
261	Kab. Landak	11.511.956	7.964.358		83.795.354
262	Kab. Kapuas Hulu	18.111.829	6.825.000		73.676.705
263	Kab. Ketapang	35.994.362	4.863.658		183.197.849
264	Kab. Mempawah	10.345.299			56.439.697
265	Kab. Sambas	16.738.746	8.200.000	5.401.270	120.517.743
266	Kab. Sanggau	14.394.125	4.600.000		62.602.147
267	Kab. Sintang	45.062.110	6.600.000		135.685.735
268	Kota Pontianak	6.890.038			65.282.192
269	Kota Singkawang	8.768.965			48.087.183
270	Kab. Sekadau	9.176.917			42.360.459
271	Kab. Melawi	12.701.695	5.500.100		71.142.320
272	Kab. Kayong Utara	7.707.820	4.474.566		88.577.114
273	Kab. Kubu Raya	8.345.516	3.696.380		72.871.490
274	Provinsi Kalimantan Tengah	15.463.964			230.148.536
275	Kab. Barito Selatan	17.086.797			55.557.978
276	Kab. Barito Utara	16.830.782			78.409.120
277	Kab. Kapuas	41.715.894			96.854.506

*) Perubahan Pertama

(PMK Nomor 94 Tahun 2021)

Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021

**) Perubahan Kedua

(PMK Nomor 162 Tahun 2021)

Tanggal Berlaku: 23 November 2021

***) Perubahan Ketiga

(PMK Nomor 118 Tahun 2022)

Tanggal Berlaku: 25 Juli 2022

SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Dampaknya

2. DAK FISIK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Kesehatan dan KB			Subtotal Kesehatan dan KB	Jalan
		Penguatan Intervensi Stunting	Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi	Keluarga Berencana		Tematik Ketahanan Pangan
(1)	(2)	(22)	(23)	(24)	(25)=(22)+(23)+(24)	(26)
258	Kota Batu					
259	Provinsi Kalimantan Barat	4.374.938			4.374.938	
260	Kab. Bengkayang					
261	Kab. Landak	1.779.859		40.000	1.819.859	
262	Kab. Kapuas Hulu	1.650.000	94.042.486	225.000	95.917.486	
263	Kab. Ketapang		74.205.358	461.699	74.667.057	
264	Kab. Mempawah					5.900.145
265	Kab. Sambas		80.958.926	40.500	80.999.426	13.134.080
266	Kab. Sanggau	2.194.000	28.579.857	31.955	30.805.812	
267	Kab. Sintang	119.952	44.135.419	365.025	44.620.396	
268	Kota Pontianak	220.915		43.500	264.415	
269	Kota Singkawang					
270	Kab. Sekadau					
271	Kab. Melawi	75.000	16.005.193	315.025	16.395.218	
272	Kab. Kayong Utara		41.829.658		41.829.658	
273	Kab. Kubu Raya	1.050.000	10.506.327	33.542	11.589.869	
274	Provinsi Kalimantan Tengah	5.800.178			5.800.178	
275	Kab. Barito Selatan			315.000	315.000	
276	Kab. Barito Utara					
277	Kab. Kapuas			315.000	315.000	

*) Perubahan Pertama

(PMK Nomor 94 Tahun 2021)

Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021

**) Perubahan Kedua

(PMK Nomor 162 Tahun 2021)

Tanggal Berlaku: 23 November 2021

***) Perubahan Ketiga

(PMK Nomor 118 Tahun 2022)

Tanggal Berlaku: 25 Juli 2022

SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Dampaknya

2. DAK FISIK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Jalan		Air Minum		
		Tematik Pembangunan Infrastruktur Ekonomi Berkelanjutan	Subtotal Jalan	Tematik Penurunan Angka Kematian Ibu dan Stunting	Tematik Penanggulangan Kemiskinan	Subtotal Air Minum
(1)	(2)	(27)	(28)=(26)+(27)	(29)	(30)	(31)=(29)+(30)
258	Kota Batu				2.190.856	2.190.856
259	Provinsi Kalimantan Barat	50.436.199	50.436.199			
260	Kab. Bengkayang	9.318.025	9.318.025		6.125.778	6.125.778
261	Kab. Landak				5.725.709	5.725.709
262	Kab. Kapuas Hulu	11.723.811	11.723.811	3.759.563	5.051.202	8.810.765
263	Kab. Ketapang	21.279.456	21.279.456	7.499.133	7.432.434	14.931.567
264	Kab. Mempawah		5.900.145		5.279.063	5.279.063
265	Kab. Sambas		13.134.080	1.149.867	5.291.275	6.441.142
266	Kab. Sanggau	13.641.663	13.641.663		5.796.679	5.796.679
267	Kab. Sintang	19.223.732	19.223.732	7.584.118	7.045.524	14.629.642
268	Kota Pontianak				2.525.000	2.525.000
269	Kota Singkawang				5.825.820	5.825.820
270	Kab. Sekadau				5.046.500	5.046.500
271	Kab. Melawi			1.649.809	5.713.060	7.362.869
272	Kab. Kayong Utara				4.293.924	4.293.924
273	Kab. Kubu Raya	11.040.208	11.040.208		2.172.666	2.172.666
274	Provinsi Kalimantan Tengah	34.886.722	34.886.722			
275	Kab. Barito Selatan				3.995.362	3.995.362
276	Kab. Barito Utara				1.057.129	1.057.129
277	Kab. Kapuas			18.832.823		18.832.823

*) Perubahan Pertama

**) Perubahan Kedua

***) Perubahan Ketiga

(PMK Nomor 94 Tahun 2021)

(PMK Nomor 162 Tahun 2021)

(PMK Nomor 118 Tahun 2022)

Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021

Tanggal Berlaku: 23 November 2021

Tanggal Berlaku: 25 Juli 2022

SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Dampaknya

2. DAK FISIK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Sanitasi			Perumahan dan Permukiman	Irigasi
		Tematik Penurunan Angka Kematian Ibu dan Stunting	Tematik Penanggulangan Kemiskinan	Subtotal Sanitasi		
(1)	(2)	(32)	(33)	(34)=(32)+(33)	(35)	(36)
258	Kota Batu		1.641.582	1.641.582		2.448.833
259	Provinsi Kalimantan Barat					14.985.719
260	Kab. Bengkayang		2.446.121	2.446.121	1.655.170	2.393.501
261	Kab. Landak		5.229.193	5.229.193	3.205.038	7.055.981
262	Kab. Kapuas Hulu	3.436.641	2.708.513	6.145.154	1.213.004	2.281.860
263	Kab. Ketapang	12.819.216	2.830.688	15.649.904	1.472.551	7.368.888
264	Kab. Mempawah		600.000	600.000		5.513.140
265	Kab. Sambas	1.569.880	2.546.571	4.116.451	1.096.174	4.270.000
266	Kab. Sanggau		3.201.210	3.201.210	1.842.408	2.551.248
267	Kab. Sintang	5.727.735	3.077.964	8.805.699	1.230.736	
268	Kota Pontianak				1.083.329	
269	Kota Singkawang		1.543.460	1.543.460	2.443.823	2.956.680
270	Kab. Sekadau		809.905	809.905		4.811.631
271	Kab. Melawi	2.818.409	2.234.219	5.052.628	1.230.056	2.700.000
272	Kab. Kayong Utara		1.861.552	1.861.552	1.535.039	6.892.567
273	Kab. Kubu Raya		2.399.296	2.399.296	1.654.175	8.017.029
274	Provinsi Kalimantan Tengah					12.750.000
275	Kab. Barito Selatan	1.792.872	1.094.992	2.887.864		6.585.410
276	Kab. Barito Utara		899.867	899.867		7.021.801
277	Kab. Kapuas	18.611.659		18.611.659		2.300.000

*) Perubahan Pertama

**) Perubahan Kedua

***) Perubahan Ketiga

(PMK Nomor 94 Tahun 2021)

(PMK Nomor 162 Tahun 2021)

(PMK Nomor 118 Tahun 2022)

Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021

Tanggal Berlaku: 23 November 2021

Tanggal Berlaku: 25 Juli 2022

SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Dampaknya

2. DAK FISIK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Pertanian	Kelautan dan Perikanan	Industri Kecil dan Menengah	Pariwisata	Lingkungan Hidup
						Lingkungan Hidup Tematik Penurunan Angka Kematian Ibu dan Stunting
(1)	(2)	(37)	(38)	(39)	(40)	(41)
258	Kota Batu	783.916		3.937.883		
259	Provinsi Kalimantan Barat	11.219.614	7.834.100			
260	Kab. Bengkayang		1.920.000	3.100.302		
261	Kab. Landak	5.793.635	980.000		1.239.740	
262	Kab. Kapuas Hulu		1.640.300	1.000.097		1.300.000
263	Kab. Ketapang	4.290.000	1.630.000			1.791.000
264	Kab. Mempawah	2.920.000	525.930			
265	Kab. Sambas	3.230.000	1.837.000	4.600.448		
266	Kab. Sanggau	4.489.042	1.201.208	5.350.521		
267	Kab. Sintang		770.000	4.560.444		1.300.000
268	Kota Pontianak		139.500			
269	Kota Singkawang		1.364.000			
270	Kab. Sekadau	2.945.000	220.000			
271	Kab. Melawi		1.350.000			
272	Kab. Kayong Utara		1.169.000			
273	Kab. Kubu Raya	2.920.000	1.530.000			
274	Provinsi Kalimantan Tengah	5.805.058	8.898.000			
275	Kab. Barito Selatan		946.800			
276	Kab. Barito Utara		1.052.000	2.200.214		
277	Kab. Kapuas	3.862.559	1.645.000			

*) Perubahan Pertama

**) Perubahan Kedua

***) Perubahan Ketiga

(PMK Nomor 94 Tahun 2021)

(PMK Nomor 162 Tahun 2021)

(PMK Nomor 118 Tahun 2022)

Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021

Tanggal Berlaku: 23 November 2021

Tanggal Berlaku: 25 Juli 2022

SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Dampaknya

2. DAK FISIK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Lingkungan Hidup			TOTAL DAK PENUGASAN	TOTAL DAK FISIK
		Lingkungan Hidup Tematik Pembangunan Infrastruktur Ekonomi Berkelanjutan	Kehutanan Tematik Ketahanan Pangan	Subtotal Lingkungan Hidup		
(1)	(2)	(42)	(43)	(44)=(41)+(42)+(43)	(45)=(25)+(28)+(31)+(34)+(35)+(36)+(37)+(38)+(39)+(40)+(44)	(46)=(21)+(45)
258	Kota Batu				11.003.070	24.895.262
259	Provinsi Kalimantan Barat				88.850.570	424.643.397
260	Kab. Bengkayang				26.958.897	96.128.379
261	Kab. Landak				31.049.155	114.844.509
262	Kab. Kapuas Hulu			1.300.000	130.032.477	203.709.182
263	Kab. Ketapang			1.791.000	143.080.423	326.278.272
264	Kab. Mempawah				20.738.278	77.177.975
265	Kab. Sambas				119.724.721	240.242.464
266	Kab. Sanggau				68.879.791	131.481.938
267	Kab. Sintang			1.300.000	95.140.649	230.826.384
268	Kota Pontianak				4.012.244	69.294.436
269	Kota Singkawang				14.133.783	62.220.966
270	Kab. Sekadau				13.833.036	56.193.495
271	Kab. Melawi				34.090.771	105.233.091
272	Kab. Kayong Utara				57.581.740	146.158.854
273	Kab. Kubu Raya				41.323.243	114.194.733
274	Provinsi Kalimantan Tengah		3.657.537	3.657.537	71.797.495	301.946.031
275	Kab. Barito Selatan				14.730.436	70.288.414
276	Kab. Barito Utara				12.231.011	90.640.131
277	Kab. Kapuas				45.567.041	142.421.547

*) Perubahan Pertama

**) Perubahan Kedua

***) Perubahan Ketiga

(PMK Nomor 94 Tahun 2021)

(PMK Nomor 162 Tahun 2021)

(PMK Nomor 118 Tahun 2022)

Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021

Tanggal Berlaku: 23 November 2021

Tanggal Berlaku: 25 Juli 2022

SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Dampaknya

1. DAK FISIK REGULER

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Pendidikan				
		PAUD	SD	SMP	SMA	SMK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
278	Kab. Kotawaringin Barat	688.089	19.888.629	3.458.622		
279	Kab. Kotawaringin Timur	373.399	5.987.201	12.516.017		
280	Kota Palangkaraya	820.888	14.277.849	6.985.972		
281	Kab. Katingan	708.238	7.279.654	1.479.566		
282	Kab. Seruyan	751.030	11.068.149	2.715.376		
283	Kab. Sukamara	715.859	1.447.212	1.509.639		
284	Kab. Lamandau	275.480	3.232.163	5.240.728		
285	Kab. Gunung Mas	1.355.950	19.912.591	10.144.340		
286	Kab. Pulang Pisau	1.107.231	4.867.346	6.218.294		
287	Kab. Murung Raya	1.872.817	5.239.849	2.056.408		
288	Kab. Barito Timur	830.478	18.246.502	15.936.976		
289	Provinsi Kalimantan Selatan				41.233.122	44.439.995
290	Kab. Banjar	2.304.753	16.076.230	6.016.215		
291	Kab. Barito Kuala	726.529	6.583.117	12.631.293		
292	Kab. Hulu Sungai Selatan		1.196.378	1.950.574		
293	Kab. Hulu Sungai Tengah	385.760	10.478.919	4.284.324		
294	Kab. Hulu Sungai Utara	283.070	2.819.027	1.832.602		
295	Kab. Kotabaru	1.173.560	15.521.189	1.168.200		
296	Kab. Tabalong	303.517	18.966.823	5.069.216		
297	Kab. Tanah Laut	199.213	6.449.370	3.286.785		

*) Perubahan Pertama

**) Perubahan Kedua

***) Perubahan Ketiga

(PMK Nomor 94 Tahun 2021)

(PMK Nomor 162 Tahun 2021)

(PMK Nomor 118 Tahun 2022)

Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021

Tanggal Berlaku: 23 November 2021

Tanggal Berlaku: 25 Juli 2022

SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Dampaknya

1. DAK FISIK REGULER

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Pendidikan				Kesehatan dan KB
		SKB	SLB	Perpustakaan Daerah	Subtotal Pendidikan	Pelayanan Dasar
(1)	(2)	(8)	(9)	(10)	(11)=(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)+(9)+(10)	(12)
278	Kab. Kotawaringin Barat			300.000	24.335.340	18.482.000
279	Kab. Kotawaringin Timur				18.876.617	10.587.158
280	Kota Palangkaraya	200.000			22.284.709	10.022.840
281	Kab. Katingan				9.467.458	2.000.000
282	Kab. Seruyan			99.644	14.634.199	3.903.212
283	Kab. Sukamara				3.672.710	8.252.855
284	Kab. Lamandau				8.748.371	2.482.349
285	Kab. Gunung Mas				31.412.881	14.066.961
286	Kab. Pulang Pisau			300.000	12.492.871	2.000.000
287	Kab. Murung Raya				9.169.074	17.872.000
288	Kab. Barito Timur			300.000	35.313.956	10.928.804
289	Provinsi Kalimantan Selatan		3.340.070	4.500.000	93.513.187	
290	Kab. Banjar			299.900	24.697.098	13.704.749
291	Kab. Barito Kuala				19.940.939	13.251.634
292	Kab. Hulu Sungai Selatan				3.146.952	9.618.575
293	Kab. Hulu Sungai Tengah			216.000	15.365.003	12.047.490
294	Kab. Hulu Sungai Utara			227.000	5.161.699	11.216.855
295	Kab. Kotabaru				17.862.949	22.298.663
296	Kab. Tabalong			1.693.173	26.032.729	5.850.217
297	Kab. Tanah Laut				9.935.368	14.263.798

*) Perubahan Pertama

**) Perubahan Kedua

***) Perubahan Ketiga

(PMK Nomor 94 Tahun 2021)

(PMK Nomor 162 Tahun 2021)

(PMK Nomor 118 Tahun 2022)

Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021

Tanggal Berlaku: 23 November 2021

Tanggal Berlaku: 25 Juli 2022

SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Dampaknya

1. DAK FISIK REGULER

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Kesehatan dan KB				Subtotal Kesehatan dan KB
		Pelayanan Rujukan	Pelayanan Kefarmasian dan Bahan Habis Pakai	Peningkatan Kesiapan Sistem Kesehatan	Keluarga Berencana	
(1)	(2)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)=(12)+(13)+(14)+(15)+(16)
278	Kab. Kotawaringin Barat		3.258.856	2.309.324	1.261.717	25.311.897
279	Kab. Kotawaringin Timur	10.711.915	2.480.305	4.641.578	1.034.608	29.455.564
280	Kota Palangkaraya	4.667.713	4.724.041	391.581	1.316.000	21.122.175
281	Kab. Katingan	7.450.000	2.099.602	42.361.035	1.282.400	55.193.037
282	Kab. Seruyan	16.595.102	1.299.210		1.080.030	22.877.554
283	Kab. Sukamara	3.494.475	1.541.000		905.913	14.194.243
284	Kab. Lamandau	3.042.610	1.859.248	390.000	1.143.620	8.917.827
285	Kab. Gunung Mas	5.331.210	3.317.163	400.749	1.064.889	24.180.972
286	Kab. Pulang Pisau	6.677.372	1.875.176		1.054.795	11.607.343
287	Kab. Murung Raya	3.000.000	2.203.923		1.041.727	24.117.650
288	Kab. Barito Timur	9.094.835	2.259.871		1.260.607	23.544.117
289	Provinsi Kalimantan Selatan	56.473.126				56.473.126
290	Kab. Banjar	5.808.487	6.263.638	896.504	1.160.780	27.834.158
291	Kab. Barito Kuala	5.278.430	3.607.032	433.366	1.059.842	23.630.304
292	Kab. Hulu Sungai Selatan	8.315.768	3.056.883		765.610	21.756.836
293	Kab. Hulu Sungai Tengah	5.999.000	4.048.831		555.155	22.650.476
294	Kab. Hulu Sungai Utara		3.477.930	351.418	1.059.842	16.106.045
295	Kab. Kotabaru		3.122.957	46.089.460	1.110.311	72.621.391
296	Kab. Tabalong	6.194.000	1.415.179		1.160.780	14.620.176
297	Kab. Tanah Laut	8.981.500	3.532.818	278.568	605.624	27.662.308

*) Perubahan Pertama

(PMK Nomor 94 Tahun 2021)

Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021

**) Perubahan Kedua

(PMK Nomor 162 Tahun 2021)

Tanggal Berlaku: 23 November 2021

***) Perubahan Ketiga

(PMK Nomor 118 Tahun 2022)

Tanggal Berlaku: 25 Juli 2022

SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Dampaknya

1. DAK FISIK REGULER

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Jalan	Transportasi Perdesaan	Transportasi Laut	TOTAL DAK REGULER
(1)	(2)	(18)	(19)	(20)	(21)=(11)+(17)+(18)+(19)+(20)
278	Kab. Kotawaringin Barat	37.158.271		7.041.400	93.846.908
279	Kab. Kotawaringin Timur	23.878.306			72.210.487
280	Kota Palangkaraya	11.041.615			54.448.499
281	Kab. Katingan	33.822.774			98.483.269
282	Kab. Seruyan	16.182.510	5.350.024		59.044.287
283	Kab. Sukamara	12.166.400			30.033.353
284	Kab. Lamandau	8.071.104	4.700.000		30.437.302
285	Kab. Gunung Mas	15.334.091			70.927.944
286	Kab. Pulang Pisau	11.274.908			35.375.122
287	Kab. Murung Raya	21.502.663			54.789.387
288	Kab. Barito Timur	9.669.703			68.527.776
289	Provinsi Kalimantan Selatan	10.374.896			160.361.209
290	Kab. Banjar	14.899.715			67.430.971
291	Kab. Barito Kuala	15.749.646	4.200.000		63.520.889
292	Kab. Hulu Sungai Selatan	12.874.090			37.777.878
293	Kab. Hulu Sungai Tengah	2.121.898			40.137.377
294	Kab. Hulu Sungai Utara	8.174.960	5.355.000		34.797.704
295	Kab. Kotabaru	17.102.713			107.587.053
296	Kab. Tabalong	7.443.562			48.096.467
297	Kab. Tanah Laut	15.443.780			53.041.456

*) Perubahan Pertama

(PMK Nomor 94 Tahun 2021)

Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021

**) Perubahan Kedua

(PMK Nomor 162 Tahun 2021)

Tanggal Berlaku: 23 November 2021

***) Perubahan Ketiga

(PMK Nomor 118 Tahun 2022)

Tanggal Berlaku: 25 Juli 2022

SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Dampaknya

2. DAK FISIK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Kesehatan dan KB				Jalan
		Penguatan Intervensi Stunting	Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi	Keluarga Berencana	Subtotal Kesehatan dan KB	Tematik Ketahanan Pangan
(1)	(2)	(22)	(23)	(24)	(25)=(22)+(23)+(24)	(26)
278	Kab. Kotawaringin Barat		100.231.732		100.231.732	
279	Kab. Kotawaringin Timur		34.276.529	125.000	34.401.529	
280	Kota Palangkaraya					
281	Kab. Katingan					
282	Kab. Seruyan					
283	Kab. Sukamara					
284	Kab. Lamandau					4.947.964
285	Kab. Gunung Mas	596.000		227.500	823.500	
286	Kab. Pulang Pisau					
287	Kab. Murung Raya		14.029.924		14.029.924	
288	Kab. Barito Timur	650.000		125.000	775.000	
289	Provinsi Kalimantan Selatan	9.568.185			9.568.185	30.520.626
290	Kab. Banjar	500.000		361.700	861.700	8.142.486
291	Kab. Barito Kuala	3.499.989		340.025	3.840.014	9.954.479
292	Kab. Hulu Sungai Selatan		785.870		785.870	7.564.465
293	Kab. Hulu Sungai Tengah					6.115.796
294	Kab. Hulu Sungai Utara	645.080	23.178.501	402.524	24.226.105	
295	Kab. Kotabaru	4.425.380	12.541.152	461.700	17.428.232	
296	Kab. Tabalong	849.708		176.500	1.026.208	5.739.225
297	Kab. Tanah Laut	1.550.000		225.000	1.775.000	

*) Perubahan Pertama

**) Perubahan Kedua

***) Perubahan Ketiga

(PMK Nomor 94 Tahun 2021)

(PMK Nomor 162 Tahun 2021)

(PMK Nomor 118 Tahun 2022)

Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021

Tanggal Berlaku: 23 November 2021

Tanggal Berlaku: 25 Juli 2022

SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Dampaknya

2. DAK FISIK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Jalan		Air Minum		
		Tematik Pembangunan Infrastruktur Ekonomi Berkelanjutan	Subtotal Jalan	Tematik Penurunan Angka Kematian Ibu dan Stunting	Tematik Penanggulangan Kemiskinan	Subtotal Air Minum
(1)	(2)	(27)	(28)=(26)+(27)	(29)	(30)	(31)=(29)+(30)
278	Kab. Kotawaringin Barat	20.041.329	20.041.329		4.773.014	4.773.014
279	Kab. Kotawaringin Timur				4.426.445	4.426.445
280	Kota Palangkaraya				5.132.165	5.132.165
281	Kab. Katingan				5.126.796	5.126.796
282	Kab. Seruyan				5.182.200	5.182.200
283	Kab. Sukamara				3.895.631	3.895.631
284	Kab. Lamandau		4.947.964		12.652.406	12.652.406
285	Kab. Gunung Mas			3.549.587	1.674.412	5.223.999
286	Kab. Pulang Pisau				3.645.630	3.645.630
287	Kab. Murung Raya				4.245.858	4.245.858
288	Kab. Barito Timur			3.399.605	4.810.870	8.210.475
289	Provinsi Kalimantan Selatan		30.520.626			
290	Kab. Banjar		8.142.486		8.227.031	8.227.031
291	Kab. Barito Kuala		9.954.479		6.650.387	6.650.387
292	Kab. Hulu Sungai Selatan		7.564.465		5.483.557	5.483.557
293	Kab. Hulu Sungai Tengah		6.115.796		5.657.665	5.657.665
294	Kab. Hulu Sungai Utara			3.999.538	4.861.848	8.861.386
295	Kab. Kotabaru	13.531.411	13.531.411		15.724.873	15.724.873
296	Kab. Tabalong		5.739.225		6.779.285	6.779.285
297	Kab. Tanah Laut				7.046.793	7.046.793

*) Perubahan Pertama

**) Perubahan Kedua

***) Perubahan Ketiga

(PMK Nomor 94 Tahun 2021)

(PMK Nomor 162 Tahun 2021)

(PMK Nomor 118 Tahun 2022)

Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021

Tanggal Berlaku: 23 November 2021

Tanggal Berlaku: 25 Juli 2022

SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Dampaknya

2. DAK FISIK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Sanitasi			Perumahan dan Permukiman	Irigasi
		Tematik Penurunan Angka Kematian Ibu dan Stunting	Tematik Penanggulangan Kemiskinan	Subtotal Sanitasi		
(1)	(2)	(32)	(33)	(34)=(32)+(33)	(35)	(36)
278	Kab. Kotawaringin Barat		2.348.995	2.348.995		7.000.000
279	Kab. Kotawaringin Timur	874.400		874.400	1.333.952	6.346.698
280	Kota Palangkaraya		1.637.710	1.637.710	1.263.710	2.593.390
281	Kab. Katingan		2.105.965	2.105.965		1.306.400
282	Kab. Seruyan		1.986.999	1.986.999	2.583.247	3.580.000
283	Kab. Sukamara		1.651.334	1.651.334		3.051.293
284	Kab. Lamandau		9.431.441	9.431.441		
285	Kab. Gunung Mas	2.461.128		2.461.128		12.342.947
286	Kab. Pulang Pisau		2.096.065	2.096.065		14.940.000
287	Kab. Murung Raya		1.014.576	1.014.576		
288	Kab. Barito Timur	1.431.933	1.982.484	3.414.417		1.000.001
289	Provinsi Kalimantan Selatan					53.422.913
290	Kab. Banjar		3.375.152	3.375.152	2.279.093	5.941.884
291	Kab. Barito Kuala		3.141.987	3.141.987	2.881.481	5.339.210
292	Kab. Hulu Sungai Selatan		2.097.726	2.097.726	2.809.103	16.375.326
293	Kab. Hulu Sungai Tengah		2.220.744	2.220.744	2.728.003	5.366.883
294	Kab. Hulu Sungai Utara	5.317.977	2.129.976	7.447.953	1.268.764	5.109.995
295	Kab. Kotabaru		4.693.685	4.693.685	11.068.513	4.805.162
296	Kab. Tabalong	1.431.934	1.886.017	3.317.951		11.581.640
297	Kab. Tanah Laut		2.631.288	2.631.288	2.793.665	8.550.000

*) Perubahan Pertama

**) Perubahan Kedua

***) Perubahan Ketiga

(PMK Nomor 94 Tahun 2021)

(PMK Nomor 162 Tahun 2021)

(PMK Nomor 118 Tahun 2022)

Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021

Tanggal Berlaku: 23 November 2021

Tanggal Berlaku: 25 Juli 2022

SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Dampaknya

2. DAK FISIK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Pertanian	Kelautan dan Perikanan	Industri Kecil dan Menengah	Pariwisata	Lingkungan Hidup
						Lingkungan Hidup Tematik Penurunan Angka Kematian Ibu dan Stunting
(1)	(2)	(37)	(38)	(39)	(40)	(41)
278	Kab. Kotawaringin Barat		1.208.000	312.430		7.313.811
279	Kab. Kotawaringin Timur	2.399.346	1.506.230			
280	Kota Palangkaraya		570.750			
281	Kab. Katingan		946.108			
282	Kab. Seruyan		567.000	11.508.201		
283	Kab. Sukamara	1.308.800	1.156.000			
284	Kab. Lamandau	820.000				
285	Kab. Gunung Mas	4.435.000	999.400			1.300.000
286	Kab. Pulang Pisau		1.034.000			
287	Kab. Murung Raya			4.142.403		
288	Kab. Barito Timur	5.139.750	1.046.867			
289	Provinsi Kalimantan Selatan	4.411.416	1.117.020			
290	Kab. Banjar	3.090.000	1.194.250	1.400.136		3.867.000
291	Kab. Barito Kuala	2.825.000	1.390.000			6.413.000
292	Kab. Hulu Sungai Selatan	956.824	1.155.000			
293	Kab. Hulu Sungai Tengah	2.823.327	55.000	2.495.743		
294	Kab. Hulu Sungai Utara	1.282.242	665.400	2.390.232		
295	Kab. Kotabaru	1.530.000	1.613.000	500.048		
296	Kab. Tabalong	1.822.337	1.150.600			2.350.000
297	Kab. Tanah Laut	3.113.322	620.000	500.048		

*) Perubahan Pertama

**) Perubahan Kedua

***) Perubahan Ketiga

(PMK Nomor 94 Tahun 2021)

(PMK Nomor 162 Tahun 2021)

(PMK Nomor 118 Tahun 2022)

Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021

Tanggal Berlaku: 23 November 2021

Tanggal Berlaku: 25 Juli 2022

SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Dampaknya

2. DAK FISIK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Lingkungan Hidup			TOTAL DAK PENUGASAN	TOTAL DAK FISIK
		Lingkungan Hidup Tematik Pembangunan Infrastruktur Ekonomi Berkelanjutan	Kehutanan Tematik Ketahanan Pangan	Subtotal Lingkungan Hidup		
(1)	(2)	(42)	(43)	(44)=(41)+(42)+(43)	(45)=(25)+(28)+(31)+(34)+(35)+(36)+(37)+(38)+(39)+(40)+(44)	(46)=(21)+(45)
278	Kab. Kotawaringin Barat			7.313.811	143.229.311	237.076.219
279	Kab. Kotawaringin Timur				51.288.600	123.499.087
280	Kota Palangkaraya				11.197.725	65.646.224
281	Kab. Katingan				9.485.269	107.968.538
282	Kab. Seruyan				25.407.647	84.451.934
283	Kab. Sukamara				11.063.058	41.096.411
284	Kab. Lamandau				27.851.811	58.289.113
285	Kab. Gunung Mas			1.300.000	27.585.974	98.513.918
286	Kab. Pulang Pisau				21.715.695	57.090.817
287	Kab. Murung Raya				23.432.761	78.222.148
288	Kab. Barito Timur				19.586.510	88.114.286
289	Provinsi Kalimantan Selatan		3.148.456	3.148.456	102.188.616	262.549.825
290	Kab. Banjar			3.867.000	38.378.732	105.809.703
291	Kab. Barito Kuala			6.413.000	42.435.558	105.956.447
292	Kab. Hulu Sungai Selatan				37.227.871	75.005.749
293	Kab. Hulu Sungai Tengah				27.463.161	67.600.538
294	Kab. Hulu Sungai Utara				51.252.077	86.049.781
295	Kab. Kotabaru				70.894.924	178.481.977
296	Kab. Tabalong			2.350.000	33.767.246	81.863.713
297	Kab. Tanah Laut				27.030.116	80.071.572

*) Perubahan Pertama

**) Perubahan Kedua

***) Perubahan Ketiga

(PMK Nomor 94 Tahun 2021)

(PMK Nomor 162 Tahun 2021)

(PMK Nomor 118 Tahun 2022)

Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021

Tanggal Berlaku: 23 November 2021

Tanggal Berlaku: 25 Juli 2022

SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Dampaknya

1. DAK FISIK REGULER

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Pendidikan				
		PAUD	SD	SMP	SMA	SMK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
298	Kab. Tapin	395.359	8.128.874	17.627.752		
299	Kota Banjarbaru	225.584	1.835.572	2.000.700		
300	Kota Banjarmasin	131.584	3.613.621	3.099.426		
301	Kab. Balangan	1.185.105	7.722.574	6.852.672		
302	Kab. Tanah Bumbu	1.721.034	4.741.130	10.044.678		
303	Provinsi Kalimantan Timur				69.100.996	90.054.450
304	Kab. Berau	780.496	4.221.255	7.590.235		
305	Kab. Kutai Kartanegara	3.259.096	16.038.895	21.970.261		
306	Kab. Kutai Barat	450.781	15.775.643	7.571.751		
307	Kab. Kutai Timur	986.491	16.833.653	2.144.145		
308	Kab. Paser	749.875	19.850.556	17.270.079		
309	Kota Balikpapan		1.682.900	25.931.463		
310	Kota Bontang		1.529.000	1.723.217		
311	Kota Samarinda	1.800.379	2.371.378	6.507.875		
312	Kab. Penajam Paser Utara		1.074.425	3.768.351		
313	Kab. Mahakam Ulu		4.286.745	1.234.030		
314	Provinsi Sulawesi Utara				55.588.557	102.873.764
315	Kab. Bolaang Mongondow		4.212.018	1.510.368		
316	Kab. Minahasa		9.884.000	2.143.636		
317	Kab. Kepulauan Sangihe		2.296.973	4.063.261		

*) Perubahan Pertama

**) Perubahan Kedua

***) Perubahan Ketiga

(PMK Nomor 94 Tahun 2021)

(PMK Nomor 162 Tahun 2021)

(PMK Nomor 118 Tahun 2022)

Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021

Tanggal Berlaku: 23 November 2021

Tanggal Berlaku: 25 Juli 2022

SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Dampaknya

1. DAK FISIK REGULER

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Pendidikan				Kesehatan dan KB
		SKB	SLB	Perpustakaan Daerah	Subtotal Pendidikan	Pelayanan Dasar
(1)	(2)	(8)	(9)	(10)	(11)=(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)+(9)+(10)	(12)
298	Kab. Tapin	200.000			26.351.985	12.107.012
299	Kota Banjarbaru			998.671	5.060.527	14.987.538
300	Kota Banjarmasin	198.970			7.043.601	1.959.615
301	Kab. Balangan	686.000			16.446.351	7.031.052
302	Kab. Tanah Bumbu				16.506.842	9.750.455
303	Provinsi Kalimantan Timur		6.065.340	495.800	165.716.586	
304	Kab. Berau			200.000	12.791.986	4.697.782
305	Kab. Kutai Kartanegara				41.268.252	4.327.411
306	Kab. Kutai Barat				23.798.175	2.000.000
307	Kab. Kutai Timur			200.000	20.164.289	9.084.104
308	Kab. Paser				37.870.510	1.997.337
309	Kota Balikpapan	2.434.300			30.048.663	2.000.000
310	Kota Bontang				3.252.217	1.099.541
311	Kota Samarinda			10.000.000	20.679.632	1.972.292
312	Kab. Penajam Paser Utara			10.000.000	14.842.776	2.000.000
313	Kab. Mahakam Ulu				5.520.775	8.296.706
314	Provinsi Sulawesi Utara		1.445.960	1.000.000	160.908.281	
315	Kab. Bolaang Mongondow				5.722.386	21.135.079
316	Kab. Minahasa	680.536			12.708.172	29.462.133
317	Kab. Kepulauan Sangihe				6.360.234	15.804.250

*) Perubahan Pertama

(PMK Nomor 94 Tahun 2021)

Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021

**) Perubahan Kedua

(PMK Nomor 162 Tahun 2021)

Tanggal Berlaku: 23 November 2021

***) Perubahan Ketiga

(PMK Nomor 118 Tahun 2022)

Tanggal Berlaku: 25 Juli 2022

SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Dampaknya

1. DAK FISIK REGULER

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Kesehatan dan KB				Subtotal Kesehatan dan KB
		Pelayanan Rujukan	Pelayanan Kefarmasian dan Bahan Habis Pakai	Peningkatan Kesiapan Sistem Kesehatan	Keluarga Berencana	
(1)	(2)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)=(12)+(13)+(14)+(15)+(16)
298	Kab. Tapin	4.833.753	3.140.383		1.261.717	21.342.865
299	Kota Banjarbaru	7.817.188	2.523.417		783.274	26.111.417
300	Kota Banjarmasin	5.356.930	12.432.804	532.000	529.921	20.811.270
301	Kab. Balangan		1.479.037		1.059.835	9.569.924
302	Kab. Tanah Bumbu	3.236.000	4.550.788	1.486.142	1.160.780	20.184.165
303	Provinsi Kalimantan Timur	5.705.805				5.705.805
304	Kab. Berau	2.888.560	2.589.584	871.176	1.488.826	12.535.928
305	Kab. Kutai Kartanegara	6.135.771	4.014.298	199.998	1.499.929	16.177.407
306	Kab. Kutai Barat	6.101.570	3.064.371		1.488.818	12.654.759
307	Kab. Kutai Timur	6.432.176	4.199.852	9.421.174	1.312.186	30.449.492
308	Kab. Paser	2.985.500	2.571.564	913.630	1.510.029	9.978.060
309	Kota Balikpapan	3.193.000	3.763.105	2.961.959	1.112.128	13.030.192
310	Kota Bontang	2.994.764	2.100.623	2.971.068	1.428.567	10.594.563
311	Kota Samarinda	7.397.796	5.558.940		1.110.311	16.039.339
312	Kab. Penajam Paser Utara	3.000.000	2.195.396		1.519.612	8.715.008
313	Kab. Mahakam Ulu	4.586.731	3.536.870		1.514.061	17.934.368
314	Provinsi Sulawesi Utara	44.241.435	2.690.538	1.204.391		48.136.364
315	Kab. Bolaang Mongondow	5.400.000	1.734.404		1.110.311	29.379.794
316	Kab. Minahasa	15.119.226	2.620.200	390.000	1.059.842	48.651.401
317	Kab. Kepulauan Sangihe	16.451.042	2.045.082	341.697	1.160.780	35.802.851

*) Perubahan Pertama

(PMK Nomor 94 Tahun 2021)

Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021

**) Perubahan Kedua

(PMK Nomor 162 Tahun 2021)

Tanggal Berlaku: 23 November 2021

***) Perubahan Ketiga

(PMK Nomor 118 Tahun 2022)

Tanggal Berlaku: 25 Juli 2022

SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Dampaknya

1. DAK FISIK REGULER

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Jalan	Transportasi Perdesaan	Transportasi Laut	TOTAL DAK REGULER
(1)	(2)	(18)	(19)	(20)	(21)=(11)+(17)+(18)+(19)+(20)
298	Kab. Tapin	9.359.467			57.054.317
299	Kota Banjarbaru	12.911.747			44.083.691
300	Kota Banjarmasin	7.810.151			35.665.022
301	Kab. Balangan	13.393.418			39.409.693
302	Kab. Tanah Bumbu	40.815.048			77.506.055
303	Provinsi Kalimantan Timur	37.917.031			209.339.422
304	Kab. Berau	41.585.479	4.600.000		71.513.393
305	Kab. Kutai Kartanegara	23.804.332			81.249.991
306	Kab. Kutai Barat				36.452.934
307	Kab. Kutai Timur	38.541.088	4.700.000		93.854.869
308	Kab. Paser	38.656.909	4.600.000		91.105.479
309	Kota Balikpapan	8.743.291			51.822.146
310	Kota Bontang				13.846.780
311	Kota Samarinda	30.754.616			67.473.587
312	Kab. Penajam Paser Utara	13.257.102			36.814.886
313	Kab. Mahakam Ulu	35.827.608	10.200.000		69.482.751
314	Provinsi Sulawesi Utara	8.037.788			217.082.433
315	Kab. Bolaang Mongondow	8.059.655			43.161.835
316	Kab. Minahasa	9.579.820			70.939.393
317	Kab. Kepulauan Sangihe	6.375.704	6.200.000		54.738.789

*) Perubahan Pertama

(PMK Nomor 94 Tahun 2021)

Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021

**) Perubahan Kedua

(PMK Nomor 162 Tahun 2021)

Tanggal Berlaku: 23 November 2021

***) Perubahan Ketiga

(PMK Nomor 118 Tahun 2022)

Tanggal Berlaku: 25 Juli 2022

SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Dampaknya

2. DAK FISIK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Kesehatan dan KB				Jalan
		Penguatan Intervensi Stunting	Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi	Keluarga Berencana	Subtotal Kesehatan dan KB	Tematik Ketahanan Pangan
(1)	(2)	(22)	(23)	(24)	(25)=(22)+(23)+(24)	(26)
298	Kab. Tapin	1.545.950		327.525	1.873.475	
299	Kota Banjarbaru	1.166.000			1.166.000	
300	Kota Banjarmasin			315.000	315.000	
301	Kab. Balangan		9.029.195		9.029.195	
302	Kab. Tanah Bumbu			361.700	361.700	
303	Provinsi Kalimantan Timur	2.375.595			2.375.595	
304	Kab. Berau		11.520.482		11.520.482	
305	Kab. Kutai Kartanegara	650.000	25.010.115	315.000	25.975.115	
306	Kab. Kutai Barat			315.000	315.000	
307	Kab. Kutai Timur	650.000		227.500	877.500	17.552.040
308	Kab. Paser		15.886.616		15.886.616	26.810.820
309	Kota Balikpapan	3.240.000		315.000	3.555.000	
310	Kota Bontang					
311	Kota Samarinda	4.853.200		315.000	5.168.200	
312	Kab. Penajam Paser Utara	2.263.175		315.000	2.578.175	
313	Kab. Mahakam Ulu					
314	Provinsi Sulawesi Utara	3.720.900			3.720.900	
315	Kab. Bolaang Mongondow			377.500	377.500	
316	Kab. Minahasa					
317	Kab. Kepulauan Sangihe					

*) Perubahan Pertama

**) Perubahan Kedua

***) Perubahan Ketiga

(PMK Nomor 94 Tahun 2021)

(PMK Nomor 162 Tahun 2021)

(PMK Nomor 118 Tahun 2022)

Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021

Tanggal Berlaku: 23 November 2021

Tanggal Berlaku: 25 Juli 2022

SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Dampaknya

2. DAK FISIK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Jalan		Air Minum		
		Tematik Pembangunan Infrastruktur Ekonomi Berkelanjutan	Subtotal Jalan	Tematik Penurunan Angka Kematian Ibu dan Stunting	Tematik Penanggulangan Kemiskinan	Subtotal Air Minum
(1)	(2)	(27)	(28)=(26)+(27)	(29)	(30)	(31)=(29)+(30)
298	Kab. Tapin			1.789.792	6.985.434	8.775.226
299	Kota Banjarbaru				1.701.800	1.701.800
300	Kota Banjarmasin					
301	Kab. Balangan				5.471.959	5.471.959
302	Kab. Tanah Bumbu	19.636.683	19.636.683	15.548.324	3.873.336	19.421.660
303	Provinsi Kalimantan Timur	82.779.488	82.779.488			
304	Kab. Berau	25.574.695	25.574.695		6.063.260	6.063.260
305	Kab. Kutai Kartanegara			1.960.000	7.763.919	9.723.919
306	Kab. Kutai Barat				6.139.443	6.139.443
307	Kab. Kutai Timur		17.552.040	5.045.417	5.997.892	11.043.309
308	Kab. Paser		26.810.820		3.898.219	3.898.219
309	Kota Balikpapan				4.100.083	4.100.083
310	Kota Bontang				7.691.684	7.691.684
311	Kota Samarinda				4.625.172	4.625.172
312	Kab. Penajam Paser Utara			17.597.966		17.597.966
313	Kab. Mahakam Ulu	15.846.458	15.846.458			
314	Provinsi Sulawesi Utara	25.728.749	25.728.749			
315	Kab. Bolaang Mongondow			1.589.815	5.334.675	6.924.490
316	Kab. Minahasa				5.740.800	5.740.800
317	Kab. Kepulauan Sangihe	6.599.152	6.599.152		3.977.179	3.977.179

*) Perubahan Pertama

**) Perubahan Kedua

***) Perubahan Ketiga

(PMK Nomor 94 Tahun 2021)

(PMK Nomor 162 Tahun 2021)

(PMK Nomor 118 Tahun 2022)

Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021

Tanggal Berlaku: 23 November 2021

Tanggal Berlaku: 25 Juli 2022

SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Dampaknya

2. DAK FISIK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Sanitasi			Perumahan dan Permukiman	Irigasi
		Tematik Penurunan Angka Kematian Ibu dan Stunting	Tematik Penanggulangan Kemiskinan	Subtotal Sanitasi		
(1)	(2)	(32)	(33)	(34)=(32)+(33)	(35)	(36)
298	Kab. Tapin	2.291.094	2.043.677	4.334.771		6.667.500
299	Kota Banjarbaru		1.836.400	1.836.400	918.750	4.249.856
300	Kota Banjarmasin		2.360.886	2.360.886	1.077.122	
301	Kab. Balangan		1.751.145	1.751.145		2.748.165
302	Kab. Tanah Bumbu	22.173.607	2.655.781	24.829.388		11.504.300
303	Provinsi Kalimantan Timur					3.990.556
304	Kab. Berau		1.792.383	1.792.383	2.141.801	3.750.000
305	Kab. Kutai Kartanegara	1.300.105	3.108.951	4.409.056	1.265.696	7.485.748
306	Kab. Kutai Barat	2.091.078		2.091.078		2.120.438
307	Kab. Kutai Timur	601.412	944.861	1.546.273		
308	Kab. Paser		2.235.921	2.235.921	2.814.464	12.617.102
309	Kota Balikpapan		1.853.467	1.853.467	1.837.211	
310	Kota Bontang		3.721.292	3.721.292	28.049.287	
311	Kota Samarinda		1.414.161	1.414.161	984.702	
312	Kab. Penajam Paser Utara	8.165.204		8.165.204		9.354.674
313	Kab. Mahakam Ulu		1.384.796	1.384.796	1.126.725	
314	Provinsi Sulawesi Utara					6.749.999
315	Kab. Bolaang Mongondow	6.818.732		6.818.732		682.150
316	Kab. Minahasa		1.761.789	1.761.789	989.473	3.035.377
317	Kab. Kepulauan Sangihe		1.852.387	1.852.387	2.106.939	

*) Perubahan Pertama

**) Perubahan Kedua

***) Perubahan Ketiga

(PMK Nomor 94 Tahun 2021)

(PMK Nomor 162 Tahun 2021)

(PMK Nomor 118 Tahun 2022)

Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021

Tanggal Berlaku: 23 November 2021

Tanggal Berlaku: 25 Juli 2022

SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Dampaknya

2. DAK FISIK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Pertanian	Kelautan dan Perikanan	Industri Kecil dan Menengah	Pariwisata	Lingkungan Hidup
						Lingkungan Hidup Tematik Penurunan Angka Kematian Ibu dan Stunting
(1)	(2)	(37)	(38)	(39)	(40)	(41)
298	Kab. Tapin	2.467.341	1.097.089			
299	Kota Banjarbaru		733.550	750.073		2.028.600
300	Kota Banjarmasin					4.827.000
301	Kab. Balangan		707.450			
302	Kab. Tanah Bumbu	2.400.000	1.335.000	1.500.146		1.500.000
303	Provinsi Kalimantan Timur	6.442.196	11.610.300			
304	Kab. Berau		1.492.500			
305	Kab. Kutai Kartanegara	2.920.000	1.379.000			1.300.000
306	Kab. Kutai Barat	3.521.308	1.358.250			
307	Kab. Kutai Timur		1.330.000			3.823.000
308	Kab. Paser		1.437.069			
309	Kota Balikpapan			4.541.784		
310	Kota Bontang					
311	Kota Samarinda					
312	Kab. Penajam Paser Utara	1.155.960	1.601.610			
313	Kab. Mahakam Ulu					
314	Provinsi Sulawesi Utara	2.894.152	15.122.870		3.919.694	
315	Kab. Bolaang Mongondow	2.410.000	1.400.000	8.621.666		
316	Kab. Minahasa	4.370.000	2.106.670			
317	Kab. Kepulauan Sangihe	6.955.683	3.405.250			

*) Perubahan Pertama

**) Perubahan Kedua

***) Perubahan Ketiga

(PMK Nomor 94 Tahun 2021)

(PMK Nomor 162 Tahun 2021)

(PMK Nomor 118 Tahun 2022)

Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021

Tanggal Berlaku: 23 November 2021

Tanggal Berlaku: 25 Juli 2022

SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Dampaknya

2. DAK FISIK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Lingkungan Hidup			TOTAL DAK PENUGASAN	TOTAL DAK FISIK
		Lingkungan Hidup Tematik Pembangunan Infrastruktur Ekonomi Berkelanjutan	Kehutanan Tematik Ketahanan Pangan	Subtotal Lingkungan Hidup		
(1)	(2)	(42)	(43)	(44)=(41)+(42)+(43)	(45)=(25)+(28)+(31)+(34)+(35)+(36)+(37)+(38)+(39)+(40)+(44)	(46)=(21)+(45)
298	Kab. Tapin				25.215.402	82.269.719
299	Kota Banjarbaru			2.028.600	13.385.029	57.468.720
300	Kota Banjarmasin			4.827.000	8.580.008	44.245.030
301	Kab. Balangan				19.707.914	59.117.607
302	Kab. Tanah Bumbu			1.500.000	82.488.877	159.994.932
303	Provinsi Kalimantan Timur				107.198.135	316.537.557
304	Kab. Berau				52.335.121	123.848.514
305	Kab. Kutai Kartanegara			1.300.000	54.458.534	135.708.525
306	Kab. Kutai Barat				15.545.517	51.998.451
307	Kab. Kutai Timur			3.823.000	36.172.122	130.026.991
308	Kab. Paser				65.700.211	156.805.690
309	Kota Balikpapan				15.887.545	67.709.691
310	Kota Bontang				39.462.263	53.309.043
311	Kota Samarinda				12.192.235	79.665.822
312	Kab. Penajam Paser Utara				40.453.589	77.268.475
313	Kab. Mahakam Ulu				18.357.979	87.840.730
314	Provinsi Sulawesi Utara		13.631.737	13.631.737	71.768.101	288.850.534
315	Kab. Bolaang Mongondow				27.234.538	70.396.373
316	Kab. Minahasa				18.004.109	88.943.502
317	Kab. Kepulauan Sangihe				24.896.590	79.635.379

*) Perubahan Pertama

**) Perubahan Kedua

***) Perubahan Ketiga

(PMK Nomor 94 Tahun 2021)

(PMK Nomor 162 Tahun 2021)

(PMK Nomor 118 Tahun 2022)

Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021

Tanggal Berlaku: 23 November 2021

Tanggal Berlaku: 25 Juli 2022

SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Dampaknya

1. DAK FISIK REGULER

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Pendidikan				
		PAUD	SD	SMP	SMA	SMK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
318	Kota Bitung	260.041	4.409.322	3.864.405		
319	Kota Manado		20.481.663	4.267.479		
320	Kab. Kepulauan Talaud		7.675.981	13.698.921		
321	Kab. Minahasa Selatan	856.838	16.546.648	8.554.034		
322	Kota Tomohon		6.306.238	4.117.722		
323	Kab. Minahasa Utara	359.360	4.710.845	5.695.409		
324	Kab. Kep. Siau Tagulandang Biaro		2.826.210	1.848.056		
325	Kota Kotamobagu		7.614.919	2.656.022		
326	Kab. Bolaang Mongondow Utara	323.302	12.493.000	3.990.422		
327	Kab. Minahasa Tenggara	396.390	11.978.251	8.116.242		
328	Kab. Bolaang Mongondow Timur	269.093	18.461.545	1.601.936		
329	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	267.591	13.646.310	4.896.759		
330	Provinsi Sulawesi Tengah				119.973.223	124.028.566
331	Kab. Banggai	320.000	18.337.584	3.783.102		
332	Kab. Banggai Kepulauan		8.032.056	16.537.188		
333	Kab. Buol	992.995	16.301.191	2.562.895		
334	Kab. Toli Toli		16.627.376	5.309.313		
335	Kab. Donggala	752.704	4.068.895	13.614.171		
336	Kab. Morowali	714.947	9.382.408	8.352.808		
337	Kab. Poso	449.517	18.936.940	3.743.712		

*) Perubahan Pertama

(PMK Nomor 94 Tahun 2021)

Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021

**) Perubahan Kedua

(PMK Nomor 162 Tahun 2021)

Tanggal Berlaku: 23 November 2021

***) Perubahan Ketiga

(PMK Nomor 118 Tahun 2022)

Tanggal Berlaku: 25 Juli 2022

SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Dampaknya

1. DAK FISIK REGULER

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Pendidikan				Kesehatan dan KB
		SKB	SLB	Perpustakaan Daerah	Subtotal Pendidikan	Pelayanan Dasar
(1)	(2)	(8)	(9)	(10)	(11)=(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)+(9)+(10)	(12)
318	Kota Bitung	843.329		300.000	9.677.097	348.075
319	Kota Manado			293.864	25.043.006	3.830.200
320	Kab. Kepulauan Talaud				21.374.902	20.021.832
321	Kab. Minahasa Selatan				25.957.520	12.200.000
322	Kota Tomohon	968.395			11.392.355	1.510.500
323	Kab. Minahasa Utara	852.100			11.617.714	1.999.983
324	Kab. Kep. Siau Tagulandang Biaro			10.000.000	14.674.266	3.663.481
325	Kota Kotamobagu	726.200			10.997.141	1.870.000
326	Kab. Bolaang Mongondow Utara	3.785.000			20.591.724	29.841.045
327	Kab. Minahasa Tenggara			300.000	20.790.883	4.564.341
328	Kab. Bolaang Mongondow Timur				20.332.574	3.722.564
329	Kab. Bolaang Mongondow Selatan				18.810.660	3.906.285
330	Provinsi Sulawesi Tengah		4.848.385		248.850.174	
331	Kab. Banggai				22.440.686	21.075.942
332	Kab. Banggai Kepulauan				24.569.244	22.391.956
333	Kab. Buol				19.857.081	8.149.150
334	Kab. Toli Toli			7.005.000	28.941.689	9.958.131
335	Kab. Donggala	1.726.596		266.000	20.428.366	18.260.404
336	Kab. Morowali				18.450.163	18.201.009
337	Kab. Poso	684.220			23.814.389	8.853.596

*) Perubahan Pertama

(PMK Nomor 94 Tahun 2021)

Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021

**) Perubahan Kedua

(PMK Nomor 162 Tahun 2021)

Tanggal Berlaku: 23 November 2021

***) Perubahan Ketiga

(PMK Nomor 118 Tahun 2022)

Tanggal Berlaku: 25 Juli 2022

SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Dampaknya

1. DAK FISIK REGULER

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Kesehatan dan KB				Subtotal Kesehatan dan KB
		Pelayanan Rujukan	Pelayanan Kefarmasian dan Bahan Habis Pakai	Peningkatan Kesiapan Sistem Kesehatan	Keluarga Berencana	
(1)	(2)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)=(12)+(13)+(14)+(15)+(16)
318	Kota Bitung		3.070.717	45.390.000	1.488.826	50.297.618
319	Kota Manado		5.832.763	679.000	1.110.311	11.452.274
320	Kab. Kepulauan Talaud	12.274.623	3.365.224	3.922.750	1.110.000	40.694.429
321	Kab. Minahasa Selatan	1.950.145	5.024.228		1.160.780	20.335.153
322	Kota Tomohon	13.100.000	2.180.169		1.261.717	18.052.386
323	Kab. Minahasa Utara	12.684.653	2.998.721		1.488.826	19.172.183
324	Kab. Kep. Siau Tagulandang Biaro	3.750.000	3.467.492		1.009.374	11.890.347
325	Kota Kotamobagu	9.959.850	2.340.580	324.309	1.050.000	15.544.739
326	Kab. Bolaang Mongondow Utara		2.588.959	300.000	1.110.311	33.840.315
327	Kab. Minahasa Tenggara		2.191.204		1.362.654	8.118.199
328	Kab. Bolaang Mongondow Timur		2.396.212		1.160.780	7.279.556
329	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	1.000.000	3.956.545		1.362.348	10.225.178
330	Provinsi Sulawesi Tengah	18.383.670		1.835.410		20.219.080
331	Kab. Banggai	11.481.559	4.692.353	390.000	403.749	38.043.603
332	Kab. Banggai Kepulauan	16.619.118	3.044.705		1.463.592	43.519.371
333	Kab. Buol		2.520.302		1.429.273	12.098.725
334	Kab. Toli Toli	23.175.500	4.518.811		1.415.879	39.068.321
335	Kab. Donggala	11.823.280	6.789.790	1.140.000	1.145.538	39.159.012
336	Kab. Morowali	36.501.385	1.688.616		1.059.842	57.450.852
337	Kab. Poso	27.172.521	3.788.775	390.000	1.271.811	41.476.703

*) Perubahan Pertama

(PMK Nomor 94 Tahun 2021)

Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021

**) Perubahan Kedua

(PMK Nomor 162 Tahun 2021)

Tanggal Berlaku: 23 November 2021

***) Perubahan Ketiga

(PMK Nomor 118 Tahun 2022)

Tanggal Berlaku: 25 Juli 2022

SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Dampaknya

1. DAK FISIK REGULER

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Jalan	Transportasi Perdesaan	Transportasi Laut	TOTAL DAK REGULER
(1)	(2)	(18)	(19)	(20)	(21)=(11)+(17)+(18)+(19)+(20)
318	Kota Bitung	5.814.250			65.788.965
319	Kota Manado	5.344.716			41.839.996
320	Kab. Kepulauan Talaud	30.801.159	6.711.848	46.362.299	145.944.637
321	Kab. Minahasa Selatan	8.637.240		15.850.000	70.779.913
322	Kota Tomohon	6.757.370			36.202.111
323	Kab. Minahasa Utara	6.299.786	5.252.751		42.342.434
324	Kab. Kep. Siau Tagulandang Biaro	4.475.687	2.003.827	5.700.000	38.744.127
325	Kota Kotamobagu	5.510.708			32.052.588
326	Kab. Bolaang Mongondow Utara	6.352.561	3.842.290		64.626.890
327	Kab. Minahasa Tenggara	12.181.801			41.090.883
328	Kab. Bolaang Mongondow Timur	9.600.157			37.212.287
329	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	10.424.834			39.460.672
330	Provinsi Sulawesi Tengah	15.540.225			284.609.479
331	Kab. Banggai	12.912.515			73.396.804
332	Kab. Banggai Kepulauan	12.885.320	6.300.000		87.273.935
333	Kab. Buol	12.351.675	7.100.000		51.407.481
334	Kab. Toli Toli	13.048.350	9.660.000		90.718.360
335	Kab. Donggala	39.507.035	10.500.000		109.594.413
336	Kab. Morowali	12.995.443	5.000.000		93.896.458
337	Kab. Poso	21.437.753	4.935.000		91.663.845

*) Perubahan Pertama

**) Perubahan Kedua

***) Perubahan Ketiga

(PMK Nomor 94 Tahun 2021)

(PMK Nomor 162 Tahun 2021)

(PMK Nomor 118 Tahun 2022)

Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021

Tanggal Berlaku: 23 November 2021

Tanggal Berlaku: 25 Juli 2022

SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Dampaknya

2. DAK FISIK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Kesehatan dan KB				Jalan
		Penguatan Intervensi Stunting	Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi	Keluarga Berencana	Subtotal Kesehatan dan KB	Tematik Ketahanan Pangan
(1)	(2)	(22)	(23)	(24)	(25)=(22)+(23)+(24)	(26)
318	Kota Bitung					
319	Kota Manado					
320	Kab. Kepulauan Talaud		36.249.425		36.249.425	
321	Kab. Minahasa Selatan					
322	Kota Tomohon					
323	Kab. Minahasa Utara	500.000		501.150	1.001.150	
324	Kab. Kep. Siau Tagulandang Biaro					
325	Kota Kotamobagu					
326	Kab. Bolaang Mongondow Utara	1.690.000	27.173.620	476.149	29.339.769	
327	Kab. Minahasa Tenggara					
328	Kab. Bolaang Mongondow Timur					
329	Kab. Bolaang Mongondow Selatan		25.223.168	182.500	25.405.668	
330	Provinsi Sulawesi Tengah	3.287.555			3.287.555	
331	Kab. Banggai	1.300.000		157.500	1.457.500	7.826.131
332	Kab. Banggai Kepulauan	1.738.685	9.366.202	325.000	11.429.887	
333	Kab. Buol		42.127.466		42.127.466	
334	Kab. Toli Toli		4.418.882		4.418.882	9.732.564
335	Kab. Donggala		42.820.975		42.820.975	
336	Kab. Morowali	1.150.000		325.000	1.475.000	
337	Kab. Poso					

*) Perubahan Pertama

**) Perubahan Kedua

***) Perubahan Ketiga

(PMK Nomor 94 Tahun 2021)

(PMK Nomor 162 Tahun 2021)

(PMK Nomor 118 Tahun 2022)

Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021

Tanggal Berlaku: 23 November 2021

Tanggal Berlaku: 25 Juli 2022

SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Dampaknya

2. DAK FISIK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Jalan		Air Minum		
		Tematik Pembangunan Infrastruktur Ekonomi Berkelanjutan	Subtotal Jalan	Tematik Penurunan Angka Kematian Ibu dan Stunting	Tematik Penanggulangan Kemiskinan	Subtotal Air Minum
(1)	(2)	(27)	(28)=(26)+(27)	(29)	(30)	(31)=(29)+(30)
318	Kota Bitung				5.736.181	5.736.181
319	Kota Manado				1.375.000	1.375.000
320	Kab. Kepulauan Talaud	7.580.000	7.580.000		3.398.806	3.398.806
321	Kab. Minahasa Selatan				4.472.565	4.472.565
322	Kota Tomohon				4.160.566	4.160.566
323	Kab. Minahasa Utara	8.033.269	8.033.269	2.834.125	3.843.362	6.677.487
324	Kab. Kep. Siau Tagulandang Biaro	6.636.087	6.636.087		1.510.601	1.510.601
325	Kota Kotamobagu				5.438.074	5.438.074
326	Kab. Bolaang Mongondow Utara	5.801.891	5.801.891	3.908.792	2.899.315	6.808.107
327	Kab. Minahasa Tenggara					
328	Kab. Bolaang Mongondow Timur				2.100.000	2.100.000
329	Kab. Bolaang Mongondow Selatan			5.931.814	3.678.977	9.610.791
330	Provinsi Sulawesi Tengah	50.856.080	50.856.080			
331	Kab. Banggai		7.826.131	8.529.014		8.529.014
332	Kab. Banggai Kepulauan				4.256.865	4.256.865
333	Kab. Buol	8.465.070	8.465.070		4.580.474	4.580.474
334	Kab. Toli Toli		9.732.564		4.350.986	4.350.986
335	Kab. Donggala	17.446.617	17.446.617		4.854.002	4.854.002
336	Kab. Morowali	13.474.735	13.474.735			
337	Kab. Poso				5.049.224	5.049.224

*) Perubahan Pertama

(PMK Nomor 94 Tahun 2021)

Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021

**) Perubahan Kedua

(PMK Nomor 162 Tahun 2021)

Tanggal Berlaku: 23 November 2021

***) Perubahan Ketiga

(PMK Nomor 118 Tahun 2022)

Tanggal Berlaku: 25 Juli 2022

SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Dampaknya

2. DAK FISIK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Sanitasi			Perumahan dan Permukiman	Irigasi
		Tematik Penurunan Angka Kematian Ibu dan Stunting	Tematik Penanggulangan Kemiskinan	Subtotal Sanitasi		
(1)	(2)	(32)	(33)	(34)=(32)+(33)	(35)	(36)
318	Kota Bitung		4.209.474	4.209.474	22.071.182	562.800
319	Kota Manado		1.974.349	1.974.349	1.078.431	
320	Kab. Kepulauan Talaud				1.237.865	
321	Kab. Minahasa Selatan		968.792	968.792		2.222.106
322	Kota Tomohon		1.461.424	1.461.424	1.170.865	
323	Kab. Minahasa Utara		1.644.596	1.644.596	1.398.416	1.739.377
324	Kab. Kep. Siau Tagulandang Biaro		1.426.319	1.426.319	1.015.465	
325	Kota Kotamobagu		1.874.344	1.874.344	1.506.480	675.000
326	Kab. Bolaang Mongondow Utara	1.772.870		1.772.870	863.150	3.488.000
327	Kab. Minahasa Tenggara					1.400.504
328	Kab. Bolaang Mongondow Timur		1.769.222	1.769.222		1.022.400
329	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	7.591.521	1.049.845	8.641.366		1.707.332
330	Provinsi Sulawesi Tengah					16.234.000
331	Kab. Banggai	9.164.376		9.164.376		2.245.732
332	Kab. Banggai Kepulauan		1.963.307	1.963.307	1.446.174	2.349.290
333	Kab. Buol		2.107.651	2.107.651	2.516.614	10.786.970
334	Kab. Toli Toli		2.386.760	2.386.760	1.603.820	8.465.000
335	Kab. Donggala		2.817.780	2.817.780	2.569.651	8.242.720
336	Kab. Morowali	7.005.401	1.765.480	8.770.881		11.861.391
337	Kab. Poso		1.874.534	1.874.534	862.833	8.899.889

*) Perubahan Pertama

**) Perubahan Kedua

***) Perubahan Ketiga

(PMK Nomor 94 Tahun 2021)

(PMK Nomor 162 Tahun 2021)

(PMK Nomor 118 Tahun 2022)

Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021

Tanggal Berlaku: 23 November 2021

Tanggal Berlaku: 25 Juli 2022

SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Dampaknya

2. DAK FISIK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Pertanian	Kelautan dan Perikanan	Industri Kecil dan Menengah	Pariwisata	Lingkungan Hidup
						Lingkungan Hidup Tematik Penurunan Angka Kematian Ibu dan Stunting
(1)	(2)	(37)	(38)	(39)	(40)	(41)
318	Kota Bitung		1.200.000	8.879.486	2.672.197	
319	Kota Manado		786.000	5.500.535	3.504.211	
320	Kab. Kepulauan Talaud		2.842.500	1.150.112		
321	Kab. Minahasa Selatan	3.805.000	1.872.000			
322	Kota Tomohon		1.195.000			
323	Kab. Minahasa Utara		2.052.500			
324	Kab. Kep. Siau Tagulandang Biaro	3.770.000	1.632.000			
325	Kota Kotamobagu	485.000	427.000			
326	Kab. Bolaang Mongondow Utara	2.157.750	1.315.000			
327	Kab. Minahasa Tenggara		1.932.000	2.575.250		
328	Kab. Bolaang Mongondow Timur	3.123.018	1.735.200	1.100.107		
329	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	1.020.000	1.668.206			
330	Provinsi Sulawesi Tengah	20.166.762	12.368.122			
331	Kab. Banggai	2.620.000	1.343.750			
332	Kab. Banggai Kepulauan	4.410.000	2.292.000	13.577.922		
333	Kab. Buol	2.541.000	1.400.000	8.802.857		
334	Kab. Toli Toli	2.800.000	1.156.719			
335	Kab. Donggala	4.765.000	2.300.000	3.650.355		
336	Kab. Morowali	5.362.101	1.912.900	7.945.774		
337	Kab. Poso	5.560.000	1.917.500			

*) Perubahan Pertama

(PMK Nomor 94 Tahun 2021)

Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021

**) Perubahan Kedua

(PMK Nomor 162 Tahun 2021)

Tanggal Berlaku: 23 November 2021

***) Perubahan Ketiga

(PMK Nomor 118 Tahun 2022)

Tanggal Berlaku: 25 Juli 2022

SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Dampaknya

2. DAK FISIK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Lingkungan Hidup			TOTAL DAK PENUGASAN	TOTAL DAK FISIK
		Lingkungan Hidup Tematik Pembangunan Infrastruktur Ekonomi Berkelanjutan	Kehutanan Tematik Ketahanan Pangan	Subtotal Lingkungan Hidup		
(1)	(2)	(42)	(43)	(44)=(41)+(42)+(43)	(45)=(25)+(28)+(31)+(34)+(35)+(36)+(37)+(38)+(39)+(40)+(44)	(46)=(21)+(45)
318	Kota Bitung				45.331.320	111.120.285
319	Kota Manado				14.218.526	56.058.522
320	Kab. Kepulauan Talaud				52.458.708	198.403.345
321	Kab. Minahasa Selatan				13.340.463	84.120.376
322	Kota Tomohon				7.987.855	44.189.966
323	Kab. Minahasa Utara				22.546.795	64.889.229
324	Kab. Kep. Siau Tagulandang Biaro				15.990.472	54.734.599
325	Kota Kotamobagu				10.405.898	42.458.486
326	Kab. Bolaang Mongondow Utara				51.546.537	116.173.427
327	Kab. Minahasa Tenggara				5.907.754	46.998.637
328	Kab. Bolaang Mongondow Timur				10.849.947	48.062.234
329	Kab. Bolaang Mongondow Selatan				48.053.363	87.514.035
330	Provinsi Sulawesi Tengah		10.235.326	10.235.326	113.147.845	397.757.324
331	Kab. Banggai				33.186.503	106.583.307
332	Kab. Banggai Kepulauan				41.725.445	128.999.380
333	Kab. Buol				83.328.102	134.735.583
334	Kab. Toli Toli				34.914.731	125.633.091
335	Kab. Donggala				89.467.100	199.061.513
336	Kab. Morowali				50.802.782	144.699.240
337	Kab. Poso				24.163.980	115.827.825

*) Perubahan Pertama

**) Perubahan Kedua

***) Perubahan Ketiga

(PMK Nomor 94 Tahun 2021)

(PMK Nomor 162 Tahun 2021)

(PMK Nomor 118 Tahun 2022)

Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021

Tanggal Berlaku: 23 November 2021

Tanggal Berlaku: 25 Juli 2022

SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Dampaknya

1. DAK FISIK REGULER

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Pendidikan				
		PAUD	SD	SMP	SMA	SMK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
338	Kota Palu		1.670.814	1.016.830		
339	Kab. Parigi Moutong	662.302	24.466.763	21.710.873		
340	Kab. Tojo Una Una	767.210	25.753.869	6.257.618		
341	Kab. Sigi	552.333	8.342.277	4.778.030		
342	Kab. Banggai Laut		1.042.983	3.305.824		
343	Kab. Morowali Utara	211.710	8.840.658	4.642.678		
344	Provinsi Sulawesi Selatan				64.844.439	95.582.280
345	Kab. Bantaeng	938.978	24.647.423	7.725.090		
346	Kab. Barru		4.707.060	1.687.788		
347	Kab. Bone	1.905.826	18.169.512	8.165.779		
348	Kab. Bulukumba	4.325.317	9.695.337	19.268.848		
349	Kab. Enrekang		24.809.962	28.018.815		
350	Kab. Gowa	5.252.460	24.174.691	9.856.889		
351	Kab. Jeneponto	216.142	23.681.271	14.837.643		
352	Kab. Luwu	208.847	25.038.014	16.975.653		
353	Kab. Luwu Utara	2.378.782	9.415.630	23.845.474		
354	Kab. Maros	893.530	21.182.062	5.144.897		
355	Kab. Pangkajene dan Kepulauan		6.310.594	2.496.394		
356	Kota Palopo	830.241	18.891.468	12.284.856		
357	Kab. Luwu Timur		20.855.176	2.039.459		

*) Perubahan Pertama

**) Perubahan Kedua

***) Perubahan Ketiga

(PMK Nomor 94 Tahun 2021)

(PMK Nomor 162 Tahun 2021)

(PMK Nomor 118 Tahun 2022)

Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021

Tanggal Berlaku: 23 November 2021

Tanggal Berlaku: 25 Juli 2022

SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Dampaknya

1. DAK FISIK REGULER

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Pendidikan				Kesehatan dan KB
		SKB	SLB	Perpustakaan Daerah	Subtotal Pendidikan	Pelayanan Dasar
(1)	(2)	(8)	(9)	(10)	(11)=(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)+(9)+(10)	(12)
338	Kota Palu			9.500.000	12.187.644	13.657.781
339	Kab. Parigi Moutong				46.839.938	16.276.858
340	Kab. Tojo Una Una	857.000		500.000	34.135.697	15.075.991
341	Kab. Sigi			564.833	14.237.473	22.748.839
342	Kab. Banggai Laut				4.348.807	6.085.732
343	Kab. Morowali Utara				13.695.046	37.285.431
344	Provinsi Sulawesi Selatan		7.885.880	4.800.000	173.112.599	
345	Kab. Bantaeng			764.875	34.076.366	14.822.782
346	Kab. Barru	198.970			6.593.818	8.118.474
347	Kab. Bone	200.000		10.000.000	38.441.117	26.017.944
348	Kab. Bulukumba	1.696.900			34.986.402	12.859.328
349	Kab. Enrekang				52.828.777	7.290.757
350	Kab. Gowa			10.000.000	49.284.040	44.190.542
351	Kab. Jeneponto	870.000			39.605.056	26.131.240
352	Kab. Luwu			500.000	42.722.514	10.076.618
353	Kab. Luwu Utara			300.000	35.939.886	9.707.381
354	Kab. Maros	300.000		2.200.000	29.720.489	14.055.731
355	Kab. Pangkajene dan Kepulauan			200.000	9.006.988	5.579.375
356	Kota Palopo				32.006.565	11.110.282
357	Kab. Luwu Timur			10.000.000	32.894.635	4.481.235

*) Perubahan Pertama

(PMK Nomor 94 Tahun 2021)

Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021

**) Perubahan Kedua

(PMK Nomor 162 Tahun 2021)

Tanggal Berlaku: 23 November 2021

***) Perubahan Ketiga

(PMK Nomor 118 Tahun 2022)

Tanggal Berlaku: 25 Juli 2022

SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Dampaknya

1. DAK FISIK REGULER

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Kesehatan dan KB				Subtotal Kesehatan dan KB
		Pelayanan Rujukan	Pelayanan Kefarmasian dan Bahan Habis Pakai	Peningkatan Kesiapan Sistem Kesehatan	Keluarga Berencana	
(1)	(2)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)=(12)+(13)+(14)+(15)+(16)
338	Kota Palu	17.817.499	3.800.741	630.545	787.311	36.693.877
339	Kab. Parigi Moutong	22.145.347	8.178.701		1.429.778	48.030.684
340	Kab. Tojo Una Una	14.532.504	4.771.160		1.488.826	35.868.481
341	Kab. Sigi	4.445.463	5.241.615		1.373.758	33.809.675
342	Kab. Banggai Laut	240.000	2.122.636		1.428.264	9.876.632
343	Kab. Morowali Utara	2.892.596	4.349.957		1.499.929	46.027.913
344	Provinsi Sulawesi Selatan	106.314.598				106.314.598
345	Kab. Bantaeng	34.298.259	4.952.962		1.110.311	55.184.314
346	Kab. Barru	10.303.461	3.177.059		585.436	22.184.430
347	Kab. Bone	44.806.075	5.608.631	1.210.000	1.463.491	79.106.141
348	Kab. Bulukumba	681.000	2.823.807	35.031.441	1.334.026	52.729.602
349	Kab. Enrekang	7.609.024	2.728.951		1.334.158	18.962.890
350	Kab. Gowa	2.494.134	8.545.811	32.613.114	1.441.587	89.285.188
351	Kab. Jeneponto	1.950.000	3.135.215		1.255.156	32.471.611
352	Kab. Luwu	4.793.894	5.946.001		1.549.349	22.365.862
353	Kab. Luwu Utara	45.631.971	3.183.447	390.000	1.348.295	60.261.094
354	Kab. Maros	3.332.074	1.950.453	509.000	1.359.107	21.206.365
355	Kab. Pangkajene dan Kepulauan	10.904.080	2.834.599		1.441.386	20.759.440
356	Kota Palopo	42.173.382	2.936.412	4.915.848	1.433.613	62.569.537
357	Kab. Luwu Timur	45.786.854	1.733.932		1.446.428	53.448.449

*) Perubahan Pertama

(PMK Nomor 94 Tahun 2021)

Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021

**) Perubahan Kedua

(PMK Nomor 162 Tahun 2021)

Tanggal Berlaku: 23 November 2021

***) Perubahan Ketiga

(PMK Nomor 118 Tahun 2022)

Tanggal Berlaku: 25 Juli 2022

SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Dampaknya

1. DAK FISIK REGULER

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Jalan	Transportasi Perdesaan	Transportasi Laut	TOTAL DAK REGULER
(1)	(2)	(18)	(19)	(20)	(21)=(11)+(17)+(18)+(19)+(20)
338	Kota Palu	10.205.780			59.087.301
339	Kab. Parigi Moutong	12.924.200	11.380.959		119.175.781
340	Kab. Tojo Una Una	9.000.000	7.800.000	2.817.800	89.621.978
341	Kab. Sigi	16.500.000	12.700.000		77.247.148
342	Kab. Banggai Laut		3.355.924		17.581.363
343	Kab. Morowali Utara	14.090.852	7.500.000		81.313.811
344	Provinsi Sulawesi Selatan	17.515.166		45.135.674	342.078.037
345	Kab. Bantaeng	8.410.541			97.671.221
346	Kab. Barru	7.792.967		2.890.101	39.461.316
347	Kab. Bone	14.663.586			132.210.844
348	Kab. Bulukumba	11.975.494			99.691.498
349	Kab. Enrekang	14.299.933			86.091.600
350	Kab. Gowa	13.875.445			152.444.673
351	Kab. Jeneponto	9.557.712	5.447.297		87.081.676
352	Kab. Luwu	31.719.204			96.807.580
353	Kab. Luwu Utara	6.632.899	5.442.000		108.275.879
354	Kab. Maros	9.088.328			60.015.182
355	Kab. Pangkajene dan Kepulauan	8.666.175			38.432.603
356	Kota Palopo	8.945.837			103.521.939
357	Kab. Luwu Timur	12.045.337	4.900.000		103.288.421

*) Perubahan Pertama

(PMK Nomor 94 Tahun 2021)

Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021

**) Perubahan Kedua

(PMK Nomor 162 Tahun 2021)

Tanggal Berlaku: 23 November 2021

***) Perubahan Ketiga

(PMK Nomor 118 Tahun 2022)

Tanggal Berlaku: 25 Juli 2022

SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Dampaknya

2. DAK FISIK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Kesehatan dan KB			Jalan	
		Penguatan Intervensi Stunting	Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi	Keluarga Berencana	Subtotal Kesehatan dan KB	Tematik Ketahanan Pangan
(1)	(2)	(22)	(23)	(24)	(25)=(22)+(23)+(24)	(26)
338	Kota Palu					
339	Kab. Parigi Moutong	650.000		325.000	975.000	9.634.000
340	Kab. Tojo Una Una					
341	Kab. Sigi		24.502.235	325.000	24.827.235	12.096.299
342	Kab. Banggai Laut		13.694.819		13.694.819	
343	Kab. Morowali Utara					
344	Provinsi Sulawesi Selatan	11.284.168			11.284.168	41.822.585
345	Kab. Bantaeng					
346	Kab. Barru					
347	Kab. Bone			53.000	53.000	10.101.169
348	Kab. Bulukumba	2.129.870	12.209.308	53.000	14.392.178	
349	Kab. Enrekang		18.177.695	44.000	18.221.695	
350	Kab. Gowa	5.319.052	23.037.642	49.750	28.406.444	
351	Kab. Jeneponto	650.000	28.727.485	31.000	29.408.485	
352	Kab. Luwu	1.149.999		52.250	1.202.249	13.811.979
353	Kab. Luwu Utara	1.540.000		52.000	1.592.000	
354	Kab. Maros	650.000		44.000	694.000	
355	Kab. Pangkajene dan Kepulauan		1.037.975	53.000	1.090.975	
356	Kota Palopo					
357	Kab. Luwu Timur					

*) Perubahan Pertama

**) Perubahan Kedua

***) Perubahan Ketiga

(PMK Nomor 94 Tahun 2021)

(PMK Nomor 162 Tahun 2021)

(PMK Nomor 118 Tahun 2022)

Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021

Tanggal Berlaku: 23 November 2021

Tanggal Berlaku: 25 Juli 2022

SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Dampaknya

2. DAK FISIK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Jalan		Air Minum		
		Tematik Pembangunan Infrastruktur Ekonomi Berkelanjutan	Subtotal Jalan	Tematik Penurunan Angka Kematian Ibu dan Stunting	Tematik Penanggulangan Kemiskinan	Subtotal Air Minum
(1)	(2)	(27)	(28)=(26)+(27)	(29)	(30)	(31)=(29)+(30)
338	Kota Palu	9.183.249	9.183.249		4.417.600	4.417.600
339	Kab. Parigi Moutong		9.634.000	1.250.000	5.937.913	7.187.913
340	Kab. Tojo Una Una	11.719.639	11.719.639		6.011.932	6.011.932
341	Kab. Sigi		12.096.299	7.601.252	14.556.494	22.157.746
342	Kab. Banggai Laut				3.492.420	3.492.420
343	Kab. Morowali Utara	9.499.680	9.499.680		4.492.527	4.492.527
344	Provinsi Sulawesi Selatan		41.822.585			
345	Kab. Bantaeng	7.793.447	7.793.447		4.394.048	4.394.048
346	Kab. Barru					
347	Kab. Bone		10.101.169	10.212.162	2.249.260	12.461.422
348	Kab. Bulukumba				5.486.752	5.486.752
349	Kab. Enrekang			736.900	5.633.500	6.370.400
350	Kab. Gowa			4.399.488	3.496.771	7.896.259
351	Kab. Jeneponto			2.874.668	3.665.735	6.540.403
352	Kab. Luwu		13.811.979	4.567.532	4.686.705	9.254.237
353	Kab. Luwu Utara	8.168.634	8.168.634		4.890.916	4.890.916
354	Kab. Maros				4.910.248	4.910.248
355	Kab. Pangkajene dan Kepulauan			1.682.760	5.031.927	6.714.687
356	Kota Palopo				5.418.735	5.418.735
357	Kab. Luwu Timur	11.324.843	11.324.843		3.981.333	3.981.333

*) Perubahan Pertama

**) Perubahan Kedua

***) Perubahan Ketiga

(PMK Nomor 94 Tahun 2021)

(PMK Nomor 162 Tahun 2021)

(PMK Nomor 118 Tahun 2022)

Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021

Tanggal Berlaku: 23 November 2021

Tanggal Berlaku: 25 Juli 2022

SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Dampaknya

2. DAK FISIK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Sanitasi			Perumahan dan Permukiman	Irigasi
		Tematik Penurunan Angka Kematian Ibu dan Stunting	Tematik Penanggulangan Kemiskinan	Subtotal Sanitasi		
(1)	(2)	(32)	(33)	(34)=(32)+(33)	(35)	(36)
338	Kota Palu		1.652.690	1.652.690	974.869	
339	Kab. Parigi Moutong	2.155.407	3.947.542	6.102.949	983.618	5.105.500
340	Kab. Tojo Una Una		2.098.705	2.098.705	1.503.005	
341	Kab. Sigi	5.238.738	2.419.475	7.658.213	2.254.656	6.337.214
342	Kab. Banggai Laut		1.882.196	1.882.196	1.068.012	
343	Kab. Morowali Utara		2.061.192	2.061.192	1.291.629	9.700.000
344	Provinsi Sulawesi Selatan					31.947.518
345	Kab. Bantaeng		1.858.922	1.858.922	1.431.500	7.049.692
346	Kab. Barru		1.555.115	1.555.115		6.411.223
347	Kab. Bone	6.909.014	2.806.177	9.715.191	1.809.329	6.600.000
348	Kab. Bulukumba		1.659.047	1.659.047	1.826.420	13.030.300
349	Kab. Enrekang	4.629.919	1.795.965	6.425.884		3.866.948
350	Kab. Gowa	3.675.296	2.082.847	5.758.143	1.036.481	14.878.751
351	Kab. Jeneponto	5.417.985	2.227.926	7.645.911	1.120.881	8.338.801
352	Kab. Luwu	11.983.694	2.339.115	14.322.809		14.248.132
353	Kab. Luwu Utara		1.959.844	1.959.844		5.158.017
354	Kab. Maros		2.041.289	2.041.289	1.618.767	6.321.410
355	Kab. Pangkajene dan Kepulauan	6.727.180	1.399.794	8.126.974		1.653.778
356	Kota Palopo		683.137	683.137	1.396.706	
357	Kab. Luwu Timur		2.241.884	2.241.884		10.104.903

*) Perubahan Pertama

**) Perubahan Kedua

***) Perubahan Ketiga

(PMK Nomor 94 Tahun 2021)

(PMK Nomor 162 Tahun 2021)

(PMK Nomor 118 Tahun 2022)

Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021

Tanggal Berlaku: 23 November 2021

Tanggal Berlaku: 25 Juli 2022

SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Dampaknya

2. DAK FISIK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Pertanian	Kelautan dan Perikanan	Industri Kecil dan Menengah	Pariwisata	Lingkungan Hidup
						Lingkungan Hidup Tematik Penurunan Angka Kematian Ibu dan Stunting
(1)	(2)	(37)	(38)	(39)	(40)	(41)
338	Kota Palu		1.075.250			
339	Kab. Parigi Moutong	4.340.000	2.981.750	3.000.292		
340	Kab. Tojo Una Una	3.565.000	1.494.600	3.080.300		
341	Kab. Sigi	2.855.000	1.320.000			1.150.000
342	Kab. Banggai Laut	2.450.000	1.295.000			
343	Kab. Morowali Utara		1.529.600			
344	Provinsi Sulawesi Selatan	4.793.400	13.956.000		3.889.468	
345	Kab. Bantaeng	6.666.480	1.309.200		4.106.202	
346	Kab. Barru	3.911.250	1.120.500		1.919.999	3.611.000
347	Kab. Bone	7.275.000	2.185.000			
348	Kab. Bulukumba	3.507.000	1.953.000		2.765.999	3.942.050
349	Kab. Enrekang	6.683.199	988.480	700.068	7.087.669	
350	Kab. Gowa	7.005.000	1.198.600			1.300.000
351	Kab. Jeneponto	6.965.613	2.600.000		2.502.411	
352	Kab. Luwu	6.210.844	1.668.575			
353	Kab. Luwu Utara	3.720.000	1.567.135			
354	Kab. Maros	2.540.000	1.251.563	2.371.750	3.265.492	4.301.000
355	Kab. Pangkajene dan Kepulauan	2.595.000	2.221.421		1.999.999	
356	Kota Palopo		315.000			3.917.650
357	Kab. Luwu Timur	2.035.000	1.547.250			

*) Perubahan Pertama

**) Perubahan Kedua

***) Perubahan Ketiga

(PMK Nomor 94 Tahun 2021)

(PMK Nomor 162 Tahun 2021)

(PMK Nomor 118 Tahun 2022)

Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021

Tanggal Berlaku: 23 November 2021

Tanggal Berlaku: 25 Juli 2022

SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Dampaknya

2. DAK FISIK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Lingkungan Hidup			TOTAL DAK PENUGASAN	TOTAL DAK FISIK
		Lingkungan Hidup Tematik Pembangunan Infrastruktur Ekonomi Berkelanjutan	Kehutanan Tematik Ketahanan Pangan	Subtotal Lingkungan Hidup		
(1)	(2)	(42)	(43)	(44)=(41)+(42)+(43)	(45)=(25)+(28)+(31)+(34)+(35)+(36)+(37)+(38)+(39)+(40)+(44)	(46)=(21)+(45)
338	Kota Palu				17.303.658	76.390.959
339	Kab. Parigi Moutong				40.311.022	159.486.803
340	Kab. Tojo Una Una				29.473.181	119.095.159
341	Kab. Sigi			1.150.000	80.656.363	157.903.511
342	Kab. Banggai Laut				23.882.447	41.463.810
343	Kab. Morowali Utara				28.574.628	109.888.439
344	Provinsi Sulawesi Selatan		21.020.215	21.020.215	128.713.354	470.791.391
345	Kab. Bantaeng				34.609.491	132.280.712
346	Kab. Barru			3.611.000	18.529.087	57.990.403
347	Kab. Bone				50.200.111	182.410.955
348	Kab. Bulukumba			3.942.050	48.562.746	148.254.244
349	Kab. Enrekang				50.344.343	136.435.943
350	Kab. Gowa			1.300.000	67.479.678	219.924.351
351	Kab. Jeneponto				65.122.505	152.204.181
352	Kab. Luwu				60.718.825	157.526.405
353	Kab. Luwu Utara				27.056.546	135.332.425
354	Kab. Maros			4.301.000	29.315.519	89.330.701
355	Kab. Pangkajene dan Kepulauan				24.402.834	62.835.437
356	Kota Palopo			3.917.650	11.731.228	115.253.167
357	Kab. Luwu Timur				31.235.213	134.523.634

*) Perubahan Pertama

**) Perubahan Kedua

***) Perubahan Ketiga

(PMK Nomor 94 Tahun 2021)

(PMK Nomor 162 Tahun 2021)

(PMK Nomor 118 Tahun 2022)

Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021

Tanggal Berlaku: 23 November 2021

Tanggal Berlaku: 25 Juli 2022

SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Dampaknya

I. DAK FISIK REGULER

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Pendidikan				
		PAUD	SD	SMP	SMA	SMK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
358	Kab. Pinrang	374.266	5.970.663	2.430.004		
359	Kab. Sinjai	3.705.235	23.133.556	14.030.468		
360	Kab. Kepulauan Selayar	550.089	15.212.491	3.736.905		
361	Kab. Sidenreng Rappang	2.375.397	23.586.827	17.342.977		
362	Kab. Soppeng	2.587.700	28.466.214	24.150.196		
363	Kab. Takalar		17.274.268	11.498.651		
364	Kab. Tana Toraja		14.466.348	1.526.688		
365	Kab. Wajo	1.940.944	23.270.445	23.448.129		
366	Kota Pare Pare		1.855.000	5.481.929		
367	Kota Makassar		5.932.051	1.649.189		
368	Kab. Toraja Utara		14.519.647	12.914.032		
369	Provinsi Sulawesi Tenggara				75.274.398	97.832.226
370	Kab. Buton	5.490.040	15.987.745	18.032.107		
371	Kab. Konawe	586.456	23.994.949	11.583.839		
372	Kab. Kolaka	1.577.940	23.529.935	7.552.349		
373	Kab. Muna	2.550.813	24.068.727	30.567.020		
374	Kota Kendari	1.720.832	26.140.321	17.712.686		
375	Kota Bau Bau		4.138.944	14.011.088		
376	Kab. Konawe Selatan	4.815.064	25.065.553	13.469.869		
377	Kab. Bombana		23.207.918	9.924.170		

*) Perubahan Pertama

(PMK Nomor 94 Tahun 2021)

Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021

**) Perubahan Kedua

(PMK Nomor 162 Tahun 2021)

Tanggal Berlaku: 23 November 2021

***) Perubahan Ketiga

(PMK Nomor 118 Tahun 2022)

Tanggal Berlaku: 25 Juli 2022

SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Dampaknya

1. DAK FISIK REGULER

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Pendidikan				Kesehatan dan KB
		SKB	SLB	Perpustakaan Daerah	Subtotal Pendidikan	Pelayanan Dasar
(1)	(2)	(8)	(9)	(10)	(11)=(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)+(9)+(10)	(12)
358	Kab. Pinrang			572.655	9.347.588	7.147.180
359	Kab. Sinjai				40.869.259	17.932.474
360	Kab. Kepulauan Selayar			304.781	19.804.266	25.914.446
361	Kab. Sidenreng Rappang				43.305.201	26.968.139
362	Kab. Soppeng			2.485.604	57.689.714	19.613.910
363	Kab. Takalar	200.000			28.972.919	4.249.700
364	Kab. Tana Toraja			10.000.000	25.993.036	17.002.975
365	Kab. Wajo	474.000			49.133.518	3.101.341
366	Kota Pare Pare			200.000	7.536.929	2.377.208
367	Kota Makassar			10.000.000	17.581.240	8.461.158
368	Kab. Toraja Utara				27.433.679	6.880.328
369	Provinsi Sulawesi Tenggara		1.896.550	500.000	175.503.174	
370	Kab. Buton			8.481.000	47.990.892	8.424.575
371	Kab. Konawe				36.165.244	15.414.212
372	Kab. Kolaka			256.727	32.916.951	13.111.954
373	Kab. Muna			700.000	57.886.560	12.224.787
374	Kota Kendari				45.573.839	8.446.284
375	Kota Bau Bau			496.648	18.646.680	9.542.532
376	Kab. Konawe Selatan				43.350.486	7.065.911
377	Kab. Bombana				33.132.088	15.263.600

*) Perubahan Pertama

**) Perubahan Kedua

***) Perubahan Ketiga

(PMK Nomor 94 Tahun 2021)

(PMK Nomor 162 Tahun 2021)

(PMK Nomor 118 Tahun 2022)

Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021

Tanggal Berlaku: 23 November 2021

Tanggal Berlaku: 25 Juli 2022

SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Dampaknya

1. DAK FISIK REGULER

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Kesehatan dan KB				Subtotal Kesehatan dan KB
		Pelayanan Rujukan	Pelayanan Kefarmasian dan Bahan Habis Pakai	Peningkatan Kesiapan Sistem Kesehatan	Keluarga Berencana	
(1)	(2)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)=(12)+(13)+(14)+(15)+(16)
358	Kab. Pinrang	25.951.344	4.814.405		1.322.009	39.234.938
359	Kab. Sinjai	5.149.415	3.503.355	45.947.402	1.519.647	74.052.293
360	Kab. Kepulauan Selayar	24.699.146	2.302.022	4.673.857	777.214	58.366.685
361	Kab. Sidenreng Rappang	43.569.328	3.633.571		1.339.773	75.510.811
362	Kab. Soppeng	45.631.278	2.851.634	3.514.188	1.152.755	72.763.765
363	Kab. Takalar	3.782.500	3.233.472	2.400.000	849.388	14.515.060
364	Kab. Tana Toraja	30.778.219	2.553.554	854.000	1.444.915	52.633.663
365	Kab. Wajo	44.992.105	5.581.373		1.110.311	54.785.130
366	Kota Pare Pare	19.201.394	2.986.830	740.000	1.111.320	26.416.752
367	Kota Makassar	12.327.589	10.031.519		868.566	31.688.832
368	Kab. Toraja Utara	2.942.457	2.944.002		545.048	13.311.835
369	Provinsi Sulawesi Tenggara	24.571.910		2.495.074		27.066.984
370	Kab. Buton	5.720.000	3.340.618	390.000	1.514.061	19.389.254
371	Kab. Konawe	3.592.989	4.570.754	1.248.317	1.453.498	26.279.770
372	Kab. Kolaka	3.000.000	5.173.224	1.606.486	1.488.826	24.380.490
373	Kab. Muna	12.458.000	3.585.898		1.459.050	29.727.735
374	Kota Kendari	10.881.201	8.216.534	1.706.221	1.403.029	30.653.269
375	Kota Bau Bau	13.650.000	2.644.603	390.000	1.322.279	27.549.414
376	Kab. Konawe Selatan	4.900.000	5.763.656		1.507.701	19.237.268
377	Kab. Bombana		2.480.542	1.706.891	1.297.045	20.748.078

*) Perubahan Pertama

(PMK Nomor 94 Tahun 2021)

Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021

**) Perubahan Kedua

(PMK Nomor 162 Tahun 2021)

Tanggal Berlaku: 23 November 2021

***) Perubahan Ketiga

(PMK Nomor 118 Tahun 2022)

Tanggal Berlaku: 25 Juli 2022

SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Dampaknya

1. DAK FISIK REGULER

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Jalan	Transportasi Perdesaan	Transportasi Laut	TOTAL DAK REGULER
(1)	(2)	(18)	(19)	(20)	(21)=(11)+(17)+(18)+(19)+(20)
358	Kab. Pinrang	12.745.498			61.328.024
359	Kab. Sinjai	16.295.307			131.216.859
360	Kab. Kepulauan Selayar	11.875.893			90.046.844
361	Kab. Sidenreng Rappang	13.915.451			132.731.463
362	Kab. Soppeng	11.251.562			141.705.041
363	Kab. Takalar	8.399.536			51.887.515
364	Kab. Tana Toraja	14.084.345			92.711.044
365	Kab. Wajo	13.576.606	4.600.000		122.095.254
366	Kota Pare Pare	8.688.401			42.642.082
367	Kota Makassar				49.270.072
368	Kab. Toraja Utara	5.300.498			46.046.012
369	Provinsi Sulawesi Tenggara	14.107.208		61.243.000	277.920.366
370	Kab. Buton	9.667.450		21.517.000	98.564.596
371	Kab. Konawe	8.166.909	6.500.000		77.111.923
372	Kab. Kolaka	13.369.218			70.666.659
373	Kab. Muna	12.060.965	5.300.000	6.700.000	111.675.260
374	Kota Kendari	9.671.903			85.899.011
375	Kota Bau Bau	6.284.969			52.481.063
376	Kab. Konawe Selatan	10.334.636	5.200.000		78.122.390
377	Kab. Bombana	7.680.501	7.976.429		69.537.096

*) Perubahan Pertama

**) Perubahan Kedua

***) Perubahan Ketiga

(PMK Nomor 94 Tahun 2021)

(PMK Nomor 162 Tahun 2021)

(PMK Nomor 118 Tahun 2022)

Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021

Tanggal Berlaku: 23 November 2021

Tanggal Berlaku: 25 Juli 2022

SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Dampaknya

2. DAK FISIK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Kesehatan dan KB				Jalan
		Penguatan Intervensi Stunting	Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi	Keluarga Berencana	Subtotal Kesehatan dan KB	Tematik Ketahanan Pangan
(1)	(2)	(22)	(23)	(24)	(25)=(22)+(23)+(24)	(26)
358	Kab. Pinrang	650.000		50.400	700.400	8.469.439
359	Kab. Sinjai	350.000	33.732.153	56.500	34.138.653	
360	Kab. Kepulauan Selayar			53.000	53.000	
361	Kab. Sidenreng Rappang					8.029.081
362	Kab. Soppeng					
363	Kab. Takalar	650.000		52.000	702.000	
364	Kab. Tana Toraja	2.050.000		43.499	2.093.499	
365	Kab. Wajo	2.760.000		93.500	2.853.500	9.941.832
366	Kota Pare Pare					
367	Kota Makassar	198.000		44.000	242.000	
368	Kab. Toraja Utara	334.875	13.689.316	44.000	14.068.191	
369	Provinsi Sulawesi Tenggara	2.092.438			2.092.438	
370	Kab. Buton		12.028.730	520.874	12.549.604	
371	Kab. Konawe					
372	Kab. Kolaka		49.626.440	426.150	50.052.590	
373	Kab. Muna	2.800.000		520.875	3.320.875	
374	Kota Kendari					
375	Kota Bau Bau					
376	Kab. Konawe Selatan		67.840.244		67.840.244	
377	Kab. Bombana		17.472.015		17.472.015	

*) Perubahan Pertama

**) Perubahan Kedua

***) Perubahan Ketiga

(PMK Nomor 94 Tahun 2021)

(PMK Nomor 162 Tahun 2021)

(PMK Nomor 118 Tahun 2022)

Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021

Tanggal Berlaku: 23 November 2021

Tanggal Berlaku: 25 Juli 2022

SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Dampaknya

2. DAK FISIK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Jalan		Air Minum		
		Tematik Pembangunan Infrastruktur Ekonomi Berkelanjutan	Subtotal Jalan	Tematik Penurunan Angka Kematian Ibu dan Stunting	Tematik Penanggulangan Kemiskinan	Subtotal Air Minum
(1)	(2)	(27)	(28)=(26)+(27)	(29)	(30)	(31)=(29)+(30)
358	Kab. Pinrang		8.469.439	1.919.777	1.934.320	3.854.097
359	Kab. Sinjai			1.141.300	3.263.468	4.404.768
360	Kab. Kepulauan Selayar			7.497.000		7.497.000
361	Kab. Sidenreng Rappang		8.029.081		4.571.983	4.571.983
362	Kab. Soppeng				3.782.174	3.782.174
363	Kab. Takalar			4.439.487	2.349.175	6.788.662
364	Kab. Tana Toraja	9.365.627	9.365.627	1.380.744	5.026.831	6.407.575
365	Kab. Wajo		9.941.832	1.520.824	3.681.706	5.202.530
366	Kota Pare Pare				3.875.792	3.875.792
367	Kota Makassar				3.056.500	3.056.500
368	Kab. Toraja Utara	6.975.960	6.975.960	5.499.364	4.916.436	10.415.800
369	Provinsi Sulawesi Tenggara	35.284.745	35.284.745			
370	Kab. Buton			11.667.178	4.363.543	16.030.721
371	Kab. Konawe	10.459.058	10.459.058		2.946.994	2.946.994
372	Kab. Kolaka	11.708.116	11.708.116	1.328.495	5.514.357	6.842.852
373	Kab. Muna	8.694.283	8.694.283	6.291.076	4.624.655	10.915.731
374	Kota Kendari				5.163.639	5.163.639
375	Kota Bau Bau				3.463.532	3.463.532
376	Kab. Konawe Selatan	11.037.212	11.037.212		5.084.393	5.084.393
377	Kab. Bombana	6.953.250	6.953.250		4.804.025	4.804.025

*) Perubahan Pertama

**) Perubahan Kedua

***) Perubahan Ketiga

(PMK Nomor 94 Tahun 2021)

(PMK Nomor 162 Tahun 2021)

(PMK Nomor 118 Tahun 2022)

Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021

Tanggal Berlaku: 23 November 2021

Tanggal Berlaku: 25 Juli 2022

SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Dampaknya

2. DAK FISIK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Sanitasi			Perumahan dan Permukiman	Irigasi
		Tematik Penurunan Angka Kematian Ibu dan Stunting	Tematik Penanggulangan Kemiskinan	Subtotal Sanitasi		
(1)	(2)	(32)	(33)	(34)=(32)+(33)	(35)	(36)
358	Kab. Pinrang	3.000.242	799.882	3.800.124	1.833.033	3.161.600
359	Kab. Sinjai	7.487.877	1.753.576	9.241.453	1.242.100	17.588.693
360	Kab. Kepulauan Selayar	8.408.457		8.408.457	1.621.036	
361	Kab. Sidenreng Rappang		1.672.178	1.672.178	1.149.810	8.774.916
362	Kab. Soppeng		1.770.253	1.770.253		17.167.304
363	Kab. Takalar	4.409.447	1.651.695	6.061.142		2.218.481
364	Kab. Tana Toraja	769.548	1.871.570	2.641.118		2.300.000
365	Kab. Wajo	1.131.909	2.049.035	3.180.944	2.009.616	9.500.000
366	Kota Pare Pare		1.620.931	1.620.931	2.728.514	2.725.940
367	Kota Makassar		2.174.680	2.174.680	1.349.281	
368	Kab. Toraja Utara	4.773.112	1.902.286	6.675.398	2.855.734	3.048.991
369	Provinsi Sulawesi Tenggara					14.348.808
370	Kab. Buton	6.156.394	1.366.274	7.522.668		4.780.440
371	Kab. Konawe		1.197.371	1.197.371	1.038.317	11.730.729
372	Kab. Kolaka	4.230.322	1.611.162	5.841.484	2.710.889	12.416.871
373	Kab. Muna	29.175.080	1.719.005	30.894.085	1.653.069	8.500.000
374	Kota Kendari		1.549.908	1.549.908	2.000.901	4.100.909
375	Kota Bau Bau		1.976.540	1.976.540	1.860.511	
376	Kab. Konawe Selatan		1.340.464	1.340.464	734.884	7.460.000
377	Kab. Bombana		1.345.915	1.345.915	2.938.027	5.286.298

*) Perubahan Pertama

**) Perubahan Kedua

***) Perubahan Ketiga

(PMK Nomor 94 Tahun 2021)

(PMK Nomor 162 Tahun 2021)

(PMK Nomor 118 Tahun 2022)

Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021

Tanggal Berlaku: 23 November 2021

Tanggal Berlaku: 25 Juli 2022

SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Dampaknya

2. DAK FISIK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Pertanian	Kelautan dan Perikanan	Industri Kecil dan Menengah	Pariwisata	Lingkungan Hidup
						Lingkungan Hidup Tematik Penurunan Angka Kematian Ibu dan Stunting
(1)	(2)	(37)	(38)	(39)	(40)	(41)
358	Kab. Pinrang	8.425.000	2.313.000			4.746.050
359	Kab. Sinjai	2.680.000	1.871.150	31.785.796		
360	Kab. Kepulauan Selayar	2.550.000	2.188.800		1.070.120	3.325.000
361	Kab. Sidenreng Rappang	4.420.000	1.030.100		1.183.999	
362	Kab. Soppeng	6.215.000	1.017.200	1.547.814		
363	Kab. Takalar	4.645.000	2.938.125			2.600.000
364	Kab. Tana Toraja	4.458.704	973.120		3.875.998	1.300.000
365	Kab. Wajo	9.359.393	1.510.275	8.250.803		3.933.000
366	Kota Pare Pare	1.630.000	995.000			
367	Kota Makassar		994.000			6.482.550
368	Kab. Toraja Utara	5.160.000	1.178.800		7.378.189	1.300.000
369	Provinsi Sulawesi Tenggara	6.369.472	10.746.490		5.299.457	
370	Kab. Buton		2.366.000	6.600.542	4.451.040	
371	Kab. Konawe	2.632.481	1.356.805			
372	Kab. Kolaka	2.290.000	1.650.250	1.000.097		
373	Kab. Muna		2.693.104			
374	Kota Kendari		532.900	8.700.797	4.279.400	
375	Kota Bau Bau		1.155.000	1.200.116	6.538.220	
376	Kab. Konawe Selatan	3.590.000	1.297.500			
377	Kab. Bombana	5.896.480	1.938.000			

*) Perubahan Pertama

**) Perubahan Kedua

***) Perubahan Ketiga

(PMK Nomor 94 Tahun 2021)

(PMK Nomor 162 Tahun 2021)

(PMK Nomor 118 Tahun 2022)

Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021

Tanggal Berlaku: 23 November 2021

Tanggal Berlaku: 25 Juli 2022

SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Dampaknya

2. DAK FISIK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Lingkungan Hidup			TOTAL DAK PENUGASAN	TOTAL DAK FISIK
		Lingkungan Hidup Tematik Pembangunan Infrastruktur Ekonomi Berkelanjutan	Kehutanan Tematik Ketahanan Pangan	Subtotal Lingkungan Hidup		
(1)	(2)	(42)	(43)	(44)=(41)+(42)+(43)	(45)=(25)+(28)+(31)+(34)+(35)+(36)+(37)+(38)+(39)+(40)+(44)	(46)=(21)+(45)
358	Kab. Pinrang			4.746.050	37.302.743	98.630.767
359	Kab. Sinjai				102.952.613	234.169.472
360	Kab. Kepulauan Selayar			3.325.000	26.713.413	116.760.257
361	Kab. Sidenreng Rappang				30.832.067	163.563.530
362	Kab. Soppeng				31.499.745	173.204.786
363	Kab. Takalar			2.600.000	25.953.410	77.840.925
364	Kab. Tana Toraja			1.300.000	33.415.641	126.126.685
365	Kab. Wajo			3.933.000	55.741.893	177.837.147
366	Kota Pare Pare				13.576.177	56.218.259
367	Kota Makassar			6.482.550	14.299.011	63.569.083
368	Kab. Toraja Utara			1.300.000	59.057.063	105.103.075
369	Provinsi Sulawesi Tenggara		10.795.506	10.795.506	84.936.916	362.857.282
370	Kab. Buton				54.301.015	152.865.611
371	Kab. Konawe				31.361.755	108.473.678
372	Kab. Kolaka				94.513.149	165.179.808
373	Kab. Muna				66.671.147	178.346.407
374	Kota Kendari				26.328.454	112.227.465
375	Kota Bau Bau				16.193.919	68.674.982
376	Kab. Konawe Selatan				98.384.697	176.507.087
377	Kab. Bombana				46.634.010	116.171.106

*) Perubahan Pertama

**) Perubahan Kedua

***) Perubahan Ketiga

(PMK Nomor 94 Tahun 2021)

(PMK Nomor 162 Tahun 2021)

(PMK Nomor 118 Tahun 2022)

Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021

Tanggal Berlaku: 23 November 2021

Tanggal Berlaku: 25 Juli 2022

SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Dampaknya

1. DAK FISIK REGULER

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Pendidikan				
		PAUD	SD	SMP	SMA	SMK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
378	Kab. Wakatobi	251.969	11.328.088	15.638.186		
379	Kab. Kolaka Utara	1.811.031	24.368.592	10.958.478		
380	Kab. Konawe Utara	839.760	24.599.884	6.779.738		
381	Kab. Buton Utara	2.944.700	18.138.190	8.024.164		
382	Kab. Konawe Kepulauan	539.742	15.963.115	10.769.098		
383	Kab. Kolaka Timur	1.176.640	19.769.677	4.903.948		
384	Kab. Muna Barat	234.429	23.412.901	14.444.784		
385	Kab. Buton Tengah	4.965.040	10.038.897	8.893.378		
386	Kab. Buton Selatan	3.810.238	11.954.437	8.635.439		
387	Provinsi Bali				6.921.079	22.993.306
388	Kab. Badung					
389	Kab. Bangli	3.870.010	16.642.545	8.678.656		
390	Kab. Buleleng	4.676.385	18.270.565	17.272.324		
391	Kab. Gianyar	240.000	1.940.820	1.667.250		
392	Kab. Jembrana		21.312.126	9.301.222		
393	Kab. Karangasem	2.204.953	4.790.858	8.131.907		
394	Kab. Klungkung	240.000	6.885.268	1.139.154		
395	Kab. Tabanan		20.476.657	6.038.292		
396	Kota Denpasar		2.058.394	1.766.911		
397	Provinsi Nusa Tenggara Barat				62.891.729	80.188.879

*) Perubahan Pertama

(PMK Nomor 94 Tahun 2021)

Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021

**) Perubahan Kedua

(PMK Nomor 162 Tahun 2021)

Tanggal Berlaku: 23 November 2021

***) Perubahan Ketiga

(PMK Nomor 118 Tahun 2022)

Tanggal Berlaku: 25 Juli 2022

SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Dampaknya

1. DAK FISIK REGULER

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Pendidikan				Kesehatan dan KB
		SKB	SLB	Perpustakaan Daerah	Subtotal Pendidikan	Pelayanan Dasar
(1)	(2)	(8)	(9)	(10)	(11)=(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)+(9)+(10)	(12)
378	Kab. Wakatobi	881.760		4.500.000	32.600.003	15.690.035
379	Kab. Kolaka Utara				37.138.101	14.054.400
380	Kab. Konawe Utara	2.049.200		500.000	34.768.582	9.212.300
381	Kab. Buton Utara	491.800			29.598.854	2.833.440
382	Kab. Konawe Kepulauan			200.000	27.471.955	2.905.267
383	Kab. Kolaka Timur				25.850.265	8.177.500
384	Kab. Muna Barat				38.092.114	5.367.995
385	Kab. Buton Tengah			299.994	24.197.309	7.333.000
386	Kab. Buton Selatan				24.400.114	7.351.802
387	Provinsi Bali		1.119.500	499.092	31.532.977	
388	Kab. Badung			223.300	223.300	
389	Kab. Bangli	743.000			29.934.211	411.000
390	Kab. Buleleng			499.999	40.719.273	1.984.920
391	Kab. Gianyar				3.848.070	5.223.360
392	Kab. Jembrana				30.613.348	5.026.600
393	Kab. Karangasem			793.300	15.921.018	5.993.906
394	Kab. Klungkung	218.700			8.483.122	1.534.297
395	Kab. Tabanan				26.514.949	8.416.000
396	Kota Denpasar	2.434.199			6.259.504	2.000.000
397	Provinsi Nusa Tenggara Barat		6.383.955	500.000	149.964.563	

*) Perubahan Pertama

**) Perubahan Kedua

***) Perubahan Ketiga

(PMK Nomor 94 Tahun 2021)

(PMK Nomor 162 Tahun 2021)

(PMK Nomor 118 Tahun 2022)

Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021

Tanggal Berlaku: 23 November 2021

Tanggal Berlaku: 25 Juli 2022

SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Dampaknya

1. DAK FISIK REGULER

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Kesehatan dan KB				Subtotal Kesehatan dan KB
		Pelayanan Rujukan	Pelayanan Kefarmasian dan Bahan Habis Pakai	Peningkatan Kesiapan Sistem Kesehatan	Keluarga Berencana	
(1)	(2)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)=(12)+(13)+(14)+(15)+(16)
378	Kab. Wakatobi	13.701.753	2.423.022	544.493	1.488.826	33.848.129
379	Kab. Kolaka Utara	13.423.430	3.536.877	3.614.594	1.271.811	35.901.112
380	Kab. Konawe Utara	3.000.000	1.944.502		1.259.698	15.416.500
381	Kab. Buton Utara	3.000.000	3.336.796		1.207.211	10.377.447
382	Kab. Konawe Kepulauan	14.867.250	3.119.092	414.611	1.166.331	22.472.551
383	Kab. Kolaka Timur	2.622.843	3.856.140	198.240	984.139	15.838.862
384	Kab. Muna Barat	12.452.016	4.235.334	190.373	1.668.898	23.914.616
385	Kab. Buton Tengah	6.082.017	2.510.779	376.500	1.298.458	17.600.754
386	Kab. Buton Selatan	5.910.300	2.800.459		1.403.000	17.465.561
387	Provinsi Bali	8.806.300		931.129		9.737.429
388	Kab. Badung	17.986.393	3.751.596		238.010	21.975.999
389	Kab. Bangli	2.718.123	2.898.904	4.601.218	984.058	11.613.303
390	Kab. Buleleng	4.386.026	2.339.753	7.886.271	767.670	17.364.640
391	Kab. Gianyar	20.896.427	3.302.247	552.229	407.484	30.381.747
392	Kab. Jembrana	3.000.000	1.967.754	189.272		10.183.626
393	Kab. Karangasem	3.954.183	4.289.589	900.000	675.271	15.812.949
394	Kab. Klungkung	5.361.285	3.224.970		612.185	10.732.737
395	Kab. Tabanan	3.000.000	3.608.144	200.000	650.000	15.874.144
396	Kota Denpasar	16.032.268	4.367.744	16.500	351.262	22.767.774
397	Provinsi Nusa Tenggara Barat	94.607.235		15.484.519		110.091.754

*) Perubahan Pertama

(PMK Nomor 94 Tahun 2021)

Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021

**) Perubahan Kedua

(PMK Nomor 162 Tahun 2021)

Tanggal Berlaku: 23 November 2021

***) Perubahan Ketiga

(PMK Nomor 118 Tahun 2022)

Tanggal Berlaku: 25 Juli 2022

SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Dampaknya

1. DAK FISIK REGULER

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Jalan	Transportasi Perdesaan	Transportasi Laut	TOTAL DAK REGULER
(1)	(2)	(18)	(19)	(20)	(21)=(11)+(17)+(18)+(19)+(20)
378	Kab. Wakatobi	14.190.707			80.638.839
379	Kab. Kolaka Utara	9.195.121			82.234.334
380	Kab. Konawe Utara	9.406.891			59.591.973
381	Kab. Buton Utara	11.034.914		11.000.000	62.011.215
382	Kab. Konawe Kepulauan	30.591.612	8.300.200	2.755.000	91.591.318
383	Kab. Kolaka Timur	9.566.288			51.255.415
384	Kab. Muna Barat	12.872.041		4.865.000	79.743.771
385	Kab. Buton Tengah	6.637.753		15.800.000	64.235.816
386	Kab. Buton Selatan	7.146.879			49.012.554
387	Provinsi Bali	9.730.422			51.000.828
388	Kab. Badung	12.653.875			34.853.174
389	Kab. Bangli	32.411.291			73.958.805
390	Kab. Buleleng	31.286.643			89.370.556
391	Kab. Gianyar	7.091.237			41.321.054
392	Kab. Jembrana	10.406.967			51.203.941
393	Kab. Karangasem	37.698.981			69.432.948
394	Kab. Klungkung	6.852.739		8.242.218	34.310.816
395	Kab. Tabanan	29.897.868			72.286.961
396	Kota Denpasar	9.378.557			38.405.835
397	Provinsi Nusa Tenggara Barat	11.099.232			271.155.549

*) Perubahan Pertama

(PMK Nomor 94 Tahun 2021)

Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021

**) Perubahan Kedua

(PMK Nomor 162 Tahun 2021)

Tanggal Berlaku: 23 November 2021

***) Perubahan Ketiga

(PMK Nomor 118 Tahun 2022)

Tanggal Berlaku: 25 Juli 2022

SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Dampaknya

2. DAK FISIK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Kesehatan dan KB			Jalan	
		Penguatan Intervensi Stunting	Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi	Keluarga Berencana	Subtotal Kesehatan dan KB	Tematik Ketahanan Pangan
(1)	(2)	(22)	(23)	(24)	(25)=(22)+(23)+(24)	(26)
378	Kab. Wakatobi	2.499.000		225.000	2.724.000	
379	Kab. Kolaka Utara					7.393.408
380	Kab. Konawe Utara		3.001.454		3.001.454	
381	Kab. Buton Utara		9.761.870		9.761.870	
382	Kab. Konawe Kepulauan	670.000		277.500	947.500	
383	Kab. Kolaka Timur	1.122.000		44.000	1.166.000	
384	Kab. Muna Barat					
385	Kab. Buton Tengah					
386	Kab. Buton Selatan	1.521.042	8.105.029	295.875	9.921.946	
387	Provinsi Bali	2.215.377			2.215.377	
388	Kab. Badung	1.303.250		74.999	1.378.249	
389	Kab. Bangli	650.000	11.625.846	177.525	12.453.371	
390	Kab. Buleleng	2.250.000	23.078.924	190.000	25.518.924	
391	Kab. Gianyar	649.708		125.000	774.708	
392	Kab. Jembrana					
393	Kab. Karangasem		8.958.782		8.958.782	
394	Kab. Klungkung					
395	Kab. Tabanan		45.811.715		45.811.715	
396	Kota Denpasar	1.320.000		75.999	1.395.999	
397	Provinsi Nusa Tenggara Barat	8.088.118			8.088.118	36.496.034

*) Perubahan Pertama

(PMK Nomor 94 Tahun 2021)

Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021

**) Perubahan Kedua

(PMK Nomor 162 Tahun 2021)

Tanggal Berlaku: 23 November 2021

***) Perubahan Ketiga

(PMK Nomor 118 Tahun 2022)

Tanggal Berlaku: 25 Juli 2022

SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Dampaknya

2. DAK FISIK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Jalan		Air Minum		
		Tematik Pembangunan Infrastruktur Ekonomi Berkelanjutan	Subtotal Jalan	Tematik Penurunan Angka Kematian Ibu dan Stunting	Tematik Penanggulangan Kemiskinan	Subtotal Air Minum
(1)	(2)	(27)	(28)=(26)+(27)	(29)	(30)	(31)=(29)+(30)
378	Kab. Wakatobi	8.644.764	8.644.764	350.000	3.995.596	4.345.596
379	Kab. Kolaka Utara		7.393.408			
380	Kab. Konawe Utara	6.949.276	6.949.276		4.031.937	4.031.937
381	Kab. Buton Utara				4.526.289	4.526.289
382	Kab. Konawe Kepulauan				4.035.151	4.035.151
383	Kab. Kolaka Timur					
384	Kab. Muna Barat				3.606.181	3.606.181
385	Kab. Buton Tengah					
386	Kab. Buton Selatan					
387	Provinsi Bali	32.658.729	32.658.729		30.000.000	30.000.000
388	Kab. Badung					
389	Kab. Bangli	14.325.341	14.325.341		3.741.642	3.741.642
390	Kab. Buleleng	12.188.883	12.188.883	921.140	5.996.873	6.918.013
391	Kab. Gianyar	11.844.891	11.844.891		3.640.936	3.640.936
392	Kab. Jembrana				4.070.876	4.070.876
393	Kab. Karangasem				9.866.766	9.866.766
394	Kab. Klungkung	6.729.702	6.729.702		4.525.911	4.525.911
395	Kab. Tabanan				5.817.514	5.817.514
396	Kota Denpasar				3.873.335	3.873.335
397	Provinsi Nusa Tenggara Barat		36.496.034			

*) Perubahan Pertama

(PMK Nomor 94 Tahun 2021)

Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021

**) Perubahan Kedua

(PMK Nomor 162 Tahun 2021)

Tanggal Berlaku: 23 November 2021

***) Perubahan Ketiga

(PMK Nomor 118 Tahun 2022)

Tanggal Berlaku: 25 Juli 2022

SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Dampaknya

2. DAK FISIK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Sanitasi			Perumahan dan Permukiman	Irigasi
		Tematik Penurunan Angka Kematian Ibu dan Stunting	Tematik Penanggulangan Kemiskinan	Subtotal Sanitasi		
(1)	(2)	(32)	(33)	(34)=(32)+(33)	(35)	(36)
378	Kab. Wakatobi	5.254.969		5.254.969		
379	Kab. Kolaka Utara		1.694.139	1.694.139		4.115.646
380	Kab. Konawe Utara		1.673.389	1.673.389		4.988.900
381	Kab. Buton Utara		1.977.915	1.977.915		11.500.000
382	Kab. Konawe Kepulauan		1.938.191	1.938.191	2.811.230	4.021.200
383	Kab. Kolaka Timur	1.145.547		1.145.547		10.607.646
384	Kab. Muna Barat		1.977.614	1.977.614		4.273.000
385	Kab. Buton Tengah		1.576.696	1.576.696		
386	Kab. Buton Selatan	2.181.994		2.181.994		
387	Provinsi Bali					11.171.791
388	Kab. Badung		650.000	650.000		2.071.426
389	Kab. Bangli	4.318.530	1.907.676	6.226.206		8.643.650
390	Kab. Buleleng	6.434.523	2.693.362	9.127.885	2.943.238	8.498.850
391	Kab. Gianyar		1.588.202	1.588.202	3.008.554	4.521.971
392	Kab. Jembrana					6.452.103
393	Kab. Karangasem					8.308.018
394	Kab. Klungkung		1.234.818	1.234.818	1.290.131	6.469.968
395	Kab. Tabanan		1.852.888	1.852.888		7.058.405
396	Kota Denpasar		1.693.940	1.693.940		
397	Provinsi Nusa Tenggara Barat					35.037.210

*) Perubahan Pertama

**) Perubahan Kedua

***) Perubahan Ketiga

(PMK Nomor 94 Tahun 2021)

(PMK Nomor 162 Tahun 2021)

(PMK Nomor 118 Tahun 2022)

Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021

Tanggal Berlaku: 23 November 2021

Tanggal Berlaku: 25 Juli 2022

SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Dampaknya

2. DAK FISIK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Pertanian	Kelautan dan Perikanan	Industri Kecil dan Menengah	Pariwisata	Lingkungan Hidup
						Lingkungan Hidup Tematik Penurunan Angka Kematian Ibu dan Stunting
(1)	(2)	(37)	(38)	(39)	(40)	(41)
378	Kab. Wakatobi	3.045.000	1.219.040		36.650.819	
379	Kab. Kolaka Utara	3.395.000	1.285.607			8.744.600
380	Kab. Konawe Utara	1.612.500	2.352.500			
381	Kab. Buton Utara	1.596.000	1.643.500			
382	Kab. Konawe Kepulauan		1.247.600	4.900.477		
383	Kab. Kolaka Timur	4.383.750				
384	Kab. Muna Barat	5.586.000	1.549.152			
385	Kab. Buton Tengah	3.995.250	3.234.000			
386	Kab. Buton Selatan	2.920.000	1.495.892			
387	Provinsi Bali	1.068.535	5.190.269			
388	Kab. Badung	1.685.371			1.196.325	
389	Kab. Bangli		315.000		1.369.999	
390	Kab. Buleleng	2.404.203	1.132.500		2.146.092	
391	Kab. Gianyar	1.220.000	300.000		1.601.999	5.498.000
392	Kab. Jembrana	3.318.000	1.650.000			
393	Kab. Karangasem	946.139			3.967.498	
394	Kab. Klungkung	2.090.000	767.627		9.403.308	
395	Kab. Tabanan	2.750.000	918.250		1.400.599	
396	Kota Denpasar	752.831	420.000			
397	Provinsi Nusa Tenggara Barat	14.839.452	13.868.800			2.264.500

*) Perubahan Pertama

**) Perubahan Kedua

***) Perubahan Ketiga

(PMK Nomor 94 Tahun 2021)

(PMK Nomor 162 Tahun 2021)

(PMK Nomor 118 Tahun 2022)

Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021

Tanggal Berlaku: 23 November 2021

Tanggal Berlaku: 25 Juli 2022

SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Dampaknya

2. DAK FISIK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Lingkungan Hidup			TOTAL DAK PENUGASAN	TOTAL DAK FISIK
		Lingkungan Hidup Tematik Pembangunan Infrastruktur Ekonomi Berkelanjutan	Kehutanan Tematik Ketahanan Pangan	Subtotal Lingkungan Hidup		
(1)	(2)	(42)	(43)	(44)=(41)+(42)+(43)	(45)=(25)+(28)+(31)+(34)+(35)+(36)+(37)+(38)+(39)+(40)+(44)	(46)=(21)+(45)
378	Kab. Wakatobi	4.821.950		4.821.950	66.706.138	147.344.977
379	Kab. Kolaka Utara			8.744.600	26.628.400	108.862.734
380	Kab. Konawe Utara				24.609.956	84.201.929
381	Kab. Buton Utara				31.005.574	93.016.789
382	Kab. Konawe Kepulauan				19.901.349	111.492.667
383	Kab. Kolaka Timur				17.302.943	68.558.358
384	Kab. Muna Barat				16.991.947	96.735.718
385	Kab. Buton Tengah				8.805.946	73.041.762
386	Kab. Buton Selatan				16.519.832	65.532.386
387	Provinsi Bali		7.234.142	7.234.142	89.538.843	140.539.671
388	Kab. Badung				6.981.371	41.834.545
389	Kab. Bangli				47.075.209	121.034.014
390	Kab. Buleleng				70.878.588	160.249.144
391	Kab. Gianyar			5.498.000	33.999.261	75.320.315
392	Kab. Jembrana				15.490.979	66.694.920
393	Kab. Karangasem				32.047.203	101.480.151
394	Kab. Klungkung				32.511.465	66.822.281
395	Kab. Tabanan				65.609.371	137.896.332
396	Kota Denpasar				8.136.105	46.541.940
397	Provinsi Nusa Tenggara Barat		11.623.655	13.888.155	122.217.769	393.373.318

*) Perubahan Pertama

**) Perubahan Kedua

***) Perubahan Ketiga

(PMK Nomor 94 Tahun 2021)

(PMK Nomor 162 Tahun 2021)

(PMK Nomor 118 Tahun 2022)

Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021

Tanggal Berlaku: 23 November 2021

Tanggal Berlaku: 25 Juli 2022

SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Dampaknya

1. DAK FISIK REGULER

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Pendidikan				
		PAUD	SD	SMP	SMA	SMK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
398	Kab. Bima	825.203	26.188.815	11.907.967		
399	Kab. Dompu	1.033.861	10.985.460	6.344.499		
400	Kab. Lombok Barat	1.450.459	23.435.785	12.304.193		
401	Kab. Lombok Tengah	704.502	25.196.532	10.760.780		
402	Kab. Lombok Timur	2.449.692	13.912.580	34.678.640		
403	Kab. Sumbawa	1.112.132	19.597.537	4.129.635		
404	Kota Mataram	1.131.637	14.345.727	11.252.367		
405	Kota Bima	3.954.204	9.335.781	3.912.364		
406	Kab. Sumbawa Barat	1.873.437	7.799.283	7.887.116		
407	Kab. Lombok Utara	404.597	13.064.079	2.283.560		
408	Provinsi Nusa Tenggara Timur				107.185.025	144.683.985
409	Kab. Alor	588.426	8.523.890	5.422.134		
410	Kab. Belu	626.443	18.526.619	4.092.860		
411	Kab. Ende	351.675	17.648.508	4.523.089		
412	Kab. Flores Timur	1.322.375	18.852.497	9.663.186		
413	Kab. Kupang		13.975.324	2.312.597		
414	Kab. Lembata	874.869	5.511.452	3.355.728		
415	Kab. Manggarai		13.750.564	1.672.111		
416	Kab. Ngada	574.840	6.299.692	25.063.024		
417	Kab. Sikka	844.709	8.583.179	6.762.250		

*) Perubahan Pertama

(PMK Nomor 94 Tahun 2021)

Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021

**) Perubahan Kedua

(PMK Nomor 162 Tahun 2021)

Tanggal Berlaku: 23 November 2021

***) Perubahan Ketiga

(PMK Nomor 118 Tahun 2022)

Tanggal Berlaku: 25 Juli 2022

SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Dampaknya

1. DAK FISIK REGULER

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Pendidikan				Kesehatan dan KB
		SKB	SLB	Perpustakaan Daerah	Subtotal Pendidikan	Pelayanan Dasar
(1)	(2)	(8)	(9)	(10)	(11)=(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)+(9)+(10)	(12)
398	Kab. Bima			8.679.990	47.601.975	8.984.090
399	Kab. Dompu	540.000			18.903.820	14.461.992
400	Kab. Lombok Barat	1.643.500			38.833.937	2.481.933
401	Kab. Lombok Tengah	600.000			37.261.814	21.660.936
402	Kab. Lombok Timur	748.400		434.000	52.223.312	8.897.249
403	Kab. Sumbawa				24.839.304	23.823.431
404	Kota Mataram				26.729.731	1.999.998
405	Kota Bima			9.941.000	27.143.349	13.661.501
406	Kab. Sumbawa Barat	575.000			18.134.836	18.363.524
407	Kab. Lombok Utara			10.000.000	25.752.236	
408	Provinsi Nusa Tenggara Timur		2.479.060	2.494.000	256.842.070	
409	Kab. Alor	211.405		398.500	15.144.355	30.959.200
410	Kab. Belu				23.245.922	2.000.000
411	Kab. Ende			2.017.000	24.540.272	22.543.900
412	Kab. Flores Timur				29.838.058	10.536.600
413	Kab. Kupang			300.000	16.587.921	9.626.340
414	Kab. Lembata				9.742.049	2.000.000
415	Kab. Manggarai				15.422.675	9.240.000
416	Kab. Ngada	769.200			32.706.756	14.616.100
417	Kab. Sikka				16.190.138	21.094.780

*) Perubahan Pertama
 **) Perubahan Kedua
 ***) Perubahan Ketiga

(PMK Nomor 94 Tahun 2021)
 (PMK Nomor 162 Tahun 2021)
 (PMK Nomor 118 Tahun 2022)

Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021
 Tanggal Berlaku: 23 November 2021
 Tanggal Berlaku: 25 Juli 2022

SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Dampaknya

1. DAK FISIK REGULER

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Kesehatan dan KB				
		Pelayanan Rujukan	Pelayanan Kefarmasian dan Bahan Habis Pakai	Peningkatan Kesiapan Sistem Kesehatan	Keluarga Berencana	Subtotal Kesehatan dan KB
(1)	(2)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)=(12)+(13)+(14)+(15)+(16)
398	Kab. Bima	5.116.093	5.839.437		1.564.529	21.504.149
399	Kab. Dompu	6.873.600	2.899.685		1.490.330	25.725.607
400	Kab. Lombok Barat	16.450.000	10.316.479	2.078.814	1.503.866	32.831.092
401	Kab. Lombok Tengah		5.744.554	1.613.065	1.501.948	30.520.503
402	Kab. Lombok Timur	3.000.000	6.967.149	450.000	1.438.679	20.753.077
403	Kab. Sumbawa	3.000.000	5.145.176	390.000	1.418.860	33.777.467
404	Kota Mataram	51.751.809	3.493.903		1.479.839	58.725.549
405	Kota Bima	3.304.187	2.952.922	3.012.161	1.505.127	24.435.898
406	Kab. Sumbawa Barat	2.849.282	2.751.044		1.074.232	25.038.082
407	Kab. Lombok Utara		4.750.968		1.236.483	5.987.451
408	Provinsi Nusa Tenggara Timur	50.437.491		18.127.970		68.565.461
409	Kab. Alor	60.364.046	6.667.385		1.409.792	99.400.423
410	Kab. Belu	14.478.670	2.537.858		1.364.068	20.380.596
411	Kab. Ende	9.955.840	2.941.458		1.441.101	36.882.299
412	Kab. Flores Timur	20.567.850	5.264.265		1.514.061	37.882.776
413	Kab. Kupang	2.000.000	6.646.416	3.344.000	1.367.701	22.984.457
414	Kab. Lembata	20.714.560	6.333.806		1.441.101	30.489.467
415	Kab. Manggarai	31.914.875	5.525.110	390.000	772.877	47.842.862
416	Kab. Ngada	12.607.310	2.129.243	390.000	1.228.685	30.971.338
417	Kab. Sikka	9.902.422	5.326.062	11.695.220	1.566.231	49.584.715

*) Perubahan Pertama
 **) Perubahan Kedua
 ***) Perubahan Ketiga

(PMK Nomor 94 Tahun 2021)
 (PMK Nomor 162 Tahun 2021)
 (PMK Nomor 118 Tahun 2022)

Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021
 Tanggal Berlaku: 23 November 2021
 Tanggal Berlaku: 25 Juli 2022

SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Dampaknya

1. DAK FISIK REGULER

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Jalan	Transportasi Perdesaan	Transportasi Laut	TOTAL DAK REGULER
(1)	(2)	(18)	(19)	(20)	(21)=(11)+(17)+(18)+(19)+(20)
398	Kab. Bima	15.437.940	7.300.000		91.844.064
399	Kab. Dompu	10.589.711	6.510.000		61.729.138
400	Kab. Lombok Barat	8.777.407	13.812.787	5.554.125	99.809.348
401	Kab. Lombok Tengah	12.727.888	10.700.047		91.210.252
402	Kab. Lombok Timur	33.832.188	12.000.001		118.808.578
403	Kab. Sumbawa	9.780.240	11.672.779		80.069.790
404	Kota Mataram	8.845.062			94.300.342
405	Kota Bima	5.936.248			57.515.495
406	Kab. Sumbawa Barat	9.198.629	9.827.351		62.198.898
407	Kab. Lombok Utara	8.760.201	12.099.033		52.598.921
408	Provinsi Nusa Tenggara Timur	20.591.860		11.183.980	357.183.371
409	Kab. Alor	13.405.376	8.462.765		136.412.919
410	Kab. Belu	8.366.781	7.665.000		59.658.299
411	Kab. Ende	13.378.551	8.400.000		83.201.122
412	Kab. Flores Timur	11.171.252		3.279.523	82.171.609
413	Kab. Kupang	7.311.565	7.300.000	2.006.970	56.190.913
414	Kab. Lembata	11.874.094	8.754.584	9.424.769	70.284.963
415	Kab. Manggarai	12.805.650	6.000.000		82.071.187
416	Kab. Ngada	13.109.885			76.787.979
417	Kab. Sikka	8.034.362		8.300.000	82.109.215

*) Perubahan Pertama

**) Perubahan Kedua

***) Perubahan Ketiga

(PMK Nomor 94 Tahun 2021)

(PMK Nomor 162 Tahun 2021)

(PMK Nomor 118 Tahun 2022)

Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021

Tanggal Berlaku: 23 November 2021

Tanggal Berlaku: 25 Juli 2022

SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Dampaknya

2. DAK FISIK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Kesehatan dan KB			Jalan	
		Penguatan Intervensi Stunting	Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi	Keluarga Berencana	Subtotal Kesehatan dan KB	Tematik Ketahanan Pangan
(1)	(2)	(22)	(23)	(24)	(25)=(22)+(23)+(24)	(26)
398	Kab. Bima		67.813.764	520.875	68.334.639	11.101.595
399	Kab. Dompu			377.500	377.500	
400	Kab. Lombok Barat			208.000	208.000	
401	Kab. Lombok Tengah	1.195.000	61.225.589	301.150	62.721.739	10.743.427
402	Kab. Lombok Timur	200.000	91.648.992	316.000	92.164.992	14.804.450
403	Kab. Sumbawa			349.199	349.199	9.407.194
404	Kota Mataram			415.000	415.000	
405	Kota Bima					
406	Kab. Sumbawa Barat	1.408.092		352.500	1.760.592	
407	Kab. Lombok Utara	195.000	35.304.474	314.000	35.813.474	
408	Provinsi Nusa Tenggara Timur	15.761.612			15.761.612	
409	Kab. Alor	999.708		350.000	1.349.708	
410	Kab. Belu			349.999	349.999	
411	Kab. Ende			350.000	350.000	
412	Kab. Flores Timur	1.000.000		350.000	1.350.000	
413	Kab. Kupang	1.983.200	23.555.000	350.000	25.888.200	
414	Kab. Lembata			350.000	350.000	
415	Kab. Manggarai	1.517.760		350.000	1.867.760	8.775.608
416	Kab. Ngada	750.000		350.000	1.100.000	
417	Kab. Sikka	2.691.000		349.999	3.040.999	

*) Perubahan Pertama

**) Perubahan Kedua

***) Perubahan Ketiga

(PMK Nomor 94 Tahun 2021)

(PMK Nomor 162 Tahun 2021)

(PMK Nomor 118 Tahun 2022)

Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021

Tanggal Berlaku: 23 November 2021

Tanggal Berlaku: 25 Juli 2022

SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Dampaknya

2. DAK FISIK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Jalan		Air Minum		
		Tematik Pembangunan Infrastruktur Ekonomi Berkelanjutan	Subtotal Jalan	Tematik Penurunan Angka Kematian Ibu dan Stunting	Tematik Penanggulangan Kemiskinan	Subtotal Air Minum
(1)	(2)	(27)	(28)=(26)+(27)	(29)	(30)	(31)=(29)+(30)
398	Kab. Bima		11.101.595	7.754.054	4.427.685	12.181.739
399	Kab. Dompu			1.799.791	4.634.504	6.434.295
400	Kab. Lombok Barat	10.743.611	10.743.611	2.157.751	3.797.664	5.955.415
401	Kab. Lombok Tengah		10.743.427	2.530.206	6.780.406	9.310.612
402	Kab. Lombok Timur		14.804.450	6.107.238	4.571.540	10.678.778
403	Kab. Sumbawa		9.407.194	3.726.563	4.157.374	7.883.937
404	Kota Mataram					
405	Kota Bima				4.087.845	4.087.845
406	Kab. Sumbawa Barat	9.298.484	9.298.484	2.584.699	5.692.999	8.277.698
407	Kab. Lombok Utara			5.131.931		5.131.931
408	Provinsi Nusa Tenggara Timur	42.627.432	42.627.432			
409	Kab. Alor	10.568.661	10.568.661	1.980.443	3.906.772	5.887.215
410	Kab. Belu	8.710.289	8.710.289	1.893.750	2.605.367	4.499.117
411	Kab. Ende				4.311.124	4.311.124
412	Kab. Flores Timur			17.459.982	2.406.408	19.866.390
413	Kab. Kupang	9.724.387	9.724.387	7.984.875	5.541.401	13.526.276
414	Kab. Lembata	7.629.878	7.629.878	8.359.034	4.534.156	12.893.190
415	Kab. Manggarai		8.775.608	13.286.000	2.299.000	15.585.000
416	Kab. Ngada			5.774.328	5.895.424	11.669.752
417	Kab. Sikka			4.957.986	4.907.449	9.865.435

*) Perubahan Pertama

**) Perubahan Kedua

***) Perubahan Ketiga

(PMK Nomor 94 Tahun 2021)

(PMK Nomor 162 Tahun 2021)

(PMK Nomor 118 Tahun 2022)

Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021

Tanggal Berlaku: 23 November 2021

Tanggal Berlaku: 25 Juli 2022

SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Dampaknya

2. DAK FISIK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Sanitasi			Perumahan dan Permukiman	Irigasi
		Tematik Penurunan Angka Kematian Ibu dan Stunting	Tematik Penanggulangan Kemiskinan	Subtotal Sanitasi		
(1)	(2)	(32)	(33)	(34)=(32)+(33)	(35)	(36)
398	Kab. Bima	4.909.487	2.751.574	7.661.061	2.992.049	5.800.000
399	Kab. Dompu	3.818.490	2.176.843	5.995.333	1.318.586	5.800.000
400	Kab. Lombok Barat	809.156	3.922.247	4.731.403	2.894.960	24.471.798
401	Kab. Lombok Tengah	5.727.735	3.900.694	9.628.429	1.533.572	11.278.971
402	Kab. Lombok Timur	6.591.441	4.430.793	11.022.234	2.613.035	18.500.000
403	Kab. Sumbawa	4.727.654	2.795.564	7.523.218	2.987.928	21.240.980
404	Kota Mataram	1.072.972		1.072.972	1.087.152	
405	Kota Bima		1.844.456	1.844.456	3.150.595	1.135.040
406	Kab. Sumbawa Barat	2.881.051	1.604.391	4.485.442	2.805.518	12.820.603
407	Kab. Lombok Utara	6.718.724		6.718.724	1.069.218	6.529.303
408	Provinsi Nusa Tenggara Timur					29.927.600
409	Kab. Alor	1.591.037	1.595.469	3.186.506	954.893	
410	Kab. Belu	1.909.211	1.561.547	3.470.758	981.504	4.152.291
411	Kab. Ende	4.379.835	1.489.818	5.869.653	1.367.974	4.400.000
412	Kab. Flores Timur	2.726.375	1.547.597	4.273.972		
413	Kab. Kupang	2.856.567	1.688.427	4.544.994	2.451.253	4.991.800
414	Kab. Lembata	4.617.296		4.617.296	1.054.763	1.940.713
415	Kab. Manggarai	9.014.363	1.890.438	10.904.801	2.645.160	4.600.000
416	Kab. Ngada	6.627.719		6.627.719	1.157.850	4.193.112
417	Kab. Sikka	14.269.642	1.409.418	15.679.060	3.078.154	3.805.673

*) Perubahan Pertama

**) Perubahan Kedua

***) Perubahan Ketiga

(PMK Nomor 94 Tahun 2021)

(PMK Nomor 162 Tahun 2021)

(PMK Nomor 118 Tahun 2022)

Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021

Tanggal Berlaku: 23 November 2021

Tanggal Berlaku: 25 Juli 2022

SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Dampaknya

2. DAK FISIK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Pertanian	Kelautan dan Perikanan	Industri Kecil dan Menengah	Pariwisata	Lingkungan Hidup
						Lingkungan Hidup Tematik Penurunan Angka Kematian Ibu dan Stunting
(1)	(2)	(37)	(38)	(39)	(40)	(41)
398	Kab. Bima	7.555.000	2.405.000			
399	Kab. Dompu	6.245.502	2.327.625			
400	Kab. Lombok Barat	3.650.000	2.905.250	1.468.000	2.920.639	
401	Kab. Lombok Tengah	2.815.000	2.474.836	10.000.974	9.420.996	
402	Kab. Lombok Timur	8.235.000	2.315.211	3.684.360		
403	Kab. Sumbawa	6.143.318	2.160.419	1.650.160		1.300.000
404	Kota Mataram		2.147.000		11.775.340	
405	Kota Bima		1.384.000			
406	Kab. Sumbawa Barat	6.890.000	2.375.893			
407	Kab. Lombok Utara		1.870.000		4.558.845	
408	Provinsi Nusa Tenggara Timur	8.901.075	14.537.000		1.849.999	
409	Kab. Alor	8.485.840	2.112.000			
410	Kab. Belu		1.032.813			
411	Kab. Ende		950.000		13.053.856	
412	Kab. Flores Timur		2.256.000		5.359.498	
413	Kab. Kupang		1.588.000			
414	Kab. Lembata		1.430.000			
415	Kab. Manggarai	2.287.500	1.479.000		1.370.372	
416	Kab. Ngada		1.153.200	6.200.604	540.000	
417	Kab. Sikka		1.700.000		3.852.513	

*) Perubahan Pertama

**) Perubahan Kedua

***) Perubahan Ketiga

(PMK Nomor 94 Tahun 2021)

(PMK Nomor 162 Tahun 2021)

(PMK Nomor 118 Tahun 2022)

Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021

Tanggal Berlaku: 23 November 2021

Tanggal Berlaku: 25 Juli 2022

SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Dampaknya

2. DAK FISIK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Lingkungan Hidup			TOTAL DAK PENUGASAN	TOTAL DAK FISIK
		Lingkungan Hidup Tematik Pembangunan Infrastruktur Ekonomi Berkelanjutan	Kehutanan Tematik Ketahanan Pangan	Subtotal Lingkungan Hidup		
(1)	(2)	(42)	(43)	(44)=(41)+(42)+(43)	(45)=(25)+(28)+(31)+(34)+(35)+(36)+(37)+(38)+(39)+(40)+(44)	(46)=(21)+(45)
398	Kab. Bima				118.031.083	209.875.147
399	Kab. Dompu				28.498.841	90.227.979
400	Kab. Lombok Barat				59.949.076	159.758.424
401	Kab. Lombok Tengah	7.076.500		7.076.500	137.005.056	228.215.308
402	Kab. Lombok Timur				164.018.060	282.826.638
403	Kab. Sumbawa			1.300.000	60.646.353	140.716.143
404	Kota Mataram				16.497.464	110.797.806
405	Kota Bima				11.601.936	69.117.431
406	Kab. Sumbawa Barat				48.714.230	110.913.128
407	Kab. Lombok Utara				61.691.495	114.290.416
408	Provinsi Nusa Tenggara Timur		13.770.022	13.770.022	127.374.740	484.558.111
409	Kab. Alor				32.544.823	168.957.742
410	Kab. Belu				23.196.771	82.855.070
411	Kab. Ende				30.302.607	113.503.729
412	Kab. Flores Timur				33.105.860	115.277.469
413	Kab. Kupang				62.714.910	118.905.823
414	Kab. Lembata				29.915.840	100.200.803
415	Kab. Manggarai				49.515.201	131.586.388
416	Kab. Ngada				32.642.237	109.430.216
417	Kab. Sikka				41.021.834	123.131.049

*) Perubahan Pertama
 **) Perubahan Kedua
 ***) Perubahan Ketiga

(PMK Nomor 94 Tahun 2021)
 (PMK Nomor 162 Tahun 2021)
 (PMK Nomor 118 Tahun 2022)

Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021
 Tanggal Berlaku: 23 November 2021
 Tanggal Berlaku: 25 Juli 2022

SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Dampaknya

1. DAK FISIK REGULER

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Pendidikan				
		PAUD	SD	SMP	SMA	SMK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
418	Kab. Sumba Barat		21.577.017	2.722.245		
419	Kab. Sumba Timur	267.057	10.794.297	2.715.372		
420	Kab. Timor Tengah Selatan	579.911	18.100.215	10.637.146		
421	Kab. Timor Tengah Utara	284.746	4.107.547	2.164.828		
422	Kota Kupang		5.407.590	6.537.473		
423	Kab. Rote Ndao	351.745	2.313.982	3.126.403		
424	Kab. Manggarai Barat	717.637	10.811.738	3.181.272		
425	Kab. Nagekeo		10.448.277	3.367.890		
426	Kab. Sumba Barat Daya	1.345.510	17.982.828	2.546.730		
427	Kab. Sumba Tengah	421.294	10.936.473	1.551.090		
428	Kab. Manggarai Timur	557.635	15.642.757	5.653.690		
429	Kab. Sabu Raijua		7.421.231	2.917.155		
430	Kab. Malaka		12.451.865	10.769.081		
431	Provinsi Maluku				77.168.001	94.972.792
432	Kab. Kepulauan Tanimbar	683.899	13.529.369	8.967.018		
433	Kab. Maluku Tengah		17.246.744	11.770.626		
434	Kab. Maluku Tenggara	1.954.716	20.431.926	16.442.936		
435	Kab. Buru	764.713	15.692.990	7.207.595		
436	Kota Ambon		24.520.566	1.783.704		
437	Kab. Seram Bagian Barat	2.018.327	26.437.342	15.175.386		

*) Perubahan Pertama

**) Perubahan Kedua

***) Perubahan Ketiga

(PMK Nomor 94 Tahun 2021)

(PMK Nomor 162 Tahun 2021)

(PMK Nomor 118 Tahun 2022)

Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021

Tanggal Berlaku: 23 November 2021

Tanggal Berlaku: 25 Juli 2022

SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Dampaknya

1. DAK FISIK REGULER

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Pendidikan				Kesehatan dan KB
		SKB	SLB	Perpustakaan Daerah	Subtotal Pendidikan	Pelayanan Dasar
(1)	(2)	(8)	(9)	(10)	(11)=(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)+(9)+(10)	(12)
418	Kab. Sumba Barat				24.299.262	10.504.800
419	Kab. Sumba Timur			356.570	14.133.296	9.624.400
420	Kab. Timor Tengah Selatan				29.317.272	17.945.509
421	Kab. Timor Tengah Utara				6.557.121	12.802.163
422	Kota Kupang				11.945.063	5.221.584
423	Kab. Rote Ndao				5.792.130	5.703.254
424	Kab. Manggarai Barat	527.270			15.237.917	13.075.863
425	Kab. Nagekeo			10.000.000	23.816.167	12.606.387
426	Kab. Sumba Barat Daya				21.875.068	17.510.000
427	Kab. Sumba Tengah			200.000	13.108.857	8.467.400
428	Kab. Manggarai Timur				21.854.082	21.844.000
429	Kab. Sabu Raijua				10.338.386	2.341.812
430	Kab. Malaka				23.220.946	9.502.612
431	Provinsi Maluku		1.880.635	798.729	174.820.157	
432	Kab. Kepulauan Tanimbar				23.180.286	17.121.597
433	Kab. Maluku Tengah			4.365.193	33.382.563	14.837.256
434	Kab. Maluku Tenggara				38.829.578	15.216.958
435	Kab. Buru			500.000	24.165.298	12.232.200
436	Kota Ambon				26.304.270	14.232.016
437	Kab. Seram Bagian Barat				43.631.055	15.843.618

*) Perubahan Pertama

**) Perubahan Kedua

***) Perubahan Ketiga

(PMK Nomor 94 Tahun 2021)

(PMK Nomor 162 Tahun 2021)

(PMK Nomor 118 Tahun 2022)

Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021

Tanggal Berlaku: 23 November 2021

Tanggal Berlaku: 25 Juli 2022

SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Dampaknya

1. DAK FISIK REGULER

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Kesehatan dan KB				Subtotal Kesehatan dan KB
		Pelayanan Rujukan	Pelayanan Kefarmasian dan Bahan Habis Pakai	Peningkatan Kesiapan Sistem Kesehatan	Keluarga Berencana	
(1)	(2)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)=(12)+(13)+(14)+(15)+(16)
418	Kab. Sumba Barat	33.524.204	4.376.963	3.012.161	1.373.000	52.791.128
419	Kab. Sumba Timur	15.343.808	6.113.895	200.000	1.379.813	32.661.916
420	Kab. Timor Tengah Selatan	3.000.000	7.240.902		1.321.371	29.507.782
421	Kab. Timor Tengah Utara	3.529.900	5.553.856	250.000	1.459.270	23.595.189
422	Kota Kupang	41.567.180	5.865.133	390.000	1.489.836	54.533.733
423	Kab. Rote Ndao	15.821.561	6.600.423		1.476.714	29.601.952
424	Kab. Manggarai Barat	2.283.783	4.407.548		1.317.031	21.084.225
425	Kab. Nagekeo	10.568.821	1.617.711		1.383.851	26.176.770
426	Kab. Sumba Barat Daya		6.479.542		1.514.061	25.503.603
427	Kab. Sumba Tengah	9.585.000	2.467.198		1.441.101	21.960.699
428	Kab. Manggarai Timur		8.397.180	45.182.426	1.332.373	76.755.979
429	Kab. Sabu Raijua	12.045.370	3.548.127		462.005	18.397.314
430	Kab. Malaka	49.178.237	4.702.196		1.198.453	64.581.498
431	Provinsi Maluku	61.669.113		11.534.069		73.203.182
432	Kab. Kepulauan Tanimbar	7.827.796	3.963.176		1.397.376	30.309.945
433	Kab. Maluku Tengah	37.656.788	1.803.115	45.182.426	1.407.572	100.887.157
434	Kab. Maluku Tenggara		3.799.384	351.418	1.262.726	20.630.486
435	Kab. Buru	3.000.000	4.171.189	390.000	1.303.202	21.096.591
436	Kota Ambon		5.761.830	4.016.215	1.347.009	25.357.070
437	Kab. Seram Bagian Barat	6.822.500	2.986.214	198.723	1.248.090	27.099.145

*) Perubahan Pertama

(PMK Nomor 94 Tahun 2021)

Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021

**) Perubahan Kedua

(PMK Nomor 162 Tahun 2021)

Tanggal Berlaku: 23 November 2021

***) Perubahan Ketiga

(PMK Nomor 118 Tahun 2022)

Tanggal Berlaku: 25 Juli 2022

SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Dampaknya

1. DAK FISIK REGULER

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Jalan	Transportasi Perdesaan	Transportasi Laut	TOTAL DAK REGULER
(1)	(2)	(18)	(19)	(20)	(21)=(11)+(17)+(18)+(19)+(20)
418	Kab. Sumba Barat	8.641.437	6.800.000		92.531.827
419	Kab. Sumba Timur	13.603.900	5.500.000	3.887.784	69.786.896
420	Kab. Timor Tengah Selatan	15.909.259	6.400.000		81.134.313
421	Kab. Timor Tengah Utara	12.093.629	7.626.216		49.872.155
422	Kota Kupang	10.343.827			76.822.623
423	Kab. Rote Ndao	10.511.785	12.799.999		58.705.866
424	Kab. Manggarai Barat	12.491.421	7.000.000		55.813.563
425	Kab. Nagekeo	9.186.624	6.030.936	8.400.000	73.610.497
426	Kab. Sumba Barat Daya	10.665.802	6.300.000		64.344.473
427	Kab. Sumba Tengah	9.999.131	6.700.000		51.768.687
428	Kab. Manggarai Timur	13.353.035	6.700.000		118.663.096
429	Kab. Sabu Raijua	9.460.411	9.300.000		47.496.111
430	Kab. Malaka	5.187.218	7.700.000		100.689.662
431	Provinsi Maluku	14.573.913			262.597.252
432	Kab. Kepulauan Tanimbar	12.440.230	7.684.579	14.486.052	88.101.092
433	Kab. Maluku Tengah	11.342.263	7.300.000	11.346.220	164.258.203
434	Kab. Maluku Tenggara	18.003.083	8.700.000		86.163.147
435	Kab. Buru	22.908.847	10.400.000	3.500.000	82.070.736
436	Kota Ambon	10.617.316			62.278.656
437	Kab. Seram Bagian Barat	31.366.688	9.921.862	2.094.047	114.112.797

*) Perubahan Pertama

(PMK Nomor 94 Tahun 2021)

Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021

**) Perubahan Kedua

(PMK Nomor 162 Tahun 2021)

Tanggal Berlaku: 23 November 2021

***) Perubahan Ketiga

(PMK Nomor 118 Tahun 2022)

Tanggal Berlaku: 25 Juli 2022

SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Dampaknya

2. DAK FISIK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Kesehatan dan KB				Jalan
		Penguatan Intervensi Stunting	Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi	Keluarga Berencana	Subtotal Kesehatan dan KB	Tematik Ketahanan Pangan
(1)	(2)	(22)	(23)	(24)	(25)=(22)+(23)+(24)	(26)
418	Kab. Sumba Barat			349.999	349.999	
419	Kab. Sumba Timur			350.000	350.000	
420	Kab. Timor Tengah Selatan	600.000	2.918.739	340.000	3.858.739	
421	Kab. Timor Tengah Utara			350.000	350.000	
422	Kota Kupang					
423	Kab. Rote Ndao	715.000		520.875	1.235.875	
424	Kab. Manggarai Barat			350.000	350.000	9.435.427
425	Kab. Nagekeo	445.854		350.000	795.854	
426	Kab. Sumba Barat Daya		14.100.978	170.000	14.270.978	
427	Kab. Sumba Tengah	1.450.000		350.000	1.800.000	
428	Kab. Manggarai Timur	625.000		396.999	1.021.999	11.113.174
429	Kab. Sabu Raijua	925.839		350.000	1.275.839	
430	Kab. Malaka	750.000		350.000	1.100.000	
431	Provinsi Maluku	10.620.058			10.620.058	
432	Kab. Kepulauan Tanimbar		35.246.165		35.246.165	
433	Kab. Maluku Tengah		31.070.761	300.000	31.370.761	
434	Kab. Maluku Tenggara	1.625.000	20.327.196	280.000	22.232.196	
435	Kab. Buru		31.978.180		31.978.180	
436	Kota Ambon	2.030.000		380.000	2.410.000	
437	Kab. Seram Bagian Barat	360.900		300.000	660.900	

*) Perubahan Pertama

**) Perubahan Kedua

***) Perubahan Ketiga

(PMK Nomor 94 Tahun 2021)

(PMK Nomor 162 Tahun 2021)

(PMK Nomor 118 Tahun 2022)

Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021

Tanggal Berlaku: 23 November 2021

Tanggal Berlaku: 25 Juli 2022

SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Dampaknya

2. DAK FISIK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Jalan		Air Minum		
		Tematik Pembangunan Infrastruktur Ekonomi Berkelanjutan	Subtotal Jalan	Tematik Penurunan Angka Kematian Ibu dan Stunting	Tematik Penanggulangan Kemiskinan	Subtotal Air Minum
(1)	(2)	(27)	(28)=(26)+(27)	(29)	(30)	(31)=(29)+(30)
418	Kab. Sumba Barat	7.260.868	7.260.868	5.789.327	3.740.590	9.529.917
419	Kab. Sumba Timur	10.895.421	10.895.421	2.778.427	4.509.287	7.287.714
420	Kab. Timor Tengah Selatan	10.557.722	10.557.722	9.173.939	5.288.664	14.462.603
421	Kab. Timor Tengah Utara	9.940.134	9.940.134		5.000.000	5.000.000
422	Kota Kupang				1.936.201	1.936.201
423	Kab. Rote Ndao	8.989.438	8.989.438		1.799.368	1.799.368
424	Kab. Manggarai Barat		9.435.427		3.371.982	3.371.982
425	Kab. Nagekeo				4.575.197	4.575.197
426	Kab. Sumba Barat Daya	6.597.992	6.597.992	8.059.542	2.130.335	10.189.877
427	Kab. Sumba Tengah	2.871.969	2.871.969		4.335.001	4.335.001
428	Kab. Manggarai Timur		11.113.174	7.194.163	4.966.924	12.161.087
429	Kab. Sabu Raijua	8.407.285	8.407.285	2.162.436	2.322.202	4.484.638
430	Kab. Malaka	9.309.163	9.309.163	4.054.469	2.109.727	6.164.196
431	Provinsi Maluku	29.841.552	29.841.552			
432	Kab. Kepulauan Tanimbar	10.001.333	10.001.333		5.574.355	5.574.355
433	Kab. Maluku Tengah	14.534.903	14.534.903	6.649.231	4.678.594	11.327.825
434	Kab. Maluku Tenggara	9.745.993	9.745.993	2.257.239	5.505.017	7.762.256
435	Kab. Buru				4.696.653	4.696.653
436	Kota Ambon				7.265.001	7.265.001
437	Kab. Seram Bagian Barat	13.170.920	13.170.920	3.569.584	650.000	4.219.584

*) Perubahan Pertama

(PMK Nomor 94 Tahun 2021)

Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021

**) Perubahan Kedua

(PMK Nomor 162 Tahun 2021)

Tanggal Berlaku: 23 November 2021

***) Perubahan Ketiga

(PMK Nomor 118 Tahun 2022)

Tanggal Berlaku: 25 Juli 2022

SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Dampaknya

2. DAK FISIK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Sanitasi			Perumahan dan Permukiman	Irigasi
		Tematik Penurunan Angka Kematian Ibu dan Stunting	Tematik Penanggulangan Kemiskinan	Subtotal Sanitasi		
(1)	(2)	(32)	(33)	(34)=(32)+(33)	(35)	(36)
418	Kab. Sumba Barat	7.955.187	1.544.874	9.500.061	1.250.776	2.035.250
419	Kab. Sumba Timur	1.356.600	1.761.300	3.117.900	1.943.593	3.500.000
420	Kab. Timor Tengah Selatan	950.732	2.107.650	3.058.382	1.361.716	2.260.559
421	Kab. Timor Tengah Utara	1.431.362	1.484.315	2.915.677	3.103.030	4.250.000
422	Kota Kupang		1.503.176	1.503.176	2.933.115	1.750.000
423	Kab. Rote Ndao	1.336.471	1.698.420	3.034.891	1.537.871	4.934.999
424	Kab. Manggarai Barat	1.381.800		1.381.800	1.359.178	6.798.253
425	Kab. Nagekeo	1.513.200	1.336.030	2.849.230	993.764	5.148.000
426	Kab. Sumba Barat Daya	8.937.084	500.000	9.437.084	1.782.460	6.085.004
427	Kab. Sumba Tengah	2.227.452	1.274.752	3.502.204	3.258.334	2.201.385
428	Kab. Manggarai Timur	5.345.886	1.898.720	7.244.606	1.715.291	7.986.879
429	Kab. Sabu Raijua	1.309.197	420.000	1.729.197	1.352.790	
430	Kab. Malaka	3.182.075	1.296.506	4.478.581	981.386	3.799.388
431	Provinsi Maluku					51.897.547
432	Kab. Kepulauan Tanimbar		1.789.806	1.789.806	1.675.791	6.968.097
433	Kab. Maluku Tengah	5.091.320	2.500.442	7.591.762	2.866.210	2.500.000
434	Kab. Maluku Tenggara	3.341.179	1.867.336	5.208.515	3.104.229	883.230
435	Kab. Buru		2.141.786	2.141.786	1.849.828	4.728.830
436	Kota Ambon	2.454.743	1.499.779	3.954.522	3.191.893	
437	Kab. Seram Bagian Barat	1.963.795	2.323.073	4.286.868	2.123.281	2.601.963

*) Perubahan Pertama

**) Perubahan Kedua

***) Perubahan Ketiga

(PMK Nomor 94 Tahun 2021)

(PMK Nomor 162 Tahun 2021)

(PMK Nomor 118 Tahun 2022)

Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021

Tanggal Berlaku: 23 November 2021

Tanggal Berlaku: 25 Juli 2022

SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Dampaknya

2. DAK FISIK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Pertanian	Kelautan dan Perikanan	Industri Kecil dan Menengah	Pariwisata	Lingkungan Hidup
						Lingkungan Hidup Tematik Penurunan Angka Kematian Ibu dan Stunting
(1)	(2)	(37)	(38)	(39)	(40)	(41)
418	Kab. Sumba Barat		1.169.000			
419	Kab. Sumba Timur	2.120.000	1.821.694	763.856		
420	Kab. Timor Tengah Selatan	4.610.000	1.125.000			
421	Kab. Timor Tengah Utara		331.350	500.048		
422	Kota Kupang		1.197.250	3.187.661		
423	Kab. Rote Ndao		1.293.000	7.459.976		
424	Kab. Manggarai Barat	2.050.000	1.052.100		2.131.091	
425	Kab. Nagekeo	2.685.000	512.570	1.700.165	1.000.232	
426	Kab. Sumba Barat Daya	4.623.841	1.280.000	6.350.618		
427	Kab. Sumba Tengah	2.268.208	1.140.000			
428	Kab. Manggarai Timur	2.016.000	1.092.000	3.000.292	4.401.527	
429	Kab. Sabu Raijua	2.670.000	1.012.500	2.200.214		
430	Kab. Malaka	2.220.000	834.690			
431	Provinsi Maluku		21.008.522			
432	Kab. Kepulauan Tanimbar	5.013.750	2.980.000			1.017.750
433	Kab. Maluku Tengah		2.603.884			
434	Kab. Maluku Tenggara		2.815.672			
435	Kab. Buru		2.503.512			
436	Kota Ambon		900.000	5.500.000		
437	Kab. Seram Bagian Barat		2.518.000	18.851.836		

*) Perubahan Pertama

(PMK Nomor 94 Tahun 2021)

Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021

**) Perubahan Kedua

(PMK Nomor 162 Tahun 2021)

Tanggal Berlaku: 23 November 2021

***) Perubahan Ketiga

(PMK Nomor 118 Tahun 2022)

Tanggal Berlaku: 25 Juli 2022

SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Dampaknya

2. DAK FISIK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Lingkungan Hidup			TOTAL DAK PENUGASAN	TOTAL DAK FISIK
		Lingkungan Hidup Tematik Pembangunan Infrastruktur Ekonomi Berkelanjutan	Kehutanan Tematik Ketahanan Pangan	Subtotal Lingkungan Hidup		
(1)	(2)	(42)	(43)	(44)=(41)+(42)+(43)	(45)=(25)+(28)+(31)+(34)+(35)+(36)+(37)+(38)+(39)+(40)+(44)	(46)=(21)+(45)
418	Kab. Sumba Barat				31.095.871	123.627.698
419	Kab. Sumba Timur				31.800.178	101.587.074
420	Kab. Timor Tengah Selatan				41.294.721	122.429.034
421	Kab. Timor Tengah Utara				26.390.239	76.262.394
422	Kota Kupang				12.507.403	89.330.026
423	Kab. Rote Ndao				30.285.418	88.991.284
424	Kab. Manggarai Barat	5.048.500		5.048.500	32.978.331	88.791.894
425	Kab. Nagekeo				20.260.012	93.870.509
426	Kab. Sumba Barat Daya				60.617.854	124.962.327
427	Kab. Sumba Tengah				21.377.101	73.145.788
428	Kab. Manggarai Timur				51.752.855	170.415.951
429	Kab. Sabu Raijua				23.132.463	70.628.574
430	Kab. Malaka				28.887.404	129.577.066
431	Provinsi Maluku		9.121.405	9.121.405	122.489.084	385.086.336
432	Kab. Kepulauan Tanimbar			1.017.750	70.267.047	158.368.139
433	Kab. Maluku Tengah				72.795.345	237.053.548
434	Kab. Maluku Tenggara				51.752.091	137.915.238
435	Kab. Buru				47.898.789	129.969.525
436	Kota Ambon				23.221.416	85.500.072
437	Kab. Seram Bagian Barat				48.433.352	162.546.149

*) Perubahan Pertama

**) Perubahan Kedua

***) Perubahan Ketiga

(PMK Nomor 94 Tahun 2021)

(PMK Nomor 162 Tahun 2021)

(PMK Nomor 118 Tahun 2022)

Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021

Tanggal Berlaku: 23 November 2021

Tanggal Berlaku: 25 Juli 2022

SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Dampaknya

1. DAK FISIK REGULER

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Pendidikan				
		PAUD	SD	SMP	SMA	SMK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
438	Kab. Seram Bagian Timur	904.731	12.872.324	9.712.264		
439	Kab. Kepulauan Aru	531.033	10.937.296	2.247.777		
440	Kota Tual	489.323	19.953.295	17.926.816		
441	Kab. Maluku Barat Daya		17.387.183	9.492.227		
442	Kab. Buru Selatan	7.007.991	10.917.941	7.371.211		
443	Provinsi Papua				49.459.359	95.461.742
444	Kab. Biak Numfor		10.869.221	3.315.985		
445	Kab. Jayapura	276.403	7.708.395	4.786.782		
446	Kab. Jayawijaya		17.158.626	2.138.605		
447	Kab. Merauke		13.516.520	2.568.930		
448	Kab. Mimika	2.070.200	10.008.166	10.296.876		
449	Kab. Nabire		28.244.550	5.179.148		
450	Kab. Paniai	1.028.547	14.562.317	10.278.741		
451	Kab. Puncak Jaya		9.451.386	3.348.405		
452	Kab. Kepulauan Yapen		9.843.398	4.125.047		
453	Kota Jayapura		24.396.683	24.404.443		
454	Kab. Sarmi		11.406.437	11.439.501		
455	Kab. Keerom	407.214	4.331.746	2.486.629		
456	Kab. Yahukimo		13.656.967	1.935.192		
457	Kab. Pegunungan Bintang	1.788.968	24.038.508	6.786.458		

*) Perubahan Pertama

**) Perubahan Kedua

***) Perubahan Ketiga

(PMK Nomor 94 Tahun 2021)

(PMK Nomor 162 Tahun 2021)

(PMK Nomor 118 Tahun 2022)

Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021

Tanggal Berlaku: 23 November 2021

Tanggal Berlaku: 25 Juli 2022

SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Dampaknya

1. DAK FISIK REGULER

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Pendidikan				Kesehatan dan KB
		SKB	SLB	Perpustakaan Daerah	Subtotal Pendidikan	Pelayanan Dasar
(1)	(2)	(8)	(9)	(10)	(11)=(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)+(9)+(10)	(12)
438	Kab. Seram Bagian Timur				23.489.319	14.759.023
439	Kab. Kepulauan Aru				13.716.106	8.099.134
440	Kota Tual				38.369.434	20.853.692
441	Kab. Maluku Barat Daya			500.000	27.379.410	16.131.222
442	Kab. Buru Selatan	965.000			26.262.143	20.444.700
443	Provinsi Papua		1.095.700	500.000	146.516.801	
444	Kab. Biak Numfor	2.215.900			16.401.106	33.108.950
445	Kab. Jayapura			500.000	13.271.580	21.441.640
446	Kab. Jayawijaya			700.000	19.997.231	12.414.737
447	Kab. Merauke				16.085.450	22.634.975
448	Kab. Mimika			300.000	22.675.242	25.862.684
449	Kab. Nabire				33.423.698	22.826.522
450	Kab. Paniai			500.000	26.369.605	49.135.133
451	Kab. Puncak Jaya				12.799.791	34.022.961
452	Kab. Kepulauan Yapen				13.968.445	19.048.143
453	Kota Jayapura				48.801.126	19.709.905
454	Kab. Sarmi				22.845.938	14.316.587
455	Kab. Keerom			500.000	7.725.589	
456	Kab. Yahukimo				15.592.159	36.402.500
457	Kab. Pegunungan Bintang				32.613.934	21.002.475

*) Perubahan Pertama

**) Perubahan Kedua

***) Perubahan Ketiga

(PMK Nomor 94 Tahun 2021)

(PMK Nomor 162 Tahun 2021)

(PMK Nomor 118 Tahun 2022)

Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021

Tanggal Berlaku: 23 November 2021

Tanggal Berlaku: 25 Juli 2022

SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Dampaknya

1. DAK FISIK REGULER

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Kesehatan dan KB				Subtotal Kesehatan dan KB
		Pelayanan Rujukan	Pelayanan Kefarmasian dan Bahan Habis Pakai	Peningkatan Kesiapan Sistem Kesehatan	Keluarga Berencana	
(1)	(2)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)=(12)+(13)+(14)+(15)+(16)
438	Kab. Seram Bagian Timur	6.995.919	5.375.430		1.564.529	28.694.901
439	Kab. Kepulauan Aru	2.777.820	4.978.693	968.754	802.452	17.626.853
440	Kota Tual	49.512.534	1.251.334	2.390.000	1.346.202	75.353.762
441	Kab. Maluku Barat Daya	3.000.000	5.834.404	702.837	1.223.411	26.891.874
442	Kab. Buru Selatan	2.992.500	4.362.048	390.000	1.507.601	29.696.849
443	Provinsi Papua	114.613.486				114.613.486
444	Kab. Biak Numfor	53.850.000	4.218.225		1.498.112	92.675.287
445	Kab. Jayapura	3.000.000	2.890.500	843.405	580.390	28.755.935
446	Kab. Jayawijaya	64.998.210	6.454.956		1.110.311	84.978.214
447	Kab. Merauke		2.871.488	390.000	911.262	26.807.725
448	Kab. Mimika		3.795.390		1.488.826	31.146.900
449	Kab. Nabire	19.126.952	4.469.209		469.358	46.892.041
450	Kab. Paniai	51.240.338	5.253.041		1.100.000	106.728.512
451	Kab. Puncak Jaya	2.850.000	3.224.162		1.564.529	41.661.652
452	Kab. Kepulauan Yapen	13.785.125	2.450.208	390.000	1.009.374	36.682.850
453	Kota Jayapura		5.518.348		354.794	25.583.047
454	Kab. Sarmi		2.244.838		1.236.483	17.797.908
455	Kab. Keerom	16.758.438	4.967.662	580.000	1.345.600	23.651.700
456	Kab. Yahukimo	34.577.601	3.494.718		1.319.756	75.794.575
457	Kab. Pegunungan Bintang	16.465.430	4.661.094		985.956	43.114.955

*) Perubahan Pertama

(PMK Nomor 94 Tahun 2021)

Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021

**) Perubahan Kedua

(PMK Nomor 162 Tahun 2021)

Tanggal Berlaku: 23 November 2021

***) Perubahan Ketiga

(PMK Nomor 118 Tahun 2022)

Tanggal Berlaku: 25 Juli 2022

SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Dampaknya

1. DAK FISIK REGULER

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Jalan	Transportasi Perdesaan	Transportasi Laut	TOTAL DAK REGULER
(1)	(2)	(18)	(19)	(20)	(21)=(11)+(17)+(18)+(19)+(20)
438	Kab. Seram Bagian Timur	30.575.312	10.500.000		93.259.532
439	Kab. Kepulauan Aru	8.094.347	2.918.195	3.700.000	46.055.501
440	Kota Tual	30.093.997		25.650.000	169.467.193
441	Kab. Maluku Barat Daya	13.086.941	9.600.000		76.958.225
442	Kab. Buru Selatan	10.958.202	6.420.000		73.337.194
443	Provinsi Papua	21.299.820			282.430.107
444	Kab. Biak Numfor	21.125.000	8.200.000	4.293.700	142.695.093
445	Kab. Jayapura	10.013.991	5.700.000		57.741.506
446	Kab. Jayawijaya	16.712.473	7.245.000		128.932.918
447	Kab. Merauke	6.048.106	12.353.691		61.294.972
448	Kab. Mimika	7.543.252	2.237.283		63.602.677
449	Kab. Nabire	10.557.428	11.186.413		102.059.580
450	Kab. Paniai		11.380.959		144.479.076
451	Kab. Puncak Jaya	13.128.929	9.046.404		76.636.776
452	Kab. Kepulauan Yapen	9.755.648	7.500.000	2.352.000	70.258.943
453	Kota Jayapura	6.072.240	5.900.000		86.356.413
454	Kab. Sarmi	10.460.226	7.600.000		58.704.072
455	Kab. Keerom	9.484.907	12.500.000		53.362.196
456	Kab. Yahukimo	7.974.605	8.085.000		107.446.339
457	Kab. Pegunungan Bintang	10.610.833	9.921.862		96.261.584

*) Perubahan Pertama

(PMK Nomor 94 Tahun 2021)

Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021

**) Perubahan Kedua

(PMK Nomor 162 Tahun 2021)

Tanggal Berlaku: 23 November 2021

***) Perubahan Ketiga

(PMK Nomor 118 Tahun 2022)

Tanggal Berlaku: 25 Juli 2022

SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Dampaknya

2. DAK FISIK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Kesehatan dan KB			Jalan	
		Penguatan Intervensi Stunting	Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi	Keluarga Berencana	Subtotal Kesehatan dan KB	Tematik Ketahanan Pangan
(1)	(2)	(22)	(23)	(24)	(25)=(22)+(23)+(24)	(26)
438	Kab. Seram Bagian Timur	1.950.000	18.265.068	310.000	20.525.068	
439	Kab. Kepulauan Aru	3.562.500		309.000	3.871.500	
440	Kota Tual					
441	Kab. Maluku Barat Daya	742.244	51.166.928	198.000	52.107.172	
442	Kab. Buru Selatan		29.614.284		29.614.284	
443	Provinsi Papua	29.315.229			29.315.229	
444	Kab. Biak Numfor	1.625.000		391.875	2.016.875	
445	Kab. Jayapura			323.143	323.143	
446	Kab. Jayawijaya			300.700	300.700	
447	Kab. Merauke	500.000		264.000	764.000	
448	Kab. Mimika		75.662.592	378.150	76.040.742	
449	Kab. Nabire	850.000		516.150	1.366.150	
450	Kab. Paniai	650.000		264.000	914.000	
451	Kab. Puncak Jaya			124.000	124.000	
452	Kab. Kepulauan Yapen			363.874	363.874	
453	Kota Jayapura	1.050.000		332.700	1.382.700	
454	Kab. Sarmi	1.450.000		96.000	1.546.000	
455	Kab. Keerom			160.000	160.000	
456	Kab. Yahukimo			204.000	204.000	
457	Kab. Pegunungan Bintang	650.000		222.000	872.000	

*) Perubahan Pertama

**) Perubahan Kedua

***) Perubahan Ketiga

(PMK Nomor 94 Tahun 2021)

(PMK Nomor 162 Tahun 2021)

(PMK Nomor 118 Tahun 2022)

Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021

Tanggal Berlaku: 23 November 2021

Tanggal Berlaku: 25 Juli 2022

SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Dampaknya

2. DAK FISIK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Jalan		Air Minum		
		Tematik Pembangunan Infrastruktur Ekonomi Berkelanjutan	Subtotal Jalan	Tematik Penurunan Angka Kematian Ibu dan Stunting	Tematik Penanggulangan Kemiskinan	Subtotal Air Minum
(1)	(2)	(27)	(28)=(26)+(27)	(29)	(30)	(31)=(29)+(30)
438	Kab. Seram Bagian Timur	12.988.304	12.988.304		6.324.560	6.324.560
439	Kab. Kepulauan Aru	9.002.742	9.002.742	326.135	6.381.691	6.707.826
440	Kota Tual				5.105.506	5.105.506
441	Kab. Maluku Barat Daya	10.047.240	10.047.240	13.717.958	9.402.005	23.119.963
442	Kab. Buru Selatan	7.085.929	7.085.929		3.283.731	3.283.731
443	Provinsi Papua	21.000.001	21.000.001			
444	Kab. Biak Numfor	16.835.130	16.835.130	900.000	3.472.589	4.372.589
445	Kab. Jayapura				4.313.173	4.313.173
446	Kab. Jayawijaya	16.706.032	16.706.032		5.998.610	5.998.610
447	Kab. Merauke	10.810.222	10.810.222		4.725.001	4.725.001
448	Kab. Mimika	22.390.472	22.390.472		3.950.902	3.950.902
449	Kab. Nabire	9.319.066	9.319.066	19.681.408		19.681.408
450	Kab. Paniai				3.224.479	3.224.479
451	Kab. Puncak Jaya	11.075.435	11.075.435		4.866.041	4.866.041
452	Kab. Kepulauan Yapen			2.499.709	5.165.639	7.665.348
453	Kota Jayapura	11.027.305	11.027.305		5.843.647	5.843.647
454	Kab. Sarmi					
455	Kab. Keerom	11.434.354	11.434.354		4.558.557	4.558.557
456	Kab. Yahukimo				5.622.059	5.622.059
457	Kab. Pegunungan Bintang				4.372.993	4.372.993

*) Perubahan Pertama

**) Perubahan Kedua

***) Perubahan Ketiga

(PMK Nomor 94 Tahun 2021)

(PMK Nomor 162 Tahun 2021)

(PMK Nomor 118 Tahun 2022)

Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021

Tanggal Berlaku: 23 November 2021

Tanggal Berlaku: 25 Juli 2022

SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Dampaknya

2. DAK FISIK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Sanitasi			Perumahan dan Permukiman	Irigasi
		Tematik Penurunan Angka Kematian Ibu dan Stunting	Tematik Penanggulangan Kemiskinan	Subtotal Sanitasi		
(1)	(2)	(32)	(33)	(34)=(32)+(33)	(35)	(36)
438	Kab. Seram Bagian Timur		1.752.928	1.752.928	1.091.023	2.785.000
439	Kab. Kepulauan Aru	500.000		500.000	1.607.482	
440	Kota Tual		5.810.633	5.810.633	30.102.325	
441	Kab. Maluku Barat Daya	3.669.153	250.000	3.919.153	1.373.779	
442	Kab. Buru Selatan		1.761.018	1.761.018	1.332.869	
443	Provinsi Papua					10.046.509
444	Kab. Biak Numfor	2.550.506	1.843.973	4.394.479	5.608.291	
445	Kab. Jayapura		1.713.515	1.713.515	6.332.678	2.841.371
446	Kab. Jayawijaya	8.509.777	3.491.619	12.001.396	1.257.985	4.154.323
447	Kab. Merauke		1.506.750	1.506.750	6.778.097	9.749.065
448	Kab. Mimika		850.000	850.000	1.154.598	
449	Kab. Nabire	2.440.570	950.000	3.390.570	3.694.620	13.005.885
450	Kab. Paniai		2.330.909	2.330.909	5.891.458	
451	Kab. Puncak Jaya		2.250.000	2.250.000	1.577.057	
452	Kab. Kepulauan Yapen		1.001.304	1.001.304	4.557.040	
453	Kota Jayapura		2.374.639	2.374.639	14.131.660	
454	Kab. Sarmi				4.040.400	
455	Kab. Keerom	810.000	1.785.010	2.595.010	4.660.595	2.881.790
456	Kab. Yahukimo		2.454.774	2.454.774	1.748.570	
457	Kab. Pegunungan Bintang		1.612.554	1.612.554	1.337.258	5.655.635

*) Perubahan Pertama

**) Perubahan Kedua

***) Perubahan Ketiga

(PMK Nomor 94 Tahun 2021)

(PMK Nomor 162 Tahun 2021)

(PMK Nomor 118 Tahun 2022)

Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021

Tanggal Berlaku: 23 November 2021

Tanggal Berlaku: 25 Juli 2022

SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Dampaknya

2. DAK FISIK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Pertanian	Kelautan dan Perikanan	Industri Kecil dan Menengah	Pariwisata	Lingkungan Hidup
						Lingkungan Hidup Tematik Penurunan Angka Kematian Ibu dan Stunting
(1)	(2)	(37)	(38)	(39)	(40)	(41)
438	Kab. Seram Bagian Timur		2.932.700			
439	Kab. Kepulauan Aru	2.964.698	2.470.880			
440	Kota Tual		2.690.000	1.700.000		
441	Kab. Maluku Barat Daya	4.580.128	3.165.000			
442	Kab. Buru Selatan	2.930.000	2.375.000			
443	Provinsi Papua	9.592.858	20.829.390			
444	Kab. Biak Numfor	5.145.000	6.422.000	2.000.194	10.466.573	7.862.550
445	Kab. Jayapura		3.905.282	7.500.730	2.408.232	5.639.600
446	Kab. Jayawijaya		2.795.000			
447	Kab. Merauke	4.560.000	1.178.657		2.213.083	8.490.450
448	Kab. Mimika		3.523.750			8.399.460
449	Kab. Nabire		999.250	5.500.535		
450	Kab. Paniai		5.492.500	1.000.005		
451	Kab. Puncak Jaya		3.743.250			
452	Kab. Kepulauan Yapen		2.504.643			
453	Kota Jayapura		3.804.896		21.343.073	9.157.450
454	Kab. Sarmi		1.925.000	7.500.730		
455	Kab. Keerom	3.820.000	2.604.250			
456	Kab. Yahukimo	3.806.250	3.361.250			
457	Kab. Pegunungan Bintang		4.287.060			

*) Perubahan Pertama

**) Perubahan Kedua

***) Perubahan Ketiga

(PMK Nomor 94 Tahun 2021)

(PMK Nomor 162 Tahun 2021)

(PMK Nomor 118 Tahun 2022)

Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021

Tanggal Berlaku: 23 November 2021

Tanggal Berlaku: 25 Juli 2022

SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Dampaknya

2. DAK FISIK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Lingkungan Hidup			TOTAL DAK PENUGASAN	TOTAL DAK FISIK
		Lingkungan Hidup Tematik Pembangunan Infrastruktur Ekonomi Berkelanjutan	Kehutanan Tematik Ketahanan Pangan	Subtotal Lingkungan Hidup		
(1)	(2)	(42)	(43)	(44)=(41)+(42)+(43)	(45)=(25)+(28)+(31)+(34)+(35)+(36)+(37)+(38)+(39)+(40)+(44)	(46)=(21)+(45)
438	Kab. Seram Bagian Timur				48.399.583	141.659.115
439	Kab. Kepulauan Aru				27.125.128	73.180.629
440	Kota Tual				45.408.464	214.875.657
441	Kab. Maluku Barat Daya				98.312.435	175.270.660
442	Kab. Buru Selatan				48.382.831	121.720.025
443	Provinsi Papua		975.343	975.343	91.759.330	374.189.437
444	Kab. Biak Numfor			7.862.550	65.123.681	207.818.774
445	Kab. Jayapura			5.639.600	34.977.724	92.719.230
446	Kab. Jayawijaya				43.214.046	172.146.964
447	Kab. Merauke			8.490.450	50.775.325	112.070.297
448	Kab. Mimika			8.399.460	116.309.924	179.912.601
449	Kab. Nabire				56.957.484	159.017.064
450	Kab. Paniai				18.853.351	163.332.427
451	Kab. Puncak Jaya				23.635.783	100.272.559
452	Kab. Kepulauan Yapen				16.092.209	86.351.152
453	Kota Jayapura			9.157.450	69.065.370	155.421.783
454	Kab. Sarmi				15.012.130	73.716.202
455	Kab. Keerom				32.714.556	86.076.752
456	Kab. Yahukimo				17.196.903	124.643.242
457	Kab. Pegunungan Bintang				18.137.500	114.399.084

*) Perubahan Pertama

**) Perubahan Kedua

***) Perubahan Ketiga

(PMK Nomor 94 Tahun 2021)

(PMK Nomor 162 Tahun 2021)

(PMK Nomor 118 Tahun 2022)

Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021

Tanggal Berlaku: 23 November 2021

Tanggal Berlaku: 25 Juli 2022

SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Dampaknya

1. DAK FISIK REGULER

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Pendidikan				
		PAUD	SD	SMP	SMA	SMK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
458	Kab. Tolikara	1.478.250	15.247.296	8.424.911		
459	Kab. Boven Digoel		3.144.749	4.504.532		
460	Kab. Mappi		14.543.986	7.612.808		
461	Kab. Asmat	808.581	14.341.076	3.517.857		
462	Kab. Waropen		5.523.028	2.935.970		
463	Kab. Supiori	273.945	7.233.537	5.321.744		
464	Kab. Mamberamo Raya		3.997.922	2.313.814		
465	Kab. Mamberamo Tengah		16.027.118	1.830.565		
466	Kab. Yalimo		15.097.657	1.359.163		
467	Kab. Lanny Jaya	2.662.811	16.846.868	12.402.690		
468	Kab. Nduga	773.628	7.532.850	4.609.465		
469	Kab. Dogiyai		16.392.821	1.090.243		
470	Kab. Puncak	2.398.148	11.407.556	5.704.509		
471	Kab. Intan Jaya		3.977.393	5.558.821		
472	Kab. Deiyai		15.334.138	2.377.840		
473	Provinsi Maluku Utara				79.516.349	85.348.345
474	Kab. Halmahera Tengah	1.019.604	9.269.222	5.527.455		
475	Kota Ternate	736.053	12.736.093	8.708.682		
476	Kab. Halmahera Barat	1.017.307	15.311.601	2.226.335		
477	Kab. Halmahera Timur	1.829.798	22.803.150	6.937.651		

*) Perubahan Pertama

**) Perubahan Kedua

***) Perubahan Ketiga

(PMK Nomor 94 Tahun 2021)

(PMK Nomor 162 Tahun 2021)

(PMK Nomor 118 Tahun 2022)

Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021

Tanggal Berlaku: 23 November 2021

Tanggal Berlaku: 25 Juli 2022

SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Dampaknya

1. DAK FISIK REGULER

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Pendidikan				Kesehatan dan KB
		SKB	SLB	Perpustakaan Daerah	Subtotal Pendidikan	Pelayanan Dasar
(1)	(2)	(8)	(9)	(10)	(11)=(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)+(9)+(10)	(12)
458	Kab. Tolikara			6.595.600	31.746.057	18.729.589
459	Kab. Boven Digoel				7.649.281	4.312.000
460	Kab. Mappi			200.000	22.356.794	32.182.445
461	Kab. Asmat				18.667.514	12.742.682
462	Kab. Waropen				8.458.998	8.574.463
463	Kab. Supiori				12.829.226	1.029.058
464	Kab. Mamberamo Raya				6.311.736	25.797.114
465	Kab. Mamberamo Tengah				17.857.683	6.396.048
466	Kab. Yalimo				16.456.820	
467	Kab. Lanny Jaya				31.912.369	11.021.656
468	Kab. Nduga			200.000	13.115.943	2.134.300
469	Kab. Dogiyai			500.000	17.983.064	20.305.733
470	Kab. Puncak				19.510.213	16.339.717
471	Kab. Intan Jaya			300.000	9.836.214	16.229.291
472	Kab. Deiyai			746.500	18.458.478	16.940.883
473	Provinsi Maluku Utara		5.543.920	500.000	170.908.614	
474	Kab. Halmahera Tengah				15.816.281	13.442.739
475	Kota Ternate	1.758.100			23.938.928	7.287.200
476	Kab. Halmahera Barat				18.555.243	8.490.649
477	Kab. Halmahera Timur				31.570.599	16.598.000

*) Perubahan Pertama

(PMK Nomor 94 Tahun 2021)

Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021

**) Perubahan Kedua

(PMK Nomor 162 Tahun 2021)

Tanggal Berlaku: 23 November 2021

***) Perubahan Ketiga

(PMK Nomor 118 Tahun 2022)

Tanggal Berlaku: 25 Juli 2022

SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Dampaknya

1. DAK FISIK REGULER

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Kesehatan dan KB				Subtotal Kesehatan dan KB
		Pelayanan Rujukan	Pelayanan Kefarmasian dan Bahan Habis Pakai	Peningkatan Kesiapan Sistem Kesehatan	Keluarga Berencana	
(1)	(2)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)=(12)+(13)+(14)+(15)+(16)
458	Kab. Tolikara	5.000.000	5.151.787		1.110.311	29.991.687
459	Kab. Boven Digoel	6.109.987	4.745.626	200.000	784.081	16.151.694
460	Kab. Mappi		5.589.972		1.443.404	39.215.821
461	Kab. Asmat	3.000.000	5.310.680		1.250.000	22.303.362
462	Kab. Waropen	4.400.000	4.407.259		1.104.860	18.486.582
463	Kab. Supiori	890.500	1.708.433		641.961	4.269.952
464	Kab. Mamberamo Raya		4.875.070		1.324.803	31.996.987
465	Kab. Mamberamo Tengah	10.282.994	3.062.363		1.108.797	20.850.202
466	Kab. Yalimo		3.885.000		1.100.000	4.985.000
467	Kab. Lanny Jaya	6.184.666	6.352.269		1.029.561	24.588.152
468	Kab. Nduga		6.432.603		1.488.826	10.055.729
469	Kab. Dogiyai	10.085.000	5.858.265		1.261.717	37.510.715
470	Kab. Puncak				1.110.311	17.450.028
471	Kab. Intan Jaya	38.892.934	4.890.627		832.733	60.845.585
472	Kab. Deiyai	13.875.376	3.567.531		1.010.000	35.393.790
473	Provinsi Maluku Utara	43.486.787				43.486.787
474	Kab. Halmahera Tengah	37.211.276	4.818.723	469.147	1.568.267	57.510.152
475	Kota Ternate		2.130.468	3.212.972	1.465.611	14.096.251
476	Kab. Halmahera Barat	2.985.000	3.456.731		1.129.893	16.062.273
477	Kab. Halmahera Timur	31.352.750	2.708.217		1.514.061	52.173.028

*) Perubahan Pertama

**) Perubahan Kedua

***) Perubahan Ketiga

(PMK Nomor 94 Tahun 2021)

(PMK Nomor 162 Tahun 2021)

(PMK Nomor 118 Tahun 2022)

Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021

Tanggal Berlaku: 23 November 2021

Tanggal Berlaku: 25 Juli 2022

SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Dampaknya

1. DAK FISIK REGULER

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Jalan	Transportasi Perdesaan	Transportasi Laut	TOTAL DAK REGULER
(1)	(2)	(18)	(19)	(20)	(21)=(11)+(17)+(18)+(19)+(20)
458	Kab. Tolikara	14.501.212	8.610.000		84.848.956
459	Kab. Boven Digoel		11.000.000		34.800.975
460	Kab. Mappi	13.388.769	9.135.000		84.096.384
461	Kab. Asmat	23.583.141	7.704.025		72.258.042
462	Kab. Waropen	7.644.661	8.190.000		42.780.241
463	Kab. Supiori	4.831.417	13.226.717		35.157.312
464	Kab. Mamberamo Raya		8.365.492		46.674.215
465	Kab. Mamberamo Tengah	10.000.001	10.200.000		58.907.886
466	Kab. Yalimo		7.600.000		29.041.820
467	Kab. Lanny Jaya	8.606.475	8.400.000		73.506.996
468	Kab. Nduga		9.612.500		32.784.172
469	Kab. Dogiyai	32.545.386	8.600.000		96.639.165
470	Kab. Puncak		8.122.309		45.082.550
471	Kab. Intan Jaya	14.335.130	9.135.000		94.151.929
472	Kab. Deiyai	9.095.179	9.660.000		72.607.447
473	Provinsi Maluku Utara	36.776.042			251.171.443
474	Kab. Halmahera Tengah	28.527.919	4.600.000	7.900.000	114.354.352
475	Kota Ternate	8.188.090		1.756.500	47.979.769
476	Kab. Halmahera Barat	7.768.518	6.400.000	2.247.575	51.033.609
477	Kab. Halmahera Timur	7.500.000	6.825.000	2.354.678	100.423.305

*) Perubahan Pertama

**) Perubahan Kedua

***) Perubahan Ketiga

(PMK Nomor 94 Tahun 2021)

(PMK Nomor 162 Tahun 2021)

(PMK Nomor 118 Tahun 2022)

Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021

Tanggal Berlaku: 23 November 2021

Tanggal Berlaku: 25 Juli 2022

SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Dampaknya

2. DAK FISIK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Kesehatan dan KB				Jalan
		Penguatan Intervensi Stunting	Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi	Keluarga Berencana	Subtotal Kesehatan dan KB	Tematik Ketahanan Pangan
(1)	(2)	(22)	(23)	(24)	(25)=(22)+(23)+(24)	(26)
458	Kab. Tolikara			300.700	300.700	
459	Kab. Boven Digoel			125.000	125.000	
460	Kab. Mappi	1.703.472	83.890.931	185.000	85.779.403	
461	Kab. Asmat		23.140.529	190.000	23.330.529	
462	Kab. Waropen	2.850.000		476.700	3.326.700	
463	Kab. Supiori	1.465.000		397.869	1.862.869	
464	Kab. Mamberamo Raya			204.000	204.000	
465	Kab. Mamberamo Tengah			286.000	286.000	
466	Kab. Yalimo	889.625			889.625	
467	Kab. Lanny Jaya			35.000	35.000	
468	Kab. Nduga			340.149	340.149	
469	Kab. Dogiyai	1.500.000		300.700	1.800.700	
470	Kab. Puncak	1.051.489		289.500	1.340.989	
471	Kab. Intan Jaya	1.050.000		63.999	1.113.999	
472	Kab. Deiyai	1.350.000		476.700	1.826.700	
473	Provinsi Maluku Utara	12.138.187			12.138.187	
474	Kab. Halmahera Tengah	65.000		415.000	480.000	
475	Kota Ternate					
476	Kab. Halmahera Barat		16.749.785		16.749.785	
477	Kab. Halmahera Timur	489.600		190.000	679.600	

*) Perubahan Pertama

**) Perubahan Kedua

***) Perubahan Ketiga

(PMK Nomor 94 Tahun 2021)

(PMK Nomor 162 Tahun 2021)

(PMK Nomor 118 Tahun 2022)

Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021

Tanggal Berlaku: 23 November 2021

Tanggal Berlaku: 25 Juli 2022

SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Dampaknya

2. DAK FISIK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Jalan		Air Minum		
		Tematik Pembangunan Infrastruktur Ekonomi Berkelanjutan	Subtotal Jalan	Tematik Penurunan Angka Kematian Ibu dan Stunting	Tematik Penanggulangan Kemiskinan	Subtotal Air Minum
(1)	(2)	(27)	(28)=(26)+(27)	(29)	(30)	(31)=(29)+(30)
458	Kab. Tolikara	10.845.895	10.845.895	5.879.320	5.691.889	11.571.209
459	Kab. Boven Digoel			1.400.158	1.419.724	2.819.882
460	Kab. Mappi	9.100.976	9.100.976		4.503.318	4.503.318
461	Kab. Asmat	12.267.282	12.267.282		4.052.181	4.052.181
462	Kab. Waropen	7.067.274	7.067.274		3.816.441	3.816.441
463	Kab. Supiori	7.091.010	7.091.010	5.313.984		5.313.984
464	Kab. Mamberamo Raya			1.403.790	3.318.391	4.722.181
465	Kab. Mamberamo Tengah				4.767.611	4.767.611
466	Kab. Yalimo	8.958.511	8.958.511	4.895.431	4.916.601	9.812.032
467	Kab. Lanny Jaya	8.629.546	8.629.546		6.318.436	6.318.436
468	Kab. Nduga				4.404.475	4.404.475
469	Kab. Dogiyai	14.853.365	14.853.365	6.249.373	4.460.082	10.709.455
470	Kab. Puncak				4.697.091	4.697.091
471	Kab. Intan Jaya	10.898.668	10.898.668	2.501.211	5.441.223	7.942.434
472	Kab. Deiyai	7.802.129	7.802.129		4.049.438	4.049.438
473	Provinsi Maluku Utara	46.761.419	46.761.419			
474	Kab. Halmahera Tengah	15.943.860	15.943.860		3.579.650	3.579.650
475	Kota Ternate				3.726.359	3.726.359
476	Kab. Halmahera Barat				3.291.439	3.291.439
477	Kab. Halmahera Timur	6.717.129	6.717.129	2.701.266	3.453.643	6.154.909

*) Perubahan Pertama

(PMK Nomor 94 Tahun 2021)

Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021

**) Perubahan Kedua

(PMK Nomor 162 Tahun 2021)

Tanggal Berlaku: 23 November 2021

***) Perubahan Ketiga

(PMK Nomor 118 Tahun 2022)

Tanggal Berlaku: 25 Juli 2022

SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Dampaknya

2. DAK FISIK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Sanitasi			Perumahan dan Permukiman	Irigasi
		Tematik Penurunan Angka Kematian Ibu dan Stunting	Tematik Penanggulangan Kemiskinan	Subtotal Sanitasi		
(1)	(2)	(32)	(33)	(34)=(32)+(33)	(35)	(36)
458	Kab. Tolikara	700.000	2.509.750	3.209.750	7.351.541	
459	Kab. Boven Digoel	2.550.506		2.550.506	6.746.823	
460	Kab. Mappi		1.829.576	1.829.576	1.175.514	5.548.966
461	Kab. Asmat		2.166.837	2.166.837	5.306.902	
462	Kab. Waropen				4.557.191	
463	Kab. Supiori	703.588		703.588	4.898.769	
464	Kab. Mamberamo Raya		865.463	865.463	1.042.731	9.983.599
465	Kab. Mamberamo Tengah		1.682.134	1.682.134	1.586.788	
466	Kab. Yalimo	4.227.614	1.691.550	5.919.164	1.363.391	
467	Kab. Lanny Jaya		1.177.030	1.177.030	6.688.636	
468	Kab. Nduga		1.994.908	1.994.908		
469	Kab. Dogiyai	2.672.943	2.057.505	4.730.448	3.025.265	
470	Kab. Puncak		1.756.638	1.756.638	6.146.923	
471	Kab. Intan Jaya	7.182.397	2.089.774	9.272.171	18.443.505	
472	Kab. Deiyai	1.871.060	1.944.582	3.815.642	12.698.547	
473	Provinsi Maluku Utara					15.420.000
474	Kab. Halmahera Tengah	15.637.625	500.000	16.137.625	3.322.068	
475	Kota Ternate		3.105.465	3.105.465	8.155.434	
476	Kab. Halmahera Barat		1.752.679	1.752.679	1.960.334	3.000.000
477	Kab. Halmahera Timur	500.000	2.082.121	2.582.121	2.452.910	10.740.000

*) Perubahan Pertama

**) Perubahan Kedua

***) Perubahan Ketiga

(PMK Nomor 94 Tahun 2021)

(PMK Nomor 162 Tahun 2021)

(PMK Nomor 118 Tahun 2022)

Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021

Tanggal Berlaku: 23 November 2021

Tanggal Berlaku: 25 Juli 2022

SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Dampaknya

2. DAK FISIK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Pertanian	Kelautan dan Perikanan	Industri Kecil dan Menengah	Pariwisata	Lingkungan Hidup
						Lingkungan Hidup Tematik Penurunan Angka Kematian Ibu dan Stunting
(1)	(2)	(37)	(38)	(39)	(40)	(41)
458	Kab. Tolikara	5.600.000	5.015.250	6.850.852		
459	Kab. Boven Digoel		1.122.250			
460	Kab. Mappi		2.233.000			
461	Kab. Asmat		1.453.100			
462	Kab. Waropen	4.777.500	1.848.400			
463	Kab. Supiori		3.700.500			
464	Kab. Mamberamo Raya		2.672.310			
465	Kab. Mamberamo Tengah					
466	Kab. Yalimo		1.601.956			
467	Kab. Lanny Jaya		2.085.500			
468	Kab. Nduga		3.850.750			
469	Kab. Dogiyai		2.793.313			
470	Kab. Puncak					
471	Kab. Intan Jaya		2.652.500	6.500.633		
472	Kab. Deiyai		2.006.750			
473	Provinsi Maluku Utara		16.067.000		6.297.157	
474	Kab. Halmahera Tengah	3.441.900	1.680.000	3.150.306		
475	Kota Ternate		1.910.000			
476	Kab. Halmahera Barat	7.345.000	2.100.000	5.000.487		
477	Kab. Halmahera Timur	2.805.000	4.295.313			

*) Perubahan Pertama

**) Perubahan Kedua

***) Perubahan Ketiga

(PMK Nomor 94 Tahun 2021)

(PMK Nomor 162 Tahun 2021)

(PMK Nomor 118 Tahun 2022)

Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021

Tanggal Berlaku: 23 November 2021

Tanggal Berlaku: 25 Juli 2022

SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Dampaknya

2. DAK FISIK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Lingkungan Hidup			TOTAL DAK PENUGASAN	TOTAL DAK FISIK
		Lingkungan Hidup Tematik Pembangunan Infrastruktur Ekonomi Berkelanjutan	Kehutanan Tematik Ketahanan Pangan	Subtotal Lingkungan Hidup		
(1)	(2)	(42)	(43)	(44)=(41)+(42)+(43)	(45)=(25)+(28)+(31)+(34)+(35)+(36)+(37)+(38)+(39)+(40)+(44)	(46)=(21)+(45)
458	Kab. Tolikara				50.745.197	135.594.153
459	Kab. Boven Digoel				13.364.461	48.165.436
460	Kab. Mappi				110.170.753	194.267.137
461	Kab. Asmat				48.576.831	120.834.873
462	Kab. Waropen				25.393.506	68.173.747
463	Kab. Supiori				23.570.720	58.728.032
464	Kab. Mamberamo Raya				19.490.284	66.164.499
465	Kab. Mamberamo Tengah				8.322.533	67.230.419
466	Kab. Yalimo				28.544.679	57.586.499
467	Kab. Lanny Jaya				24.934.148	98.441.144
468	Kab. Nduga				10.590.282	43.374.454
469	Kab. Dogiyai				37.912.546	134.551.711
470	Kab. Puncak				13.941.641	59.024.191
471	Kab. Intan Jaya				56.823.910	150.975.839
472	Kab. Deiyai				32.199.206	104.806.653
473	Provinsi Maluku Utara		9.152.500	9.152.500	105.836.263	357.007.706
474	Kab. Halmahera Tengah				47.735.409	162.089.761
475	Kota Ternate				16.897.258	64.877.027
476	Kab. Halmahera Barat				41.199.724	92.233.333
477	Kab. Halmahera Timur				36.426.982	136.850.287

*) Perubahan Pertama

**) Perubahan Kedua

***) Perubahan Ketiga

(PMK Nomor 94 Tahun 2021)

(PMK Nomor 162 Tahun 2021)

(PMK Nomor 118 Tahun 2022)

Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021

Tanggal Berlaku: 23 November 2021

Tanggal Berlaku: 25 Juli 2022

SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Dampaknya

1. DAK FISIK REGULER

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Pendidikan				
		PAUD	SD	SMP	SMA	SMK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
478	Kab. Halmahera Selatan	269.846	17.856.376	6.181.292		
479	Kab. Halmahera Utara		3.932.611	4.179.976		
480	Kab. Kepulauan Sula	1.107.762	15.254.278	8.720.210		
481	Kota Tidore Kepulauan	868.321	26.686.428	11.164.205		
482	Kab. Pulau Morotai		17.702.012	7.236.879		
483	Kab. Pulau Taliabu	1.110.441	21.973.797	24.557.492		
484	Provinsi Banten				37.515.306	52.260.481
485	Kab. Lebak	829.165	23.773.052	19.091.875		
486	Kab. Pandeglang	3.925.478	21.749.834	20.457.049		
487	Kab. Serang	383.890	19.265.391	17.505.143		
488	Kab. Tangerang		14.072.156	8.998.220		
489	Kota Cilegon	752.205	6.683.594	3.192.293		
490	Kota Tangerang			5.204.010		
491	Kota Serang	520.000	10.444.840	8.652.319		
492	Kota Tangerang Selatan	1.046.852	8.485.669	2.698.904		
493	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung				27.114.482	22.421.068
494	Kab. Bangka	283.157	3.263.770	7.603.631		
495	Kab. Belitung	537.361	8.115.131	16.510.081		
496	Kota Pangkal Pinang	648.231	3.377.048	7.631.987		
497	Kab. Bangka Selatan	281.362	7.526.658	9.080.771		

*) Perubahan Pertama

**) Perubahan Kedua

***) Perubahan Ketiga

(PMK Nomor 94 Tahun 2021)

(PMK Nomor 162 Tahun 2021)

(PMK Nomor 118 Tahun 2022)

Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021

Tanggal Berlaku: 23 November 2021

Tanggal Berlaku: 25 Juli 2022

SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Dampaknya

1. DAK FISIK REGULER

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Pendidikan				Kesehatan dan KB
		SKB	SLB	Perpustakaan Daerah	Subtotal Pendidikan	Pelayanan Dasar
(1)	(2)	(8)	(9)	(10)	(11)=(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)+(9)+(10)	(12)
478	Kab. Halmahera Selatan			499.950	24.807.464	25.762.750
479	Kab. Halmahera Utara			10.000.000	18.112.587	5.519.968
480	Kab. Kepulauan Sula				25.082.250	3.314.000
481	Kota Tidore Kepulauan				38.718.954	4.676.381
482	Kab. Pulau Morotai			500.000	25.438.891	16.825.064
483	Kab. Pulau Taliabu				47.641.730	5.166.320
484	Provinsi Banten		2.194.780		91.970.567	
485	Kab. Lebak	722.300		200.000	44.616.392	4.131.641
486	Kab. Pandeglang				46.132.361	12.339.598
487	Kab. Serang	1.249.800		470.000	38.874.224	2.511.016
488	Kab. Tangerang	910.600			23.980.976	555.000
489	Kota Cilegon				10.628.092	1.999.882
490	Kota Tangerang				5.204.010	2.126.099
491	Kota Serang			9.999.161	29.616.320	1.884.250
492	Kota Tangerang Selatan	200.000		800.000	13.231.425	2.531.651
493	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung		2.672.830	518.500	52.726.880	
494	Kab. Bangka			2.357.461	13.508.019	19.326.639
495	Kab. Belitung			500.000	25.662.573	7.174.414
496	Kota Pangkal Pinang				11.657.266	19.898.197
497	Kab. Bangka Selatan				16.888.791	15.256.261

*) Perubahan Pertama
 **) Perubahan Kedua
 ***) Perubahan Ketiga

(PMK Nomor 94 Tahun 2021)
 (PMK Nomor 162 Tahun 2021)
 (PMK Nomor 118 Tahun 2022)

Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021
 Tanggal Berlaku: 23 November 2021
 Tanggal Berlaku: 25 Juli 2022

SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Dampaknya

1. DAK FISIK REGULER

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Kesehatan dan KB				Subtotal Kesehatan dan KB
		Pelayanan Rujukan	Pelayanan Kefarmasian dan Bahan Habis Pakai	Peningkatan Kesiapan Sistem Kesehatan	Keluarga Berencana	
(1)	(2)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)=(12)+(13)+(14)+(15)+(16)
478	Kab. Halmahera Selatan	38.143.581	3.456.931		1.515.321	68.878.583
479	Kab. Halmahera Utara		5.800.318	200.000	1.569.879	13.090.165
480	Kab. Kepulauan Sula	3.000.000	5.509.353	561.771	1.443.404	13.828.528
481	Kota Tidore Kepulauan		2.401.852		789.498	7.867.731
482	Kab. Pulau Morotai	54.586.237	2.611.581		1.315.718	75.338.600
483	Kab. Pulau Taliabu	13.698.297	2.735.959		1.514.061	23.114.637
484	Provinsi Banten	6.802.907				6.802.907
485	Kab. Lebak		5.320.785		1.110.311	10.562.737
486	Kab. Pandeglang		4.969.776		1.110.311	18.419.685
487	Kab. Serang		8.498.017	6.159.955	1.487.817	18.656.805
488	Kab. Tangerang	24.903.050	6.898.205	647.037	1.475.000	34.478.292
489	Kota Cilegon	2.330.000	1.963.985		1.488.826	7.782.693
490	Kota Tangerang		7.099.900	3.205.408		12.431.407
491	Kota Serang		3.315.114	625.950	1.054.089	6.879.403
492	Kota Tangerang Selatan		3.943.848		1.048.234	7.523.733
493	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	26.607.403		1.645.000		28.252.403
494	Kab. Bangka	30.044.023	2.746.585	793.202	1.342.447	54.252.896
495	Kab. Belitung		1.914.484	187.000	1.059.840	10.335.738
496	Kota Pangkal Pinang	64.624.068	2.871.685	2.050.000	845.552	90.289.502
497	Kab. Bangka Selatan	3.753.527	2.115.871	1.867.902	730.786	23.724.347

*) Perubahan Pertama

(PMK Nomor 94 Tahun 2021)

Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021

**) Perubahan Kedua

(PMK Nomor 162 Tahun 2021)

Tanggal Berlaku: 23 November 2021

***) Perubahan Ketiga

(PMK Nomor 118 Tahun 2022)

Tanggal Berlaku: 25 Juli 2022

SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Dampaknya

1. DAK FISIK REGULER

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Jalan	Transportasi Perdesaan	Transportasi Laut	TOTAL DAK REGULER
(1)	(2)	(18)	(19)	(20)	(21)=(11)+(17)+(18)+(19)+(20)
478	Kab. Halmahera Selatan	17.188.297	9.100.000	27.436.067	147.410.411
479	Kab. Halmahera Utara	5.321.460		7.395.949	43.920.161
480	Kab. Kepulauan Sula	5.745.526	8.170.945		52.827.249
481	Kota Tidore Kepulauan	11.070.747		29.250.000	86.907.432
482	Kab. Pulau Morotai	5.659.174	8.190.000		114.626.665
483	Kab. Pulau Taliabu	5.296.141	5.100.000	7.200.000	88.352.508
484	Provinsi Banten				98.773.474
485	Kab. Lebak	30.978.254	5.800.000		91.957.383
486	Kab. Pandeglang	9.971.994	6.205.618		80.729.658
487	Kab. Serang	27.105.046	1.640.000		86.276.075
488	Kab. Tangerang	7.056.690			65.515.958
489	Kota Cilegon				18.410.785
490	Kota Tangerang	2.008.007			19.643.424
491	Kota Serang				36.495.723
492	Kota Tangerang Selatan				20.755.158
493	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	9.028.052			90.007.335
494	Kab. Bangka	9.635.498			77.396.413
495	Kab. Belitung	9.413.089		9.282.200	54.693.600
496	Kota Pangkal Pinang	8.957.792			110.904.560
497	Kab. Bangka Selatan	12.111.452	3.900.000	32.851.574	89.476.164

*) Perubahan Pertama

**) Perubahan Kedua

***) Perubahan Ketiga

(PMK Nomor 94 Tahun 2021)

(PMK Nomor 162 Tahun 2021)

(PMK Nomor 118 Tahun 2022)

Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021

Tanggal Berlaku: 23 November 2021

Tanggal Berlaku: 25 Juli 2022

SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Dampaknya

2. DAK FISIK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Kesehatan dan KB				Jalan
		Penguatan Intervensi Stunting	Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi	Keluarga Berencana	Subtotal Kesehatan dan KB	Tematik Ketahanan Pangan
(1)	(2)	(22)	(23)	(24)	(25)=(22)+(23)+(24)	(26)
478	Kab. Halmahera Selatan			295.875	295.875	
479	Kab. Halmahera Utara		61.297.255		61.297.255	
480	Kab. Kepulauan Sula	995.000	10.079.774	100.000	11.174.774	
481	Kota Tidore Kepulauan		23.932.900		23.932.900	
482	Kab. Pulau Morotai					
483	Kab. Pulau Taliabu					
484	Provinsi Banten	3.326.707			3.326.707	14.729.295
485	Kab. Lebak	650.000	7.122.793	340.000	8.112.793	12.646.818
486	Kab. Pandeglang		56.939.018	280.000	57.219.018	9.499.026
487	Kab. Serang	415.000	2.315.391	519.799	3.250.190	
488	Kab. Tangerang		4.619.731	252.000	4.871.731	
489	Kota Cilegon		6.957.589		6.957.589	
490	Kota Tangerang	3.738.000	1.722.896	310.000	5.770.896	
491	Kota Serang	1.853.920	67.999.004	296.500	70.149.424	
492	Kota Tangerang Selatan	350.000	24.415.161	250.000	25.015.161	
493	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	991.550			991.550	
494	Kab. Bangka			280.000	280.000	
495	Kab. Belitung		10.560.384		10.560.384	
496	Kota Pangkal Pinang					
497	Kab. Bangka Selatan	881.287	1.866.247	280.000	3.027.534	10.248.482

*) Perubahan Pertama

(PMK Nomor 94 Tahun 2021)

Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021

**) Perubahan Kedua

(PMK Nomor 162 Tahun 2021)

Tanggal Berlaku: 23 November 2021

***) Perubahan Ketiga

(PMK Nomor 118 Tahun 2022)

Tanggal Berlaku: 25 Juli 2022

SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Dampaknya

2. DAK FISIK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Jalan		Air Minum		
		Tematik Pembangunan Infrastruktur Ekonomi Berkelanjutan	Subtotal Jalan	Tematik Penurunan Angka Kematian Ibu dan Stunting	Tematik Penanggulangan Kemiskinan	Subtotal Air Minum
(1)	(2)	(27)	(28)=(26)+(27)	(29)	(30)	(31)=(29)+(30)
478	Kab. Halmahera Selatan	10.557.999	10.557.999	3.107.021	4.867.016	7.974.037
479	Kab. Halmahera Utara				562.500	562.500
480	Kab. Kepulauan Sula	7.790.392	7.790.392			
481	Kota Tidore Kepulauan				4.451.223	4.451.223
482	Kab. Pulau Morotai	12.011.781	12.011.781		3.521.644	3.521.644
483	Kab. Pulau Taliabu					
484	Provinsi Banten		14.729.295			
485	Kab. Lebak		12.646.818	9.578.893	9.378.940	18.957.833
486	Kab. Pandeglang		9.499.026		5.972.901	5.972.901
487	Kab. Serang			3.884.149	7.292.400	11.176.549
488	Kab. Tangerang				1.157.000	1.157.000
489	Kota Cilegon					
490	Kota Tangerang					
491	Kota Serang				1.364.521	1.364.521
492	Kota Tangerang Selatan					
493	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	32.940.051	32.940.051			
494	Kab. Bangka			5.196.396	7.219.851	12.416.247
495	Kab. Belitung	3.345.904	3.345.904		3.241.793	3.241.793
496	Kota Pangkal Pinang				5.570.040	5.570.040
497	Kab. Bangka Selatan		10.248.482	182.700	7.195.240	7.377.940

*) Perubahan Pertama

**) Perubahan Kedua

***) Perubahan Ketiga

(PMK Nomor 94 Tahun 2021)

(PMK Nomor 162 Tahun 2021)

(PMK Nomor 118 Tahun 2022)

Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021

Tanggal Berlaku: 23 November 2021

Tanggal Berlaku: 25 Juli 2022

SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Dampaknya

2. DAK FISIK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Sanitasi			Perumahan dan Permukiman	Irigasi
		Tematik Penurunan Angka Kematian Ibu dan Stunting	Tematik Penanggulangan Kemiskinan	Subtotal Sanitasi		
(1)	(2)	(32)	(33)	(34)=(32)+(33)	(35)	(36)
478	Kab. Halmahera Selatan	2.318.369	2.748.690	5.067.059	2.598.220	8.794.100
479	Kab. Halmahera Utara		1.079.841	1.079.841		10.020.000
480	Kab. Kepulauan Sula	5.091.316	1.865.097	6.956.413	1.129.604	2.012.044
481	Kota Tidore Kepulauan		1.199.823	1.199.823	1.267.301	
482	Kab. Pulau Morotai		1.880.233	1.880.233	3.094.657	5.429.821
483	Kab. Pulau Taliabu		1.772.142	1.772.142	1.765.129	
484	Provinsi Banten					
485	Kab. Lebak	8.863.717	3.699.455	12.563.172	2.786.139	3.030.180
486	Kab. Pandeglang	3.182.075	7.902.157	11.084.232	2.794.940	2.533.450
487	Kab. Serang	3.818.490		3.818.490		1.509.492
488	Kab. Tangerang		1.330.000	1.330.000	6.905.700	
489	Kota Cilegon					
490	Kota Tangerang					
491	Kota Serang		2.786.031	2.786.031	865.134	
492	Kota Tangerang Selatan					
493	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung					15.888.165
494	Kab. Bangka	480.000	1.854.229	2.334.229	771.750	5.321.972
495	Kab. Belitung		1.706.761	1.706.761		
496	Kota Pangkal Pinang		1.300.000	1.300.000	1.017.355	
497	Kab. Bangka Selatan	2.548.221	1.900.839	4.449.060	1.269.188	7.603.454

*) Perubahan Pertama

**) Perubahan Kedua

***) Perubahan Ketiga

(PMK Nomor 94 Tahun 2021)

(PMK Nomor 162 Tahun 2021)

(PMK Nomor 118 Tahun 2022)

Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021

Tanggal Berlaku: 23 November 2021

Tanggal Berlaku: 25 Juli 2022

SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Dampaknya

2. DAK FISIK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Pertanian	Kelautan dan Perikanan	Industri Kecil dan Menengah	Pariwisata	Lingkungan Hidup
						Lingkungan Hidup Tematik Penurunan Angka Kematian Ibu dan Stunting
(1)	(2)	(37)	(38)	(39)	(40)	(41)
478	Kab. Halmahera Selatan	6.325.000	1.566.000			
479	Kab. Halmahera Utara	3.125.000	1.799.000	2.000.194		
480	Kab. Kepulauan Sula	5.299.980	2.294.298			
481	Kota Tidore Kepulauan		5.040.000	3.200.311		
482	Kab. Pulau Morotai	5.654.250	3.165.000		36.357.743	
483	Kab. Pulau Taliabu		1.737.500			
484	Provinsi Banten	5.122.586	6.408.420			
485	Kab. Lebak	6.370.000	1.158.425		2.462.799	
486	Kab. Pandeglang	9.790.000	1.656.695	500.048		
487	Kab. Serang	3.875.000	1.613.670			
488	Kab. Tangerang	1.374.524				
489	Kota Cilegon					
490	Kota Tangerang					
491	Kota Serang	1.805.000	680.000			
492	Kota Tangerang Selatan					
493	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	3.000.000	9.160.000		400.000	
494	Kab. Bangka	2.415.000	521.000			
495	Kab. Belitung	2.100.000	1.590.000		3.680.220	
496	Kota Pangkal Pinang		513.000			
497	Kab. Bangka Selatan	2.745.750	1.698.750		1.489.771	

*) Perubahan Pertama

(PMK Nomor 94 Tahun 2021)

Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021

**) Perubahan Kedua

(PMK Nomor 162 Tahun 2021)

Tanggal Berlaku: 23 November 2021

***) Perubahan Ketiga

(PMK Nomor 118 Tahun 2022)

Tanggal Berlaku: 25 Juli 2022

SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Dampaknya

2. DAK FISIK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Lingkungan Hidup			TOTAL DAK PENUGASAN	TOTAL DAK FISIK
		Lingkungan Hidup Tematik Pembangunan Infrastruktur Ekonomi Berkelanjutan	Kehutanan Tematik Ketahanan Pangan	Subtotal Lingkungan Hidup		
(1)	(2)	(42)	(43)	(44)=(41)+(42)+(43)	(45)=(25)+(28)+(31)+(34)+(35)+(36)+(37)+(38)+(39)+(40)+(44)	(46)=(21)+(45)
478	Kab. Halmahera Selatan				43.178.290	190.588.701
479	Kab. Halmahera Utara				79.883.790	123.803.951
480	Kab. Kepulauan Sula				36.657.505	89.484.754
481	Kota Tidore Kepulauan				39.091.558	125.998.990
482	Kab. Pulau Morotai				71.115.129	185.741.794
483	Kab. Pulau Taliabu				5.274.771	93.627.279
484	Provinsi Banten		7.612.288	7.612.288	37.199.296	135.972.770
485	Kab. Lebak				68.088.159	160.045.542
486	Kab. Pandeglang				101.050.310	181.779.968
487	Kab. Serang				25.243.391	111.519.466
488	Kab. Tangerang				15.638.955	81.154.913
489	Kota Cilegon				6.957.589	25.368.374
490	Kota Tangerang				5.770.896	25.414.320
491	Kota Serang				77.650.110	114.145.833
492	Kota Tangerang Selatan				25.015.161	45.770.319
493	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung		559.997	559.997	62.939.763	152.947.098
494	Kab. Bangka	6.800.000		6.800.000	30.860.198	108.256.611
495	Kab. Belitung				26.225.062	80.918.662
496	Kota Pangkal Pinang				8.400.395	119.304.955
497	Kab. Bangka Selatan				39.909.929	129.386.093

*) Perubahan Pertama

**) Perubahan Kedua

***) Perubahan Ketiga

(PMK Nomor 94 Tahun 2021)

(PMK Nomor 162 Tahun 2021)

(PMK Nomor 118 Tahun 2022)

Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021

Tanggal Berlaku: 23 November 2021

Tanggal Berlaku: 25 Juli 2022

SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Dampaknya

1. DAK FISIK REGULER

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Pendidikan				
		PAUD	SD	SMP	SMA	SMK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
498	Kab. Bangka Tengah	856.002	17.455.737	6.502.500		
499	Kab. Bangka Barat	1.791.025	5.201.778	6.026.699		
500	Kab. Belitung Timur	770.550	2.120.128	2.679.821		
501	Provinsi Gorontalo				27.944.726	22.253.197
502	Kab. Boalemo	3.166.583	21.730.956	11.360.249		
503	Kab. Gorontalo	496.735	12.781.357	6.918.715		
504	Kota Gorontalo	1.978.746	13.778.155	16.342.384		
505	Kab. Pohuwato	252.496	4.237.192	3.856.182		
506	Kab. Bone Bolango		27.868.108	27.814.602		
507	Kab. Gorontalo Utara	238.384	10.172.944	1.966.862		
508	Provinsi Kepulauan Riau				55.685.079	43.500.896
509	Kab. Natuna		3.058.861	1.752.006		
510	Kab. Kepulauan Anambas	670.091	9.972.460	5.322.974		
511	Kab. Karimun	4.239.726	21.004.119	9.496.328		
512	Kota Batam	3.181.905	25.546.528	22.590.547		
513	Kota Tanjung Pinang	275.390	10.515.054	7.387.427		
514	Kab. Lingga	1.080.747	4.594.708	6.420.486		
515	Kab. Bintan		22.760.093	12.312.543		
516	Provinsi Papua Barat				75.199.607	79.529.992
517	Kab. Fak Fak		2.280.201	4.899.471		

*) Perubahan Pertama

**) Perubahan Kedua

***) Perubahan Ketiga

(PMK Nomor 94 Tahun 2021)

(PMK Nomor 162 Tahun 2021)

(PMK Nomor 118 Tahun 2022)

Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021

Tanggal Berlaku: 23 November 2021

Tanggal Berlaku: 25 Juli 2022

SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Dampaknya

1. DAK FISIK REGULER

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Pendidikan				Kesehatan dan KB
		SKB	SLB	Perpustakaan Daerah	Subtotal Pendidikan	Pelayanan Dasar
(1)	(2)	(8)	(9)	(10)	(11)=(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)+(9)+(10)	(12)
498	Kab. Bangka Tengah				24.814.239	2.960.351
499	Kab. Bangka Barat				13.019.502	1.909.868
500	Kab. Belitung Timur			408.600	5.979.099	
501	Provinsi Gorontalo		1.376.570	4.291.200	55.865.693	
502	Kab. Boalemo	1.064.589			37.322.377	19.542.394
503	Kab. Gorontalo	3.218.100		2.500.000	25.914.907	8.167.499
504	Kota Gorontalo	939.138			33.038.423	2.724.644
505	Kab. Pohuwato			4.500.000	12.845.870	21.749.503
506	Kab. Bone Bolango	200.000		300.000	56.182.710	12.279.136
507	Kab. Gorontalo Utara			10.000.000	22.378.190	9.741.286
508	Provinsi Kepulauan Riau		1.993.590	900.000	102.079.565	
509	Kab. Natuna			190.000	5.000.867	17.253.606
510	Kab. Kepulauan Anambas				15.965.525	2.000.000
511	Kab. Karimun			286.237	35.026.410	7.888.000
512	Kota Batam	3.666.800		699.800	55.685.580	12.625.100
513	Kota Tanjung Pinang	335.888			18.513.759	1.168.480
514	Kab. Lingga				12.095.941	16.230.940
515	Kab. Bintan	1.357.000		300.000	36.729.636	11.549.793
516	Provinsi Papua Barat		2.318.550	700.000	157.748.149	
517	Kab. Fak Fak			500.000	7.679.672	425.900

*) Perubahan Pertama

**) Perubahan Kedua

***) Perubahan Ketiga

(PMK Nomor 94 Tahun 2021)

(PMK Nomor 162 Tahun 2021)

(PMK Nomor 118 Tahun 2022)

Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021

Tanggal Berlaku: 23 November 2021

Tanggal Berlaku: 25 Juli 2022

SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Dampaknya

1. DAK FISIK REGULER

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Kesehatan dan KB				
		Pelayanan Rujukan	Pelayanan Kefarmasian dan Bahan Habis Pakai	Peningkatan Kesiapan Sistem Kesehatan	Keluarga Berencana	Subtotal Kesehatan dan KB
(1)	(2)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)=(12)+(13)+(14)+(15)+(16)
498	Kab. Bangka Tengah	10.940.700	2.358.546		368.421	16.628.018
499	Kab. Bangka Barat	15.349.057	2.460.097	390.000	980.130	21.089.152
500	Kab. Belitung Timur	3.000.000	1.869.219	972.088	538.299	6.379.606
501	Provinsi Gorontalo	7.115.000		3.512.809		10.627.809
502	Kab. Boalemo	10.238.746	3.177.690	390.000	1.169.460	34.518.290
503	Kab. Gorontalo	14.113.686	4.397.329	1.435.797	1.059.842	29.174.153
504	Kota Gorontalo	11.283.757	547.147	390.000	1.153.714	16.099.262
505	Kab. Pohuwato	3.000.000	4.278.056		1.214.882	30.242.441
506	Kab. Bone Bolango	6.203.849	3.375.453	390.000	1.352.258	23.600.696
507	Kab. Gorontalo Utara	5.120.628	2.315.511		1.095.574	18.272.999
508	Provinsi Kepulauan Riau	3.204.846				3.204.846
509	Kab. Natuna	3.000.000	3.673.016	396.998	1.414.435	25.738.055
510	Kab. Kepulauan Anambas	5.083.992	3.316.831	390.000	1.448.451	12.239.274
511	Kab. Karimun		2.369.227	351.418	959.455	11.568.100
512	Kota Batam	5.900.000	5.537.177	192.000	962.220	25.216.497
513	Kota Tanjung Pinang	6.000.000	2.500.798	196.398	1.270.000	11.135.676
514	Kab. Lingga	6.650.000	1.441.890		1.289.677	25.612.507
515	Kab. Bintan	8.190.468	3.057.147	390.000	1.322.279	24.509.687
516	Provinsi Papua Barat					
517	Kab. Fak Fak		2.079.957	390.000	1.401.818	4.297.675

*) Perubahan Pertama

(PMK Nomor 94 Tahun 2021)

Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021

**) Perubahan Kedua

(PMK Nomor 162 Tahun 2021)

Tanggal Berlaku: 23 November 2021

***) Perubahan Ketiga

(PMK Nomor 118 Tahun 2022)

Tanggal Berlaku: 25 Juli 2022

SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Dampaknya

1. DAK FISIK REGULER

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Jalan	Transportasi Perdesaan	Transportasi Laut	TOTAL DAK REGULER
(1)	(2)	(18)	(19)	(20)	(21)=(11)+(17)+(18)+(19)+(20)
498	Kab. Bangka Tengah	7.799.050			49.241.307
499	Kab. Bangka Barat	31.704.640			65.813.294
500	Kab. Belitung Timur	9.403.859			21.762.564
501	Provinsi Gorontalo	9.093.045			75.586.547
502	Kab. Boalemo	6.959.400	6.000.000		84.800.067
503	Kab. Gorontalo	17.653.267	4.700.000		77.442.327
504	Kota Gorontalo	5.041.618			54.179.303
505	Kab. Pohuwato	8.012.445	6.300.000		57.400.756
506	Kab. Bone Bolango	9.458.902			89.242.308
507	Kab. Gorontalo Utara	6.774.024	7.976.399		55.401.612
508	Provinsi Kepulauan Riau	12.860.940		19.597.008	137.742.359
509	Kab. Natuna	9.145.732	5.900.000		45.784.654
510	Kab. Kepulauan Anambas	9.867.592	5.600.000		43.672.391
511	Kab. Karimun	13.378.936	6.322.755		66.296.201
512	Kota Batam	7.400.087	972.732		89.274.896
513	Kota Tanjung Pinang	8.021.657			37.671.092
514	Kab. Lingga	15.375.326		6.500.000	59.583.774
515	Kab. Bintan	9.466.698	4.800.000	6.000.000	81.506.021
516	Provinsi Papua Barat	12.432.600			170.180.749
517	Kab. Fak Fak	30.499.163	6.400.000		48.876.510

*) Perubahan Pertama

**) Perubahan Kedua

***) Perubahan Ketiga

(PMK Nomor 94 Tahun 2021)

(PMK Nomor 162 Tahun 2021)

(PMK Nomor 118 Tahun 2022)

Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021

Tanggal Berlaku: 23 November 2021

Tanggal Berlaku: 25 Juli 2022

SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Dampaknya

2. DAK FISIK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Kesehatan dan KB				Jalan
		Penguatan Intervensi Stunting	Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi	Keluarga Berencana	Subtotal Kesehatan dan KB	Tematik Ketahanan Pangan
(1)	(2)	(22)	(23)	(24)	(25)=(22)+(23)+(24)	(26)
498	Kab. Bangka Tengah					
499	Kab. Bangka Barat			200.000	200.000	
500	Kab. Belitung Timur		23.700.960		23.700.960	
501	Provinsi Gorontalo	633.189			633.189	
502	Kab. Boalemo		13.187.444	315.000	13.502.444	
503	Kab. Gorontalo	947.000		302.525	1.249.525	
504	Kota Gorontalo					
505	Kab. Pohuwato		19.579.000	305.000	19.884.000	
506	Kab. Bone Bolango		18.664.248	305.000	18.969.248	
507	Kab. Gorontalo Utara					
508	Provinsi Kepulauan Riau	1.321.518			1.321.518	
509	Kab. Natuna			62.500	62.500	
510	Kab. Kepulauan Anambas					
511	Kab. Karimun	300.000	10.387.853	37.999	10.725.852	
512	Kota Batam	735.512	13.251.621		13.987.133	
513	Kota Tanjung Pinang					
514	Kab. Lingga	650.000		40.000	690.000	
515	Kab. Bintan					
516	Provinsi Papua Barat	4.797.246			4.797.246	
517	Kab. Fak Fak		5.976.613	516.150	6.492.763	

*) Perubahan Pertama

**) Perubahan Kedua

***) Perubahan Ketiga

(PMK Nomor 94 Tahun 2021)

(PMK Nomor 162 Tahun 2021)

(PMK Nomor 118 Tahun 2022)

Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021

Tanggal Berlaku: 23 November 2021

Tanggal Berlaku: 25 Juli 2022

SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Dampaknya

2. DAK FISIK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Jalan		Air Minum		
		Tematik Pembangunan Infrastruktur Ekonomi Berkelanjutan	Subtotal Jalan	Tematik Penurunan Angka Kematian Ibu dan Stunting	Tematik Penanggulangan Kemiskinan	Subtotal Air Minum
(1)	(2)	(27)	(28)=(26)+(27)	(29)	(30)	(31)=(29)+(30)
498	Kab. Bangka Tengah				4.749.151	4.749.151
499	Kab. Bangka Barat			2.171.589		2.171.589
500	Kab. Belitung Timur	3.314.860	3.314.860		2.602.550	2.602.550
501	Provinsi Gorontalo	17.233.860	17.233.860			
502	Kab. Boalemo	6.447.262	6.447.262	8.522.056	4.988.624	13.510.680
503	Kab. Gorontalo	11.285.304	11.285.304	9.298.918	200.000	9.498.918
504	Kota Gorontalo				3.365.722	3.365.722
505	Kab. Pohuwato			2.499.711	5.196.080	7.695.791
506	Kab. Bone Bolango			6.484.250	3.870.701	10.354.951
507	Kab. Gorontalo Utara	7.907.537	7.907.537		4.231.051	4.231.051
508	Provinsi Kepulauan Riau	45.601.800	45.601.800			
509	Kab. Natuna	3.508.183	3.508.183	276.000	5.704.100	5.980.100
510	Kab. Kepulauan Anambas	3.759.425	3.759.425		4.800.307	4.800.307
511	Kab. Karimun	4.479.879	4.479.879	1.722.124	3.730.965	5.453.089
512	Kota Batam				6.735.890	6.735.890
513	Kota Tanjung Pinang				1.200.000	1.200.000
514	Kab. Lingga			12.561.439	4.031.051	16.592.490
515	Kab. Bintan	3.398.889	3.398.889		3.773.674	3.773.674
516	Provinsi Papua Barat	53.910.741	53.910.741			
517	Kab. Fak Fak	19.071.786	19.071.786		3.676.816	3.676.816

*) Perubahan Pertama

(PMK Nomor 94 Tahun 2021)

Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021

**) Perubahan Kedua

(PMK Nomor 162 Tahun 2021)

Tanggal Berlaku: 23 November 2021

***) Perubahan Ketiga

(PMK Nomor 118 Tahun 2022)

Tanggal Berlaku: 25 Juli 2022

SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Dampaknya

2. DAK FISIK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Sanitasi			Perumahan dan Permukiman	Irigasi
		Tematik Penurunan Angka Kematian Ibu dan Stunting	Tematik Penanggulangan Kemiskinan	Subtotal Sanitasi		
(1)	(2)	(32)	(33)	(34)=(32)+(33)	(35)	(36)
498	Kab. Bangka Tengah		1.674.383	1.674.383		1.120.000
499	Kab. Bangka Barat	4.133.413	600.000	4.733.413	2.347.922	6.620.937
500	Kab. Belitung Timur		1.811.652	1.811.652	1.427.860	2.136.390
501	Provinsi Gorontalo					15.073.254
502	Kab. Boalemo	7.636.980	2.300.677	9.937.657	873.172	7.390.549
503	Kab. Gorontalo	3.636.657		3.636.657	2.005.613	15.831.800
504	Kota Gorontalo		1.560.005	1.560.005	2.303.148	
505	Kab. Pohuwato	5.909.568	2.162.328	8.071.896	2.219.475	4.850.000
506	Kab. Bone Bolango	6.156.394	1.937.770	8.094.164		7.489.962
507	Kab. Gorontalo Utara		1.904.606	1.904.606	2.463.198	12.925.125
508	Provinsi Kepulauan Riau					
509	Kab. Natuna	7.313.796		7.313.796	1.070.703	2.573.587
510	Kab. Kepulauan Anambas		1.916.620	1.916.620		4.880.883
511	Kab. Karimun	2.990.249	1.738.202	4.728.451		
512	Kota Batam		2.547.482	2.547.482	1.625.320	
513	Kota Tanjung Pinang		1.854.753	1.854.753	973.909	
514	Kab. Lingga	14.476.646	1.886.088	16.362.734		
515	Kab. Bintan				1.003.858	
516	Provinsi Papua Barat					
517	Kab. Fak Fak		1.044.007	1.044.007	6.493.928	21.259.949

*) Perubahan Pertama

**) Perubahan Kedua

***) Perubahan Ketiga

(PMK Nomor 94 Tahun 2021)

(PMK Nomor 162 Tahun 2021)

(PMK Nomor 118 Tahun 2022)

Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021

Tanggal Berlaku: 23 November 2021

Tanggal Berlaku: 25 Juli 2022

SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Dampaknya

2. DAK FISIK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Pertanian	Kelautan dan Perikanan	Industri Kecil dan Menengah	Pariwisata	Lingkungan Hidup
						Lingkungan Hidup Tematik Penurunan Angka Kematian Ibu dan Stunting
(1)	(2)	(37)	(38)	(39)	(40)	(41)
498	Kab. Bangka Tengah	1.270.000	2.627.000	3.156.007	2.405.999	
499	Kab. Bangka Barat		1.265.000			
500	Kab. Belitung Timur	2.640.000	970.856			
501	Provinsi Gorontalo	3.571.800	11.950.890			
502	Kab. Boalemo		2.028.750			
503	Kab. Gorontalo	2.772.525	1.866.600	16.401.597		1.300.000
504	Kota Gorontalo		1.104.606	850.082		1.375.643
505	Kab. Pohuwato		2.215.400	1.078.305		
506	Kab. Bone Bolango		1.295.000	2.640.257		2.600.000
507	Kab. Gorontalo Utara	2.480.000	1.605.700			1.132.175
508	Provinsi Kepulauan Riau		9.992.040			
509	Kab. Natuna	700.000	1.355.000	7.589.739	2.983.824	
510	Kab. Kepulauan Anambas	1.245.000	2.713.000	10.861.063	2.387.727	
511	Kab. Karimun	1.129.243	2.644.794		2.447.473	
512	Kota Batam		960.269			
513	Kota Tanjung Pinang		616.000		10.716.020	
514	Kab. Lingga	1.146.500	1.155.000	1.201.117		
515	Kab. Bintan	1.627.087	2.369.000	5.000.487		
516	Provinsi Papua Barat	9.900.000	22.023.853		15.871.951	
517	Kab. Fak Fak		3.417.500			

*) Perubahan Pertama

**) Perubahan Kedua

***) Perubahan Ketiga

(PMK Nomor 94 Tahun 2021)

(PMK Nomor 162 Tahun 2021)

(PMK Nomor 118 Tahun 2022)

Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021

Tanggal Berlaku: 23 November 2021

Tanggal Berlaku: 25 Juli 2022

SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Dampaknya

2. DAK FISIK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Lingkungan Hidup			TOTAL DAK PENUGASAN	TOTAL DAK FISIK
		Lingkungan Hidup Tematik Pembangunan Infrastruktur Ekonomi Berkelanjutan	Kehutanan Tematik Ketahanan Pangan	Subtotal Lingkungan Hidup		
(1)	(2)	(42)	(43)	(44)=(41)+(42)+(43)	(45)=(25)+(28)+(31)+(34)+(35)+(36)+(37)+(38)+(39)+(40)+(44)	(46)=(21)+(45)
498	Kab. Bangka Tengah				17.002.540	66.243.847
499	Kab. Bangka Barat				17.338.861	83.152.155
500	Kab. Belitung Timur				38.605.128	60.367.692
501	Provinsi Gorontalo		9.929.233	9.929.233	58.392.226	133.978.773
502	Kab. Boalemo				53.690.514	138.490.581
503	Kab. Gorontalo			1.300.000	65.848.539	143.290.866
504	Kota Gorontalo			1.375.643	10.559.206	64.738.509
505	Kab. Pohuwato				46.014.867	103.415.623
506	Kab. Bone Bolango			2.600.000	51.443.582	140.685.890
507	Kab. Gorontalo Utara			1.132.175	34.649.392	90.051.004
508	Provinsi Kepulauan Riau				56.915.358	194.657.717
509	Kab. Natuna				33.137.432	78.922.086
510	Kab. Kepulauan Anambas				32.564.025	76.236.416
511	Kab. Karimun				31.608.781	97.904.982
512	Kota Batam				25.856.094	115.130.990
513	Kota Tanjung Pinang				15.360.682	53.031.774
514	Kab. Lingga				37.147.841	96.731.615
515	Kab. Bintan				17.172.995	98.679.016
516	Provinsi Papua Barat		1.200.000	1.200.000	107.703.791	277.884.540
517	Kab. Fak Fak				61.456.749	110.333.259

*) Perubahan Pertama

**) Perubahan Kedua

***) Perubahan Ketiga

(PMK Nomor 94 Tahun 2021)

(PMK Nomor 162 Tahun 2021)

(PMK Nomor 118 Tahun 2022)

Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021

Tanggal Berlaku: 23 November 2021

Tanggal Berlaku: 25 Juli 2022

SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Dampaknya

1. DAK FISIK REGULER

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Pendidikan				
		PAUD	SD	SMP	SMA	SMK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
518	Kab. Manokwari	857.303	16.296.209	7.098.151		
519	Kab. Sorong	229.942	4.875.968	2.271.869		
520	Kota Sorong		3.743.416	2.611.519		
521	Kab. Raja Ampat	777.917	10.633.170	6.055.634		
522	Kab. Sorong Selatan	624.353	8.352.683	2.672.207		
523	Kab. Teluk Bintuni	997.206	8.067.333	2.146.999		
524	Kab. Teluk Wondama	1.054.637	8.792.283	2.891.151		
525	Kab. Kaimana		3.569.579	1.985.217		
526	Kab. Maybrat		4.538.789	5.951.639		
527	Kab. Tambrau		12.022.170	3.485.160		
528	Kab. Manokwari Selatan		4.420.897	3.529.309		
529	Kab. Pegunungan Arfak		13.617.709	11.311.348		
530	Provinsi Sulawesi Barat				66.090.660	79.051.235
531	Kab. Majene	245.386	5.325.048	1.206.135		
532	Kab. Mamuju	1.070.606	22.722.290	15.446.818		
533	Kab. Polewali Mandar	440.000	21.829.279	10.796.022		
534	Kab. Mamasa	2.136.685	21.101.738	14.072.602		
535	Kab. Pasangkayu	2.464.497	23.134.761	11.433.114		
536	Kab. Mamuju Tengah	2.523.397	17.806.942	1.643.048		
537	Provinsi Kalimantan Utara				30.634.752	52.386.688

*) Perubahan Pertama

**) Perubahan Kedua

***) Perubahan Ketiga

(PMK Nomor 94 Tahun 2021)

(PMK Nomor 162 Tahun 2021)

(PMK Nomor 118 Tahun 2022)

Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021

Tanggal Berlaku: 23 November 2021

Tanggal Berlaku: 25 Juli 2022

SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Dampaknya

1. DAK FISIK REGULER

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Pendidikan				Kesehatan dan KB
		SKB	SLB	Perpustakaan Daerah	Subtotal Pendidikan	Pelayanan Dasar
(1)	(2)	(8)	(9)	(10)	(11)=(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)+(9)+(10)	(12)
518	Kab. Manokwari	1.766.050			26.017.713	8.288.927
519	Kab. Sorong			10.064.760	17.442.539	25.287.554
520	Kota Sorong				6.354.935	5.700.000
521	Kab. Raja Ampat			4.800.000	22.266.721	22.431.780
522	Kab. Sorong Selatan				11.649.243	17.537.737
523	Kab. Teluk Bintuni			300.000	11.511.538	18.381.287
524	Kab. Teluk Wondama			300.000	13.038.071	20.755.044
525	Kab. Kaimana			540.300	6.095.096	3.992.000
526	Kab. Maybrat				10.490.428	15.331.804
527	Kab. Tambrauw				15.507.330	16.432.946
528	Kab. Manokwari Selatan				7.950.206	2.459.000
529	Kab. Pegunungan Arfak				24.929.057	18.377.273
530	Provinsi Sulawesi Barat		4.265.313	15.000.000	164.407.208	
531	Kab. Majene				6.776.569	9.941.054
532	Kab. Mamuju	371.682		200.000	39.811.396	12.717.096
533	Kab. Polewali Mandar				33.065.301	10.340.641
534	Kab. Mamasa	810.200			38.121.225	14.872.720
535	Kab. Pasangkayu			300.000	37.332.372	7.293.557
536	Kab. Mamuju Tengah				21.973.387	13.511.385
537	Provinsi Kalimantan Utara		2.496.555		85.517.995	

*) Perubahan Pertama
 **) Perubahan Kedua
 ***) Perubahan Ketiga

(PMK Nomor 94 Tahun 2021)
 (PMK Nomor 162 Tahun 2021)
 (PMK Nomor 118 Tahun 2022)

Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021
 Tanggal Berlaku: 23 November 2021
 Tanggal Berlaku: 25 Juli 2022

SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Dampaknya

1. DAK FISIK REGULER

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Kesehatan dan KB				Subtotal Kesehatan dan KB
		Pelayanan Rujukan	Pelayanan Kefarmasian dan Bahan Habis Pakai	Peningkatan Kesiapan Sistem Kesehatan	Keluarga Berencana	
(1)	(2)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)=(12)+(13)+(14)+(15)+(16)
518	Kab. Manokwari	3.000.000	3.555.973		201.874	15.046.774
519	Kab. Sorong		5.313.707		1.488.826	32.090.087
520	Kota Sorong	9.360.546	3.401.808	390.000	761.875	19.614.229
521	Kab. Raja Ampat	3.000.000	3.783.416		1.412.114	30.627.310
522	Kab. Sorong Selatan	10.014.361	5.292.247		1.312.186	34.156.531
523	Kab. Teluk Bintuni		4.217.948			22.599.235
524	Kab. Teluk Wondama	5.609.185	3.608.221		1.261.500	31.233.950
525	Kab. Kaimana	5.891.575	1.791.332	390.000	1.187.500	13.252.407
526	Kab. Maybrat		3.029.519		1.110.311	19.471.634
527	Kab. Tambrauw		1.712.288		1.365.137	19.510.371
528	Kab. Manokwari Selatan		5.410.863		1.266.126	9.135.989
529	Kab. Pegunungan Arfak		5.756.966		778.516	24.912.755
530	Provinsi Sulawesi Barat	12.949.539		4.768.446		17.717.985
531	Kab. Majene	6.856.727	3.088.609	199.998	1.433.311	21.519.699
532	Kab. Mamuju	6.000.000	4.157.827		1.564.731	24.439.654
533	Kab. Polewali Mandar	4.302.416	7.791.670	2.926.817	1.488.826	26.850.370
534	Kab. Mamasa	4.150.140	2.095.897		1.488.826	22.607.583
535	Kab. Pasangkayu	19.792.797	2.031.753		1.513.556	30.631.663
536	Kab. Mamuju Tengah	8.337.869	3.873.836		1.337.420	27.060.510
537	Provinsi Kalimantan Utara	6.442.500		4.157.000		10.599.500

*) Perubahan Pertama

(PMK Nomor 94 Tahun 2021)

Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021

**) Perubahan Kedua

(PMK Nomor 162 Tahun 2021)

Tanggal Berlaku: 23 November 2021

***) Perubahan Ketiga

(PMK Nomor 118 Tahun 2022)

Tanggal Berlaku: 25 Juli 2022

SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Dampaknya

1. DAK FISIK REGULER

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Jalan	Transportasi Perdesaan	Transportasi Laut	TOTAL DAK REGULER
(1)	(2)	(18)	(19)	(20)	(21)=(11)+(17)+(18)+(19)+(20)
518	Kab. Manokwari	13.221.883	6.689.156		60.975.526
519	Kab. Sorong	14.049.266	9.700.000		73.281.892
520	Kota Sorong	8.739.558		2.150.000	36.858.722
521	Kab. Raja Ampat	6.889.519	9.240.000	7.500.000	76.523.550
522	Kab. Sorong Selatan	29.712.171	8.170.945		83.688.890
523	Kab. Teluk Bintuni	10.599.945	7.400.000		52.110.718
524	Kab. Teluk Wondama	5.887.024	10.710.000		60.869.045
525	Kab. Kaimana	8.234.328	5.700.000		33.281.831
526	Kab. Maybrat	10.014.011	8.190.000		48.166.073
527	Kab. Tambrauw	12.418.632	9.000.000		56.436.333
528	Kab. Manokwari Selatan	8.375.594	9.135.000		34.596.789
529	Kab. Pegunungan Arfak	14.846.268	8.268.218		72.956.298
530	Provinsi Sulawesi Barat	5.280.854			187.406.047
531	Kab. Majene	8.616.655			36.912.923
532	Kab. Mamuju	9.182.656			73.433.706
533	Kab. Polewali Mandar	8.161.160	6.300.000		74.376.831
534	Kab. Mamasa				60.728.808
535	Kab. Pasangkayu	37.340.000	4.830.000		110.134.035
536	Kab. Mamuju Tengah	8.053.050	7.500.000		64.586.947
537	Provinsi Kalimantan Utara	10.337.904			106.455.399

*) Perubahan Pertama

**) Perubahan Kedua

***) Perubahan Ketiga

(PMK Nomor 94 Tahun 2021)

(PMK Nomor 162 Tahun 2021)

(PMK Nomor 118 Tahun 2022)

Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021

Tanggal Berlaku: 23 November 2021

Tanggal Berlaku: 25 Juli 2022

SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Dampaknya

2. DAK FISIK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Kesehatan dan KB				Jalan
		Penguatan Intervensi Stunting	Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi	Keluarga Berencana	Subtotal Kesehatan dan KB	Tematik Ketahanan Pangan
(1)	(2)	(22)	(23)	(24)	(25)=(22)+(23)+(24)	(26)
518	Kab. Manokwari	1.180.000		276.150	1.456.150	
519	Kab. Sorong	400.000	39.487.879	516.150	40.404.029	
520	Kota Sorong	1.000.000		296.000	1.296.000	
521	Kab. Raja Ampat	650.000		36.200	686.200	
522	Kab. Sorong Selatan	1.720.000		391.874	2.111.874	
523	Kab. Teluk Bintuni	2.631.264	6.684.422	439.999	9.755.685	
524	Kab. Teluk Wondama	481.800		391.875	873.675	
525	Kab. Kaimana	849.725		550.874	1.400.599	
526	Kab. Maybrat			286.000	286.000	
527	Kab. Tambrauw	400.000		190.000	590.000	
528	Kab. Manokwari Selatan			172.000	172.000	
529	Kab. Pegunungan Arfak			352.500	352.500	
530	Provinsi Sulawesi Barat	4.006.083			4.006.083	
531	Kab. Majene	558.200	6.569.422	315.000	7.442.622	
532	Kab. Mamuju	650.000	7.313.194	315.000	8.278.194	
533	Kab. Polewali Mandar	500.000	24.906.455	500.800	25.907.255	
534	Kab. Mamasa			365.000	365.000	
535	Kab. Pasangkayu					
536	Kab. Mamuju Tengah	464.750		315.000	779.750	
537	Provinsi Kalimantan Utara	1.231.830			1.231.830	

*) Perubahan Pertama

(PMK Nomor 94 Tahun 2021)

Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021

**) Perubahan Kedua

(PMK Nomor 162 Tahun 2021)

Tanggal Berlaku: 23 November 2021

***) Perubahan Ketiga

(PMK Nomor 118 Tahun 2022)

Tanggal Berlaku: 25 Juli 2022

SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Dampaknya

2. DAK FISIK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Jalan		Air Minum		
		Tematik Pembangunan Infrastruktur Ekonomi Berkelanjutan	Subtotal Jalan	Tematik Penurunan Angka Kematian Ibu dan Stunting	Tematik Penanggulangan Kemiskinan	Subtotal Air Minum
(1)	(2)	(27)	(28)=(26)+(27)	(29)	(30)	(31)=(29)+(30)
518	Kab. Manokwari			1.000.000	4.208.463	5.208.463
519	Kab. Sorong	12.407.054	12.407.054		4.378.418	4.378.418
520	Kota Sorong				5.038.986	5.038.986
521	Kab. Raja Ampat	9.041.241	9.041.241			
522	Kab. Sorong Selatan					
523	Kab. Teluk Bintuni	15.117.328	15.117.328			
524	Kab. Teluk Wondama				3.746.412	3.746.412
525	Kab. Kaimana				4.488.697	4.488.697
526	Kab. Maybrat	7.514.992	7.514.992		3.627.388	3.627.388
527	Kab. Tambrauw	9.485.274	9.485.274		3.459.426	3.459.426
528	Kab. Manokwari Selatan	6.497.478	6.497.478			
529	Kab. Pegunungan Arfak	8.624.935	8.624.935	1.784.105	4.057.798	5.841.903
530	Provinsi Sulawesi Barat	12.704.337	12.704.337			
531	Kab. Majene			3.499.595	5.364.653	8.864.248
532	Kab. Mamuju			1.997.656	3.582.851	5.580.507
533	Kab. Polewali Mandar			9.102.570	4.676.986	13.779.556
534	Kab. Mamasa			3.936.284	4.354.465	8.290.749
535	Kab. Pasangkayu	16.117.356	16.117.356		4.519.584	4.519.584
536	Kab. Mamuju Tengah	6.158.896	6.158.896	7.707.492	4.495.832	12.203.324
537	Provinsi Kalimantan Utara	21.547.161	21.547.161			

*) Perubahan Pertama

**) Perubahan Kedua

***) Perubahan Ketiga

(PMK Nomor 94 Tahun 2021)

(PMK Nomor 162 Tahun 2021)

(PMK Nomor 118 Tahun 2022)

Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021

Tanggal Berlaku: 23 November 2021

Tanggal Berlaku: 25 Juli 2022

SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Dampaknya

2. DAK FISIK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Sanitasi			Perumahan dan Permukiman	Irigasi
		Tematik Penurunan Angka Kematian Ibu dan Stunting	Tematik Penanggulangan Kemiskinan	Subtotal Sanitasi		
(1)	(2)	(32)	(33)	(34)=(32)+(33)	(35)	(36)
518	Kab. Manokwari	2.863.867	1.910.067	4.773.934	5.196.593	
519	Kab. Sorong		1.523.781	1.523.781		5.156.607
520	Kota Sorong	525.000	1.816.326	2.341.326	2.895.367	
521	Kab. Raja Ampat		1.600.294	1.600.294	5.422.399	3.653.676
522	Kab. Sorong Selatan		1.069.710	1.069.710		
523	Kab. Teluk Bintuni		1.430.571	1.430.571	955.232	
524	Kab. Teluk Wondama		1.671.480	1.671.480	4.418.055	9.206.785
525	Kab. Kaimana		1.487.910	1.487.910	3.822.216	
526	Kab. Maybrat				1.041.800	
527	Kab. Tambrau		1.500.000	1.500.000	3.500.000	
528	Kab. Manokwari Selatan		783.425	783.425	4.847.460	
529	Kab. Pegunungan Arfak	400.000	881.780	1.281.780		
530	Provinsi Sulawesi Barat					4.867.580
531	Kab. Majene	3.818.490	2.047.411	5.865.901	1.768.779	3.450.000
532	Kab. Mamuju		2.480.773	2.480.773		2.385.600
533	Kab. Polewali Mandar	2.110.764	2.626.743	4.737.507	1.812.596	2.693.156
534	Kab. Mamasa	6.798.418	2.342.153	9.140.571		5.343.000
535	Kab. Pasangkayu		1.910.459	1.910.459		3.312.863
536	Kab. Mamuju Tengah	9.863.798	1.232.650	11.096.448	2.110.826	8.422.345
537	Provinsi Kalimantan Utara					9.411.339

*) Perubahan Pertama

**) Perubahan Kedua

***) Perubahan Ketiga

(PMK Nomor 94 Tahun 2021)

(PMK Nomor 162 Tahun 2021)

(PMK Nomor 118 Tahun 2022)

Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021

Tanggal Berlaku: 23 November 2021

Tanggal Berlaku: 25 Juli 2022

SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Dampaknya

2. DAK FISIK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Pertanian	Kelautan dan Perikanan	Industri Kecil dan Menengah	Pariwisata	Lingkungan Hidup
						Lingkungan Hidup Tematik Penurunan Angka Kematian Ibu dan Stunting
(1)	(2)	(37)	(38)	(39)	(40)	(41)
518	Kab. Manokwari	3.350.000	2.916.000	4.730.460		
519	Kab. Sorong		2.505.500	1.500.146	7.715.522	
520	Kota Sorong		4.040.000		16.612.216	
521	Kab. Raja Ampat		975.000			
522	Kab. Sorong Selatan		1.820.000	1.000.097		
523	Kab. Teluk Bintuni		4.000.000	900.087		
524	Kab. Teluk Wondama	1.710.000	2.257.500		4.713.101	
525	Kab. Kaimana		2.869.700			
526	Kab. Maybrat	2.299.500	4.151.563			
527	Kab. Tambrauw		4.365.000			
528	Kab. Manokwari Selatan		2.553.500			
529	Kab. Pegunungan Arfak		1.984.744			
530	Provinsi Sulawesi Barat	4.458.887	9.428.069			
531	Kab. Majene	5.024.250	1.285.800			
532	Kab. Mamuju		1.405.400			
533	Kab. Polewali Mandar	6.080.733	1.316.550	3.000.292		6.942.550
534	Kab. Mamasa	4.750.000	1.222.200			
535	Kab. Pasangkayu	1.080.000	1.950.943	1.947.610		
536	Kab. Mamuju Tengah		1.220.000	600.038		
537	Provinsi Kalimantan Utara		10.041.900			

*) Perubahan Pertama

(PMK Nomor 94 Tahun 2021)

Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021

**) Perubahan Kedua

(PMK Nomor 162 Tahun 2021)

Tanggal Berlaku: 23 November 2021

***) Perubahan Ketiga

(PMK Nomor 118 Tahun 2022)

Tanggal Berlaku: 25 Juli 2022

SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Dampaknya

2. DAK FISIK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Lingkungan Hidup			TOTAL DAK PENUGASAN	TOTAL DAK FISIK
		Lingkungan Hidup Tematik Pembangunan Infrastruktur Ekonomi Berkelanjutan	Kehutanan Tematik Ketahanan Pangan	Subtotal Lingkungan Hidup		
(1)	(2)	(42)	(43)	(44)=(41)+(42)+(43)	(45)=(25)+(28)+(31)+(34)+(35)+(36)+(37)+(38)+(39)+(40)+(44)	(46)=(21)+(45)
518	Kab. Manokwari				27.631.600	88.607.126
519	Kab. Sorong				75.591.057	148.872.949
520	Kota Sorong				32.223.895	69.082.617
521	Kab. Raja Ampat				21.378.810	97.902.360
522	Kab. Sorong Selatan				6.001.681	89.690.571
523	Kab. Teluk Bintuni				32.158.903	84.269.621
524	Kab. Teluk Wondama				28.597.008	89.466.053
525	Kab. Kaimana				14.069.122	47.350.953
526	Kab. Maybrat				18.921.243	67.087.316
527	Kab. Tambrauw				22.899.700	79.336.033
528	Kab. Manokwari Selatan				14.853.863	49.450.652
529	Kab. Pegunungan Arfak				18.085.862	91.042.160
530	Provinsi Sulawesi Barat		4.652.555	4.652.555	40.117.511	227.523.558
531	Kab. Majene				33.701.600	70.614.523
532	Kab. Mamuju				20.130.474	93.564.180
533	Kab. Polewali Mandar			6.942.550	66.270.195	140.647.026
534	Kab. Mamasa				29.111.520	89.840.328
535	Kab. Pasangkayu				30.838.815	140.972.850
536	Kab. Mamuju Tengah				42.591.627	107.178.574
537	Provinsi Kalimantan Utara		731.520	731.520	42.963.750	149.419.149

*) Perubahan Pertama

**) Perubahan Kedua

***) Perubahan Ketiga

(PMK Nomor 94 Tahun 2021)

(PMK Nomor 162 Tahun 2021)

(PMK Nomor 118 Tahun 2022)

Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021

Tanggal Berlaku: 23 November 2021

Tanggal Berlaku: 25 Juli 2022

SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Dampaknya

1. DAK FISIK REGULER

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Pendidikan				
		PAUD	SD	SMP	SMA	SMK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
538	Kab. Bulungan	4.736.562	24.856.797	26.027.623		
539	Kab. Malinau	881.164	3.429.991	2.133.036		
540	Kab. Nunukan		6.783.269	1.199.512		
541	Kota Tarakan	289.566	2.547.587	17.687.763		
542	Kab. Tana Tidung	526.078	3.571.001	1.859.162		
	Jumlah Nasional	398.003.301	7.005.522.475	4.657.220.916	2.436.845.368	3.050.037.717

*) Perubahan Pertama
**) Perubahan Kedua
***) Perubahan Ketiga

(PMK Nomor 94 Tahun 2021)
(PMK Nomor 162 Tahun 2021)
(PMK Nomor 118 Tahun 2022)

Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021
Tanggal Berlaku: 23 November 2021
Tanggal Berlaku: 25 Juli 2022

SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Dampaknya

1. DAK FISIK REGULER

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Pendidikan				Kesehatan dan KB
		SKB	SLB	Perpustakaan Daerah	Subtotal Pendidikan	Pelayanan Dasar
(1)	(2)	(8)	(9)	(10)	(11)=(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)+(9)+(10)	(12)
538	Kab. Bulungan			393.215	56.014.197	8.475.120
539	Kab. Malinau				6.444.191	2.000.000
540	Kab. Nunukan			300.000	8.282.781	10.140.718
541	Kota Tarakan			291.500	20.816.416	2.000.000
542	Kab. Tana Tidung				5.956.241	2.000.000
	Jumlah Nasional	110.052.342	125.379.588	549.998.235	18.333.059.942	4.716.645.068

*) Perubahan Pertama
**) Perubahan Kedua
***) Perubahan Ketiga

(PMK Nomor 94 Tahun 2021)
(PMK Nomor 162 Tahun 2021)
(PMK Nomor 118 Tahun 2022)

Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021
Tanggal Berlaku: 23 November 2021
Tanggal Berlaku: 25 Juli 2022

SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Dampaknya

1. DAK FISIK REGULER

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Kesehatan dan KB				Subtotal Kesehatan dan KB
		Pelayanan Rujukan	Pelayanan Kefarmasian dan Bahan Habis Pakai	Peningkatan Kesiapan Sistem Kesehatan	Keluarga Berencana	
(1)	(2)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)=(12)+(13)+(14)+(15)+(16)
538	Kab. Bulungan	3.841.368	4.029.357	740.722	1.514.061	18.600.628
539	Kab. Malinau	3.286.192	2.661.685		1.434.320	9.382.197
540	Kab. Nunukan	1.475.000	5.124.482		1.404.644	18.144.844
541	Kota Tarakan	20.815.817	3.339.607	1.395.087	1.488.826	29.039.337
542	Kab. Tana Tidung		795.915	391.427	1.488.826	4.676.168
	Jumlah Nasional	6.319.628.812	2.196.477.163	1.074.258.119	574.124.702	14.881.133.864

*) Perubahan Pertama
**) Perubahan Kedua
***) Perubahan Ketiga

(PMK Nomor 94 Tahun 2021)
(PMK Nomor 162 Tahun 2021)
(PMK Nomor 118 Tahun 2022)

Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021
Tanggal Berlaku: 23 November 2021
Tanggal Berlaku: 25 Juli 2022

SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Dampaknya

1. DAK FISIK REGULER

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Jalan	Transportasi Perdesaan	Transportasi Laut	TOTAL DAK REGULER
(1)	(2)	(18)	(19)	(20)	(21)=(11)+(17)+(18)+(19)+(20)
538	Kab. Bulungan	10.469.312	3.885.000		88.969.137
539	Kab. Malinau	13.994.566	5.040.000		34.860.954
540	Kab. Nunukan	6.320.972	9.660.000	4.500.000	46.908.597
541	Kota Tarakan	6.413.027			56.268.780
542	Kab. Tana Tidung	9.459.929			20.092.338
	Jumlah Nasional	6.945.833.062	1.248.319.817	575.464.145	41.983.810.830

*) Perubahan Pertama
**) Perubahan Kedua
***) Perubahan Ketiga

(PMK Nomor 94 Tahun 2021)
(PMK Nomor 162 Tahun 2021)
(PMK Nomor 118 Tahun 2022)

Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021
Tanggal Berlaku: 23 November 2021
Tanggal Berlaku: 25 Juli 2022

SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Dampaknya

2. DAK FISIK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Kesehatan dan KB			Jalan	
		Penguatan Intervensi Stunting	Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi	Keluarga Berencana	Subtotal Kesehatan dan KB	Tematik Ketahanan Pangan
(1)	(2)	(22)	(23)	(24)	(25)=(22)+(23)+(24)	(26)
538	Kab. Bulungan		49.513.981	320.000	49.833.981	
539	Kab. Malinau		8.214.438	270.000	8.484.438	
540	Kab. Nunukan	1.000.000	50.779.250	320.000	52.099.250	
541	Kota Tarakan					
542	Kab. Tana Tidung		12.170.854		12.170.854	
	Jumlah Nasional	600.687.692	4.215.434.147	99.230.182	4.915.352.021	1.072.505.764

*) Perubahan Pertama
**) Perubahan Kedua
***) Perubahan Ketiga

(PMK Nomor 94 Tahun 2021)
(PMK Nomor 162 Tahun 2021)
(PMK Nomor 118 Tahun 2022)

Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021
Tanggal Berlaku: 23 November 2021
Tanggal Berlaku: 25 Juli 2022

SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Dampaknya

2. DAK FISIK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Jalan		Air Minum		
		Tematik Pembangunan Infrastruktur Ekonomi Berkelanjutan	Subtotal Jalan	Tematik Penurunan Angka Kematian Ibu dan Stunting	Tematik Penanggulangan Kemiskinan	Subtotal Air Minum
(1)	(2)	(27)	(28)=(26)+(27)	(29)	(30)	(31)=(29)+(30)
538	Kab. Bulungan	10.072.561	10.072.561	5.249.393	5.600.309	10.849.702
539	Kab. Malinau	9.882.015	9.882.015		5.298.493	5.298.493
540	Kab. Nunukan	12.231.118	12.231.118	4.500.000	5.703.805	10.203.805
541	Kota Tarakan				5.677.579	5.677.579
542	Kab. Tana Tidung				3.084.304	3.084.304
	Jumlah Nasional	2.192.005.983	3.264.511.747	823.804.537	2.153.559.538	2.977.364.075

*) Perubahan Pertama
 **) Perubahan Kedua
 ***) Perubahan Ketiga

(PMK Nomor 94 Tahun 2021)
 (PMK Nomor 162 Tahun 2021)
 (PMK Nomor 118 Tahun 2022)

Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021
 Tanggal Berlaku: 23 November 2021
 Tanggal Berlaku: 25 Juli 2022

SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Dampaknya

2. DAK FISIK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Sanitasi			Perumahan dan Permukiman	Irigasi
		Tematik Penurunan Angka Kematian Ibu dan Stunting	Tematik Penanggulangan Kemiskinan	Subtotal Sanitasi		
(1)	(2)	(32)	(33)	(34)=(32)+(33)	(35)	(36)
538	Kab. Bulungan	1.846.918	1.552.164	3.399.082		5.054.824
539	Kab. Malinau		1.643.433	1.643.433	952.008	1.767.000
540	Kab. Nunukan	8.182.478	1.872.443	10.054.921	926.482	4.928.817
541	Kota Tarakan		1.911.835	1.911.835	1.088.091	
542	Kab. Tana Tidung		1.481.281	1.481.281		2.904.383
	Jumlah Nasional	981.444.876	993.219.106	1.974.663.982	975.784.325	2.901.015.016

*) Perubahan Pertama
**) Perubahan Kedua
***) Perubahan Ketiga

(PMK Nomor 94 Tahun 2021)
(PMK Nomor 162 Tahun 2021)
(PMK Nomor 118 Tahun 2022)

Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021
Tanggal Berlaku: 23 November 2021
Tanggal Berlaku: 25 Juli 2022

SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Dampaknya

2. DAK FISIK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Pertanian	Kelautan dan Perikanan	Industri Kecil dan Menengah	Pariwisata	Lingkungan Hidup
						Lingkungan Hidup Tematik Penurunan Angka Kematian Ibu dan Stunting
(1)	(2)	(37)	(38)	(39)	(40)	(41)
538	Kab. Bulungan	2.735.000	1.988.379			
539	Kab. Malinau	3.515.000	650.341			
540	Kab. Nunukan	3.400.000	2.054.250	2.040.755		
541	Kota Tarakan		1.292.181			
542	Kab. Tana Tidung	1.029.679	714.750			
	Jumlah Nasional	1.394.263.757	997.119.766	743.538.967	585.411.191	262.827.886

*) Perubahan Pertama
**) Perubahan Kedua
***) Perubahan Ketiga

(PMK Nomor 94 Tahun 2021)
(PMK Nomor 162 Tahun 2021)
(PMK Nomor 118 Tahun 2022)

Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021
Tanggal Berlaku: 23 November 2021
Tanggal Berlaku: 25 Juli 2022

SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Dampaknya

2. DAK FISIK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Lingkungan Hidup			TOTAL DAK PENUGASAN	TOTAL DAK FISIK
		Lingkungan Hidup Tematik Pembangunan Infrastruktur Ekonomi Berkelanjutan	Kehutanan Tematik Ketahanan Pangan	Subtotal Lingkungan Hidup		
(1)	(2)	(42)	(43)	(44)=(41)+(42)+(43)	(45)=(25)+(28)+(31)+(34)+(35)+(36)+(37)+(38)+(39)+(40)+(44)	(46)=(21)+(45)
538	Kab. Bulungan				83.933.529	172.902.666
539	Kab. Malinau				32.192.728	67.053.682
540	Kab. Nunukan				97.939.398	144.847.995
541	Kota Tarakan				9.969.686	66.238.466
542	Kab. Tana Tidung				21.385.251	41.477.589
	Cadangan DAK Fisik					329.257.264
	Jumlah Nasional	64.747.950	278.531.223	606.107.059	21.335.131.906	63.648.200.000

*) Perubahan Pertama
 **) Perubahan Kedua
 ***) Perubahan Ketiga

(PMK Nomor 94 Tahun 2021)
 (PMK Nomor 162 Tahun 2021)
 (PMK Nomor 118 Tahun 2022)

Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021
 Tanggal Berlaku: 23 November 2021
 Tanggal Berlaku: 25 Juli 2022

SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan Dampaknya

C. RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) NONFISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	TUNJANGAN KHUSUS GURU
(1)	(2)	(10)
I	Provinsi Aceh	996.934
1	Kab. Aceh Barat	7.237.336
2	Kab. Aceh Besar	0
3	Kab. Aceh Selatan	0
4	Kab. Aceh Singkil	4.955.386
5	Kab. Aceh Tengah	4.542.706
6	Kab. Aceh Tenggara	0
7	Kab. Aceh Timur	3.105.893
8	Kab. Aceh Utara	32.057.649
9	Kab. Bireuen	23.470.445
10	Kab. Pidie	3.306.835
11	Kab. Simeulue	1.247.188
12	Kota Banda Aceh	0
13	Kota Sabang	0
14	Kota Langsa	0
15	Kota Lhokseumawe	0
16	Kab. Gayo Lues	1.691.684
17	Kab. Aceh Barat Daya	0
18	Kab. Aceh Jaya	1.703.518
19	Kab. Nagan Raya	3.808.811
20	Kab. Aceh Tamiang	0
21	Kab. Bener Meriah	2.954.861
22	Kab. Pidie Jaya	3.787.663
23	Kota Subulussalam	0
II	Provinsi Sumatera Utara	19.940.535
1	Kab. Asahan	0
2	Kab. Dairi	724.170
3	Kab. Deli Serdang	0
4	Kab. Karo	0
5	Kab. Labuhanbatu	0
6	Kab. Langkat	1.021.652
7	Kab. Mandailing Natal	24.148.181
8	Kab. Nias	15.454.717
9	Kab. Simalungun	5.729
10	Kab. Tapanuli Selatan	6.605.281
11	Kab. Tapanuli Tengah	9.766.730
12	Kab. Tapanuli Utara	7.791.821
13	Kab. Toba	7.283.511

- *) Perubahan Pertama (PMK Nomor 94 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021
**) Perubahan Kedua (PMK Nomor 162 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 23 November 2021
***) Perubahan Ketiga (PMK Nomor 118 Tahun 2022) Tanggal Berlaku: 25 Juli 2022

SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Dampaknya

NO	NAMA DAERAH	TUNJANGAN KHUSUS GURU
(1)	(2)	(10)
14	Kota Binjai	0
15	Kota Medan	0
16	Kota Pematang Siantar	0
17	Kota Sibolga	0
18	Kota Tanjung Balai	0
19	Kota Tebing Tinggi	0
20	Kota Padang Sidempuan	0
21	Kab. Pakpak Bharat	0
22	Kab. Nias Selatan	26.955.487
23	Kab. Humbang Hasundutan	1.357.804
24	Kab. Serdang Bedagai	0
25	Kab. Samosir	2.070.528
26	Kab. Batu Bara	0
27	Kab. Padang Lawas	2.952.671
28	Kab. Padang Lawas Utara	14.095.744
29	Kab. Labuhanbatu Selatan	0
30	Kab. Labuhanbatu Utara	4.004.040
31	Kab. Nias Utara	16.594.042
32	Kab. Nias Barat	21.932.203
33	Kota Gunungsitoli	4.025.330
III	Provinsi Sumatera Barat	1.556.709
1	Kab. Limapuluh Kota	0
2	Kab. Agam	0
3	Kab. Kepulauan Mentawai	8.642.742
4	Kab. Padang Pariaman	0
5	Kab. Pasaman	0
6	Kab. Pesisir Selatan	2.235.817
7	Kab. Sijunjung	0
8	Kab. Solok	8.084.658
9	Kab. Tanah Datar	0
10	Kota Bukit Tinggi	0
11	Kota Padang Panjang	0
12	Kota Padang	0
13	Kota Payakumbuh	0
14	Kota Sawahlunto	0
15	Kota Solok	0
16	Kota Pariaman	0
17	Kab. Pasaman Barat	0
18	Kab. Dharmasraya	3.298.565
19	Kab. Solok Selatan	0
IV	Provinsi Riau	892.302
1	Kab. Bengkalis	0
2	Kab. Indragiri Hilir	19.787.170

*) Perubahan Pertama (PMK Nomor 94 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021

**) Perubahan Kedua (PMK Nomor 162 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 23 November 2021

***) Perubahan Ketiga (PMK Nomor 118 Tahun 2022) Tanggal Berlaku: 25 Juli 2022

SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Dampaknya

NO	NAMA DAERAH	TUNJANGAN KHUSUS GURU
(1)	(2)	(10)
3	Kab. Indragiri Hulu	0
4	Kab. Kampar	7.275.298
5	Kab. Kuantan Singingi	2.228.449
6	Kab. Pelalawan	4.882.745
7	Kab. Rokan Hilir	2.183.403
8	Kab. Rokan Hulu	2.308.648
9	Kab. Siak	0
10	Kota Dumai	0
11	Kota Pekanbaru	0
12	Kab. Kepulauan Meranti	6.794.725
V	Provinsi Jambi	308.679
1	Kab. Batanghari	0
2	Kab. Bungo	0
3	Kab. Kerinci	0
4	Kab. Merangin	3.992.840
5	Kab. Muaro Jambi	0
6	Kab. Sarolangun	3.445.137
7	Kab. Tanjung Jabung Barat	2.589.513
8	Kab. Tanjung Jabung Timur	2.576.113
9	Kab. Tebo	0
10	Kota Jambi	0
11	Kota Sungai Penuh	0
VI	Provinsi Sumatera Selatan	0
1	Kab. Lahat	9.950
2	Kab. Musi Banyuasin	8.211.978
3	Kab. Musi Rawas	640.638
4	Kab. Muara Enim	0
5	Kab. Ogan Komering Ilir	3.340.427
6	Kab. Ogan Komering Ulu	0
7	Kota Palembang	0
8	Kota Prabumulih	0
9	Kota Pagar Alam	0
10	Kota Lubuk Linggau	0
11	Kab. Banyuasin	2.434.056
12	Kab. Ogan Ilir	0
13	Kab. OKU Timur	0
14	Kab. OKU Selatan	9.104.958
15	Kab. Empat Lawang	0
16	Kab. Penukal Abab Lematang Ilir	1.343.856
17	Kab. Musi Rawas Utara	527.820
VII	Provinsi Bengkulu	0
1	Kab. Bengkulu Selatan	0
2	Kab. Bengkulu Utara	0
3	Kab. Rejang Lebong	1.573.109

*) Perubahan Pertama (PMK Nomor 94 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021

***) Perubahan Kedua (PMK Nomor 162 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 23 November 2021

***) Perubahan Ketiga (PMK Nomor 118 Tahun 2022) Tanggal Berlaku: 25 Juli 2022

SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Dampaknya

NÖ	NAMA DAERAH	TUNJANGAN KHUSUS GURU
(1)	(2)	(10)
4	Kota Bengkulu	0
5	Kab. Kaur	2.721.252
6	Kab. Seluma	451.910
7	Kab. Mukomuko	0
8	Kab. Lebong	259.429
9	Kab. Kepahiang	0
10	Kab. Bengkulu Tengah	187.453
VIII	Provinsi Lampung	126.622
1	Kab. Lampung Barat	599.789
2	Kab. Lampung Selatan	0
3	Kab. Lampung Tengah	0
4	Kab. Lampung Utara	0
5	Kab. Lampung Timur	0
6	Kab. Tanggamus	5.065.361
7	Kab. Tulang Bawang	3.295.061
8	Kab. Way Kanan	6.177.892
9	Kota Bandar Lampung	0
10	Kota Metro	0
11	Kab. Pesawaran	1.522.162
12	Kab. Pringsewu	0
13	Kab. Mesuji	1.118.823
14	Kab. Tulang Bawang Barat	0
15	Kab. Pesisir Barat	5.082.441
IX	Provinsi DKI Jakarta	0
X	Provinsi Jawa Barat	0
1	Kab. Bandung	0
2	Kab. Bekasi	0
3	Kab. Bogor	0
4	Kab. Ciamis	0
5	Kab. Cianjur	0
6	Kab. Cirebon	0
7	Kab. Garut	0
8	Kab. Indramayu	0
9	Kab. Karawang	0
10	Kab. Kuningan	0
11	Kab. Majalengka	0
12	Kab. Purwakarta	0
13	Kab. Subang	0
14	Kab. Sukabumi	0
15	Kab. Sumedang	0
16	Kab. Tasikmalaya	0
17	Kota Bandung	0
18	Kota Bekasi	0
19	Kota Bogor	0

- *) Perubahan Pertama (PMK Nomor 94 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021
 **) Perubahan Kedua (PMK Nomor 162 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 23 November 2021
 ***) Perubahan Ketiga (PMK Nomor 118 Tahun 2022) Tanggal Berlaku: 25 Juli 2022

SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Dampaknya

NO	NAMA DAERAH	TUNJANGAN KHUSUS GURU
(1)	(2)	(10)
20	Kota Cirebon	0
21	Kota Depok	0
22	Kota Sukabumi	0
23	Kota Tasikmalaya	0
24	Kota Cimahi	0
25	Kota Banjar	0
26	Kab. Bandung Barat	0
27	Kab. Pangandaran	0
XI	Provinsi Jawa Tengah	0
1	Kab. Banjarnegara	0
2	Kab. Banyumas	0
3	Kab. Batang	0
4	Kab. Blora	0
5	Kab. Boyolali	0
6	Kab. Brebes	0
7	Kab. Cilacap	0
8	Kab. Demak	1.266.733
9	Kab. Grobogan	0
10	Kab. Jepara	2.647.565
11	Kab. Karanganyar	0
12	Kab. Kebumen	0
13	Kab. Kendal	0
14	Kab. Klaten	0
15	Kab. Kudus	0
16	Kab. Magelang	0
17	Kab. Pati	0
18	Kab. Pekalongan	0
19	Kab. Pemasang	0
20	Kab. Purbalingga	0
21	Kab. Purworejo	0
22	Kab. Rembang	0
23	Kab. Semarang	0
24	Kab. Sragen	0
25	Kab. Sukoharjo	0
26	Kab. Tegal	3.070.008
27	Kab. Temanggung	0
28	Kab. Wonogiri	0
29	Kab. Wonosobo	688.090
30	Kota Magelang	0
31	Kota Pekalongan	0
32	Kota Salatiga	0
33	Kota Semarang	0
34	Kota Surakarta	0
35	Kota Tegal	0

- *) Perubahan Pertama (PMK Nomor 94 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021
**) Perubahan Kedua (PMK Nomor 162 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 23 November 2021
***) Perubahan Ketiga (PMK Nomor 118 Tahun 2022) Tanggal Berlaku: 25 Juli 2022

SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Dampaknya

NO	NAMA DAERAH	TUNJANGAN KHUSUS GURU
(1)	(2)	(10)
XII	Provinsi DI Yogyakarta	0
1	Kab. Bantul	0
2	Kab. Gunung Kidul	0
3	Kab. Kulon Progo	0
4	Kab. Sleman	0
5	Kota Yogyakarta	0
XIII	Provinsi Jawa Timur	0
1	Kab. Bangkalan	0
2	Kab. Banyuwangi	0
3	Kab. Blitar	0
4	Kab. Bojonegoro	0
5	Kab. Bondowoso	0
6	Kab. Gresik	0
7	Kab. Jember	0
8	Kab. Jombang	0
9	Kab. Kediri	0
10	Kab. Lamongan	0
11	Kab. Lumajang	0
12	Kab. Madiun	0
13	Kab. Magetan	0
14	Kab. Malang	0
15	Kab. Mojokerto	0
16	Kab. Nganjuk	0
17	Kab. Ngawi	0
18	Kab. Pacitan	0
19	Kab. Pamekasan	0
20	Kab. Pasuruan	0
21	Kab. Ponorogo	0
22	Kab. Probolinggo	0
23	Kab. Sampang	0
24	Kab. Sidoarjo	0
25	Kab. Situbondo	0
26	Kab. Sumenep	8.148.565
27	Kab. Trenggalek	0
28	Kab. Tuban	0
29	Kab. Tulungagung	0
30	Kota Blitar	0
31	Kota Kediri	0
32	Kota Madiun	0
33	Kota Malang	0
34	Kota Mojokerto	0
35	Kota Pasuruan	0
36	Kota Probolinggo	0
37	Kota Surabaya	0

- *) Perubahan Pertama (PMK Nomor 94 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021
**) Perubahan Kedua (PMK Nomor 162 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 23 November 2021
***) Perubahan Ketiga (PMK Nomor 118 Tahun 2022) Tanggal Berlaku: 25 Juli 2022

SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Dampaknya

NO	NAMA DAERAH	TUNJANGAN KHUSUS GURU
(1)	(2)	(10)
38	Kota Batu	0
XIV	Provinsi Kalimantan Barat	3.234.588
1	Kab. Bengkayang	6.792.135
2	Kab. Landak	18.026.312
3	Kab. Kapuas Hulu	13.226.863
4	Kab. Ketapang	14.229.780
5	Kab. Mempawah	0
6	Kab. Sambas	1.742.960
7	Kab. Sanggau	13.859.369
8	Kab. Sintang	29.592.033
9	Kota Pontianak	0
10	Kota Singkawang	0
11	Kab. Sekadau	10.276.396
12	Kab. Melawi	22.115.799
13	Kab. Kayong Utara	3.177.951
14	Kab. Kubu Raya	5.993.619
XV	Provinsi Kalimantan Tengah	0
1	Kab. Barito Selatan	7.188.876
2	Kab. Barito Utara	7.163.216
3	Kab. Kapuas	17.715.421
4	Kab. Kotawaringin Barat	1.112.983
5	Kab. Kotawaringin Timur	0
6	Kota Palangkaraya	0
7	Kab. Katingan	10.346.566
8	Kab. Seruyan	0
9	Kab. Sukamara	1.343.757
10	Kab. Lamandau	3.921.996
11	Kab. Gunung Mas	4.537.528
12	Kab. Pulang Pisau	4.612.739
13	Kab. Murung Raya	7.587.644
14	Kab. Barito Timur	1.707.602
XVI	Provinsi Kalimantan Selatan	1.053.195
1	Kab. Banjar	6.927.302
2	Kab. Barito Kuala	765.155
3	Kab. Hulu Sungai Selatan	1.216.780
4	Kab. Hulu Sungai Tengah	2.014.116
5	Kab. Hulu Sungai Utara	9.447.746
6	Kab. Kotabaru	0
7	Kab. Tabalong	0
8	Kab. Tanah Laut	0
9	Kab. Tapin	733.465
10	Kota Banjarbaru	0
11	Kota Banjarmasin	0
12	Kab. Balangan	3.128.968

- *) Perubahan Pertama (PMK Nomor 94 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021
**) Perubahan Kedua (PMK Nomor 162 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 23 November 2021
***) Perubahan Ketiga (PMK Nomor 118 Tahun 2022) Tanggal Berlaku: 25 Juli 2022

SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Dampaknya

NO	NAMA DAERAH	TUNJANGAN KHUSUS GURU
(1)	(2)	(10)
13	Kab. Tanah Bumbu	178.505
XVII	Provinsi Kalimantan Timur	1.427.468
1	Kab. Berau	651.787
2	Kab. Kutai Kartanegara	9.892.006
3	Kab. Kutai Barat	3.947.475
4	Kab. Kutai Timur	3.564.319
5	Kab. Paser	3.323.238
6	Kota Balikpapan	0
7	Kota Bontang	0
8	Kota Samarinda	0
9	Kab. Penajam Paser Utara	0
10	Kab. Mahakam Ulu	442.688
XVIII	Provinsi Sulawesi Utara	1.349.018
1	Kab. Bolaang Mongondow	1.128.422
2	Kab. Minahasa	0
3	Kab. Sangihe	7.838.693
4	Kota Bitung	0
5	Kota Manado	0
6	Kab. Kepulauan Talaud	1.555.024
7	Kab. Minahasa Selatan	795.540
8	Kota Tomohon	0
9	Kab. Minahasa Utara	664.168
10	Kab. Kep. Siau Tagulandang Biaru	0
11	Kota Kotamobagu	0
12	Kab. Bolaang Mongondow Utara	0
13	Kab. Minahasa Tenggara	0
14	Kab. Bolaang Mongondow Timur	0
15	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	0
XIX	Provinsi Sulawesi Tengah	654.577
1	Kab. Banggai	2.281.012
2	Kab. Banggai Kepulauan	1.593.798
3	Kab. Buol	0
4	Kab. Toli-Toli	3.502.721
5	Kab. Donggala	6.228.539
6	Kab. Morowali	4.975.723
7	Kab. Poso	749.631
8	Kota Palu	0
9	Kab. Parigi Moutong	3.369.861
10	Kab. Tojo Una Una	8.344.336
11	Kab. Sigi	8.441.040
12	Kab. Banggai Laut	2.128.169
13	Kab. Morowali Utara	3.828.726
XX	Provinsi Sulawesi Selatan	3.036.634
1.	Kab. Bantaeng	0

- *) Perubahan Pertama (PMK Nomor 94 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021
 **) Perubahan Kedua (PMK Nomor 162 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 23 November 2021
 ***) Perubahan Ketiga (PMK Nomor 118 Tahun 2022) Tanggal Berlaku: 25 Juli 2022

SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Dampaknya

NO	NAMA DAERAH	TUNJANGAN KHUSUS GURU
(1)	(2)	(10)
2	Kab. Barru	0
3	Kab. Bone	764.662
4	Kab. Bulukumba	0
5	Kab. Enrekang	5.122.597
6	Kab. Gowa	0
7	Kab. Jeneponto	0
8	Kab. Luwu	13.597.830
9	Kab. Luwu Utara	8.424.520
10	Kab. Maros	1.315.179
11	Kab. Pangkajene Kepulauan	6.276.090
12	Kota Palopo	0
13	Kab. Luwu Timur	0
14	Kab. Pinrang	5.181.021
15	Kab. Sinjai	0
16	Kab. Kepulauan Selayar	7.623.410
17	Kab. Sidenreng Rappang	0
18	Kab. Soppeng	0
19	Kab. Takalar	0
20	Kab. Tana Toraja	6.335.562
21	Kab. Wajo	0
22	Kota Pare-pare	0
23	Kota Makassar	0
24	Kab. Toraja Utara	0
XXI	Provinsi Sulawesi Tenggara	1.576.679
1	Kab. Buton	1.023.827
2	Kab. Konawe	4.483.071
3	Kab. Kolaka	1.963.946
4	Kab. Muna	10.060.171
5	Kota Kendari	0
6	Kota Bau-bau	0
7	Kab. Konawe Selatan	6.127.224
8	Kab. Bombana	7.157.329
9	Kab. Wakatobi	0
10	Kab. Kolaka Utara	2.926.687
11	Kab. Konawe Utara	291.993
12	Kab. Buton Utara	1.737.296
13	Kab. Konawe Kepulauan	0
14	Kab. Kolaka Timur	1.437.310
15	Kab. Muna Barat	3.295.793
16	Kab. Buton Tengah	1.795.034
17	Kab. Buton Selatan	243.567
XXII	Provinsi Bali	0
1	Kab. Badung	0
2	Kab. Bangli	0

- *) Perubahan Pertama (PMK Nomor 94 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021
 **) Perubahan Kedua (PMK Nomor 162 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 23 November 2021
 ***) Perubahan Ketiga (PMK Nomor 118 Tahun 2022) Tanggal Berlaku: 25 Juli 2022

SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Dampaknya

NO	NAMA DAERAH	TUNJANGAN KHUSUS GURU
(1)	(2)	(10)
3	Kab. Buleleng	0
4	Kab. Gianyar	0
5	Kab. Jembrana	0
6	Kab. Karangasem	0
7	Kab. Klungkung	0
8	Kab. Tabanan	0
9	Kota Denpasar	0
XXIII	Provinsi Nusa Tenggara Barat	0
1	Kab. Bima	6.845.191
2	Kab. Dompu	0
3	Kab. Lombok Barat	0
4	Kab. Lombok Tengah	0
5	Kab. Lombok Timur	0
6	Kab. Sumbawa	5.063.599
7	Kota Mataram	0
8	Kota Bima	0
9	Kab. Sumbawa Barat	0
10	Kab. Lombok Utara	0
XXIV	Provinsi Nusa Tenggara Timur	7.671.381
1	Kab. Alor	2.150.878
2	Kab. Belu	2.169.854
3	Kab. Ende	10.840.751
4	Kab. Flores Timur	3.105.299
5	Kab. Kupang	4.751.303
6	Kab. Lembata	4.082.424
7	Kab. Manggarai	7.677.346
8	Kab. Ngada	4.140.912
9	Kab. Sikka	17.042.852
10	Kab. Sumba Barat	0
11	Kab. Sumba Timur	2.477.673
12	Kab. Timor Tengah Selatan	2.495.987
13	Kab. Timor Tengah Utara	4.210.178
14	Kota Kupang	0
15	Kab. Rote Ndao	9.013.749
16	Kab. Manggarai Barat	7.482.541
17	Kab. Nagekeo	4.021.024
18	Kab. Sumba Barat Daya	12.274.695
19	Kab. Sumba Tengah	4.550.838
20	Kab. Manggarai Timur	8.376.488
21	Kab. Sabu Raijua	747.885
22	Kab. Malaka	11.581.216
XXV	Provinsi Maluku	6.612.849
1	Kab. Kepulauan Tanimbar	4.052.667
2	Kab. Maluku Tengah	5.482.149

- *) Perubahan Pertama (PMK Nomor 94 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021
 **) Perubahan Kedua (PMK Nomor 162 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 23 November 2021
 ***) Perubahan Ketiga (PMK Nomor 118 Tahun 2022) Tanggal Berlaku: 25 Juli 2022

SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Dampaknya

NO	NAMA DAERAH	TUNJANGAN KHUSUS GURU
(1)	(2)	(10)
3	Kab. Maluku Tenggara	7.285.426
4	Kab. Buru	5.379.064
5	Kota Ambon	0
6	Kab. Seram Bagian Barat	6.880.717
7	Kab. Seram Bagian Timur	11.055.913
8	Kab. Kepulauan Aru	14.979.683
9	Kota Tual	656.741
10	Kab. Maluku Barat Daya	7.847.757
11	Kab. Buru Selatan	6.044.273
XXVI	Provinsi Papua	9.530.839
1	Kab. Biak Numfor	4.373.144
2	Kab. Jayapura	2.422.290
3	Kab. Jayawijaya	3.186.422
4	Kab. Merauke	6.156.940
5	Kab. Mimika	4.806.338
6	Kab. Nabire	1.868.680
7	Kab. Paniai	1.468.596
8	Kab. Puncak Jaya	284.808
9	Kab. Kepulauan Yapen	5.848.353
10	Kota Jayapura	0
11	Kab. Sarmi	686.997
12	Kab. Keerom	4.636.903
13	Kab. Yahukimo	3.089.080
14	Kab. Pegunungan Bintang	4.422.399
15	Kab. Tolitola	915.789
16	Kab. Boven Digoel	975.462
17	Kab. Mappi	1.848.361
18	Kab. Asmat	4.528.336
19	Kab. Waropen	1.449.050
20	Kab. Supiori	2.802.094
21	Kab. Mamberamo Raya	1.353.659
22	Kab. Mamberamo Tengah	1.251.279
23	Kab. Yalimo	1.700.626
24	Kab. Lanny Jaya	3.469.765
25	Kab. Nduga	932.324
26	Kab. Dogiyai	1.431.744
27	Kab. Puncak	859.425
28	Kab. Intan Jaya	942.604
29	Kab. Deiyai	0
XXVII	Provinsi Maluku Utara	5.817.452
1	Kab. Halmahera Tengah	4.846.176
2	Kota Ternate	0
3	Kab. Halmahera Barat	10.291.198
4	Kab. Halmahera Timur	6.087.985

- *) Perubahan Pertama (PMK Nomor 94 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021
**) Perubahan Kedua (PMK Nomor 162 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 23 November 2021
***) Perubahan Ketiga (PMK Nomor 118 Tahun 2022) Tanggal Berlaku: 25 Juli 2022

SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Dampaknya

NO	NAMA DAERAH	TUNJANGAN KHUSUS GURU
(1)	(2)	(10)
5	Kab. Halmahera Selatan	15.490.027
6	Kab. Halmahera Utara	4.069.742
7	Kab. Kepulauan Sula	6.103.023
8	Kota Tidore Kepulauan	816.334
9	Kab. Pulau Morotai	1.449.283
10	Kab. Pulau Taliabu	3.238.579
XXVIII	Provinsi Banten	1.058.124
1	Kab. Lebak	16.131.762
2	Kab. Pandeglang	15.235.017
3	Kab. Serang	0
4	Kab. Tangerang	0
5	Kota Cilegon	0
6	Kota Tangerang	0
7	Kota Serang	0
8	Kota Tangerang Selatan	0
XXIX	Provinsi Bangka Belitung	0
1	Kab. Bangka	0
2	Kab. Belitung	0
3	Kota Pangkal Pinang	0
4	Kab. Bangka Selatan	0
5	Kab. Bangka Tengah	0
6	Kab. Bangka Barat	0
7	Kab. Belitung Timur	0
XXX	Provinsi Gorontalo	0
1	Kab. Boalemo	2.887.535
2	Kab. Gorontalo	644.661
3	Kota Gorontalo	0
4	Kab. Pohuwato	0
5	Kab. Bone Bolango	0
6	Kab. Gorontalo Utara	2.709.477
XXXI	Provinsi Kepulauan Riau	0
1	Kab. Natuna	1.463.259
2	Kab. Kepulauan Anambas	1.798.507
3	Kab. Karimun	1.899.612
4	Kota Batam	0
5	Kota Tanjung Pinang	0
6	Kab. Lingga	7.507.408
7	Kab. Bintan	493.755
XXXII	Provinsi Papua Barat	4.898.654
1	Kab. Fak Fak	3.386.617
2	Kab. Manokwari	2.028.987
3	Kab. Sorong	6.583.373
4	Kota Sorong	192.212
5	Kab. Raja Ampat	3.497.073

- *) Perubahan Pertama (PMK Nomor 94 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021
 **) Perubahan Kedua (PMK Nomor 162 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 23 November 2021
 ***) Perubahan Ketiga (PMK Nomor 118 Tahun 2022) Tanggal Berlaku: 25 Juli 2022

SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Dampaknya

NO	NAMA DAERAH	TUNJANGAN KHUSUS GURU
(1)	(2)	(10)
6	Kab. Sorong Selatan	5.343.135
7	Kab. Teluk Bintuni	1.614.204
8	Kab. Teluk Wondama	2.141.346
9	Kab. Kaimana	4.575.424
10	Kab. Maybrat	0
11	Kab. Tambora	10.778
12	Kab. Manokwari Selatan	0
13	Kab. Pegunungan Arfak	1.695.692
XXXIII	Provinsi Sulawesi Barat	1.710.753
1	Kab. Majene	7.023.559
2	Kab. Mamuju	7.031.230
3	Kab. Polewali Mandar	3.043.605
4	Kab. Mamasa	11.851.630
5	Kab. Pasangkayu	1.019.965
6	Kab. Mamuju Tengah	2.254.818
XXXIV	Provinsi Kalimantan Utara	824.758
1	Kab. Bulungan	0
2	Kab. Malinau	2.908.507
3	Kab. Nunukan	6.532.366
4	Kota Tarakan	0
5	Kab. Tana Tidung	232.265
	DANA CADANGAN	241.540.201
	JUMLAH PROVINSI	74.278.750
	JUMLAH KABUPATEN/KOTA	1.269.188.049
	NASIONAL	1.585.007.000

- *) Perubahan Pertama (PMK Nomor 94 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021
**) Perubahan Kedua (PMK Nomor 162 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 23 November 2021
***) Perubahan Ketiga (PMK Nomor 118 Tahun 2022) Tanggal Berlaku: 25 Juli 2022

SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease2019 (Covid-19) Dan Dampaknya

D. CONTOH FORMAT LAPORAN REALISASI DUKUNGAN PROGRAM PEMULIHAN EKONOMI DAERAH

KOP SURAT
LAPORAN REALISASI DUKUNGAN PROGRAM PEMULIHAN EKONOMI DAERAH
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA*).....⁽¹⁾
BULAN⁽²⁾
TAHUN ANGGARAN 2021

No.	Uraian ⁽³⁾	Jenis Akun ⁽⁴⁾	Anggaran				Realisasi				Realisasi Output	
			Sumber Pendanaan		Jumlah ⁽⁷⁾	% ⁽⁸⁾	Sumber Pendanaan		Jumlah ⁽¹¹⁾	% ⁽¹²⁾	Volume ⁽¹³⁾	Satuan ⁽¹⁴⁾
			DAU ⁽⁵⁾	DBH ⁽⁶⁾			DAU ⁽⁹⁾	DBH ⁽¹⁰⁾				
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(d)+(e)	(g)	(h)	(i)	(j)=(h)+(i)	(k)=(j)/(f)	(l)	
I	PERLINDUNGAN SOSIAL											
	a. Bantuan sosial	xxx	Rp	Rp	Rp		Rp	Rp	Rp		xxx	xxx
	b. Pemberian makanan tambahan	xxx	Rp	Rp	Rp		Rp	Rp	Rp		xxx	xxx
	c. Dst....	xxx	Rp	Rp	Rp		Rp	Rp	Rp		xxx	xxx
	Subtotal PERLINDUNGAN SOSIAL		Rp	Rp	Rp	%	Rp	Rp	Rp	%		
II	DUKUNGAN EKONOMI											
	a. Pemberdayaan UMKM	xxx	Rp	Rp	Rp		Rp	Rp	Rp		xxx	xxx
	b. Subsidi pertanian	xxx	Rp	Rp	Rp		Rp	Rp	Rp		xxx	xxx
	c. Dst...	xxx	Rp	Rp	Rp		Rp	Rp	Rp		xxx	xxx
	Subtotal DUKUNGAN EKONOMI		Rp	Rp	Rp	%	Rp	Rp	Rp	%		
JUMLAH DUKUNGAN PROGRAM PEMULIHAN EKONOMI DAERAH MELALUI DTU				Rp	Rp	Rp		Rp	Rp	Rp		

Demikian laporan ini dibuat dengan sebenarnya dan kami bertanggung jawab mutlak atas kebenaran dan kualitas laporan ini.

*) Coret yang tidak perlu

.....⁽¹⁵⁾
.....⁽¹⁶⁾
(tanda tangan asli dan cap dinas basah)
.....⁽¹⁷⁾

*) Perubahan Pertama
**) Perubahan Kedua
***) Perubahan Ketiga

(PMK Nomor 94 Tahun 2021)
(PMK Nomor 162 Tahun 2021)
(PMK Nomor 118 Tahun 2022)

Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021
Tanggal Berlaku: 23 November 2021
Tanggal Berlaku: 25 Juli 2022

SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan Dampaknya

PETUNJUK PENGISIAN

No.	Uraian
1	Pilih salah satu dan diisi sesuai dengan daerah bersangkutan
2	Diisi sesuai bulan berkenaan untuk laporan bulan yang lalu
3	Diisi dengan nama program yang dianggarkan dalam APBD/Perubahan APBD
4	Diisi dengan jenis akun yang dianggarkan dalam APBD/Perubahan APBD
5	Diisi dengan data anggaran dengan sumber pendanaan yang berasal dari DAU pada APBD/Perubahan APBD
6	Diisi dengan data anggaran dengan sumber pendanaan yang berasal dari DBH pada APBD/Perubahan APBD
7	Diisi dengan jumlah anggaran dalam APBD/Perubahan APBD yang bersumber dari DAU dan/atau DBH
8	Diisi dengan prosentase anggaran dalam APBD/Perubahan APBD terhadap total dukungan program pemulihan ekonomi daerah melalui DTU
9	Diisi dengan data realisasi sampai dengan bulan yang lalu dengan sumber pendanaan yang berasal dari DAU pada APBD/Perubahan APBD
10	Diisi dengan data realisasi sampai dengan bulan yang lalu dengan sumber pendanaan yang berasal dari DBH pada APBD/Perubahan APBD
11	Diisi dengan jumlah realisasi sampai dengan bulan yang lalu dalam APBD/Perubahan APBD yang bersumber dari DAU dan/atau DBH
12	Diisi dengan prosentase realisasi sampai dengan bulan yang lalu terhadap anggaran dukungan program pemulihan ekonomi daerah melalui DTU
13	Diisi dengan volume <i>output</i> yang dihasilkan
14	Diisi dengan satuan dari volume <i>output</i> yang dihasilkan
15	Diisi sesuai lokasi dan tanggal laporan dibuat
16	Diisi sesuai dengan jabatan penandatanganan laporan
17	Diisi sesuai dengan nama lengkap penandatanganan laporan

*) Perubahan Pertama (PMK Nomor 94 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021
**) Perubahan Kedua (PMK Nomor 162 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 23 November 2021
***) Perubahan Ketiga (PMK Nomor 118 Tahun 2022) Tanggal Berlaku: 25 Juli 2022

SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Dampaknya

E. CONTOH FORMAT PERNYATAAN PENGALOKASIAN DUKUNGAN PROGRAM PEMULIHAN EKONOMI DAERAH

KOP SURAT	
PERNYATAAN PENGALOKASIAN DUKUNGAN PROGRAM PEMULIHAN EKONOMI DAERAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA ⁽¹⁾ , (1) TAHUN ANGGARAN 2021	
Yang bertanda tangan dibawah ini Gubernur/Bupati/Walikota ⁽²⁾ , (2) menyatakan bahwa saya bersedia untuk mengalokasikan sebagian/seluruhnya ⁽³⁾ Belanja Wajib DTU dalam rangka dukungan program pemulihan ekonomi daerah dengan rincian sebagai berikut:	
Jumlah Belanja Wajib DTU	: Rp..... (3)
Jumlah Belanja Dukungan Program Pemulihan Ekonomi Daerah Melalui DTU	: Rp..... (4) /% (5)
1. Dukungan Ekonomi	: Rp..... (6) /% (7)
2. Perlindungan Sosial	: Rp..... (8) /% (9)
Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.	
* coret yang tidak perlu	
..... (10) (11)	
(tanda tangan asli dan cap dinas basah)	
..... (12)	

*) Perubahan Pertama

(PMK Nomor 94 Tahun 2021)

Tanggal Berlaku:

19 Juli 2021

***) Perubahan Kedua

(PMK Nomor 162 Tahun 2021)

Tanggal Berlaku:

23 November 2021

****) Perubahan Ketiga

(PMK Nomor 118 Tahun 2022)

Tanggal Berlaku:

25 Juli 2022

SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Dampaknya

PETUNJUK PENGISIAN

No.	Uraian
1	Pilih salah satu dan diisi sesuai dengan daerah bersangkutan
2	Diisi sesuai dengan Kepala Daerah atau Bendahara Umum Daerah bersangkutan
3	Diisi sesuai jumlah Belanja Wajib yang Bersumber dari 25% DTU
4	Diisi sesuai jumlah belanja dukungan program pemulihan ekonomi daerah melalui DTU
5	Diisi dukungan program pemulihan ekonomi daerah dari Belanja Wajib yang Bersumber dari 25% DTU
6	Diisi sesuai jumlah belanja dukungan ekonomi dalam rangka dukungan program pemulihan ekonomi daerah melalui DTU
7	Diisi prosentase belanja dukungan ekonomi terhadap total belanja dukungan program pemulihan ekonomi daerah melalui DTU
8	Diisi jumlah belanja perlindungan sosial dalam rangka dukungan program pemulihan ekonomi daerah melalui DTU
9	Diisi prosentase belanja perlindungan sosial terhadap total belanja dukungan program pemulihan ekonomi daerah melalui DTU
10	Diisi sesuai lokasi dan tanggal laporan dibuat
11	Diisi sesuai dengan jabatan penandatangan laporan
12	Diisi sesuai dengan nama lengkap penandatangan laporan

*) Perubahan Pertama

(PMK Nomor 94 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021

**) Perubahan Kedua

(PMK Nomor 162 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 23 November 2021

***) Perubahan Ketiga

(PMK Nomor 118 Tahun 2022) Tanggal Berlaku: 25 Juli 2022

SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan Dampaknya

F. CONTOH FORMAT LAPORAN REALISASI INSENTIF TENAGA KESEHATAN DAERAH

KOP SURAT
LAPORAN REALISASI INSENTIF TENAGA KESEHATAN DAERAH
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA*).....⁽¹⁾
BULAN⁽²⁾
TAHUN ANGGARAN.....⁽³⁾

Yang bertanda tangan di bawah ini⁽⁴⁾ menyatakan bahwa saya bertanggung jawab penuh atas kebenaran Laporan Realisasi Pembayaran Insentif Tenaga Kesehatan Daerah Oleh RKUD dengan rincian sebagai berikut:

Bulan ⁽⁵⁾	Dokter Spesialis		Dokter Umum & Dokter Gigi		Bidan & Perawat		Tenaga Kesehatan Lainnya		JUMLAH	
	Jumlah Penerima ⁽⁶⁾	Realisasi ⁽⁷⁾	Jumlah Penerima ⁽⁸⁾	Realisasi ⁽⁹⁾						
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)=(b)+(d)+(f)+(h)	(k)=(c)+(e)+(g)+(i)
Januari										
Februari										
Maret										
April										
Mei										
Juni										
Juli										
Agustus										
September										
Oktober										
November										
Desember										
JUMLAH

Bukti realisasi pembayaran kepada tenaga kesehatan yang tercantum dalam laporan ini, disimpan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional.
Demikian laporan ini dibuat dengan sebenarnya.

....., tanggal⁽¹⁰⁾
Kepala Badan/Biro/Dinas Pengelola Keuangan⁽¹⁾
(tanda tangan asli dan cap dinas basah)

Nama Lengkap⁽¹¹⁾
NIP⁽¹²⁾

*) Perubahan Pertama
**) Perubahan Kedua
***) Perubahan Ketiga

(PMK Nomor 94 Tahun 2021)
(PMK Nomor 162 Tahun 2021)
(PMK Nomor 118 Tahun 2022)

Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021
Tanggal Berlaku: 23 November 2021
Tanggal Berlaku: 25 Juli 2022

SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan Dampaknya

PETUNJUK PENGISIAN

No.	Uraian
1	Pilih salah satu dan diisi sesuai dengan daerah bersangkutan
2	Diisi sesuai bulan berkenaan penyampaian laporan
3	Diisi tahun 2020 untuk reallisasi sisa dana BOKT dan tahun 2021 untuk dana earmarking DAU
4	Diisi sesuai jabatan penandatangan laporan
5	Diisi sesuai realisasi bulanan
6	Diisi dengan jumlah penerima insentif tenaga kesehatan pada bulan yang bersangkutan dalam satuan orang
7	Diisi jumlah realisasi yang dibayarkan pada bulan yang bersangkutan dalam satuan rupiah
8	Diisi dengan jumlah kumulatif penerima insentif tenaga kesehatan pada bulan yang bersangkutan dalam satuan orang
9	Diisi jumlah kumulatif realisasi yang dibayarkan pada bulan yang bersangkutan dalam satuan rupiah
10	Diisi sesuai lokasi dan tanggal laporan dibuat
11	Diisi sesuai dengan nama lengkap penandatangan laporan
12	Diisi sesuai dengan nomor induk pegawai penandatangan laporan

*) Perubahan Pertama

(PMK Nomor 94 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021

**) Perubahan Kedua

(PMK Nomor 162 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 23 November 2021

***) Perubahan Ketiga

(PMK Nomor 118 Tahun 2022) Tanggal Berlaku: 25 Juli 2022

SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Dampaknya

G. CONTOH FORMAT LAPORAN RENCANA PENGGUNAAN SISA DANA INSENTIF DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

LAPORAN RENCANA PENGGUNAAN SISA DANA INSENTIF DAERAH (DID)
 PROVINSI/KABUPATEN/KOTA(1)
 TAHUN ANGGARAN 2020

Yang bertanda tangan dibawah ini(2) menyatakan telah mencantumkan Sisa DID Tahun Anggaran 2020 dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau akan mencantumkan Sisa DID Tahun Anggaran 2020 dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran(3). Dengan rincian kegiatan, sebagai berikut:

Jenis Kegiatan	Pagu Anggaran	Output	
		Jumlah	Satuan
BIDANG PENDIDIKAN (DIGITALISASI)(4)(5)	-	-
1.(5)(6)(7)(8)
2.
dst.
BIDANG PENDIDIKAN (UMUM)(4)(5)	-	-
1.(5)(6)(7)(8)
2.
dst.
BIDANG KESEHATAN (PENANGANAN COVID-19)(4)(5)	-	-
1.(5)(6)(7)(8)
2.
dst.
BIDANG KESEHATAN (SARANA DAN PRASARANA)(4)(5)	-	-
1.(5)(6)(7)(8)
2.
dst.
BIDANG KESEHATAN (DIGITALISASI)(4)(5)	-	-
1.(5)(6)(7)(8)
2.
dst.
BIDANG KESEHATAN (UMUM)(4)(5)	-	-
1.(5)(6)(7)(8)
2.
dst.
BIDANG Penguatan Ekonomi(4)(5)	-	-
1.(5)(6)(7)(8)
2.
dst.
BIDANG Perlindungan Sosial(4)(5)	-	-
1.(5)(6)(7)(8)
2.
dst.
Jumlah(9)(10)(11)(12)

Demikian rencana penggunaan Sisa DID Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp(10) dibuat dengan sebenarnya.

.....(11)
(12)
(13)
(14)

- *) Perubahan Pertama (PMK Nomor 94 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021
- ***) Perubahan Kedua (PMK Nomor 162 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 23 November 2021
- ****) Perubahan Ketiga (PMK Nomor 118 Tahun 2022) Tanggal Berlaku: 25 Juli 2022

SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Dampaknya

PETUNJUK PENGISIAN

No.	Uraian
1	Pilih salah satu dan diisi sesuai dengan daerah bersangkutan.
2	Diisi sesuai dengan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah bersangkutan.
3	Diisi sesuai tahun APBD.
4	Diisi total rencana anggaran pada bidang yang akan dilaksanakan.
5	Diisi jenis kegiatan yang akan dilaksanakan.
6	Diisi rencana anggaran jenis kegiatan pada bidang yang akan dilaksanakan.
7	Diisi jumlah output yang akan dihasilkan dalam satu jenis kegiatan.
8	Diisi jenis satuan keluaran kegiatan yang akan dihasilkan.
9	Diisi total rencana penggunaan sisa DID tahun anggaran 2020 yang akan dilaksanakan.
10	Diisi total rencana penggunaan sisa DID tahun anggaran 2020 yang akan dilaksanakan.
11	Diisi sesuai dengan tempat dan tanggal pengajuan penandatanganan laporan
12	Diisi sesuai dengan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah bersangkutan.
13	Tanda tangan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah bersangkutan dan diberi cap dinas basah
14	Diisi sesuai dengan nama Pejabat Pengelola Keuangan Daerah bersangkutan

*) Perubahan Pertama

(PMK Nomor 94 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021

**) Perubahan Kedua

(PMK Nomor 162 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 23 November 2021

***) Perubahan Ketiga

(PMK Nomor 118 Tahun 2022) Tanggal Berlaku: 25 Juli 2022

SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Dampaknya

H. CONTOH FORMAT LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DANA INSENTIF DAERAH TAMBAHAN TAHUN ANGGARAN 2020

LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DANA INSENTIF DAERAH (DID) TAMBAHAN			
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA(1)			
TAHUN ANGGARAN 2020			
Yang bertanda tangan dibawah ini(2) menyatakan bahwa saya bertanggung jawab penuh atas kebenaran Laporan Realisasi Penyerapan DID Tambahan tahun anggaran 2020 ini dengan rincian, sebagai berikut:			
Realisasi Penyaluran dari RKUN:			
a. Periode Pertama		:- Rp(3)
b. Periode Kedua		:- Rp(4)
c. Periode Ketiga		:- Rp(5)
Jumlah		:- Rp(6)
Penggunaan Dana			
a. Realisasi Penggunaan Dana		:- Rp(7)
b. Persentase Penggunaan Dana		 % (8)

Jenis Kegiatan	Jumlah Realisasi	Output	
		Jumlah	Satuan
PEMULIHAN EKONOMI(9)	-	-
1.(10)(11)(12)(13)
2.
dst.			
PENANGANAN COVID-19 BIDANG KESEHATAN(9)	-	-
1.(10)(11)(12)(13)
2.
dst.			
PENANGANAN COVID-19 BIDANG BANTUAN SOSIAL(9)	-	-
1.(10)(11)(12)(13)
2.
dst.			
Jumlah(14)		

Bukti-bukti realisasi pembayaran kepada pihak ketiga yang tercantum dalam laporan ini (sejumlah Rp(15), disimpan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional.

Demikian laporan ini dibuat dengan sebenarnya.

.....(16)

.....(17)

.....(18)

.....(19)

*) Perubahan Pertama (PMK Nomor 94 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021
 **) Perubahan Kedua (PMK Nomor 162 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 23 November 2021
 ***) Perubahan Ketiga (PMK Nomor 118 Tahun 2022) Tanggal Berlaku: 25 Juli 2022

SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Dampaknya

PETUNJUK PENGISIAN

No.	Uraian
1	Pilih salah satu dan diisi sesuai dengan daerah bersangkutan.
2	Diisi sesuai dengan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah bersangkutan.
3	Diisi sesuai dengan jumlah dana yang diterima RKUD dari RKUN pada penyaluran DID Tambahan Periode Pertama.
4	Diisi sesuai dengan jumlah dana yang diterima RKUD dari RKUN pada penyaluran DID Tambahan Periode Kedua.
5	Diisi sesuai dengan jumlah dana yang diterima RKUD dari RKUN pada penyaluran DID Tambahan Periode Ketiga.
6	Diisi sesuai dengan jumlah keseluruhan DID Tambahan yang diterima RKUD dari RKUN.
7	Diisi sesuai dengan jumlah realisasi penyerapan keseluruhan DID Tambahan.
8	Diisi sesuai dengan persentase penyerapan keseluruhan DID Tambahan terhadap jumlah keseluruhan dana yang diterima RKUD dari RKUN.
9	Diisi jumlah realisasi penyerapan kegiatan pada bidang yang sudah dilaksanakan
10	Diisi jenis kegiatan pada bidang yang sudah dilaksanakan
11	Diisi realisasi penyerapan kegiatan yang bersangkutan
12	Diisi jumlah output yang dihasilkan dalam satu jenis kegiatan.
13	Diisi jenis satuan untuk kegiatan yang dilaksanakan.
14	Diisi sesuai dengan jumlah realisasi penyerapan keseluruhan DID Tambahan.
15	Diisi sesuai dengan jumlah realisasi penyerapan keseluruhan DID Tambahan.
16	Diisi sesuai dengan tempat dan tanggal pengajuan penandatanganan laporan.
17	Diisi sesuai dengan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah bersangkutan.
18	Tanda tangan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah bersangkutan dan diberi cap dinas basah
19	Diisi sesuai dengan nama Pejabat Pengelola Keuangan Daerah bersangkutan

*) Perubahan Pertama

(PMK Nomor 94 Tahun 2021)

Tanggal Berlaku:

19 Juli 2021

***) Perubahan Kedua

(PMK Nomor 162 Tahun 2021)

Tanggal Berlaku:

23 November 2021

****) Perubahan Ketiga

(PMK Nomor 118 Tahun 2022)

Tanggal Berlaku:

25 Juli 2022

SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Dampaknya

I. CONTOH FORMAT LAPORAN RENCANA PENGGUNAAN SISA DANA INSENTIF DAERAH TAMBAHAN TAHUN ANGGARAN 2020

LAPORAN RENCANA PENGGUNAAN SISA DANA INSENTIF DAERAH (DID) TAMBAHAN
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA⁽¹⁾
TAHUN ANGGARAN 2020

Yang bertanda tangan dibawah ini⁽²⁾ menyatakan telah mencantumkan Sisa DID Tambahan Tahun Anggaran 2020 dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau akan mencantumkan Sisa DID Tambahan Tahun Anggaran 2020 dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran⁽³⁾. Dengan rincian kegiatan, sebagai berikut:

Jenis Kegiatan	Pagu Anggaran	Output	
		Jumlah	Satuan
BIDANG PENDIDIKAN (DIGITALISASI) ⁽⁴⁾ ⁽⁵⁾	-	-
1. ⁽⁵⁾ ⁽⁶⁾ ⁽⁷⁾ ⁽⁸⁾
2.
dst.
BIDANG PENDIDIKAN (UMUM) ⁽⁴⁾ ⁽⁵⁾	-	-
1. ⁽⁵⁾ ⁽⁶⁾ ⁽⁷⁾ ⁽⁸⁾
2.
dst.
BIDANG KESEHATAN (PENANGANAN COVID-19) ⁽⁴⁾ ⁽⁵⁾	-	-
1. ⁽⁵⁾ ⁽⁶⁾ ⁽⁷⁾ ⁽⁸⁾
2.
dst.
BIDANG KESEHATAN (SARANA DAN PRASARANA) ⁽⁴⁾ ⁽⁵⁾	-	-
1. ⁽⁵⁾ ⁽⁶⁾ ⁽⁷⁾ ⁽⁸⁾
2.
dst.
BIDANG KESEHATAN (DIGITALISASI) ⁽⁴⁾ ⁽⁵⁾	-	-
1. ⁽⁵⁾ ⁽⁶⁾ ⁽⁷⁾ ⁽⁸⁾
2.
dst.
BIDANG KESEHATAN (UMUM) ⁽⁴⁾ ⁽⁵⁾	-	-
1. ⁽⁵⁾ ⁽⁶⁾ ⁽⁷⁾ ⁽⁸⁾
2.
dst.
BIDANG Penguatan Ekonomi ⁽⁴⁾ ⁽⁵⁾	-	-
1. ⁽⁵⁾ ⁽⁶⁾ ⁽⁷⁾ ⁽⁸⁾
2.
dst.
BIDANG PERLINDUNGAN SOSIAL ⁽⁴⁾ ⁽⁵⁾	-	-
1. ⁽⁵⁾ ⁽⁶⁾ ⁽⁷⁾ ⁽⁸⁾
2.
dst.
Jumlah ⁽⁹⁾		

Demikian rencana penggunaan Sisa DID Tambahan Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp⁽¹⁰⁾ dibuat dengan sebenarnya.

.....⁽¹¹⁾
⁽¹²⁾
⁽¹³⁾
⁽¹⁴⁾

*) Perubahan Pertama (PMK Nomor 94 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021
 **) Perubahan Kedua (PMK Nomor 162 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 23 November 2021
 ***) Perubahan Ketiga (PMK Nomor 118 Tahun 2022) Tanggal Berlaku: 25 Juli 2022

SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Dampaknya

PETUNJUK PENGISIAN

No.	Uraian
1	Pilih salah satu dan diisi sesuai dengan daerah bersangkutan.
2	Diisi sesuai dengan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah bersangkutan.
3	Diisi sesuai tahun APBD.
4	Diisi total rencana anggaran pada bidang yang akan dilaksanakan.
5	Diisi jenis kegiatan yang akan dilaksanakan.
6	Diisi rencana anggaran jenis kegiatan pada bidang yang akan dilaksanakan.
7	Diisi jumlah output yang akan dihasilkan dalam satu jenis kegiatan.
8	Diisi jenis satuan keluaran kegiatan yang akan dihasilkan.
9	Diisi total rencana penggunaan sisa DID tahun anggaran 2020 yang akan dilaksanakan.
10	Diisi total rencana penggunaan sisa DID tahun anggaran 2020 yang akan dilaksanakan.
11	Diisi sesuai dengan tempat dan tanggal pengajuan penandatanganan laporan
12	Diisi sesuai dengan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah bersangkutan.
13	Tanda tangan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah bersangkutan dan diberi cap dinas basah
14	Diisi sesuai dengan nama Pejabat Pengelola Keuangan Daerah bersangkutan

*) Perubahan Pertama (PMK Nomor 94 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021
**) Perubahan Kedua (PMK Nomor 162 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 23 November 2021
***) Perubahan Ketiga (PMK Nomor 118 Tahun 2022) Tanggal Berlaku: 25 Juli 2022

SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Dampaknya

J. CONTOH FORMAT LAPORAN BULANAN REALISASI PENYERAPAN DANA INSENTIF DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

LAPORAN BULANAN REALISASI PENYERAPAN DANA INSENTIF DAERAH (DID)
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA⁽¹⁾
BULAN⁽²⁾
TAHUN ANGGARAN 2021

Yang bertanda tangan dibawah ini⁽³⁾ menyatakan bahwa saya bertanggung jawab penuh atas kebenaran Laporan Realisasi Penyerapan DID Tambahan tahun anggaran 2020 ini dengan rincian, sebagai berikut:

Realisasi Penyaluran dari RKUN:

a. Tahap I : Rp⁽⁴⁾
 b. Tahap II : Rp⁽⁵⁾
 Jumlah : Rp⁽⁶⁾

Penggunaan Dana

c. Realisasi Penggunaan Dana bulan⁽²⁾ : Rp⁽⁷⁾
 d. Persentase Penggunaan Dana%⁽⁸⁾

Jenis Kegiatan	Jumlah Realisasi	Output	
		Jumlah	Satuan
BIDANG PENDIDIKAN (DIGITALISASI) ⁽⁹⁾	-	-	-
1. ⁽¹⁰⁾ ⁽¹¹⁾ ⁽¹²⁾ ⁽¹³⁾
2.
dst.			
BIDANG PENDIDIKAN (UMUM) ⁽⁹⁾	-	-	-
1. ⁽¹⁰⁾ ⁽¹¹⁾ ⁽¹²⁾ ⁽¹³⁾
2.
dst.			
BIDANG KESEHATAN (PENANGANAN COVID-19) ⁽⁹⁾	-	-	-
1. ⁽¹⁰⁾ ⁽¹¹⁾ ⁽¹²⁾ ⁽¹³⁾
2.
dst.			
BIDANG KESEHATAN (SARANA DAN PRASARANA) ⁽⁹⁾	-	-	-
1. ⁽¹⁰⁾ ⁽¹¹⁾ ⁽¹²⁾ ⁽¹³⁾
2.
dst.			
BIDANG KESEHATAN (DIGITALISASI) ⁽⁹⁾	-	-	-
1. ⁽¹⁰⁾ ⁽¹¹⁾ ⁽¹²⁾ ⁽¹³⁾
2.
dst.			
BIDANG KESEHATAN (UMUM) ⁽⁹⁾	-	-	-
1. ⁽¹⁰⁾ ⁽¹¹⁾ ⁽¹²⁾ ⁽¹³⁾
2.
dst.			
BIDANG Penguatan Ekonomi ⁽⁹⁾	-	-	-
1. ⁽¹⁰⁾ ⁽¹¹⁾ ⁽¹²⁾ ⁽¹³⁾
2.
dst.			
BIDANG PERLINDUNGAN SOSIAL ⁽⁹⁾	-	-	-
1. ⁽¹⁰⁾ ⁽¹¹⁾ ⁽¹²⁾ ⁽¹³⁾
2.
dst.			
Jumlah ⁽¹⁴⁾		

*) Perubahan Pertama (PMK Nomor 94 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021
 **) Perubahan Kedua (PMK Nomor 162 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 23 November 2021
 ***) Perubahan Ketiga (PMK Nomor 118 Tahun 2022) Tanggal Berlaku: 25 Juli 2022

SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Dampaknya

Bukti-bukti realisasi pembayaran kepada pihak ketiga yang tercantum dalam laporan ini (sejumlah Rp)⁽¹⁵⁾, disimpan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional.

Demikian laporan ini dibuat dengan sebenarnya.

.....⁽¹⁶⁾

.....⁽¹⁷⁾

.....⁽¹⁸⁾

.....⁽¹⁹⁾

- | | | | |
|-----------------------|----------------------------|------------------|------------------|
| *) Perubahan Pertama | (PMK Nomor 94 Tahun 2021) | Tanggal Berlaku: | 19 Juli 2021 |
| ***) Perubahan Kedua | (PMK Nomor 162 Tahun 2021) | Tanggal Berlaku: | 23 November 2021 |
| ***) Perubahan Ketiga | (PMK Nomor 118 Tahun 2022) | Tanggal Berlaku: | 25 Juli 2022 |

SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Dampaknya

PETUNJUK PENGISIAN

No.	Uraian
1	Pilih salah satu dan diisi sesuai dengan daerah bersangkutan.
2	Diisi sesuai bulan periode laporan realisasi.
3	Diisi sesuai dengan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah bersangkutan.
4	Diisi sesuai dengan jumlah dana yang diterima RKUD dari RKUN pada penyaluran DID Tahap I.
5	Diisi sesuai dengan jumlah dana yang diterima RKUD dari RKUN pada penyaluran DID Tahap II.
6	Diisi sesuai dengan jumlah keseluruhan DID yang diterima RKUD dari RKUN.
7	Diisi sesuai dengan jumlah realisasi penyerapan keseluruhan DID.
8	Diisi sesuai dengan persentase penyerapan keseluruhan DID terhadap jumlah keseluruhan dana yang diterima RKUD dari RKUN.
9	Diisi jumlah realisasi penyerapan kegiatan pada bidang yang sudah dilaksanakan
10	Diisi jenis kegiatan pada bidang yang sudah dilaksanakan
11	Diisi realisasi penyerapan kegiatan yang bersangkutan
12	Diisi jumlah output yang dihasilkan dalam satu jenis kegiatan.
13	Diisi jenis satuan untuk kegiatan yang dilaksanakan.
14	Diisi sesuai dengan jumlah realisasi penyerapan keseluruhan DID.
15	Diisi sesuai dengan jumlah realisasi penyerapan keseluruhan DID.
16	Diisi sesuai dengan tempat dan tanggal pengajuan penandatanganan laporan.
17	Diisi sesuai dengan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah bersangkutan.
18	Tanda tangan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah bersangkutan dan diberi cap dinas basah
19	Diisi sesuai dengan nama Pejabat Pengelola Keuangan Daerah bersangkutan

*) Perubahan Pertama

(PMK Nomor 94 Tahun 2021)

Tanggal Berlaku:

19 Juli 2021

***) Perubahan Kedua

(PMK Nomor 162 Tahun 2021)

Tanggal Berlaku:

23 November 2021

***)) Perubahan Ketiga

(PMK Nomor 118 Tahun 2022)

Tanggal Berlaku:

25 Juli 2022

SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Dampaknya

K. CONTOH FORMAT BERITA ACARA KONFIRMASI DAN REKONSILIASI KUMULATIF SISA DANA DESA

BERITA ACARA KONFIRMASI DAN REKONSILIASI					
KUMULATIF SISA DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2015 S.D. 2018					
DI REKENING KAS DESA					
Nomor : BAR-/20XX ⁽¹⁾					
Pada Hari ini Tanggal Bulan Tahun telah diselenggarakan Konfirmasi dan Rekonsiliasi Data Kumulatif Sisa Dana Desa Tahun 2015 s.d 2018 antara Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (atau yang dipersamakan) Kabupaten/Kota ⁽²⁾ , Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (atau yang dipersamakan) Kabupaten/Kota ⁽³⁾ dengan Desa Kecamatan.....					
Konfirmasi dan rekonsiliasi dilaksanakan secara bersama-sama, dengan hasil sebagai berikut:					
Tahun	Penyaluran dari RKUD	Sisa Dana Desa TAYL yang dianggarkan Kembali	Penyetoran Dana Desa	Sisa Dana Desa yang di Anggarkan Tahun Berikutnya	Sisa Dana Desa yang disetor ke RKUD
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (b+c)-(d+e)
2015	Rp.		Rp.	Rp.	Rp.
2016	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.
2017 *)		Rp.	Rp.		Rp.
2017	Rp.		Rp.	Rp.	Rp.
2018	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.
Kumulatif Sisa Dana Desa di Setor ke RKUD					Rp.

Data kumulatif sisa Dana Desa tersebut selanjutnya akan menjadi dasar rekonsiliasi kumulatif sisa Dana Desa antara BPKAD dengan Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Pihak Desa bertanggungjawab penuh terhadap kebenaran data kumulatif sisa Dana Desa yang diserahkan ke BPKAD sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Rekonsiliasi Sisa Dana Desa ini. Bukti-bukti pendukung pencatatan Dana Desa telah disimpan sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional.

Data-data pada tabel di atas telah sesuai dengan pencatatan dalam aplikasi OMSPAN. Sisa Dana Desa sebesar Rp.⁽⁴⁾ disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah paling lambat tanggal 30 April 2021.

Dalam hal setelah dilaksanakan rekonsiliasi dan penyetoran sisa Dana Desa ke RKUD berdasarkan hasil audit/reviu aparat pengawas fungsional ditemukan kekurangan dalam penyetoran sisa Dana Desa, maka Desa berkewajiban melakukan penyetoran ke RKUD.

*) Perubahan Pertama

(PMK Nomor 94 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021

***) Perubahan Kedua

(PMK Nomor 162 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 23 November 2021

***) Perubahan Ketiga

(PMK Nomor 118 Tahun 2022) Tanggal Berlaku: 25 Juli 2022

SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Dampaknya

PETUNJUK PENGISIAN

No.	Uraian
1	Diisi sesuai nomor BAR disesuaikan untuk mempermudah administrasi di pemerintah daerah
2	Diisi sesuai nama kabupaten/kota
3	Diisi sesuai nominal kumulatif sisa Dana Desa
4	Diisi sesuai lokasi dan tanggal
5	Diisi sesuai nama desa dan kecamatan
6	Diisi sesuai nama pejabat kepala desa
7	Diisi sesuai nama & NIP pejabat DPMD
8	Diisi sesuai nama & NIP pejabat BPKAD

*) Perubahan Pertama (PMK Nomor 94 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021
**) Perubahan Kedua (PMK Nomor 162 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 23 November 2021
***) Perubahan Ketiga (PMK Nomor 118 Tahun 2022) Tanggal Berlaku: 25 Juli 2022

SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Dampaknya

BERITA ACARA KONFIRMASI DAN REKONSILIASI

KUMULATIF SISA DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2015 S.D. 2019

DI REKENING KAS UMUM DAERAH

Nomor : BAR- /20XX⁽¹⁾

Pada Hari ini Tanggal Bulan Tahun telah diselenggarakan Rekonsiliasi Data Kumulatif Sisa Dana Desa Tahun 2015 s.d 2019 antara Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (atau yang dipersamakan) Kabupaten/Kota dengan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN)

Rekonsiliasi dilaksanakan secara bersama-sama, dengan hasil sebagai berikut:

Tahun	Jumlah penyaluran dari RKUN	Dana Desa TAYL yang di Anggaran Kembali	Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD	Sisa Dana Desa di RKUD
(a)	(b)	(c)	(d)	(e) =((b)+(c)-(d)
2015	Rp.		Rp.	Rp.
2016	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.
2017	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.
2018	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.
2019	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.
Sisa Dana Desa di RKUD yang di setor ke RKUN (a)				Rp.
Konsolidasi Sisa Dana Desa yang disetor ke RKUD (b)				Rp.
Jumlah Total Sisa Dana yang di setorkan ke RKUN(a) + (b)				Rp.

Kepala BPKAD Kabupaten/Kota bertanggungjawab penuh terhadap kebenaran data kumulatif sisa Dana Desa sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Rekonsiliasi Sisa Dana Desa ini. Bukti-bukti pendukung realisasi penyaluran ke Rekening Kas Desa telah disimpan sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional.

Data-data sebagaimana tercantum dalam tabel di atas telah sesuai dengan pencatatan yang terdapat pada aplikasi OMSPAN. Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 222/PMK.07/2020, sisa Dana Desa sebesar Rp..... disetor ke Rekening Kas Umum Negara paling lambat tanggal tanggal 31 Mei 2021.

Dalam hal setelah dilaksanakan rekonsiliasi dan penyetoran sisa Dana Desa ke RKUN berdasarkan hasil audit/reviu aparat pengawas fungsional ditemukan kekurangan dalam penyetoran sisa Dana Desa, maka BPKAD berkewajiban melakukan penyetoran ke RKUN.

Demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Kepala BPKAD,

Kepala KPPN,

Nama

Nama

NIP

NIP

*) Perubahan Pertama

(PMK Nomor 94 Tahun 2021)

Tanggal Berlaku:

19 Juli 2021

***) Perubahan Kedua

(PMK Nomor 162 Tahun 2021)

Tanggal Berlaku:

23 November 2021

****) Perubahan Ketiga

(PMK Nomor 118 Tahun 2022)

Tanggal Berlaku:

25 Juli 2022

SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Dampaknya

PETUNJUK PENGISIAN

No.	Uraian
1	Diisi sesuai nomor BAR disesuaikan dengan kode pemerintah daerah dan kode KPPN
2	Diisi sesuai nama KPPN yang melayani wilayah pemerintah daerah bersangkutan
3	Diisi sesuai nama kabupaten/kota
4	Diisi sesuai nominal kumulatif sisa Dana Desa
5	Diisi sesuai lokasi dan tanggal
6	Diisi sesuai nama dan NIP Kepala BPKAD
7	Diisi sesuai nama dan NIP Kepala KPPN

*) Perubahan Pertama

(PMK Nomor 94 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021

***) Perubahan Kedua

(PMK Nomor 162 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 23 November 2021

***) Perubahan Ketiga

(PMK Nomor 118 Tahun 2022) Tanggal Berlaku: 25 Juli 2022

SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan Dampaknya

LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 94/PMK. 07/2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 17 /PMK.07/2021

TENTANG PENGELOLAAN DANA TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA

TAHUN ANGGARAN 2021 DALAM RANGKA MENDUKUNG PENANGANAN

PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DAN DAMPAKNYA

L. CONTOH FORMAT LAPORAN REALISASI DUKUNGAN PENDANAAN BELANJA KESEHATAN DAN BELANJA PRIORITAS LAINNYA*)

KOP SURAT

LAPORAN REALISASI DUKUNGAN PENDANAAN BELANJA KESEHATAN PENANGANAN PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)*
DAN BELANJA PRIORITAS LAINNYA
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA*),..... (1)
BULAN(2)
TAHUN ANGGARAN 2021

No.	Uraian ⁽³⁾	Jenis Akun ⁽⁴⁾	Anggaran				Realisasi					Realisasi Output	
			Sumber Pendanaan			Jumlah ⁽⁸⁾	Sumber Pendanaan			Jumlah ⁽¹²⁾	% ⁽¹³⁾	Volume ⁽¹⁴⁾	Satuan ⁽¹⁵⁾
			DAU ⁽⁵⁾	DBH ⁽⁶⁾	PD Non TKDD ⁽⁷⁾		DAU ⁽⁹⁾	DBH ⁽¹⁰⁾	PD Non TKDD ⁽¹¹⁾				
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)=(d)+(e)+(f)	(i)	(j)	(k)	(l)=(i)+(j)+(k)	(l)	(m)	(n)
1	Penanganan COVID-19	xxx	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp		xxx	xxx
2	Dukungan vaksinasi:												
	a. dukungan operasional untuk pelaksanaan vaksinasi	xxx	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp		xxx	xxx
	b. pemantauan dan penanggulangan dampak kesehatan ikutan pasca vaksinasi	xxx	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp		xxx	xxx

*) Perubahan Pertama

**) Perubahan Kedua

***) Perubahan Ketiga

(PMK Nomor 94 Tahun 2021)

(PMK Nomor 162 Tahun 2021)

(PMK Nomor 118 Tahun 2022)

Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021

Tanggal Berlaku: 23 November 2021

Tanggal Berlaku: 25 Juli 2022

SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Dampaknya

	c. distribusi, pengamanan, penyediaan tempat penyimpanan vaksin	xxx	Rp	xxx	xxx							
	d. insentif tenaga kesehatan daerah dalam rangka pelaksanaan vaksinasi	xxx	Rp	xxx	xxx							
3	Dukungan pada kelurahan dalam rangka penanganan pandemi COVID -19	xxx	Rp	xxx	xxx							
4	Insentif tenaga kesehatan daerah dalam rangka penanganan COVID -19											
	a. dokter spesialis	xxx	Rp	xxx	xxx							
	b. dokter umum & dokter gigi	xxx	Rp	xxx	xxx							
	c. bidan & perawat	xxx	Rp	xxx	xxx							
	d. tenaga kesehatan lainnya	xxx	Rp	xxx	xxx							
5	Belanja kesehatan lainnya dan kegiatan prioritas yang ditetapkan Pemerintah Pusat	xxx	Rp	xxx	xxx							
Jumlah Dukungan Pendanaan Belanja Kesehatan Dan Belanja Prioritas Lainnya			Rp	%								

Alokasi DAU/DBH TA 2021 ⁽¹⁶⁾	Rp
Jumlah Dukungan Pendanaan Belanja Kesehatan Dan Belanja Prioritas Lainnya Yang Bersumber Dari DAU/DBH TA 2021 ⁽¹⁷⁾	Rp
Persentase Dukungan Pendanaan Belanja Kesehatan Dan Belanja Prioritas Lainnya Yang Bersumber Dari DAU/DBH ⁽¹⁸⁾	%

Demikian laporan ini dibuat dengan sebenarnya dan kami bertanggung jawab mutlak atas kebenaran dan kualitas laporan ini.

.....,⁽¹⁹⁾

.....⁽²⁰⁾

(tanda tangan asli dan cap dinas basah)

.....⁽²¹⁾

*) Perubahan Pertama
 **) Perubahan Kedua
 ***) Perubahan Ketiga

(PMK Nomor 94 Tahun 2021)
 (PMK Nomor 162 Tahun 2021)
 (PMK Nomor 118 Tahun 2022)

Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021
 Tanggal Berlaku: 23 November 2021
 Tanggal Berlaku: 25 Juli 2022

SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan Dampaknya

PETUNJUK PENGISIAN*)

No.	Uraian
1.	Pilih salah satu dan diisi sesuai dengan daerah bersangkutan
2.	Diisi sesuai bulan berkenaan untuk laporan realisasi bulan sebelumnya
3.	Diisi dengan nama program yang dianggarkan dalam APBD/Perubahan APBD
4.	Diisi dengan jenis akun yang dianggarkan dalam APBD/Perubahan APBD
5.	Diisi dengan data anggaran dengan sumber pendanaan yang berasal dari DAU pada APBD/Perubahan APBD
6.	Diisi dengan data anggaran dengan sumber pendanaan yang berasal dari DBH pada APBD/Perubahan APBD
7.	Diisi dengan data anggaran dengan sumber pendanaan yang berasal dari Pendapatan Daerah selain TKDD pada APBD/Perubahan APBD
8.	Diisi dengan jumlah anggaran dalam APBD/Perubahan APBD
9.	Diisi dengan data realisasi sampai dengan bulan yang lalu dengan sumber pendanaan yang berasal dari DAU pada APBD/Perubahan APBD
10.	Diisi dengan data realisasi sampai dengan bulan yang lalu dengan sumber pendanaan yang berasal dari DBH pada APBD/Perubahan APBD
11.	Diisi dengan data realisasi dengan sumber pendanaan yang berasal dari Pendapatan Daerah selain TKDD pada APBD/Perubahan APBD
12.	Diisi dengan jumlah realisasi sampai dengan bulan yang lalu dalam APBD/Perubahan APBD
13.	Diisi dengan prosentase realisasi sampai dengan bulan yang lalu terhadap anggaran dukungan pendanaan belanja kesehatan dan belanja prioritas lainnya
14.	Diisi dengan volume <i>output</i> yang dihasilkan
15.	Diisi dengan satuan dari volume <i>output</i> yang dihasilkan
16.	Diisi dengan jumlah alokasi DAU/DBH yang menjadi sumber dana laporan
17.	Diisi dengan jumlah dukungan pendanaan belanja kesehatan dan belanja prioritas lainnya sebagaimana jumlah dalam kolom (g)
18.	Diisi dengan persentase dari jumlah dukungan pendanaan belanja kesehatan dan belanja prioritas lainnya sebagaimana jumlah dalam kolom (g) terhadap alokasi DAU/DBH yang menjadi sumber dana laporan
19.	Diisi sesuai lokasi dan tanggal laporan dibuat
20.	Diisi sesuai dengan jabatan penandatanganan laporan
21.	Diisi sesuai dengan nama lengkap penandatanganan laporan

*) Perubahan Pertama (PMK Nomor 94 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021
**) Perubahan Kedua (PMK Nomor 162 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 23 November 2021
***) Perubahan Ketiga (PMK Nomor 118 Tahun 2022) Tanggal Berlaku: 25 Juli 2022

SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Dampaknya

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 162/PMK.07/2021
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI
KEUANGAN NOMOR 17 /PMK.07 /2021 TENTANG
PENGELOLAAN TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA
TAHUN ANGGARAN 2021 DALAM RANGKA MENDUKUNG
PENANGANAN PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019
(COVID-19) DAN DAMPAKNYA

M. RINCIAN KABUPATEN PENANGGULANGAN KEMISKINAN EKSTREM **)

NO.	KODE PEMDA	PROVINSI	PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA
1.	3203	JAWA BARAT	CIANJUR
2.	3204	JAWA BARAT	BANDUNG
3.	3208	JAWA BARAT	KUNINGAN
4.	3212	JAWA BARAT	INDRAMAYU
5.	3215	JAWA BARAT	KARAWANG
6.	3302	JAWA TENGAH	BANYUMAS
7.	3304	JAWA TENGAH	BANJARNEGARA
8.	3305	JAWA TENGAH	KEBUMEN
9.	3327	JAWA TENGAH	PEMALANG
10.	3329	JAWA TENGAH	BREBES
11.	3513	JAWA TIMUR	PROBOLINGGO
12.	3522	JAWA TIMUR	BOJONEGORO
13.	3524	JAWA TIMUR	LAMONGAN
14.	3526	JAWA TIMUR	BANGKALAN
15.	3529	JAWA TIMUR	SUMENEP
16.	5311	NUSA TENGGARA TIMUR	SUMBA TIMUR
17.	5302	NUSA TENGGARA TIMUR	TIMOR TENGAH SELATAN
18.	5314	NUSA TENGGARA TIMUR	ROTE NDAO
19.	5317	NUSA TENGGARA TIMUR	SUMBA TENGAH
20.	5319	NUSA TENGGARA TIMUR	MANGGARAI TIMUR
21.	8103	MALUKU	MALUKU TENGGARA BARAT
22.	8102	MALUKU	MALUKU TENGGARA
23.	8101	MALUKU	MALUKU TENGAH
24.	8105	MALUKU	SERAM BAGIAN TIMUR
25.	8108	MALUKU	MALUKU BARAT DAYA
26.	9207	PAPUA BARAT	TELUK WONDAMA
27.	9206	PAPUA BARAT	TELUK BINTUNI
28.	9209	PAPUA BARAT	TAMBRAUW
29.	9210	PAPUA BARAT	MAYBRAT
30.	9211	PAPUA BARAT	MANOKWARI SELATAN

- *) Perubahan Pertama (PMK Nomor 94 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021
**) Perubahan Kedua (PMK Nomor 162 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 23 November 2021
***) Perubahan Ketiga (PMK Nomor 118 Tahun 2022) Tanggal Berlaku: 25 Juli 2022

SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Dampaknya

NO.	KODE PEMDA	PROVINSI	PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA
31.	9102	PAPUA	JAYAWIJAYA
32.	9107	PAPUA	PUNCAK JAYA
33.	9123	PAPUA	LANNY JAYA
34.	9121	PAPUA	MAMBERAMO TENGAH
35.	9128	PAPUA	DEIYAI

*) Perubahan Pertama
**) Perubahan Kedua
***) Perubahan Ketiga

(PMK Nomor 94 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021
(PMK Nomor 162 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 23 November 2021
(PMK Nomor 118 Tahun 2022) Tanggal Berlaku: 25 Juli 2022

SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Dampaknya

LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 118/PMK.07/2022

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI

KEUANGAN NOMOR 17 /PMK.07 /2021 TENTANG

PENGELOLAAN TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA

TAHUN ANGGARAN 2021 DALAM RANGKA MENDUKUNG

PENANGANAN PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019

(COVID-19) DAN DAMPAKNYA

FORMAT BERITA ACARA REKONSILIASI ATAS PELAKSANAAN DUKUNGAN
PENANGANAN DAMPAK PANDEMI COVID-19 DI DAERAH TAHUN 2021***)

BERITA ACARA REKONSILIASI ATAS PELAKSANAAN DUKUNGAN
PENANGANAN DAMPAK PANDEMI COVID-19 DI DAERAH TAHUN 2021
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA⁽¹⁾

Pada hari ini,tanggal....., bulan, tahun ⁽²⁾, kami masing-masing:

1.(nama Sekretaris Daerah atau Pejabat Yang Ditunjuk),(NIP dan jabatan) mewakili Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota..... ⁽³⁾.
dan
2.(nama pejabat),(NIP dan jabatan) mewakili Tentara Nasional Republik Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia/
Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional/Badan Intelijen Negara,

telah melaksanakan rekonsiliasi atas pelaksanaan dukungan penanganan dampak pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di daerah pada tahun 2021 dan disepakati hal-hal sebagai berikut:

*) Perubahan Pertama	(PMK Nomor 94 Tahun 2021)	Tanggal Berlaku:	19 Juli 2021
***) Perubahan Kedua	(PMK Nomor 162 Tahun 2021)	Tanggal Berlaku:	23 November 2021
***) Perubahan Ketiga	(PMK Nomor 118 Tahun 2022)	Tanggal Berlaku:	25 Juli 2022

SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Dampaknya

No.	Jenis Dukungan Pelaksanaan Vaksinasi ⁽²⁾	Periode Pelaksanaan pada Tahun 2021 ⁽²⁾	Sasaran (Dosis) untuk Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 di Tahun 2021 ⁽¹⁾	Jumlah Petugas (Orang) ⁽⁴⁾	Realisasi Anggaran Tahun 2021 ⁽⁵⁾
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
1	Operasi penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Pembertarikan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Mikro oleh Tentara Nasional Republik Indonesia	Juni			
		Juli			
		Agustus			
		dst.			
JUMLAH			 (6) (7)
2	operasi yustisi/kawal vaksin oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia	Juni			
		Juli			
		Agustus			
		dst.			
JUMLAH			 (8) (9)
3	rekrutmen dan pelatihan tenaga kesehatan	Juni			
		Juli			
		Agustus			
		dst.			
JUMLAH			 (10) (11)
4	operasional kegiatan	Juni			
		Juli			
		Agustus			
		dst.			
JUMLAH			 (12) (13)
5	pendanaan untuk pembayaran insentif atau honor kepada tenaga kesehatan dan tenaga pendukung	Juni			
		Juli			
		Agustus			
		dst.			
JUMLAH			 (15) (16)
JUMLAH KESELURUHAN				 (18)

Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota⁽³⁾ menyatakan bersedia dilakukan pemotongan penyaluran DAU dan/atau DBH sebagai penggantian dana APBN yang digunakan untuk dukungan penanganan dampak pandemi COVID-19 sebesar Rp.....(terbilang).

Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya dan masing-masing pihak bertanggung jawab atas kebenaran Berita Acara ini. Bukti-bukti realisasi yang tercantum dalam Berita Acara ini disimpan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional.

..... 20xx

Perwakilan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota..... ⁽³⁾ (Sekretaris Daerah atau Pejabat Yang Ditunjuk)	Perwakilan TNI/POLRI/BKKBN/BIN (Jabatan)
(Tanda Tangan dan Stempel)	(Tanda Tangan dan Stempel)
(Nama) ⁽⁴⁾ (NIP) ⁽⁵⁾	(Nama) ⁽⁴⁾ (NIP) ⁽⁵⁾

- *) Perubahan Pertama (PMK Nomor 94 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021
 **) Perubahan Kedua (PMK Nomor 162 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 23 November 2021
 ***) Perubahan Ketiga (PMK Nomor 118 Tahun 2022) Tanggal Berlaku: 25 Juli 2022

SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Dampaknya

PETUNJUK PENGISIAN ***)

NO.	URAIAN
(1)	Diisi sesuai dengan nama Daerah
(2)	Diisi sesuai dengan hari dan tanggal pelaksanaan rekonsiliasi
(3)	Diisi sesuai dengan nama Daerah
(4)	Diisi Nama Penandatanganan
(5)	Diisi NIP Penandatanganan
	Petunjuk Pengisian Tabel
(1)	Diisi Jenis Dukungan Pelaksanaan Vaksinasi
(2)	Diisi bulan/periode pelaksanaan kegiatan di tahun 2021
(3)	Diisi jumlah realisasi sasaran (dosis) per bulan/periode
(4)	Diisi jumlah petugas) per bulan/periode
(5)	Diisi jumlah realisasi anggaran pada Tahun 2021 per bulan/periode
(6)	Diisi jumlah seluruh petugas (penjumlahan seluruh petugas per bulan/periode)
(7)	Diisi jumlah realisasi anggaran pada Tahun 2021 (penjumlahan seluruh realisasi per bulan/periode) untuk kegiatan terkait
(8)	Diisi jumlah seluruh petugas (penjumlahan seluruh petugas per bulan/periode)
(9)	Diisi jumlah realisasi anggaran pada Tahun 2021 (penjumlahan seluruh realisasi per bulan/periode) untuk kegiatan terkait
(10)	Diisi jumlah seluruh petugas (penjumlahan seluruh petugas per bulan/periode)
(11)	Diisi jumlah realisasi anggaran pada Tahun 2021 (penjumlahan seluruh realisasi per bulan/periode)
(12)	Diisi jumlah seluruh sasaran (dosis) per bulan/periode di Tahun 2021 untuk kegiatan terkait
(13)	Diisi jumlah seluruh petugas (penjumlahan seluruh petugas per bulan/periode)
(14)	Diisi jumlah realisasi anggaran pada Tahun 2021 (penjumlahan seluruh realisasi per bulan/periode) untuk kegiatan terkait
(15)	Diisi jumlah seluruh sasaran (dosis) per bulan/periode di Tahun 2021 untuk kegiatan terkait
(16)	Diisi jumlah seluruh petugas (penjumlahan seluruh petugas per bulan/periode)
(17)	Diisi jumlah realisasi anggaran pada Tahun 2021 (penjumlahan seluruh realisasi per bulan/periode) untuk kegiatan terkait
(18)	Diisi penjumlahan realisasi anggaran pada angka (7), (9), (11), (14), dan (17)

*) Perubahan Pertama

(PMK Nomor 94 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021

**) Perubahan Kedua

(PMK Nomor 162 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 23 November 2021

***) Perubahan Ketiga

(PMK Nomor 118 Tahun 2022) Tanggal Berlaku: 25 Juli 2022

SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Dampaknya

CATATAN

A. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 94/PMK.07/2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Dampaknya:

PASAL II

1. Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, terhadap permohonan penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2021 yang telah disampaikan oleh bupati/wali kota kepada Kuasa Pengguna Anggaran Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa sebelum Peraturan Menteri ini diundangkan dan masih perlu dilakukan penandaan (*tagging*) desa, dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri ini.
2. Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

B. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 162/PMK.07/2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Dampaknya:

PASAL II

1. Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:
 - a. pemotongan terhadap penyaluran DBH tahun anggaran 2021 dapat dilakukan dalam hal rekomendasi pemotongan penyaluran DAU atau DBH per Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9B ayat (1) disampaikan sebelum Peraturan Menteri ini diundangkan; dan
 - b. terhadap permohonan penyaluran Dana Desa tahun anggaran 2021 yang telah disampaikan kepada Kuasa Pengguna Anggaran Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa atau masih dalam proses oleh bupati di kabupaten prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf m sebelum Peraturan Menteri ini diundangkan, penyaluran Dana Desa tahap II dan tahap III serta tahap II untuk Desa berstatus Desa Mandiri dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri ini.
2. Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

C. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 118/PMK.07/2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Dampaknya:

PASAL II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

*) Perubahan Pertama	(PMK Nomor 94 Tahun 2021)	Tanggal Berlaku:	19 Juli 2021
***) Perubahan Ketiga	(PMK Nomor 118 Tahun 2022)	Tanggal Berlaku:	25 Juli 2022